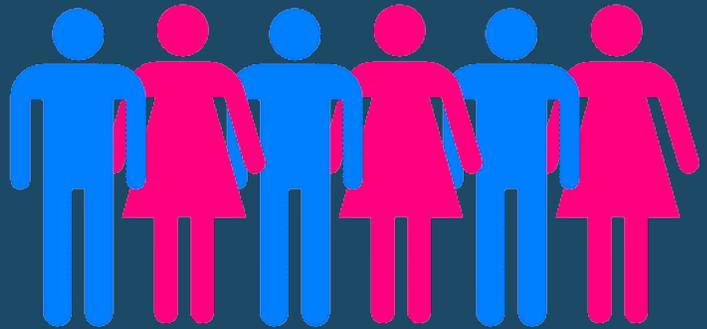




ISSN: 2089-3531

Pembangunan Manusia Berbasis Gender



Tahun 2022





ISSN: 2089-234

Pembangunan Manusia Berbasis Gender



Tahun 2022



PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2022

ISSN

2089-3531

Ukuran Buku

17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman

274

Naskah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA)

Gambar Kulit

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA)

Diterbitkan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA)

Sumber Gambar

freepik.com, flaticon.com, canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Pribudiarta Nur Sitepu
Penanggung Jawab	: Lies Rosdianty
Editor	: Sylvianti Angraini Anita Putri Bungsu Nurhayati
Penulis Naskah	: Sylvianti Angraini Anita Putri Bungsu Nurhayati Indah Lukitasari Wahyu Bodromurti Dian Surida
Pengolah Data	: Sylvianti Angraini Nurhayati Indah Lukitasari Wahyu Bodromurti Dian Surida
Layout	: Gustriza Erda

SAMBUTAN MENTERI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK



Dalam mendukung pembangunan yang responsif gender, diperlukan data yang dapat menggambarkan posisi dan kondisi kesetaraan gender baik di tataran nasional maupun global. Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender berisi indikator dan ulasan tentang perkembangan capaian pembangunan yang dikaitkan dengan isu gender di Indonesia. Capaian pembangunan manusia berbasis gender pada publikasi ini dianalisis berdasarkan *Global Gender Gap Index (GGGI)*, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kesenjangan gender di tingkat global diukur melalui **GGGI**, sedangkan di tingkat nasional, kesetaraan gender diukur menggunakan IPG dan IDG yang dianalisis hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam upaya peningkatan implementasi strategi pengarusutamaan gender di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta sehingga publikasi ini dapat terselesaikan. Kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan publikasi di edisi mendatang.

Jakarta, Desember 2022

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bintang', written over a horizontal line.

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pada tataran global, kondisi ketimpangan gender Indonesia dapat dilihat melalui nilai Global Gender Gap Index (GGGI). Tahun 2021, berdasarkan Global Gender Gap Report, Indonesia berada pada urutan 101 dari 156 negara dengan skor GGGI sebesar 0,688 atau 68,8 persen. Hal ini berarti baru 68,8 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN. GGGI terdiri atas empat sub indeks yaitu Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, Capaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Secara garis besar, peringkat Indonesia dibandingkan dengan 156 negara di dunia pada sub-sub indeks GGGI masih berada pada posisi cenderung di bawah, yaitu peringkat ke 99 pada sub indeks partisipasi dan peluang sektor ekonomi, peringkat ke 107 pada sub indeks capaian pendidikan, peringkat ke 76 pada sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup, dan peringkat ke 92 pada sub indeks pemberdayaan politik.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki laki dan IPM perempuan. Berdasarkan data BPS, IPM perempuan pada tahun 2021 sebesar 69,59 dan laki-laki sebesar 76,25. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,66 poin antara IPM laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 91,27, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Namun begitu, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu pembangunan laki-laki masuk dalam kategori “tinggi” karena pencapaiannya sudah melebihi 70 sedangkan pembangunan perempuan masih masuk kategori “sedang” karena pencapaiannya belum mencapai 70.

Pencapaian IPG antar provinsi di Indonesia juga terlihat masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah timur Indonesia. Berdasarkan data BPS, IPG tahun 2021 tertinggi terdapat di provinsi DIY yaitu sebesar 94,88 sedangkan terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 80,16. Dilihat dari disparitas antar kabupaten/kota di Indonesia, terdapat ketimpangan capaian IPG sebesar 45,37 poin antara kabupaten/kota dengan IPG tertinggi, yaitu Kabupaten Ogan ilir (Sumatera Selatan) sebesar 99,09 dan kabupaten/kota dengan IPG terendah, yaitu Kabupaten Asmat di Papua sebesar 53,72.

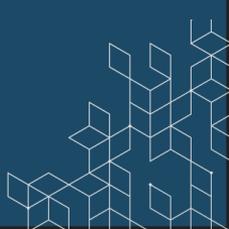
Umur harapan hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun IPG. Berdasarkan data dan hasil penghitungan BPS tahun 2021, perempuan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi yaitu 73,55 tahun sedangkan laki-laki 69,97 tahun. Hal ini kemungkinan karena perempuan lebih sadar akan



perilaku sehat dan mau mengakses fasilitas kesehatan dibanding laki-laki. Begitu juga dengan angka harapan lama sekolah (HLS), yaitu perempuan lebih lama bersekolah dibanding laki-laki. HLS perempuan tahun 2021 mencapai 13,22 tahun sedangkan laki-laki 12,95 tahun. Angka HLS ini menggambarkan rata-rata anak yang berusia 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2021 akan berpeluang bersekolah 12-13 tahun atau minimal lulus sekolah menengah tingkat atas. Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS), RLS laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun menjadi 8,92 tahun, sedangkan perempuan mengalami peningkatan 0,11 tahun menjadi 8,17 tahun. Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, RLS laki-laki hanya meningkat 1,01 tahun sedangkan perempuan meningkat 1,28 tahun, sehingga walaupun RLS perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki tetapi percepatannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pencapaian RLS perempuan bila selalu naik kelas maka hanya sampai kelas 8 atau SMP kelas 2, sedangkan laki-laki hampir kelas 9.

Sementara capaian dalam perekonomian, dilihat dari pengeluaran perkapita, pengeluaran per kapita laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2021 dan di tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2021 adalah hampir Rp. 15,7 juta rupiah per tahun, sedangkan perempuan hanya 9 juta rupiah per tahun atau hanya 57,38 persen dibandingkan pengeluaran laki-laki. Ketimpangan pengeluaran per kapita per tahun antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 antara 50-60 persen. Peningkatan kompetensi perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak salah satu jenis kelamin dapat memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 76,26 (BPS). Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,89 persen berbanding 78,11 persen. Komposisi tenaga kerja manajer, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 62,78 persen sedangkan perempuan sebesar 37,22 persen. Jika dilihat disparitas antar provinsi, hanya empat provinsi yang memiliki nilai IDG di atas rata-rata nasional, yaitu DI Yogyakarta, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah. Gap antara capaian IDG tertinggi dan terendah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih cukup tinggi, sehingga strategi pengarusutamaan gender harus semakin diperkuat dengan memperhatikan pemerataan implementasi di berbagai daerah.



DAFTAR ISI

i	SAMBUTAN
ii	KATA PENGANTAR
iii	RINGKASAN EKSEKUTIF
vi	DAFTAR ISI
vi	DAFTAR GAMBAR
xi	DAFTAR TABEL
xii	DAFTAR LAMPIRAN
7	BAB 1 PENDAHULUAN
3	Latar Belakang
5	Metodologi
6	Sistematika
8	BAB 2 KETIMPANGAN GENDER DI TATARAN GLOBAL
12	Kondisi Ketimpangan Gender Indonesia di Tataran Global
25	Best Practice Negara-Negara ASEAN dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
11	BAB 3 KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA
31	Pemberdayaan Gender Semakin Terlihat
34	Pembangunan Gender Belum Merata Antar Wilayah
13	BAB 4 KONDISI PEMBERDAYAAN GENDER DI INDONESIA
74	Ketimpangan Pemberdayaan Gender Masih Terjadi di Indonesia
77	Memahami masing-masing komponen IDG
15	BAB 5 KETERKAITAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
99	Analisa Kuadran IPM dan IPG
104	Analisa Kuadran IPG dan IDG
108	Analisa Kuadran IPM Perempuan dan IDG
112	Best Practice Wilayah dengan Capaian Tinggi
114	Strategi Pencapaian untuk Wilayah di Kuadran II, III dan IV
115	DAFTAR PUSTAKA
120	LAMPIRAN
250	CATATAN TEKNIS

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
2.1 Peringkat <i>Global Gender Gap Index</i> (GGGI) di Tataran Global, 2021	13
2.2 Global Gender Gap Index (GGGI) Negara-negara Asia Pasifik, 2021	14
2.3 Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021	15
2.4 Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, 2021	16
2.5 Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021	18
2.6 Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, 2021	19
2.7 Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021	21
2.8 Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, 2021	22
2.9 Sub Indeks Pemberdayaan Politik menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021	23
2.10 Posisi Indonesia di Asia Tenggara Menurut Sub Indeks Pemberdayaan Politik, 2021	24
3.1 IPM Indonesia Menurut Provinsi, 2021	32
3.2 Perkembangan IPM Perempuan, IPMLaki-Laki, IPM dan IPG, 2011-2021	34
3.3 IPG Indonesia Menurut Provinsi, 2020-2021	35
3.4 IPM Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2021	37
3.5 Jumlah Provinsi Menurut Kelompok Kategori IPM, Jenis Kelamin dan Pulau, 2021	39
3.6 Capaian IPG menurut Provinsi, 2021	41

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN	
3.7	Disparitas capaian IPG provinsi tertinggi dan terendah, 2010-2021	41
3.8	Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Pasangan Kelompok Kategori Capaian Pembangunan Laki-laki dan Perempuan, 2021	47
3.9	Capaian IPG menurut Kab/Kota, 2021	48
3.10	Umur Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021	50
3.11	Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021	51
3.12	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur Harapan Hidup (UHH) dan Jenis Kelamin, 2021	54
3.13	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021	56
3.14	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021	57
3.15	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Jenis Kelamin, 2021	59
3.16	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021	61
3.17	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021	62
3.18	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Rata-rata Lama Sekolah dan Jenis Kelamin, 2021	65
3.19	Pengeluaran per kapita menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2010-2021	66
3.20	Pengeluaran Per kapita menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2021	68
3.21	Jumlah Kabupaten/Kota menurut kelompok pengeluaran per kapita per tahun dan Jenis Kelamin, 2021	71
4.1	Capaian Indikator Komponen Penyusunan IDG Indonesia, 2021	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN	
4.2	Indeks Indikator Komponen Indeks Pemberdayaan Gender, 2021	75
4.3	Perkembangan IDG, Keterlibatan perempuan di parlemen, persentase sumbangan pendapatan perempuan dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional, 2010-2021	75
4.4	IDG Indonesia Menurut Provinsi, 2021	76
4.5	Disparitas capaian IDG provinsi tertinggi dan terendah, 2010-2021	77
4.6	IDG Indonesia Menurut Provinsi, 2020-2021	78
4.7	Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurut Provinsi Tahun 2020-2021	84
4.8	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan menurut Provinsi Tahun 2020-2021	87
4.9	Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang berusaha, 2021	91
4.10	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurut Provinsi Tahun 2020-2021	92
4.11	Jumlah ASN di Indonesia menurut Jenis Kelamin, 2020-2021	96
4.12	Persentase ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, 2021	96
5.1	Keterkaitan antara IPM dan IPG dalam bentuk kuadran	99
5.2	Sebaran Provinsi menurut Kelompok Kuadran IPM dan IPG, 2021	100
5.3	Sebaran Provinsi menurut Kelompok Kuadran IPM dan IPG, 2020	101
5.4	Hubungan antara IPM dan IPG Provinsi, 2020-2021	102
5.5	Keterkaitan antara IPG dan IDG dalam bentuk kuadran	104
5.6	Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPG dan IDG, 2021	105

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
5.7 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPG dan IDG, 2020	106
5.8 Hubungan antara IDG dan IPG, 2020-2021	107
5.9 Komponen Pembentuk IDG di Provinsi yang Terjadi Perubahan Kuadran	108
5.10 Keterkaitan antara IPM Perempuan dan IDG dalam bentuk kuadran	109
5.11 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPM Perempuan dan IDG, 2021	109
5.12 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPM Perempuan dan IDG, 2020	110
5.13 Hubungan antara IPM Perempuan dan IDG, 2020-2021	111

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
2.1 Peringkat Global Gender Gap Index (GGGI) di Tataran Global, 2021	12
3.1 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai IPG Tertinggi dan Terendah, 2021	42
3.2 Nilai IPG Tertinggi dan Terendah Kabupaten/Kota Menurut Provinsi, 2020-2021	43
3.3 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Provinsi dan Kelompok Nilai IPG, 2021	45
3.4 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai Umur Harapan Hidup (UHH) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021	47
3.5 Kabupaten/Kota yang memiliki Harapan Lama Sekolah (HLS) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021	58
3.6 Kabupaten/Kota yang memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021	64
3.7 Kabupaten/Kota yang memiliki Pengeluaran Per kapita Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2021	69
4.1 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai IDG Tertinggi dan Terendah, 2021	79
4.2 Nilai IDG Tertinggi dan Terendah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021	80
4.3 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Provinsi dan Kelompok Nilai IDG, 2021	82
4.4 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tertinggi dan Terendah, 2021	85
4.5 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai sumbangan pendapatan perempuan Tertinggi dan Terendah tahun 2021	88
4.6 Nilai Persentase sumbangan pendapatan perempuan Terendah, Tertinggi dan Rentang antara Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021	89
4.7 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi dan terendah tahun 2021	93
4.8 Nilai Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Terendah, Tertinggi dan Rentang antara Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021	94

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN		HALAMAN
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021	116
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2021	141
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2021	166
4	Indeks Pembangunan Gender (IPGO menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021	169
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021	194
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2021	218
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021	221



01

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Budaya patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktik sosial dimana laki-laki lebih mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1990). Perempuan cenderung diarahkan pada peran domestik dibandingkan laki-laki (Hermawati, 2007). Budaya ini telah lama terkonstruksi di masyarakat Indonesia. Situasi pandemik Covid-19 berdampak pada perubahan kondisi sosial yang dialami masyarakat. Di masa pandemik ini, budaya patriarki menyebabkan seorang istri merasakan beban yang lebih berat dalam hal pekerjaan rumah dan perawatan anak dibandingkan dengan suami (Setiyono & Imelda, 2021).

Dengan demikian, diskriminasi gender ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kesetaraan gender. Kesetaraan gender diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Kemen PPPA, 2000). Istilah kesetaraan gender dirasa masih asing oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui telah menerapkan kesetaraan gender di dalam keluarganya (Qomariah, 2019).

Kesetaraan gender menjadi isu penting yang disoroti di tingkat nasional maupun dunia internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen dalam menurunkan kesenjangan gender. Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Kemen PPPA, 2000). Selain itu, percepatan pelaksanaan PUG juga tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kesetaraan gender menjadi prinsip dalam pelaksanaan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu *no one left behinds*. Dalam tataran global, pemerintah juga turut serta dalam mengimplementasikan target-target yang tercantum pada tujuan kelima SDGs terkait kesetaraan gender. Target-target tujuan ke-5 tersebut, meliputi:

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun;
- 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
- 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
- 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
 - 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
 - 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
 - 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Implementasi dari komitmen pemerintah maupun partisipasi masyarakat terkait kesetaraan gender telah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender baik di tataran global maupun di tingkat nasional. Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender diharapkan dapat menjadi bahan acuan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta dan perguruan tinggi tentang pembangunan manusia yang melibatkan isu gender dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program.

Metodologi

Sumber Data

Penyusunan publikasi ini menggunakan dua sumber utama, yaitu:

- a *Global Gender Gap Report* yang dirilis oleh *World Economic Forum* sebagai sumber data untuk *Global Gender Gap Index (GGGI)* beserta komponen-komponen pembentuk indeks tersebut. *Human Development Report* yang digunakan adalah *Global Gender Gap Report* tahun 2021;
- b Data BPS pada laman bps.go.id sebagai sumber data untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) beserta komponen-komponen pembentuk indeks tersebut.

Selain itu, publikasi ini juga disertai dengan kajian-kajian untuk melengkapi analisis atas data kuantitatif.

Konsep dan Definisi Operasional

Konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada *Global Gender Gap Report* Tahun 2021 dan laman Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

a. *Global Gender Gap Index (GGGI)*

GGGI merupakan indikator ketidaksetaraan gender yang dirilis oleh *World Economic Forum*. Indeks ini terdiri atas empat sub indeks yaitu Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, Capaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik (*World Economic Forum, 2021*).

Sub indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi ini berisi tiga konsep: kesenjangan partisipasi, kesenjangan remunerasi dan kesenjangan kemajuan. Kesenjangan partisipasi diukur dengan melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesenjangan remunerasi diukur melalui rasio dari perkiraan pendapatan yang diperoleh perempuan dan laki-laki dan indikator kualitatif yang dikumpulkan melalui Survei Opini Eksekutif Tahunan Forum Ekonomi (kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa). Kesenjangan antara kemajuan perempuan dan laki-laki diukur melalui rasio perempuan dan laki-laki di antara legislator, pejabat senior dan manajer, dan rasio perempuan dan laki-laki di antara tenaga teknis dan profesional.

Sub indeks Capaian Pendidikan mengukur kesenjangan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki saat ini melalui rasio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah dan pendidikan tingkat tinggi. Pandangan jangka panjang dari kemampuan negara untuk mendidik perempuan dan laki-laki secara setara diukur melalui rasio angka melek huruf perempuan dengan angka melek huruf laki-laki.

Sub indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup menggambarkan perbedaan kesehatan perempuan dan laki-laki menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah rasio jenis kelamin saat lahir, yang bertujuan khusus untuk menangkap fenomena “perempuan hilang”, lazim di banyak negara dengan preferensi putra yang kuat. Kedua, kita gunakan kesenjangan angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki. Ukuran ini memberikan perkiraan dari jumlah tahun yang dapat dicapai perempuan dan laki-laki berharap untuk hidup dalam kesehatan yang baik dengan memperhatikan tahun-tahun yang hilang karena kekerasan, penyakit, kekurangan gizi dan faktor lain yang relevan.

Sub indeks Pemberdayaan Politik mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat tertinggi pengambilan keputusan politik melalui rasio perempuan terhadap laki-laki di posisi menteri dan rasio perempuan terhadap laki-laki di posisi parlemen. Selain itu, diperhitungkan pula rasio perempuan dan laki-laki dalam tataran eksekutif (perdana menteri atau presiden) selama 50 tahun terakhir. Kelemahan yang jelas dalam kategori ini adalah tidak adanya indikator mengukur perbedaan antara partisipasi perempuan dan laki-laki di tingkat pemerintahan daerah karena adanya keterbatasan data yang tersedia.

Status pencapaian GGI dikelompokkan menjadi Setara jika mendekati skor 1 dan Senjang jika memiliki skor 0.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan sebuah ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2020b). Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan. IPM dapat digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Status pencapaian IPM dikelompokkan menjadi (BPS, 2020b): Rendah : <60 ; Sedang: $60 \leq \text{IPM} <70$; Tinggi: $70 \leq \text{IPM} <80$; dan Sangat tinggi ≥ 80 .

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2020a). Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki. Selain itu, berdasarkan Laporan dari UNDP (2022), status capaian IPG dapat diukur menjadi Kesetaraan Tinggi ($|IPG-100| \leq 2,5$); Kesetaraan Menengah Tinggi ($2,5 < |IPG-100| \leq 5$); Kesetaraan Menengah ($5 < |IPG-100| \leq 7,5$); Kesetaraan Menengah Rendah ($7,5 < |IPG-100| \leq 10$) dan Kesetaraan Rendah ($|IPG-100| > 10$).

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik (bps.go.id). IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah ($IDG < 50$); sedang ($50 \leq IDG < 60$); tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); sangat tinggi ($IDG > 80$).

Keterbatasan Data

Publikasi ini tidak menjelaskan *Human Development Index (HDI) 2020*, *Gender Development Index (GDI) 2020* dan *Gender Inequality Index (GII) 2020*.

Sistematika

Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender terdiri atas enam bab.

BAB 1

merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas 3 subbab yaitu:

- subbab 1.1 mengulas latar belakang kesetaraan gender sebagai bagian dari komitmen nasional dan internasional di Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunan manusia berbasis gender,

- subbab 1.2 membahas metodologi perhitungan indikator terkait pembangunan manusia berbasis gender,

- subbab 1.3 adalah sistematika dari publikasi.

BAB 2

membahas terkait ketimpangan gender di tataran global. Pada bagian ini, diulas ketimpangan gender di tataran global beserta komponen-komponen penyusun *Global Gender Gap Index (GGGI)*.

BAB 3

membahas terkait kondisi pembangunan gender di Indonesia. Dalam bab ini mengulas bagaimana pembangunan perempuan dibandingkan dengan pembangunan laki-laki secara umum maupun dilihat ke dalam masing-masing komponen indeks pembangunan gender. Pada bab 3 ini pula dilakukan analisa ketimpangan pembangunan gender antar wilayah di Indonesia.

BAB 4

membahas terkait kondisi pemberdayaan gender di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan ketimpangan pemberdayaan gender antarwilayah di Indonesia. Disamping itu juga membahas kondisi pemberdayaan gender jika dilihat per masing-masing komponen Indeks Pemberdayaan Gender.

BAB 5

membahas keterkaitan kesetaraan gender dan pembangunan manusia. Bab 5 ini menganalisis kuadran antara IPM dan IPG; IPM dan IDG; IPG dan IDG; serta IPM Perempuan dan IDG. Selain itu, juga disajikan *best practice* wilayah dengan capaian tinggi serta strategi pencapaian untuk wilayah di kuadran II, III dan IV.

BAB 6

merupakan bab terakhir dari publikasi ini yang membahas kesimpulan yang berisi poin-poin kunci dari setiap bab. Setelah Bab 6, dilanjutkan dengan penyajian lampiran dari masing-masing Bab dan catatan teknis penghitungan indeks pembangunan gender serta indeks pemberdayaan gender.

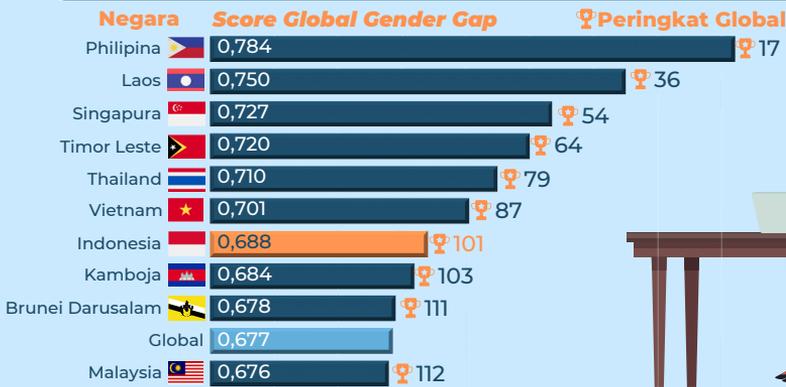


02

KETIMPANGAN GENDER DI TATARAN GLOBAL

KETIMPANGAN GENDER DI TATARAN GLOBAL

GLOBAL GENDER GAP INDEX (GGGI) NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA, 2021



Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



SUB INDEKS PARTISIPASI DAN PELUANG DI SEKTOR EKONOMI

Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, 2021

Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021



Sumber: Global Gender Gap Report, 2021

Sub Indeks

Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



Rank **99** Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi Skor **0,647**

Peringkat	Skor	Indikator
75	0,996	Rasio perempuan dan laki-laki sebagai tenaga teknis dan profesional
59	0,697	Kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa
115	0,665	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki
114	0,517	Rasio dari perkiraan pendapatan yang diperoleh perempuan dan laki-laki
92	0,424	Rasio perempuan dan laki-laki sebagai legislator, pejabat senior dan manajer

SUB INDEKS PENCAPAIAN PENDIDIKAN

Sub Indeks Pencapaian Pendidikan menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021

Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Pencapaian Pendidikan, 2021



Sub Indeks

Rank **107** Pencapaian Pendidikan Skor **0,970**

Indikator	Skor	Peringkat
Rasio perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan menengah	1,000	1
Rasio perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan tinggi	1,000	1
Rasio angka melek huruf perempuan dan laki-laki	0,966	94
Rasio perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan sekolah dasar	0,949	132

Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



Sumber: Global Gender Gap Report, 2021

KETIMPANGAN GENDER DI TATARAN GLOBAL

SUB INDEKS KESEHATAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP

Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, 2021



Sumber: Global Gender Gap Report, 2021

Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021

Sub Indeks
Rank **76** Kesehatan dan Kelangsungan Hidup Skor **0,971**



Angka harapan hidup perempuan dan laki-laki

Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



Rasio jenis kelamin saat lahir



SUB INDEKS PEMBERDAYAAN POLITIK

Sub Indeks Pemberdayaan Politik menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021

Sub Indeks
Rank **92** Pemberdayaan Politik Skor **0,164**



Rasio perempuan dan laki-laki di parlemen

Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



Rasio perempuan dan laki-laki sebagai Menteri



Rasio perempuan dan laki-laki di tataran eksekutif selama 50 tahun terakhir

Posisi Indonesia di Asia Tenggara Menurut Sub Indeks Pemberdayaan Politik, 2021



Sumber: Global Gender Gap Report, 2021



2.1 Kondisi Ketimpangan Gender Indonesia di Tataran Global

Kesetaraan gender merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh seluruh negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi ketimpangan gender tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. *Global Gender Gap Index (GGGI)* merupakan salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan gender di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tabel 2.1 menunjukkan skor GGI dan peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di tataran global.

Tabel 2.1

Peringkat *Global Gender Gap Index (GGGI)* di Tataran Global, 2021

No	Negara	Peringkat		Skor
		Regional	Global	
1	New Zealand	1	4	0,840
2	Philippines	2	17	0,784
3	Lao PDR	3	36	0,750
4	Australia	4	50	0,731
5	Singapore	5	54	0,727
6	Timor-leste	6	64	0,720
7	Mongolia	7	69	0,716
8	Thailand	8	79	0,710
9	Viet Nam	9	87	0,701
10	Indonesia	10	101	0,688
11	Korea, Rep.	11	102	0,687
12	Cambodia	12	103	0,684
13	China	13	107	0,682
14	Myanmar	14	109	0,681
15	Brunei Darussalam	15	111	0,678
16	Malaysia	16	112	0,676
17	Fiji	17	113	0,674
18	Japan	18	120	0,656
19	Papua New Guinea	19	135	0,635
20	Vanuatu	20	141	0,625

Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Dapat dilihat pada Tabel 2.1, secara global posisi Indonesia saat ini berada pada urutan 101 dari 156 negara dengan skor GGGI sebesar 0,688. New Zealand berada di peringkat pertama untuk wilayah Asia Pasifik dengan nilai 0,840. Hal ini berarti bahwa gap nilai antara peringkat pertama (New Zealand) dan Indonesia sebesar 0,152.

Gambar 2.1

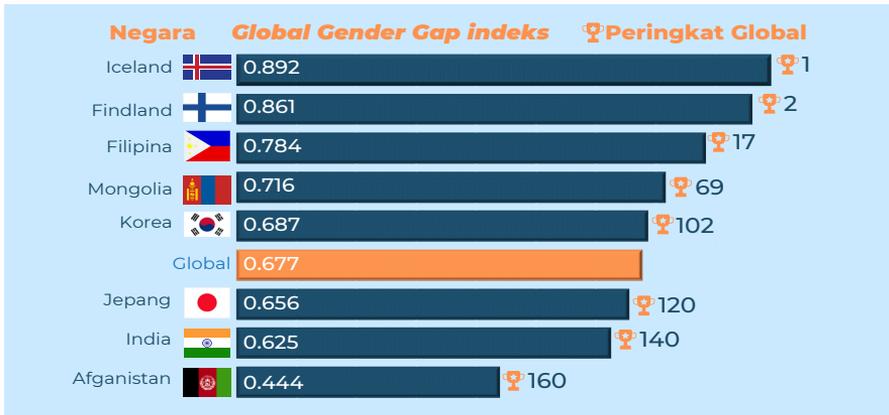
Global Gender Gap Index (GGGI) Negara-negara Asia Tenggara, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Global Gap Gender Report (GGGR) tahun 2021 dari *World Economy Report (WEF)* menunjukkan ketimpangan gender negara-negara di dunia. GGGI antara 0-100, artinya semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin tinggi kesetaraan gender suatu negara. Secara global, GGGI adalah 67,7 persen yang artinya rata-rata kesetaraan gender negara-negara di dunia hanya sekitar 67,7 persen atau hanya 67,7 persen kesenjangan gender yang baru bisa diatasi dari seluruh kesenjangan gender yang ada.

Nilai GGGI Indonesia sebesar 68,8 persen artinya baru 68,8 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Peringkat Indonesia adalah 7 dari 10 negara Asia Tenggara berdasarkan nilai GGGI. Peringkat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara Filipina, Laos, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam, sedangkan negara Kamboja, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki peringkat di bawah Indonesia.

Gambar 2.2*Global Gender Gap Index (GGGI) Negara-negara Asia Pasifik, 2021*

Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Dapat dilihat pada Gambar 2.2, negara dengan posisi tertinggi adalah Iceland dengan indeks sebesar 89,2 persen diikuti oleh Finland sebesar 86,1 persen. Untuk negara dengan capaian terendah adalah negara Afganistan sebesar 44,4 persen. Bila dilihat dari negara-negara Asia Pasifik terlihat bahwa posisi Indonesia berada dibawah Filipina dan Mongolia sedangkan negara Korea, Jepang dan India mempunyai peringkat di bawah Indonesia.

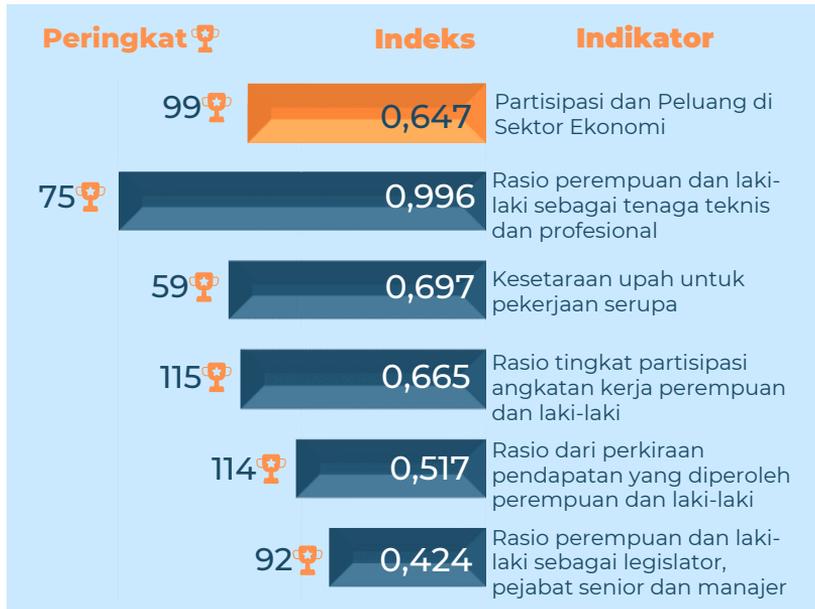
2.1.1. Kondisi Ketimpangan Gender dalam Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi

Sub indeks partisipasi dan peluang ekonomi terdiri atas tiga konsep yaitu kesenjangan partisipasi, kesenjangan remunerasi, dan kesenjangan kemajuan. Ketiga konsep tersebut memiliki indikator sebagai berikut: rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki, kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa, rasio dari perkiraan pendapatan yang diperoleh perempuan dan laki-laki, rasio perempuan dan laki-laki sebagai legislator, pejabat senior dan manajer dan rasio perempuan dan laki-laki sebagai tenaga teknis dan profesional.

Indonesia peringkat 99 dari 156 negara dengan nilai 0,647 untuk sub indeks partisipasi dan peluang di sektor ekonomi. Dalam sub indeks ini, indikator kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki memiliki peringkat paling tinggi di tataran global untuk negara Indonesia jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu mencapai peringkat 59 dari 156 negara dengan skor 0,697. Sedangkan indikator dengan peringkat paling rendah di global untuk sub indeks ini ada pada indikator rasio

tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki dengan peringkat 115 dari 156 negara yang memiliki skor sebesar 0,665.

Gambar 2.3 Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indonesia peringkat kesepuluh dari sebelas negara di Asia Tenggara untuk capaian sub indeks partisipasi dan peluang di sektor ekonomi sebesar 0,647. Angka ini jauh tertinggal dengan negara Lao PDR sebesar 0,915 dan lebih tinggi sedikit dengan negara Malaysia sebagai negara dengan peringkat terakhir di Asia Tenggara.

Secara global, nilai sub indeks partisipasi dan peluang ekonomi adalah 58 persen atau kesetaraan gender di bidang partisipasi dan peluang ekonomi hanya terpenuhi 58 persen. Negara Laos mempunyai nilai kesetaraan gender bidang partisipasi dan peluang ekonomi tertinggi. Laos mempunyai nilai sub indeks sebesar 91,5 persen yang menggambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi dan peluang ekonomi hampir sama karena mendekati nilai 100. Berdasarkan Gambar 2.4, sub indeks partisipasi dan peluang ekonomi Indonesia adalah 64,7 persen dan menduduki peringkat 99 dari 156 negara. Sehingga digambarkan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terkait partisipasi dan peluang ekonomi baru tertutupi sekitar 65 persen dan posisi Indonesia di dunia adalah kelompok menengah ke bawah.

Gambar 2.4

Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sebesar 66,5 persen dan mempunyai peringkat 115 dari 156 negara serta peringkat kedua terbawah di 10 negara Asia Tenggara. Negara Filipina mempunyai peringkat terbawah di negara Asia Tenggara dimana capaian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil sedikit dibandingkan Indonesia yaitu 65,3 persen. Negara Laos dan Kamboja mempunyai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang cukup tinggi di atas 90 persen sehingga peringkat mereka di dunia cukup tinggi yaitu Laos pada peringkat 8 sedangkan Vietnam di peringkat 30 (GGGR, 2021).

Rasio dari perkiraan pendapatan yang diterima perempuan dan laki-laki di Indonesia adalah 69,7 persen yang berarti kesetaraan pendapatan perempuan dengan laki-laki hanya bisa diatasi 69,7 persen. Peringkat Indonesia di dunia adalah 59, namun diantara negara Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat 9 dari 9 negara yang dihitung. Negara Singapura berada pada peringkat 7 di dunia dan tentunya peringkat pertama di Asia Tenggara dengan nilai 80,3 persen.

Selain itu, negara Thailand dan Filipina juga mempunyai peringkat yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain dengan nilai sekitar 78 persen.

Kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa di Indonesia sebesar 51,7 persen, dimana upah untuk perempuan hanya setengah dibandingkan upah laki-laki. Hasil dari indikator ini menyebabkan Indonesia mempunyai peringkat yang cukup rendah di dunia yaitu 114 dan peringkat ke 10 dari 10 negara Asia Tenggara. Negara Laos, Vietnam, dan Kamboja mempunyai peringkat yang tinggi di dunia.

Dalam pelaporan “Mengatasi Hambatan Gender dalam Kewirausahaan dan Kepemimpinan bagi Anak Perempuan dan Perempuan Muda di Asia Tenggara” oleh UNICEF dan UNDP menelaah bagaimana kapasitas dan kompetensi yang dimiliki anak perempuan dan perempuan muda terkait kewirausahaan dan kepemimpinan dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat, dan ekosistem lain yang lebih luas seiring dengan peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Temuan yang utama mencakup:

- 1** Dibandingkan laki-laki muda, perempuan muda memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih rendah dan kekhawatiran yang lebih tinggi terhadap kegagalan. Anak perempuan dan perempuan muda menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka ditentukan oleh ketekunan mereka sendiri. Mereka juga kurang menganggap penting peran faktor eksternal yang ada di luar kendali mereka.
- 2** Anak perempuan dan perempuan muda merasa bahwa tugas dalam keluarga mereka harus didahulukan daripada kebutuhan dan pilihan pribadi mereka. Sejak masih belia, anak perempuan merasa bahwa mereka dituntut oleh keluarga agar bisa menyeimbangkan urusan pendidikan dan pekerjaan dengan pekerjaan rumah tangga yang cukup berat.
- 3** Perempuan muda merasa bahwa peluang karir mereka, termasuk peluang menjadi wirausaha, dibatasi oleh tekanan sosial terkait peran yang wajar bagi perempuan. Mereka berupaya untuk lebih memahami peluang yang masih mungkin dimanfaatkan.
- 4** Jenjang pendidikan memang dianggap oleh perempuan muda sebagai modal yang penting untuk memperoleh pekerjaan, tetapi materi dan keterampilan yang diajarkan di sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menurut mereka masih belum cukup dijadikan bekal dalam perjalanan karier, termasuk dalam kewirausahaan. Pilihan untuk mengembangkan keterampilan merupakan hal yang sering kali dibatasi untuk sejumlah segmen masyarakat yang miskin dan rentan, yang tinggal di daerah terpencil, yang memiliki disabilitas, dan yang mengalami pernikahan dan kehamilan di bawah umur.

- 5 Perempuan muda, terutama yang tinggal di wilayah perdesaan, terpaksa untuk menjadi wirausaha tidak hanya karena sedikitnya lapangan pekerjaan formal di wilayah setempat, tetapi juga karena adanya keleluasaan yang dimiliki dengan menjadi wirausaha, yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan urusan memperoleh pendapatan dengan tanggung jawab pengasuhan.
- 6 Akses keuangan, jaringan usaha, dan informasi yang tidak memadai ditambah dengan norma gender yang diskriminatif menjadi hambatan terbesar yang dihadapi perempuan muda dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka.
- 7 Kurangnya perempuan yang berada di posisi pengambil keputusan dan adanya kebijakan dan undang-undang yang bias gender, terutama terkait akses keuangan, tanah dan aset lainnya, serta penyediaan pengasuhan, membatasi potensi untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2.1.2. Kondisi Ketimpangan Gender dalam Sub Indeks Pencapaian Pendidikan

Sub indeks ini mengukur kesenjangan antara akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan saat ini melalui rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta rasio angka melek huruf perempuan dan laki-laki.

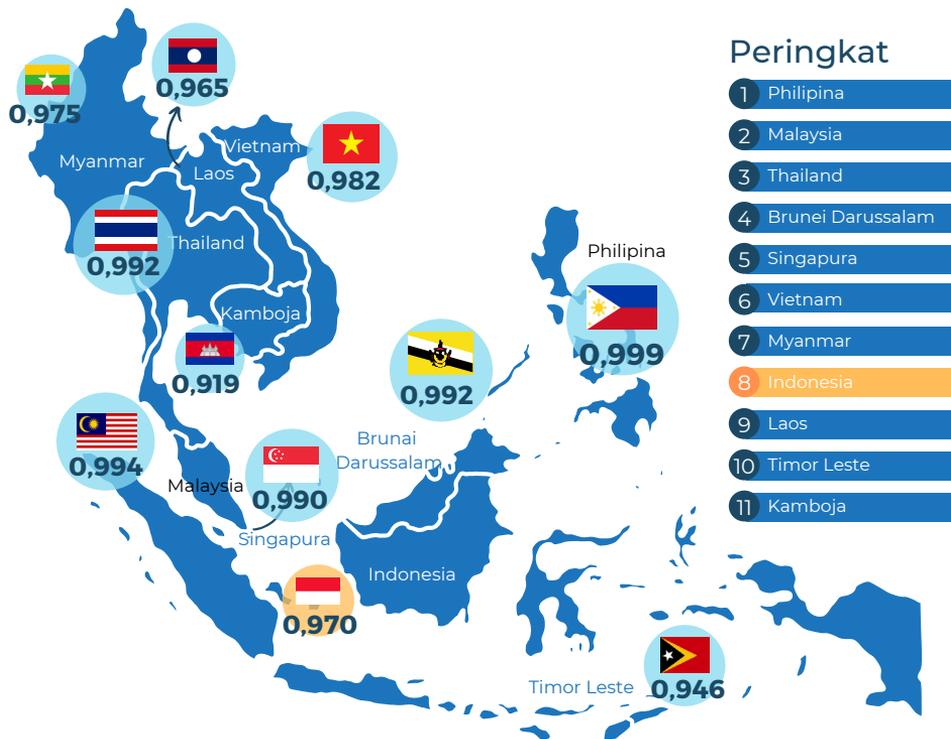
Gambar 2.5 Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indonesia peringkat 107 dari 156 negara dengan nilai 0,970 untuk sub indeks pencapaian pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.5. Rasio perempuan dan laki-laki yang memperoleh pendidikan menengah juga pendidikan tinggi menjadi peringkat 1 di tingkat global dengan skor 1. Artinya, perempuan sudah menerima pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang setara dengan laki-laki di Indonesia.

Gambar 2.6 Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indonesia peringkat kedelapan di Asia Tenggara untuk capaian sub indeks capaian pendidikan sebesar 0,97 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Filipina menjadi negara peringkat pertama di wilayah Asia Tenggara dengan capaian skor 0,999 sedangkan Kamboja menjadi negara posisi terakhir dengan capaian skor 0,919.

Sub indeks pencapaian pendidikan Indonesia sebesar 97 persen dengan peringkat Indonesia di dunia sebesar 107 dan peringkat ke 8 di negara ASEAN. Pencapaian Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara

Laos, Timor Leste dan Kamboja. Indonesia masih terdapat kesenjangan dalam angka melek huruf dan partisipasi di pendidikan dasar dan hal ini juga terjadi pada negara-negara yang pencapaiannya di bawah Indonesia. Negara Filipina yang mempunyai peringkat 39 di dunia, kesenjangan hanya terdapat pada indikator partisipasi di pendidikan dasar, sedangkan ketiga indikator lainnya bernilai 1.

Kebijakan pendidikan di Brunei Darussalam diatur oleh Sistem Pendidikan Nasional Abad 21 atau SPN21 (Brahim Tengah, 2013). Di antara kebijakan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan menanggung biaya pendidikan sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berkualitas. Kesetaraan gender dalam pendidikan di Brunei Darussalam tercermin dari jumlah lulusan perempuan melebihi jumlah lulusan laki-laki di semua jurusan kecuali teknik.

Di bidang pendidikan, Kamboja berfokus untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua anak dan remaja untuk mengakses lembaga pendidikan. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak laki-laki, jumlah guru, dan kondisi alam.

Kesenjangan gender di Laos menonjol dalam pendidikan menengah. Budaya Laos adalah perempuan-sentris, terutama di daerah perdesaan di mana perempuan siap untuk mengurus rumah tangga sejak usia dini.

Kesenjangan pendidikan di Vietnam tercermin dalam hambatan bahasa, perbedaan status sosial dan kondisi alam, terutama di antara kelompok minoritas. Budaya Vietnam juga menekankan bahwa perempuan harus melakukan banyak pekerjaan rumah.

Kebijakan pendidikan Thailand dapat dilihat dalam undang-undang yang menyatakan bahwa semua orang Thailand memiliki hak yang sama untuk setidaknya 12 tahun pendidikan dasar gratis yang berkualitas baik. Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan bantuan pemerintah untuk anak-anak yang kurang beruntung.

2.1.3. Kondisi Ketimpangan Gender dalam Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup

Sub indeks ini menggambarkan perbedaan antara kesehatan perempuan dan laki-laki melalui penggunaan dua indikator yaitu rasio jenis kelamin saat lahir dan kesenjangan antara harapan hidup sehat perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.7

Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indonesia berada pada peringkat 76 dari 156 negara dengan nilai 0,971 untuk capaian sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup seperti tertera pada Gambar 2.7. Untuk indikator rasio jenis kelamin perempuan dan laki-laki saat lahir, Indonesia menjadi peringkat nomor 1 di tingkat global dengan skor 0,944.

Indonesia peringkat kedelapan di Asia Tenggara untuk capaian sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup sebesar 0,971. Myanmar menjadi negara dengan posisi tertinggi di wilayah Asia Tenggara dengan capaian sebesar 0,98 dan Vietnam menjadi terendah di wilayah Asia Tenggara dengan capaian 0,945.

Berdasarkan Gambar 2.8, posisi Indonesia dalam sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup adalah peringkat ke 76 dan peringkat ke 8 dari 11 negara Asia Tenggara. Nilai sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup Indonesia adalah 97,1 persen, artinya masih terdapat ketimpangan gender dalam sub indeks ini. Dalam kelompok negara Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Filipina, Laos, Thailand dan Kamboja. Dalam indikator harapan hidup sehat, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand dan Vietnam yang sudah mencapai angka indeks sebesar 1,06.

Gambar 2.8**Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, 2021**

Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Negara Indonesia telah melakukan reformasi di bidang kesehatan melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan maka pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui sub sistem kesehatan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu upaya kesehatan; penelitian dan pengembangan kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional).

Malaysia memiliki sistem pembiayaan kesehatan yang terdiri dari kesehatan publik dan perawatan kesehatan privat. Kesehatan publik dari pajak masyarakat digunakan untuk program pencegahan dan promosi kesehatan. Namun, untuk program kesehatan kuratif dan rehabilitatif,

dokter umum harus membayar 1 RM dan spesialis 5 RM. Selain itu, di sektor kesehatan, pemerintah Malaysia telah memberlakukan pembebasan pajak untuk peralatan medis dan obat-obatan, dan telah membatasi akses dokter dengan biaya medis yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan.

Thailand memiliki 3 skema sistem kesehatan yaitu *Universal Health Coverage* (seluruhnya 75%), *Social Health Insurance for Formal Private Sector* (Skema asuransi kesehatan untuk pegawai swasta 20 %) dan *Civil Servant Medical Benefit Scheme* (skema asuransi kesehatan untuk PNS 5%). Selain itu, Thailand memiliki sejumlah besar rumah sakit primer, sekunder dan tersier dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Beberapa program kesehatan telah menjangkau tingkat desa termasuk memberikan kesempatan bagi putra daerah kembali ke komunitasnya untuk belajar di bidang kesehatan dan bekerja dengan insentif yang memadai. Selain itu, beberapa rumah sakit di Thailand telah menjadi rujukan warga negara ASEAN untuk mendapatkan layanan kesehatan.

2.1.4. Kondisi Ketimpangan Gender dalam Sub Indeks Pemberdayaan Politik

Sub indeks ini mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi melalui rasio perempuan terhadap laki-laki di posisi menteri dan rasio perempuan terhadap laki-laki di posisi parlemen serta rasio perempuan dan laki-laki dalam tataran eksekutif (perdana menteri atau presiden) selama 50 tahun terakhir.

Gambar 2.9 Sub Indeks Pemberdayaan Politik menurut Indikator Pembentuknya dan Peringkat Indonesia di Tingkat Global, 2021

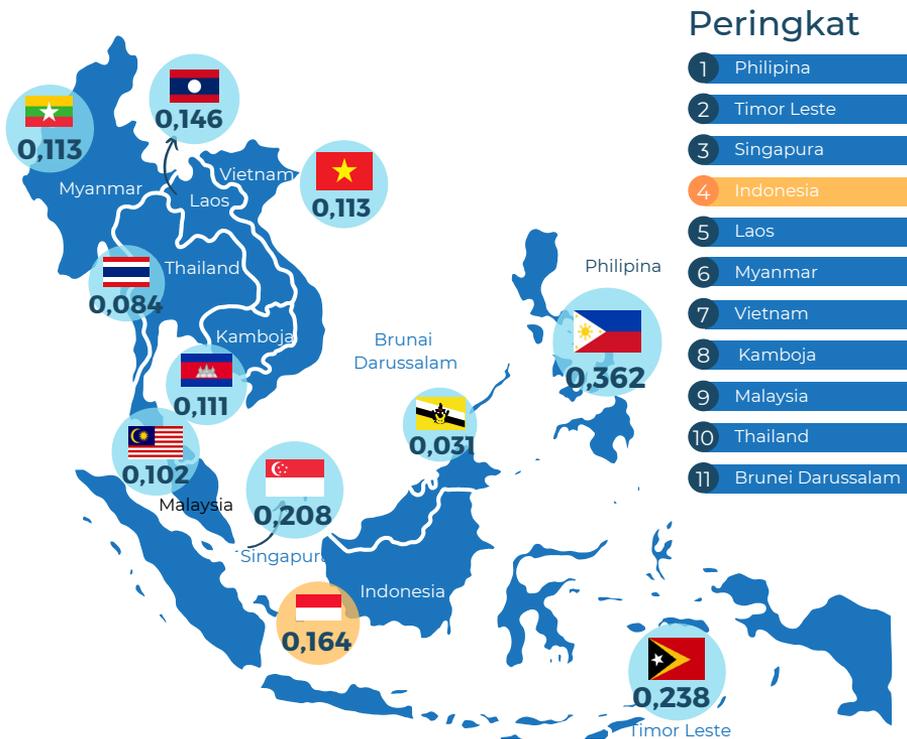


Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Indonesia peringkat 92 dari 156 negara dengan nilai 0,164 untuk sub indeks pemberdayaan politik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9. Dari ketiga indikator yang membentuknya, rasio perempuan dan laki-laki di tataran eksekutif selama 50 tahun terakhir memiliki peringkat global tertinggi yaitu 41 dari 156 negara dengan nilai 0,069.

Gambar 2.10

Posisi Indonesia di Asia Tenggara Menurut Sub Indeks Pemberdayaan Politik, 2021



Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

Berdasarkan Gambar 2.10, Indonesia menjadi peringkat keempat di Asia Tenggara untuk capaian sub indeks pemberdayaan politik dengan nilai sebesar 0,164 dan masih terdapat ketimpangan dalam pengambilan keputusan terutama di bidang politik. Dalam sub indeks ini, capaian tertinggi diperoleh Filipina dan terendah adalah Brunei Darussalam. Posisi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Negara Indonesia masih lebih baik dibandingkan kelima negara Asia Tenggara tersebut karena masih mempunyai Menteri perempuan dan pernah memiliki presiden perempuan.

2.2. Best Practice Pembangunan Gender di tingkat ASEAN

Filipina menjadi negara dengan nilai kesetaraan gender paling tinggi di tingkat ASEAN berdasarkan GGGI Tahun 2021. Menurut penelitian Dewi (2021), keberhasilan kesetaraan gender di Filipina didukung oleh:

- 1 diadopsinya terminologi *gender mainstreaming*.
- 2 penerapan gender mainstreaming yang dibuktikan dengan dibentuknya beberapa peraturan perundang-undangan serta program terkait penerapan kesetaraan gender yaitu *The Magna Carta of Women (MCW)*, *The Philippine Development Plan for Women (PDPW) 1989-1992*, dan *The Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995-2025*.
- 3 implementasi *gender mainstreaming* di beberapa sektor seperti partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Selain itu, menurut penelitian Nurhalizah & Yuwafik (2020), kondisi lain yang mendukung kesetaraan gender di Filipina adalah gerakan aktivis perempuan yang sangat kuat di masyarakat dan berperan tidak hanya di nasional tetapi juga internasional. Gerakan ini mendorong banyak perubahan di Filipina terutama terkait buruh perempuan dan pendidikan perempuan. Banyak organisasi dan LSM yang mendukung kesetaraan gender dan masalah perempuan lainnya juga merupakan kondisi lain yang mendukung keberhasilan kesetaraan gender di Filipina.

Di sisi lain, komitmen internasional pemerintah Filipina terhadap kesetaraan gender ditunjukkan dengan Filipina sebagai negara ASEAN yang pertama kali melakukan ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tanggal 5 Agustus 1981. Selain itu, Filipina pun meratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW pada 12 November 2003. CEDAW telah berkontribusi besar dalam kemajuan dan pemberdayaan perempuan Filipina. Salah satunya yaitu pemberlakuan Undang-Undang Republik (*Republic Act*) No. 9710, atau dikenal sebagai *Magna Carta of Women (MCW)*. Undang-undang ini merupakan undang-undang hak asasi manusia perempuan yang komprehensif yang berusaha untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan mengakui, melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak perempuan Filipina, terutama mereka yang berada di kondisi terpinggirkan.

Prinsip kesetaraan gender tertuang dalam berbagai undang-undang di Filipina antara lain *Gender and Development Law (5% dari anggaran lembaga pemerintah adalah untuk gender)*, *Party-List Law*

(Perempuan sebagai perwakilan di badan legislatif melalui pemilihan partai), *Anti-Sexual Harassment Law*, *Anti-Rape Law*, *Women in Nation-Building Law* (Anggaran untuk perempuan dari dana pembangunan pemerintah asing dan lembaga multilateral), *Repatriation Law*, *Non-Discrimination Law in Labor Code* (Perlindungan perempuan dalam perekrutan dan pembayaran), *Comprehensive Agrarian Reform Law* (Persamaan hak bagi perempuan untuk menjadi penerima tanah), dan *Military Training equality* (Perempuan dapat memasuki sekolah militer dan polisi) (Odi et al., 2000). Selain itu, konstitusi 1987 negara Filipina mengatur kesetaraan gender dalam Pasal II ayat 14 mengenai pengakuan negara terhadap peran perempuan dalam pembangunan dan harus menjamin kesetaraan fundamental di hadapan hukum antara perempuan dan laki-laki, serta pada pasal XIII ayat 14 bahwa negara akan melindungi perempuan yang bekerja dan memberikan peluang serta fasilitas yang setara dengan laki-laki (Odi et al., 2000).

Indeks pemberdayaan politik yang paling tinggi di tingkat ASEAN dicapai pula oleh negara Filipina. Negara ini menerapkan kebijakan *affirmative action* yang diatur dalam MCW. Kebijakan tersebut mengatur kesetaraan gender sebagai kebijakan, program, layanan atau tindakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang kurang beruntung dengan memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk *affirmative action* yang bersifat sukarela untuk setiap partai politik. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam bidang parlemen juga diatur dalam *Republic Act 7941* atau "*Party-List System Act*" yang berisi bahwa negara akan menjamin sistem kepartaian yang utuh, bebas dan terbuka untuk mencalonkan kandidatnya di DPR (PCW, 2021). Saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen Filipina sebanyak 27,69% sedangkan di Indonesia berada dibawahnya yaitu sebanyak 21,91% (IPU, 2022).

Pemerintah Filipina meyakini implementasi MCW sebagai nilai fundamental yang harus tercermin dalam pembangunan dan perempuan berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dimulai dari lokal, regional hingga nasional (Dewi, 2021). Walaupun perempuan dalam pencalonan masih ditempatkan pada urutan terakhir, kehadiran perempuan berhasil memberikan hasil yang nyata melalui keterwakilannya di lembaga parlemen karena kesadarannya sendiri dan adanya keseriusan pemerintah memberikan perlindungan hukum pada kebijakan kesetaraan gender (Arawi et al., 2022).

Indeks pencapaian pendidikan Filipina pun tertinggi di tingkat ASEAN. Filipina merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari penetapan prioritas anggaran tertinggi untuk pendidikan yang tertuang dalam *The Constitution of the Republic of the Philippines 1987* (Dewi, 2021). Pemerintah memiliki *Program Pantawid Pamilyang Pilipino (4P)* untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 4P merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan

persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan terkait pendidikan adalah anak penerima bantuan berusia 3-18 tahun harus mendaftar di sekolah, dan mempertahankan kehadiran setidaknya 85% dari jumlah kelas setiap bulan. Dalam bidang pendidikan di Filipina, saat ini, perempuan lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki (Paqueo & Orbeta, 2019).

Indeks partisipasi dan peluang di sektor ekonomi di tingkat ASEAN paling tinggi dicapai oleh Laos. Kebijakan terkait kesetaraan gender di Laos tertuang dalam konstitusi yang diundangkan pada tahun 1991. Konstitusi Laos menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, dan masyarakat, maupun dalam keluarga. Pada tahun 1955 didirikan *Laos Women Union (LWU)*, yaitu mandat untuk mewakili perempuan dari semua kelompok etnis, untuk melindungi hak perempuan. LWU berpedoman pada prinsip Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Nasional (National and International Partners in Lao People's Democratic Republic, 2019). Selanjutnya, salah satu kebijakan pemberdayaan perempuan lainnya yang telah diterapkan pada tahun 1995 adalah pengaturan jarak kelahiran. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi, mempersingkat waktu perempuan dalam peran reproduksi, dan memperpanjang waktu perempuan dalam pekerjaan yang produktif (Khouangvichit, 2010).

Selain itu, Komisi Nasional untuk Kemajuan Perempuan, Ibu dan Anak di Laos didirikan sejak tahun 2003, diamanatkan untuk mendefinisikan kebijakan, strategi, dan program nasional untuk pengembangan dan promosi perempuan. Komisi tersebut juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional demi kemajuan perempuan dan pengarusutamaan gender di semua sektor. Disamping itu, Kaukus Parlemen Perempuan dibentuk pada akhir tahun 2002 yang bertanggung jawab dalam mengorganisir pelatihan kepemimpinan perempuan dan untuk lokakarya pelatihan gender bagi anggota parlemen.

Pemerintah Laos telah menyusun Undang-Undang Kesetaraan Gender yang disetujui oleh Majelis Nasional pada tahun 2019 dan diundangkan dengan Keputusan Presiden pada tahun 2020 (Lao People's Democratic Republic, 2020). Strategi yang dilakukan oleh Laos untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pekerjaan diantaranya dengan memberikan dukungan khusus bagi perempuan pemilik UKM dan ekspansi pelatihan kejuruan dan pusat konseling untuk perempuan (National and International Partners in Lao People's Democratic Republic, 2019).

Indeks kesehatan dan kelangsungan hidup di tingkat ASEAN tertinggi dicapai oleh Myanmar. Kebijakan Kesehatan di Myanmar didukung dengan adanya landasan konstitusi dari pemerintah Myanmar tahun 2008, salah satunya pada pasal 28. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Myanmar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya dan memberikan payung hukum yang dapat

menjamin warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, Myanmar memiliki program kebijakan dengan nama *Health for All*. Salah satu tujuan program tersebut adalah meningkatkan kerjasama di beberapa sektor seperti swasta dan organisasi non pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan. Pemerintah menjalin kerja sama dengan beberapa INGO, salah satunya adalah *Medecins Sans Frontieres* (MSF) atau Dokter Lintas Batas. MSF telah memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar dengan memberikan layanannya kepada setiap kelompok individu tanpa membedakan jenis kelamin, ras, etnis, dan budaya.





03

KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA

Sumber: BPS, 2021



▲0,21

IPG 2021 91,27

Indeks pembangunan gender tahun 2021 sebesar 91,27, lebih tinggi 0,21 dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 91,06,

IPM laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,27 menjadi 76,25 tahun 2021 sedangkan perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,4 menjadi 69,59, IPM laki-laki sudah masuk kategori "Tinggi" sedangkan perempuan masuk kategori "Sedang"



PEMBANGUNAN GENDER BELUM MERATA

Kabupaten dengan IPG tertinggi yakni Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan terendah Kabupaten Asmat Provinsi Papua

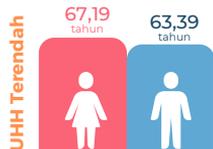
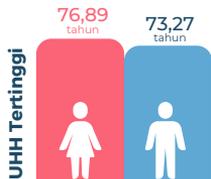


10 Kabupaten/ Kota dengan IPG terendah berada pada provinsi:



PEREMPUAN BERUMUR LEBIH PANJANG

Umur Harapan Hidup (UHH) 2021

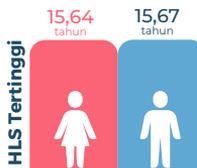


TIDAK ADA PERBEDAAN PELUANG LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) 2021



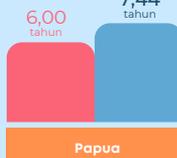
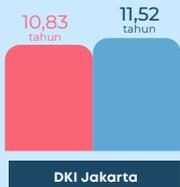
Sumber: BPS



LAMA SEKOLAH PEREMPUAN PERLU DITINGKATKAN

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,17 tahun 8,92 tahun



Sumber: BPS

PEREKONOMIAN MASIH DIDOMINASI OLEH LAKI-LAKI

Pengeluaran perkapita laki-laki : hampir Rp, 15,770 juta pertahun

Pengeluaran perkapita perempuan: Rp, 9,050 juta pertahun

5 provinsi dengan pengeluaran tertinggi laki-laki:
DKI Jakarta Kepulauan Riau Bangka Belitung
Kalimantan Timur Kalimantan Selatan

provinsi dengan pengeluaran tertinggi perempuan
DKI Jakarta Bali DI Yogyakarta
Kepulauan Riau Banten

Sumber: BPS



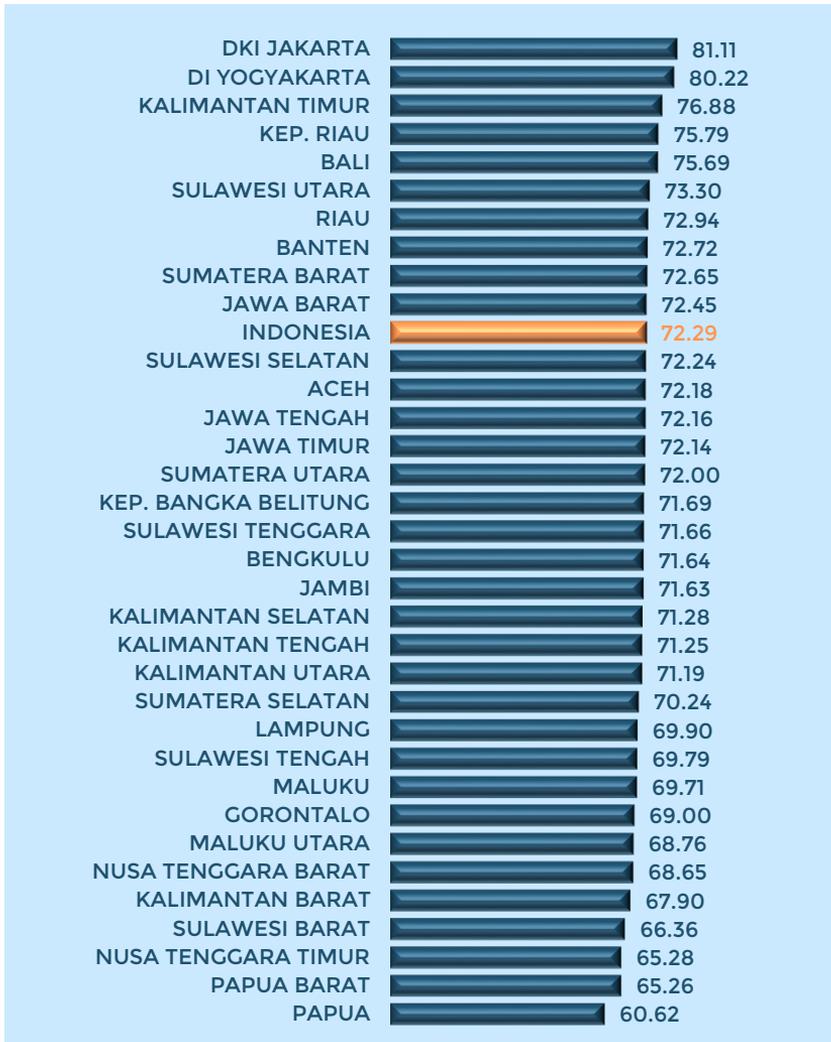
3.1. Pembangunan Perempuan Masih Tertinggal

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan.

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. Selanjutnya, pelaksanaan strategi PUG menghadapi berbagai tantangan, diantaranya penerapan kebijakan, alat analisis, serta komitmen dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender masih belum optimal, pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan desa masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.

Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Peningkatan produktivitas dengan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah; pemerataan bertujuan mendapatkan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi dan sosial; kesinambungan berarti memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial sampai dengan generasi selanjutnya dan terakhir adalah pemberdayaan yang berarti penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Menurut BPS, pemanfaatan IPM dijabarkan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk) dan dapat digunakan sebagai pembandingan sehingga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh suatu wilayah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Indonesia menggunakan data IPM sebagai alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

Gambar 3.1**IPM Indonesia Menurut Provinsi, 2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 3.1, IPM Indonesia pada tahun 2021 adalah 72,29 dan terlihat masih terdapat ketimpangan capaian antara wilayah di Indonesia. Provinsi dengan capaian IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (81,11) sedangkan provinsi dengan capaian IPM terendah adalah Papua (60,62). Besarnya ketimpangan antara capaian IPM tertinggi dan terendah sebesar 20,49 poin. Selain itu, hanya terdapat 10 provinsi yang mempunyai nilai IPM di atas angka IPM Indonesia sedangkan 24 provinsi yang lain mempunyai nilai capaian di bawah IPM Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Namun, pandemi covid 19 telah membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya perlambatan kenaikan IPM sejak tahun 2020. Tahun 2020, nilai IPM hanya meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2019. Tahun 2021, nilai IPM meningkat 0,35 poin dibandingkan tahun 2020. Padahal, sebelumnya peningkatan IPM biasanya melebihi dari 0,35 poin setiap tahunnya.

Capaian IPM menurut jenis kelamin menunjukkan adanya ketimpangan dimana capaian perempuan tahun 2021 sebesar 69,59 sedangkan laki-laki sebesar 76,25 atau terdapat ketimpangan sebesar 6,66 poin. Pada tahun 2021, kenaikan IPM perempuan sebesar 0,4 poin. Kenaikan IPM perempuan ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 0,27 poin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa percepatan capaian IPM perempuan tahun 2021 lebih baik dibandingkan laki-laki (Gambar 3.2).

Capaian IPM menurut jenis kelamin selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010. Peningkatan IPM laki-laki sebesar 5,31 poin dan IPM perempuan sebesar 6,16 poin pada periode 2010-2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa percepatan pembangunan manusia perempuan sedikit lebih cepat dibandingkan laki-laki.

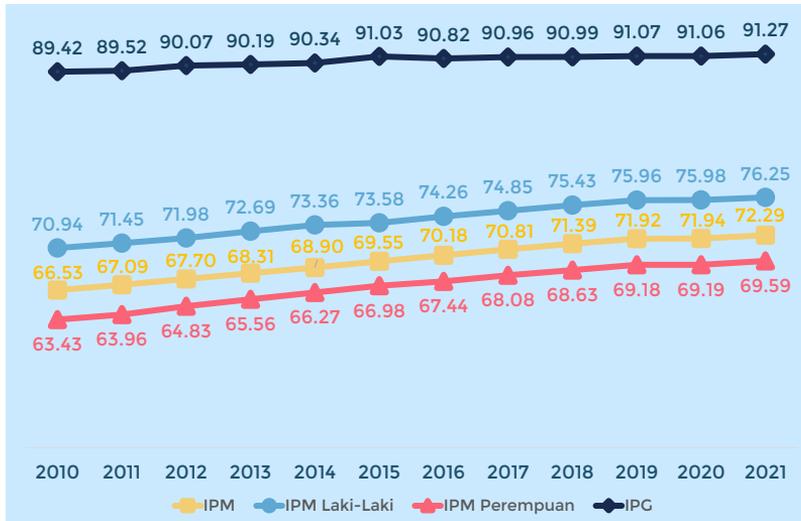
Pembangunan manusia ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun, kenyataannya perempuan selalu tertinggal dalam pencapaian kualitas penduduk. Ketertinggalan perempuan karena beberapa persoalan yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini bertentangan dengan amanah di dalam Undang-undang bahwa pembangunan adalah hak semua warga negara.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dengan pembangunan laki-laki. Kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki ditunjukkan dengan nilai rasio yang di bawah 100. IPG Indonesia pada tahun 2021 sebesar 91,27 mengalami peningkatan (0,21 poin) dibandingkan tahun 2020 sebesar 91,06. Peningkatan nilai IPG terjadi karena adanya percepatan kenaikan IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Walaupun IPG Indonesia pencapaiannya di atas 90 persen namun pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, dimana pembangunan laki-laki masuk dalam kategori “tinggi” karena pencapaiannya sudah melebihi 70 sedangkan pembangunan perempuan masih masuk kategori “sedang” karena pencapaiannya belum mencapai 70. Ketertinggalan pembangunan perempuan harus segera diatasi dengan melakukan pembangunan perempuan yang tepat sasaran. Peningkatan komponen-komponen pembangunan perempuan serta memperluas kesempatan pada perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya baik di

sektor domestik dan sektor publik diharapkan dapat mempercepat kenaikan pembangunan perempuan di masa yang akan datang.

Gambar 3.2

Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-Laki, IPM dan IPG, 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

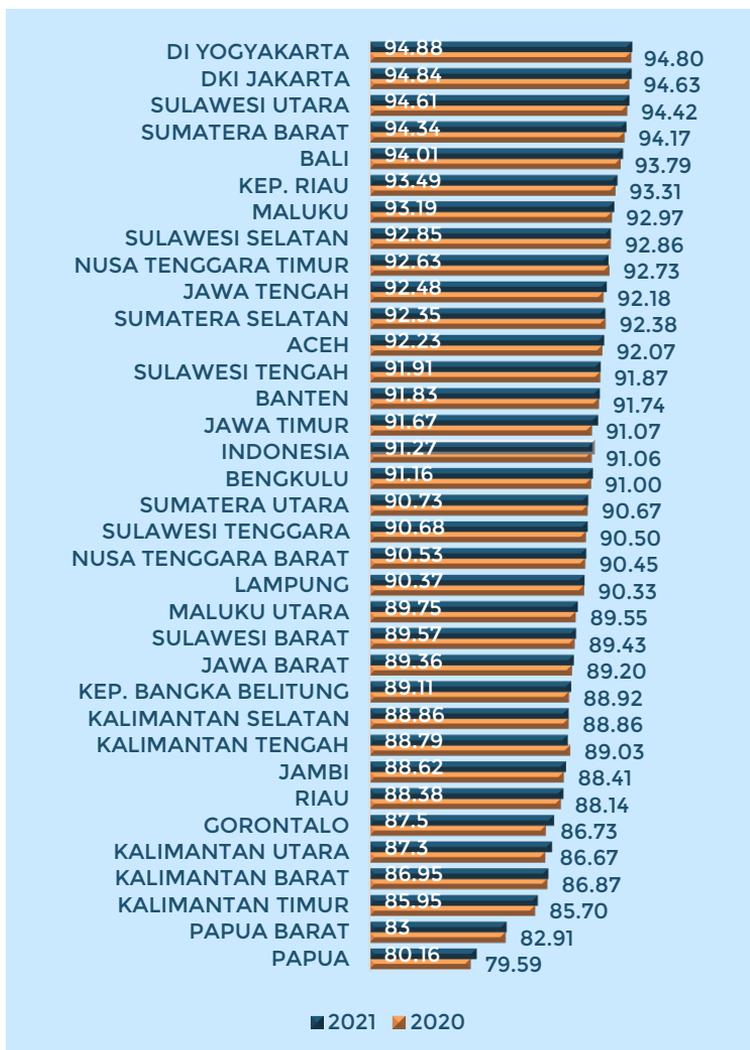
3.2. Pembangunan Gender Belum Merata antar Wilayah

Indonesia saat ini berada dalam tahapan bonus demografi, dimana kondisi struktur umur penduduk produktif cukup tinggi sehingga dependency ratio berada pada tingkat yang rendah. Manfaat optimal akan didapatkan dari bonus demografi bila sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah berada dalam kondisi optimal dari sisi kesehatan, kecerdasan dan pendidikan. Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia juga harus optimal dalam memanfaatkan kesehatannya, kecerdasannya dan pendidikannya, sehingga isu kesetaraan gender harus terintegrasi dalam proses pembangunan. Peningkatan peran perempuan berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) antara provinsi di Indonesia masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah-daerah timur Indonesia. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa nilai IPG tahun 2021 tertinggi terdapat di provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 94,88 sedangkan terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 80,16 atau

perbedaan sebesar 14,72 poin. Empat provinsi lain yang mempunyai nilai IPG tertinggi lainnya di Indonesia adalah DKI Jakarta (94,84), Sulawesi Utara (94,61), Sumatera Barat (94,34) dan Bali (94,01) sebaliknya empat provinsi lain yang mempunyai nilai IPG terendah yaitu Papua Barat (83), Kalimantan Timur (85,95), Kalimantan Barat (86,95) dan Kalimantan utara (87,3). Secara umum, seluruh provinsi sudah memiliki nilai IPG diatas 80,00 dimana 14 provinsi capaian dibawah 90,00 sedangkan 20 provinsi yang memiliki nilai IPG diatas 90,00 bahkan terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai IPG diatas 94,00 (Gambar 3.3).

Gambar 3.3 IPG Indonesia Menurut Provinsi, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2021, ketimpangan nilai IPG tertinggi dan terendah antara provinsi lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Ketimpangan nilai IPG tahun 2021 sebesar 14,72 poin dengan nilai IPG tertinggi terdapat pada provinsi Yogyakarta sebesar 94,88 sedangkan terendah terdapat pada provinsi Papua sebesar 80,16. Untuk tahun 2020, ketimpangan nilai IPG sebesar 15,21 poin dengan nilai IPG tertinggi pada provinsi Yogyakarta sebesar 94,80 dengan terendah terdapat pada provinsi Papua sebesar 79,59.

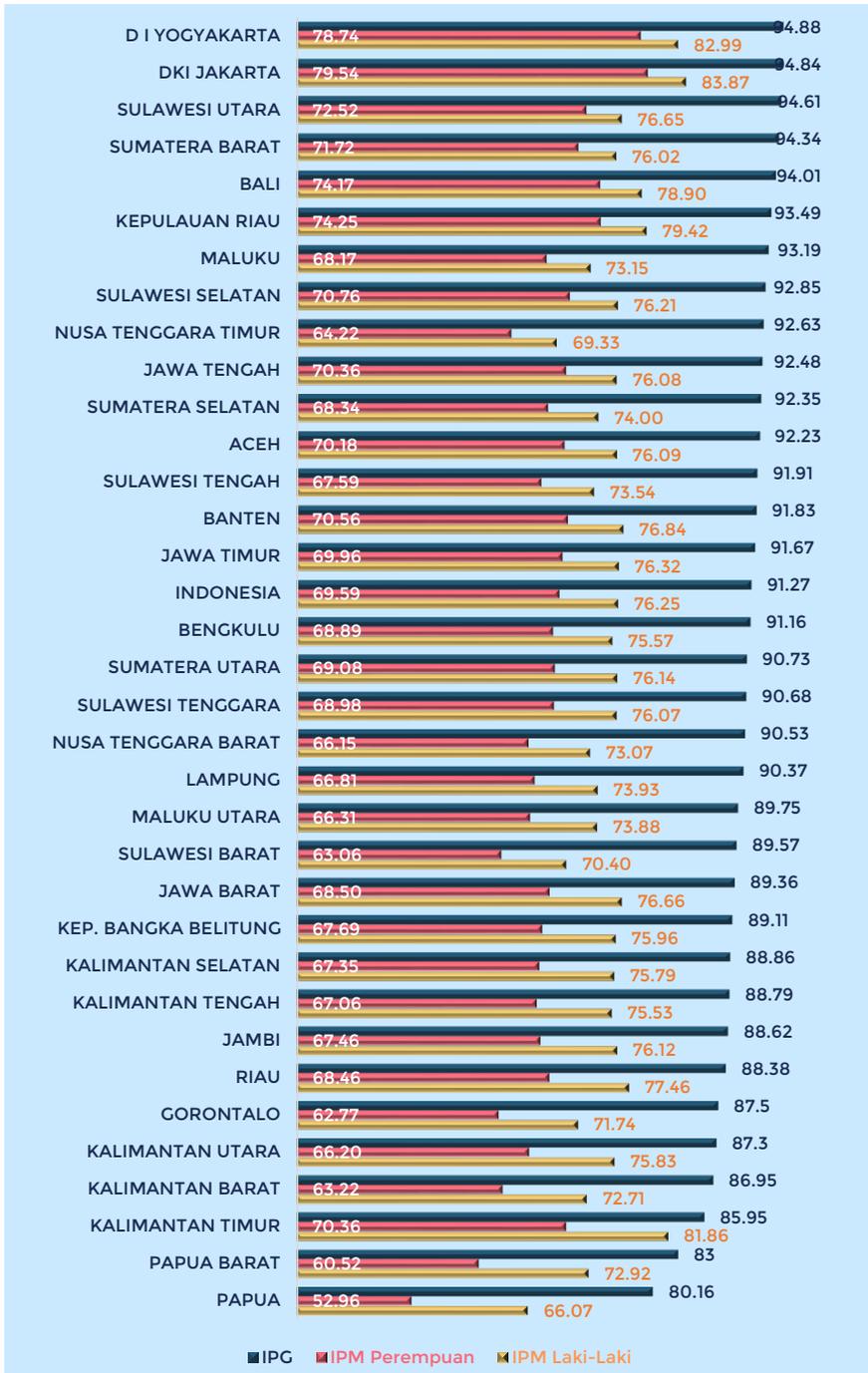
Selain ketimpangan capaian IPG tertinggi dan terendah antar wilayah, Gambar 3.3 juga menjelaskan bahwa hanya 4 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang nilai capaian IPG tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sedangkan provinsi lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi capaian IPG terdapat pada provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2020 capaiannya sebesar 86,73 menjadi 87,5 pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,77 poin, sedangkan provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang terbesar yaitu 0,24 poin sedangkan pada tahun 2021 capaiannya 88,79 menurun dari 89,03 pada tahun 2020.

Tingginya nilai IPG provinsi Yogyakarta dikarenakan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Yogyakarta yang sudah responsif gender antara lain bidang kesehatan terdapat jaminan persalinan (jampersal), sosialisasi reproduksi yang sasarannya adalah perempuan serta posyandu lansia. Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender sehingga mendukung penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2008. Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi yang masif terhadap orang tua yang memiliki anak usia sekolah terkait manfaat dan pentingnya pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan baik pada perempuan maupun laki-laki.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi memiliki jaminan di bidang pendidikan dan kesehatan yang cukup lengkap. Di bidang kesehatan, beberapa jaminan yang ditanggung oleh dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta antara lain jaminan layanan ambulans, jaminan layanan darah PMI, jaminan layanan kesehatan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang memiliki nilai IPG tertinggi di Indonesia telah membuat Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan ini sebagai landasan hukum dan penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggaran.

Gambar 3.4 IPM Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.4 melihat gambaran capaian IPG dan hubungannya dengan capaian IPM baik laki-laki dan perempuan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa semakin ke bawah atau semakin kecil angka IPG maka semakin besar perbedaan antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Ketimpangan terendah terjadi di provinsi Yogyakarta yang mempunyai nilai IPG tertinggi dengan nilai IPM laki-laki sebesar 82,99 dan nilai IPM perempuan sebesar 78,74 sedangkan ketimpangan tertinggi terdapat di provinsi Papua yang memiliki capaian IPG terendah memiliki nilai IPM laki-laki sebesar 66,07 dan nilai IPM perempuan sebesar 52,96.

Bila sedikit diulas pada pencapaian pembangunan perempuan (IPM perempuan) menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2021 belum ada yang masuk pada kategori “sangat tinggi” yaitu nilai capaian lebih dari 80, sedangkan pada laki-laki sudah ada 3 provinsi yang capaiannya tergolong “sangat tinggi”. Capaian pembangunan perempuan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 1 provinsi berkategori “rendah” (<60), 22 provinsi berkategori “sedang” (60-69), 11 provinsi berkategori “tinggi” (70-79). Sedangkan capaian pembangunan laki-laki secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: tidak ada provinsi yang berkategori “rendah”, hanya 2 provinsi berkategori “sedang”, 29 provinsi berkategori “tinggi” dan 3 provinsi berkategori “sangat tinggi”. Pencapaian pembangunan perempuan memang sebagian besar masih berkategori “sedang”, sedangkan laki-laki sebagian besar sudah berkategori “tinggi”. Walaupun demikian, pada tahun 2021 terdapat 2 provinsi yaitu Yogyakarta dan DKI Jakarta yang capaian pembangunan perempuannya sudah bersiap untuk masuk ke dalam kategori “sangat tinggi”, yaitu angka capaiannya sudah mendekati angka 80. Program-program yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender kemudian diikuti oleh monitoring dan evaluasi terhadap program-program tersebut dapat meningkatkan pencapaian kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan pada pembangunan perempuan.

Di tahun 2021, 15 provinsi mempunyai nilai IPG diatas angka nasional (91,27). Selain itu, 9 provinsi mempunyai kategori capaian sama antara laki-laki dan perempuan dan 6 provinsi memiliki kategori capaian yang berbeda. Delapan provinsi yang memiliki kategori yang sama (Banten, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara) yaitu sama-sama masuk kategori “tinggi” dan provinsi Nusa Tenggara Timur masuk kategori sedang. Sedangkan 6 provinsi yang memiliki kategori yang berbeda terdiri dari 2 wilayah (Yogyakarta dan DKI Jakarta) capaian pembangunan perempuan berkategori “tinggi” sedangkan laki-laki berkategori “sangat tinggi” sedangkan 4 provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Maluku) pembangunan perempuan berkategori “sedang” sedangkan pembangunan laki-laki berkategori “tinggi”.

19 provinsi yang memiliki nilai IPG dibawah angka nasional menunjukkan adanya perbedaan pengkategorian antara pembangunan

perempuan dan laki-laki. Rincian perbedaannya antara lain 17 provinsi mempunyai pembangunan perempuan berkategori “sedang” dan pembangunan laki-laki berkategori “tinggi”, 1 provinsi (Kalimantan Timur) pembangunan perempuannya berkategori “tinggi” tetapi pembangunan laki-laki berkategori “sangat tinggi”, dan 1 provinsi (Papua) pembangunan perempuan berkategori “rendah” sedangkan pembangunan laki-laki berkategori “sedang”.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan tertinggi ketiga di Indonesia, namun berlawanan dengan posisi capaian IPG yang berada pada urutan terendah ketiga. Beberapa penyebabnya adalah program, kegiatan, dan penganggaran yang belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan terkait isu gender belum maksimal di kalangan pelaksana pembangunan.

Gambar 3.5 Jumlah Provinsi Menurut Kelompok Kategori IPM, Jenis Kelamin dan Pulau, 2021



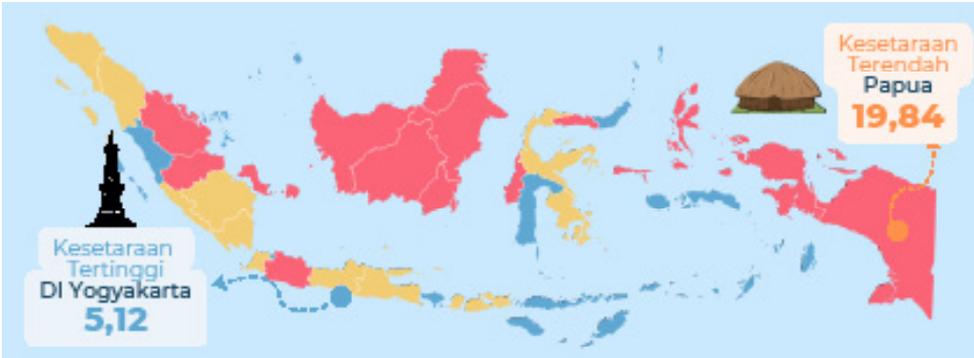
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.5 memberikan gambaran terkait analisis spasial lainnya dalam pengkategorian nilai pembangunan baik perempuan dan laki-laki menurut kelompok pulau yang ada di Indonesia. Secara umum, terlihat ketimpangan dalam pengkategorian yaitu pada laki-laki terdapat kategori “sangat tinggi” dan tidak adanya kategori “rendah” sedangkan untuk perempuan sebaliknya karena tidak ada kategori “sangat tinggi” dan terdapat kategori “rendah”. Pada provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera dan Sulawesi, pembangunan laki-laki sudah semua masuk ke dalam kategori “tinggi”, tetapi pembangunan perempuan justru hanya sebagian kecil masuk kategori “tinggi” yaitu sebagian provinsinya masih didominasi oleh kategori “sedang”. Ketimpangan pengkategorian antara laki-laki dan perempuan juga terjadi di pulau-pulau lain di Indonesia. Percepatan terhadap pembangunan perempuan diharapkan terjadi di semua wilayah di Indonesia agar pembangunan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah di pulau Jawa yang berkategori sedang dalam pengkategorian IPM perempuan. Salah satu kendala dalam pencapaian kesetaraan gender di Provinsi Jawa Barat terkait kuantitas dan kualitas penduduk yang cukup besar adalah 18 persen penduduk perempuan di Indonesia tinggal di Jawa Barat. Namun, provinsi Jawa Barat terdapat salah satu program penting terhadap upaya peningkatan kualitas hidup perempuan yaitu melalui program “Sekolah Perempuan Mencapai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta)” pada akhir tahun 2018. Program ini dirancang sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga, nilai ekonomi dan perlindungan anak. Selain itu program tersebut adalah upaya mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.

Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh UNDP, Gambar 3.6 menunjukkan bahwa kesetaraan gender terendah berada di Provinsi Papua (19,84) sedangkan kesetaraan gender tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta (5,12). Proporsi terbanyak provinsi di Indonesia berada pada kategori kesetaraan yang masih rendah yaitu sebanyak 14 provinsi antara lain Riau, Jambi, Kep, Babel, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Papua dan belum ada satu provinsi pun yang masuk ke dalam kategori kesetaraan tinggi dan menengah tinggi di Indonesia. Sembilan provinsi di Indonesia tergolong kesetaraan menengah yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku. Sebelas provinsi berkategori kesetaraan menengah rendah yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.

Gambar 3.6 Capaian IPG menurut Provinsi, 2021



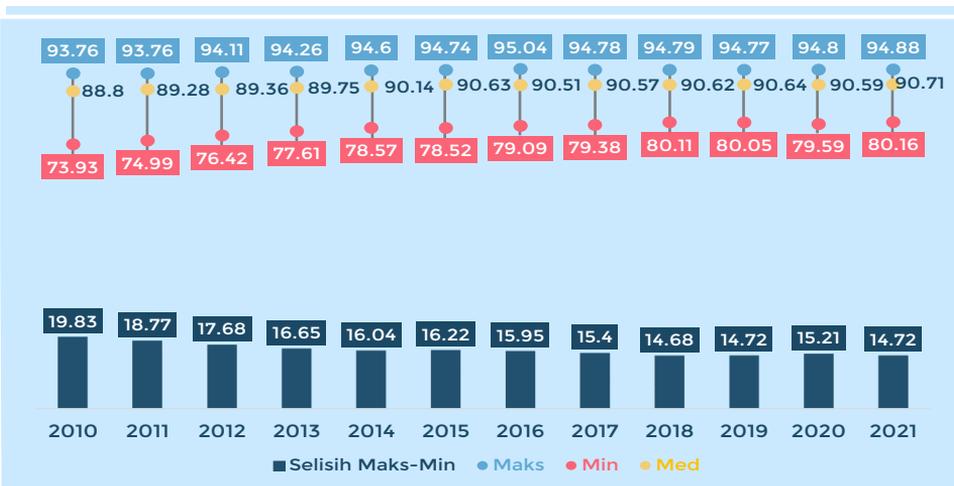
Keterangan:

- 0** Provinsi Kesetaraan Tinggi ($|IPG-100| \leq 2,5$)
- 0** Provinsi Kesetaraan Menengah Tinggi ($2,5 < |IPG-100| \leq 5$)
- 9** Provinsi Kesetaraan Menengah ($5 < |IPG-100| \leq 7,5$)
- 11** Provinsi Kesetaraan Menengah Rendah ($7,5 < |IPG-100| \leq 10$)
- 14** Provinsi Kesetaraan Rendah ($|IPG-100| > 10$)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Disparitas capaian IPG menurut provinsi dari tahun 2010 hingga 2021 berkisar pada 14 hingga 19 persen. Kesenjangan capaian IPG provinsi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah di tahun 2018.

Gambar 3.7 Disparitas capaian IPG provinsi tertinggi dan terendah, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2.1. Pembangunan Gender Belum Merata di Level Kabupaten/Kota

Gender adalah sebuah konstruksi sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat spesifik, kontekstual dan situasional menurut tempat, waktu, suku bangsa, budaya, status sosial, agama, ideologi, politik dan ekonomi. Indonesia memiliki beberapa macam suku bangsa, budaya, status sosial, agama yang berbeda-beda dengan konstruksi sosial-budaya yang berbeda pula. Dengan demikian, selain menganalisis ketimpangan pembangunan berbasis gender di tingkat provinsi, analisis wilayah tingkat kabupaten/kota juga dapat diperlukan untuk menggambarkan pembangunan gender di Indonesia.

Tabel 3.1

Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai IPG Tertinggi dan Terendah, 2021

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	IPG
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi			
1.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	99,09
2.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	99,07
3.	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	98,99
4.	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	98,95
5.	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	98,89
6.	Sumatera Barat	Kota Pariaman	98,62
7.	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	98,60
8.	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	98,56
9.	Maluku	Seram Bagian Barat	98,53
10.	Maluku	Maluku Tengah	98,41
Terendah			
1.	Papua	Asmat	53,72
2.	Papua	Tolikara	60,18
3.	Papua Barat	Manokwari Selatan	64,37
4.	Papua	Puncak Jaya	65,69
5.	Papua	Paniai	68,25
6.	Papua Barat	Tambrau	68,28
7.	Maluku Utara	Pulau Morotai	69,75
8.	Papua	Deiyai	70,15
9.	Papua	Waropen	70,35
10.	Kalimantan Timur	Paser	71,19

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia terdapat gambaran bahwa IPG tertinggi terdapat pada Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) sebesar 99,09 sedangkan nilai IPG terendah terdapat pada Kabupaten Asmat di Papua sebesar 53,72 atau terjadi ketimpangan sebesar 45,37 poin. Tabel 3.1 menjelaskan 10 wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai nilai IPG tertinggi dan terendah. Dari 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai IPG tertinggi, 50 persen berada di pulau Sumatera. Selain itu, dari 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai IPG terendah, 60 persen berada di provinsi Papua.

Beberapa wilayah kabupaten/kota yang memiliki nilai IPG tertinggi terdapat di provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini terkenal dengan budaya matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan garis ibu. Beberapa literatur menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau cukup tinggi. Dalam sistem sosial budaya Minangkabau, perempuan diberikan hak penguasaan sumber-sumber ekonomi yang vital seperti sawah, ladang, dan rumah. Dalam sistem matrilineal, perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan. Walaupun perempuan tidak berperan aktif dalam pengambilan keputusan adat, namun kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan “Bundo Kanduang” yang memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan yang ditentukan oleh kaum laki-laki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu) dan penghulu (kepala suku).

Tabel 3.2

Nilai IPG Tertinggi dan Terendah Kabupaten/Kota Menurut Provinsi, 2020-2021

No	Provinsi	2020			2021		
		Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang	Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang
1	Aceh	97,35	77,97	19,38	97,26	78,27	18,99
2	Sumatera Utara	99,02	79,37	19,65	98,89	79,63	19,26
3	Sumatera Barat	98,89	88,31	10,58	98,99	88,32	10,67
4	Riau	93,01	81,88	11,13	93,27	82,12	11,15
5	Jambi	94,31	80,08	14,23	94,42	81,06	13,36
6	Sumatera Selatan	99,13	82,9	16,23	99,09	82,63	16,46
7	Bengkulu	95,8	83,88	11,92	95,77	84,03	11,74
8	Lampung	95,55	84,17	11,38	95,89	84,37	11,52
9	Bangka Belitung	95,55	83,81	11,74	93,25	84,31	8,94
10	Kepulauan Riau	96,79	89,25	7,54	97,14	89,73	7,41

No	Provinsi	2020			2021		
		Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang	Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang
11	DKI Jakarta	96,14	93,39	2,75	96,28	93,39	2,89
12	Jawa Barat	95,18	79,06	16,12	95,18	79,07	16,11
13	Jawa Tengah	96,84	83,88	12,96	96,89	84,59	12,3
14	D I Yogyakarta	98,16	84,73	13,43	98,32	85,31	13,01
15	Jawa Timur	97,46	80,81	16,65	97,36	81,18	16,18
16	Banten	95,06	79,81	15,25	94,72	79,87	14,85
17	Bali	96,77	88,93	7,84	96,88	88,96	7,92
18	Nusa Tenggara Barat	96,41	85,44	10,97	96,41	85,54	10,87
19	Nusa Tenggara Timur	98,97	84,62	14,35	98,56	84,08	14,48
20	Kalimantan Barat	98,97	80,1	18,87	94,01	80,15	13,86
21	Kalimantan Tengah	95,35	83,56	11,79	95,32	83,55	11,77
22	Kalimantan Selatan	96,5	84,08	12,42	96,46	84,15	12,31
23	Kalimantan Timur	89,65	71,15	18,5	89,83	71,19	18,64
24	Kalimantan Utara	91,9	77,57	14,33	92	78,2	13,8
25	Sulawesi Utara	98,94	79,7	19,24	98,95	80,09	18,86
26	Sulawesi Tengah	97,96	84,89	13,07	97,14	89,73	7,41
27	Sulawesi Selatan	98,02	86,83	11,19	97,81	86,8	11,01
28	Sulawesi Tenggara	98,37	72,25	26,12	99,07	72,56	26,51
29	Corontalo	91,36	81,15	10,21	91,4	81,17	10,23
30	Sulawesi Barat	97,79	84,92	12,87	98,23	85,25	12,98
31	Maluku	98,44	86,39	12,05	98,53	86,49	12,04
32	Maluku Utara	95,47	69,75	25,72	95,84	69,75	26,09
33	Papua Barat	91,62	63,88	27,74	91,63	64,37	27,26
34	Papua	94,35	53,59	40,76	94,65	53,72	40,93

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain ketimpangan kabupaten/kota tertinggi dan terendah di seluruh wilayah di Indonesia, Tabel 3.2 juga dapat menggambarkan disparitas capaian IPG tertinggi dan terendah antara kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan variasi nilai IPG kabupaten/kota terkecil dengan rentang nilainya sekitar 2,89 disusul oleh provinsi Kepulauan Riau (7,41) dan Bali (7,92). Sedangkan provinsi yang memiliki variasi nilai IPG kabupaten/kota tertinggi terdapat di provinsi Papua yaitu Kota Jayapura mempunyai

nilai IPG 94,65 sedangkan Kabupaten Asmat memiliki nilai IPG 53,72 atau memiliki rentang sebesar 40,93 poin. Selain provinsi Papua, provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tenggara juga memiliki disparitas tertinggi di Indonesia. Bila dilihat secara keseluruhan maka nilai IPG tertinggi kabupaten/kota di masing-masing provinsi sebagian besar sudah diatas 90 hanya provinsi Kalimantan Timur yang nilainya belum mencapai 90. Sebaliknya, nilai IPG terendah kabupaten/kota di masing-masing provinsi antara 53,72 sampai dengan 93,39.

Tabel 3.3

Jumlah Kabupaten/Kota menurut Provinsi dan Kelompok Nilai IPG, 2021

No.	Provinsi	Kelompok Nilai IPG					Jumlah
		<60	60-69	70-79	80-89	>90	
1	Aceh	0	0	1	8	14	23
2	Sumatera Utara	0	0	1	10	22	33
3	Sumatera Barat	0	0	0	2	17	19
4	Riau	0	0	0	8	4	12
5	Jambi	0	0	0	7	4	11
6	Sumatera Selatan	0	0	0	4	13	17
7	Bengkulu	0	0	0	4	6	10
8	Lampung	0	0	0	9	6	15
9	Bangka Belitung	0	0	0	4	3	7
10	Kepulauan Riau	0	0	0	1	6	7
11	Dki Jakarta	0	0	0	0	6	6
12	Jawa Barat	0	0	1	14	12	27
13	Jawa Tengah	0	0	0	8	27	35
14	D I Yogyakarta	0	0	0	1	4	5
15	Jawa Timur	0	0	0	14	24	38
16	Banten	0	0	1	2	5	8
17	Bali	0	0	0	1	8	9
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	3	7	10
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6	16	22
20	Kalimantan Barat	0	0	0	12	2	14
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	6	8	14
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	7	6	13
23	Kalimantan Timur	0	0	3	7	0	10

No.	Provinsi	Kelompok Nilai IPG					Jumlah
		<60	60-69	70-79	80-89	>90	
24	Kalimantan Utara	0	0	1	3	1	5
25	Sulawesi Utara	0	0	0	5	10	15
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	3	10	13
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	8	16	24
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	9	7	17
29	Gorontalo	0	0	0	5	1	6
30	Sulawesi Barat	0	0	0	2	4	6
31	Maluku	0	0	0	5	6	11
32	Maluku Utara	0	1	0	6	3	10
33	Papua Barat	0	2	4	6	1	13
34	Papua	1	3	7	13	5	29
35	Indonesia	1	6	20	203	284	514

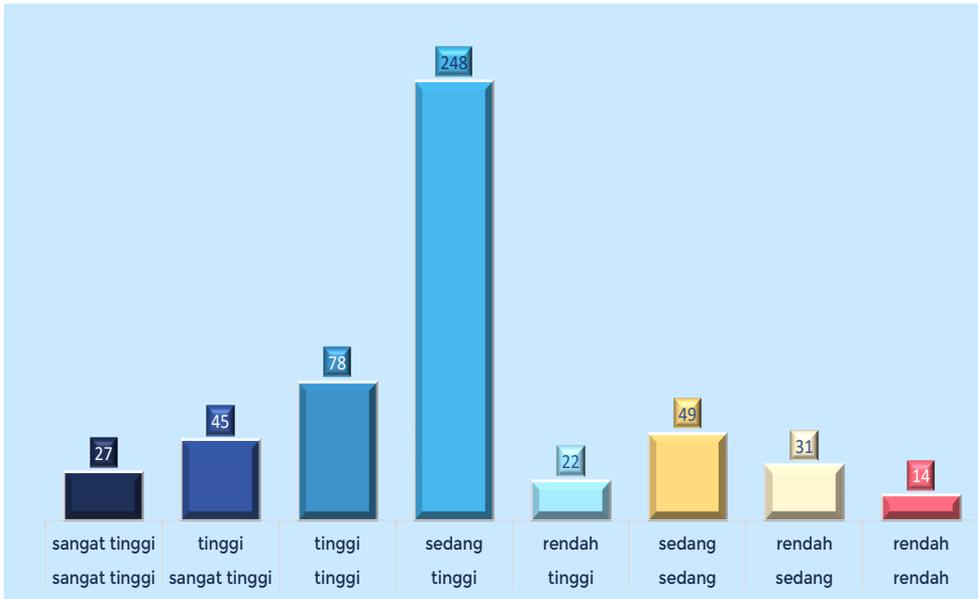
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain rentang nilai antara wilayah yang mempunyai IPG tertinggi dan terendah di masing-masing provinsi, Tabel 3.3 menunjukkan jumlah kabupaten/kota menurut kelompok nilai IPG. Secara umum, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 1 kabupaten/kota mempunyai nilai IPG kurang dari 60; 6 kabupaten/kota mempunyai nilai IPG antara 60-69; 20 kabupaten/kota mempunyai nilai antara 70-79; 203 kabupaten/kota antara 80-89; dan 284 kabupaten/kota mempunyai nilai lebih dari 90. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa 94,7 persen kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah mempunyai nilai IPG diatas 80.

Di provinsi Banten dan Jawa Barat masih ada 1 kabupaten/kotanya yang mempunyai nilai belum mencapai 80, sedangkan wilayah lain di pulau Jawa sudah mencapai minimal angka 80. Begitu juga di pulau Sumatera, hanya di provinsi Aceh dan Sumatera Utara (masing-masing 1 kabupaten/kota) yang pencapaian nilainya belum 80. Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua menunjukkan masih adanya Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPG dibawah 80 bahkan di provinsi Papua ada 1 kabupaten yang di bawah 60.

Gambar 3.8

Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Pasangan Kelompok Kategori Capaian Pembangunan Laki-laki dan Perempuan, 2021

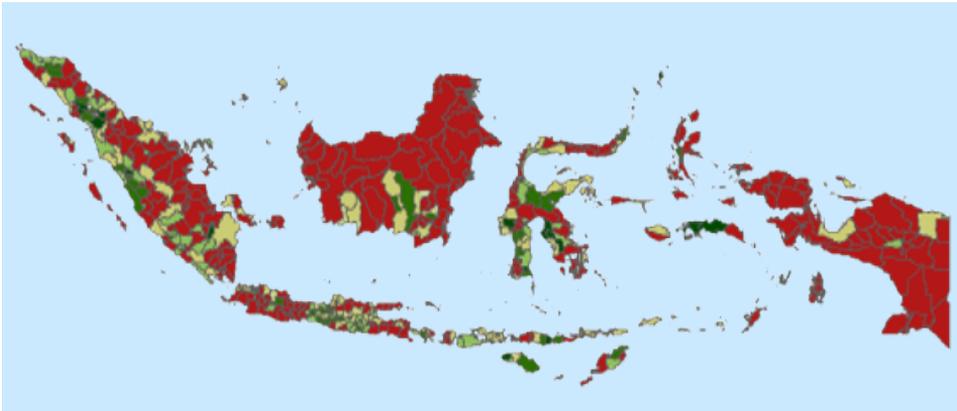


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.8 menunjukkan pasangan pengkategorian capaian pembangunan laki-laki dan perempuan. Besarnya kotak menggambarkan jumlah kabupaten/kota pada suatu kelompok kategori. Semakin besar gambar kotak pada suatu kelompok kategori dibandingkan lainnya menggambarkan jumlah kabupaten/kota pada kelompok kategori tersebut lebih banyak dibandingkan kelompok kategori lainnya. Terlihat pasangan kategori “tinggi” pada pembangunan laki-laki dan “sedang” pada pembangunan perempuan mendominasi (sebanyak 248 kabupaten/kota), sebaliknya jumlah pasangan kategori “rendah” untuk pembangunan laki-laki dan “rendah” untuk pembangunan perempuan paling sedikit (sebanyak 14 kabupaten/kota). Secara umum sebanyak 168 kabupaten/kota tidak ada perbedaan kategori dalam pencapaian baik pembangunan laki-laki maupun perempuan, 324 kabupaten/kota memiliki perbedaan kategori satu tingkat (kategori “sangat tinggi”-“tinggi”, “tinggi”-“sedang” dan “sedang”-“rendah”) dan 22 kabupaten/kota memiliki perbedaan kategori 2 tingkat (“tinggi”-“rendah”).

Gambar 3.9

Capaian IPG menurut Kab/Kota, 2021



Keterangan:

25 Kab/Kota	Kesetaraan Tinggi ($ \text{IPG}-100 \leq 2,5$)
77 Kab/Kota	Kesetaraan Menengah Tinggi ($2,5 < \text{IPG}-100 \leq 5$)
83 Kab/Kota	Kesetaraan Menengah ($5 < \text{IPG}-100 \leq 7,5$)
99 Kab/Kota	Kesetaraan Menengah Rendah ($7,5 < \text{IPG}-100 \leq 10$)
230 Kab/Kota	Kesetaraan Rendah ($ \text{IPG}-100 > 10$)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh UNDP, Gambar 3.9 menunjukkan proporsi terbanyak kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori kesetaraan gender rendah sebanyak 230 kab/kota. Sedangkan, kesetaraan gender tinggi sudah ada di 25 kab/kota di Indonesia.

Ketidaksetaraan gender bisa membatasi potensi-potensi yang seharusnya dapat dikembangkan, sehingga salah satu upaya pemerintah untuk berkomitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan gender adalah ikut menandatangani kesepakatan global dalam Sustainable Development Goal (SDG) tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Komitmen pemerintah ini tentunya dapat mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi, praktek-praktek yang berbahaya terhadap perempuan dan tentunya menjamin akses dan partisipasi sama dengan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan

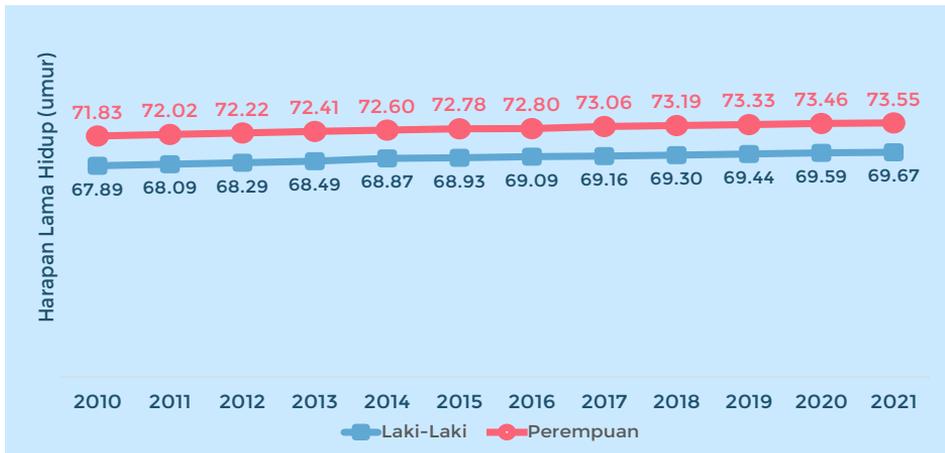
Pranarka, 1996). Beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan menurut Zakiyah (2010) antara lain: membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap rumah tangga yang sangat bergantung pada suami, memberikan beragam keterampilan kaum perempuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan memberikan kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Pada pembukaan G20 *Women's Empowerment Kick Off Meeting* tahun 2020 disampaikan bahwa ada 3 syarat dalam mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia yaitu pemerataan infrastruktur digital, literasi digital dan pelatihan kewirausahaan bagi kaum perempuan di pelosok tanah air. Pemerataan infrastruktur digital salah satunya adalah peningkatan akses perempuan menggunakan jasa keuangan dalam ekonomi digital, sedangkan untuk literasi digital adalah memanfaatkan teknologi digital dengan baik dalam kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Pelatihan kewirausahaan dilakukan dengan cara meningkatkan dan memperbanyak pelatihan sehingga perempuan dapat meningkatkan kualitas dirinya.

3.2.2 Perempuan Berusia Lebih Panjang

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan terkait erat dengan perempuan. Kondisi bidang kesehatan di Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga dan kesehatan perempuan. Sampai saat ini masih beredar pandangan masyarakat bahwa tanggung jawab pemeliharaan kesehatan keluarga ada pada pundak perempuan. Hal ini terkait erat dengan fungsi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, masa menyusui dan pemeliharaan anak sampai anak mandiri.

Umur harapan hidup adalah tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (sirusa.bps.go.id). Kegunaan dari indikator ini adalah mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan indikator umur harapan hidup diikuti oleh berbagai macam program di bidang kesehatan dan program sosial lainnya antara lain gizi dan kalori, lingkungan dan kemiskinan sehingga angka harapan hidup bisa juga menggambarkan seluruh aspek tidak hanya bidang kesehatan saja.

Gambar 3.10**Umur Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.10 menunjukkan perkembangan umur harapan hidup (UHH) di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Digambarkan bahwa garis UHH perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki menjelaskan bahwa perempuan memiliki harapan lebih berumur panjang dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, UHH untuk perempuan adalah 73,55 tahun sedangkan laki-laki adalah 69,67 tahun. Perkembangan dari tahun 2010, di tahun 2021 terjadi peningkatan UHH sebanyak 1,72 tahun untuk perempuan sedangkan 1,78 tahun untuk laki-laki.

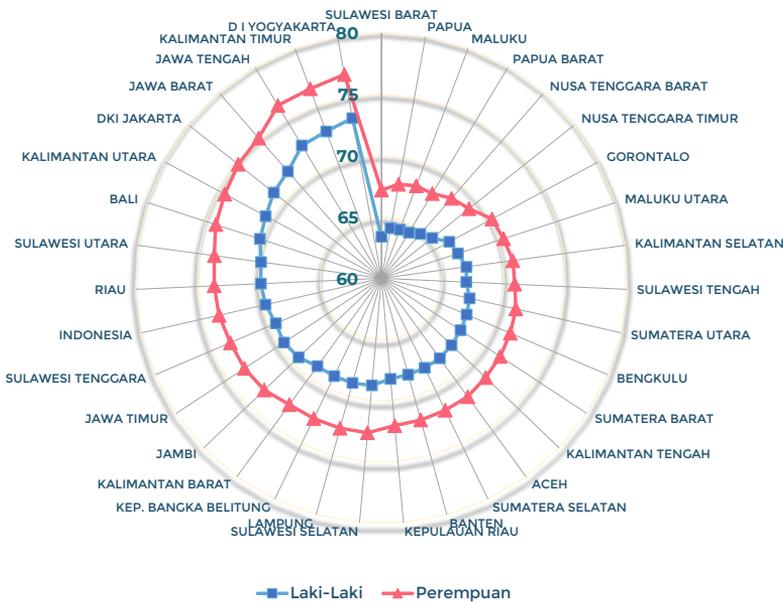
Menurut WHO, tingkat kelangsungan hidup laki-laki yang lebih rendah daripada perempuan mencerminkan beberapa faktor seperti: (1) tingkat paparan pekerjaan yang lebih tinggi terhadap bahaya fisik dan kimia; (2) perilaku yang berkaitan dengan norma laki-laki dan (3) paradigma perilaku kesehatan terhadap maskulinitas, seperti laki-laki yang cenderung tidak mengunjungi dokter saat sakit.

Umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di semua wilayah Indonesia. Gambar 3.11 menunjukkan ketimpangan antara wilayah terhadap pencapaian UHH baik pada laki-laki maupun perempuan. UHH perempuan di sebagian besar wilayah mencapai nilai antara 70-75 tahun. Beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat mencapai nilai di bawah 70 tahun sedangkan wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Timur mencapai nilai lebih dari 75 tahun. Sedangkan, untuk laki-laki sebagian besar wilayah mencapai nilai UHH sebesar 65-70 tahun, sedangkan kurang dari 65 tahun dicapai

oleh wilayah Sulawesi Barat, Papua, Maluku, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat dan melebihi dari 70 tahun dicapai oleh Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta.

Gambar 3.11

Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai UHH tertinggi di Indonesia baik pada laki-laki dan perempuan dan posisi ini tidak berubah dalam kurun waktu 1 dekade ke belakang. Tingginya UHH di Yogyakarta didukung oleh komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas kesehatan penduduk baik dimulai dari usia bayi, balita, perempuan sampai dengan lansia. Kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi serta berkurangnya angka kesakitan warga yang sakit merupakan salah satu komitmen pemerintah Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Yogyakarta. Selain itu, budaya masyarakat Yogyakarta seperti menanamkan budaya penerimaan, kesabaran dan kebersyukuran membuat peningkatan kesejahteraan psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang.

Disamping itu, di bidang kesehatan, pemerintah Jawa Barat mempunyai program Layad Rawat 119 yang bertujuan untuk melayani masyarakat tidak mampu dalam mengakses fasilitas kesehatan. Sedangkan, pemerintah Jawa Tengah mempunyai program seperti memperhatikan kesehatan ibu hamil, stunting serta partisipasi masyarakat yang berbentuk pengamanan sosial dan keamanan serta jejaring ekonomi. Selain itu, provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa program bidang kesehatan seperti Jaminan pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD), pemeriksaan jaminan kesehatan yang lengkap bagi masyarakat tidak mampu, jaminan darah bebas dari HIV dan Hepatitis serta jaminan kesehatan bagi korban kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa UHH perempuan lebih tinggi laki-laki baik secara nasional maupun wilayah. Ketimpangan antara wilayah juga menjadi satu fakta di dalam pencapaian umur harapan hidup di Indonesia. Pemerataan pembangunan terutama di bidang kesehatan di semua wilayah Indonesia serta sosialisasi GERMAS (Gerakan masyarakat hidup sehat) perlu dilakukan lebih intens di seluruh Indonesia. Germas merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Germas meliputi (1) melakukan aktifitas fisik; (2) Budayakan makan buah dan sayur tiap hari; (3) Tidak Merokok; (4) Tidak mengonsumsi minuman beralkohol; (5) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; (6) Menjaga kebersihan lingkungan; dan (7) Menggunakan jamban sehat.

Tabel 3.4 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai Umur Harapan Hidup (UHH) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/ Kota	Provinsi	UHH	Kabupaten/ kota	Provinsi	UHH
LAKI-LAKI						
1	Sukoharjo	Jawa Tengah	75,99	Nduga	Papua	53,71
2	Karanganyar	Jawa Tengah	75,81	Mamberamo Raya	Papua	56,29
3	Kota Semarang	Jawa Tengah	75,79	Asmat	Papua	56,83
4	Kota Surakarta	Jawa Tengah	75,57	Seram Bagian Timur	Maluku	57,78
5	Kota Salatiga	Jawa Tengah	75,50	Jayawijaya	Papua	58,13
6	Kota Magelang	Jawa Tengah	75,11	Tambrau	Papua Barat	58,43

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/ Kota	Provinsi	UHH	Kabupaten/ kota	Provinsi	UHH
7	Klaten	Jawa Tengah	75,10	Teluk Wondama	Papua Barat	58,46
8	Kudus	Jawa Tengah	74,87	Boven Digoel	Papua	58,53
9	Wonogiri	Jawa Tengah	74,44	Sabu Raijua	NTT	58,82
10	Pati	Jawa Tengah	74,28	Teluk Bintuni	Papua Barat	59,21
PEREMPUAN						
1	Sukoharjo	Jawa Tengah	79,72	Nduga	Papua	57,03
2	Kota Salatiga	Jawa Tengah	79,44	Mamberamo Raya	Papua	59,69
3	Karanganyar	Jawa Tengah	79,43	Asmat	Papua	60,28
4	Kota Semarang	Jawa Tengah	79,43	Seram Bagian Timur	Maluku	61,34
5	Kota Surakarta	Jawa Tengah	79,23	Jayawijaya	Papua	61,63
6	Kota Magelang	Jawa Tengah	78,82	Tambrau	Papua Barat	61,96
7	Klaten	Jawa Tengah	78,80	Teluk Wondama	Papua Barat	62,03
8	Kudus	Jawa Tengah	78,66	Boven Digoel	Papua	62,07
9	Wonogiri	Jawa Tengah	78,13	Sabu Raijua	NTT	62,45
10	Pati	Jawa Tengah	78,10	Teluk Bintuni	Papua Barat	62,81

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Tabel 3.4 menjelaskan bahwa UHH laki-laki tertinggi terdapat di Kabupaten Sukoharjo sebesar 75,99 tahun sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 53,71 tahun sehingga rentang nilai UHH tertinggi dan terendah sebesar 22,28 tahun. Dari 10 Kabupaten/kota yang memiliki UHH tertinggi semuanya terdapat di provinsi Jawa tengah sebaliknya 10 Kabupaten/kota yang memiliki UHH terendah 5 kabupaten berada di provinsi Papua, 3 kabupaten berada di provinsi Papua barat dan masing-masing 1 kabupaten yang berada di provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu program bidang kesehatan di kabupaten Sukoharjo adalah keberadaan posyandu yang tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk lansia dan sudah banyak tersebar di desa dan kelurahannya.

Selain itu, pemerintah kabupaten Sukoharjo juga melakukan pelatihan terhadap kader posyandu terkait perkembangan bidang kesehatan antara lain kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan posyandu sampai dengan penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS.

Pola UHH perempuan sama dengan laki-laki yaitu nilai tertinggi juga terdapat di Kabupaten Sukoharjo sebesar 79,72 tahun sedangkan nilai terendah terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 57,03 tahun atau mempunyai rentang sebesar 22,69 tahun. Pola penyebaran 10 kabupaten/kota baik yang memiliki UHH tertinggi maupun terendah juga sama dengan laki-laki. Hal yang membedakan adalah capaian UHH perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. UHH laki-laki sebesar 75,99 sedangkan perempuan sebesar 79,72 di Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga dengan Kabupaten Pati, UHH laki-laki sebesar 74,28 tahun lebih rendah dibandingkan perempuan sebesar 78,10 tahun. Begitu pula dengan UHH terendah menunjukkan hal yang sama yaitu UHH laki-laki di Kabupaten Nduga sebesar 53,71 tahun sedangkan perempuan sebesar 57,03 tahun. Demikian juga untuk Kabupaten Teluk Bintuni, UHH laki-laki sebesar 59,21 tahun dan perempuan sebesar 62,81 tahun.

Gambar 3.12 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur Harapan Hidup (UHH) dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah kabupaten/kota menurut kelompok UHH dan jenis kelamin yang ditunjukkan pada Gambar 3.12 mempunyai pola yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Pada laki-laki jumlah kabupaten/kota terbanyak terdapat pada kelompok UHH 65-69 tahun yaitu sebanyak 273 kabupaten/kota sedangkan pada perempuan terbanyak pada kelompok umur ≥ 70 tahun yaitu sebanyak 360 kabupaten/kota. Dari Gambar 3.12 terlihat bahwa 105 kabupaten/kota memiliki UHH laki-laki dibawah 65 tahun sedangkan perempuan hanya 19 Kabupaten/kota.

Perbedaan atau disparitas kualitas kesehatan antara wilayah di Indonesia cukup besar. Beberapa hal penyebabnya antara lain ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan antara wilayah yang berbeda. Beberapa wilayah mempunyai rasio tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan lebih baik. Hal lain seperti jumlah rumah sakit, total tempat tidur tersedia serta rasio tempat tidur dapat menjadi indikator kesenjangan fasilitas kesehatan.

3.2.3 Tidak ada Perbedaan Peluang Sekolah antara Laki-laki dan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia menurut pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang karena pendidikan adalah peluang untuk memperbaiki diri. Beberapa manfaat pendidikan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatnya pendapatan maupun derajat kesehatan serta mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan.

Beberapa tantangan dalam sektor pendidikan adalah pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Pendidikan perempuan mempunyai efek eksternalitas positif atas kuantitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara/wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pembangunan di bidang pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk usia 7 tahun keatas.

Gambar 3.13 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021



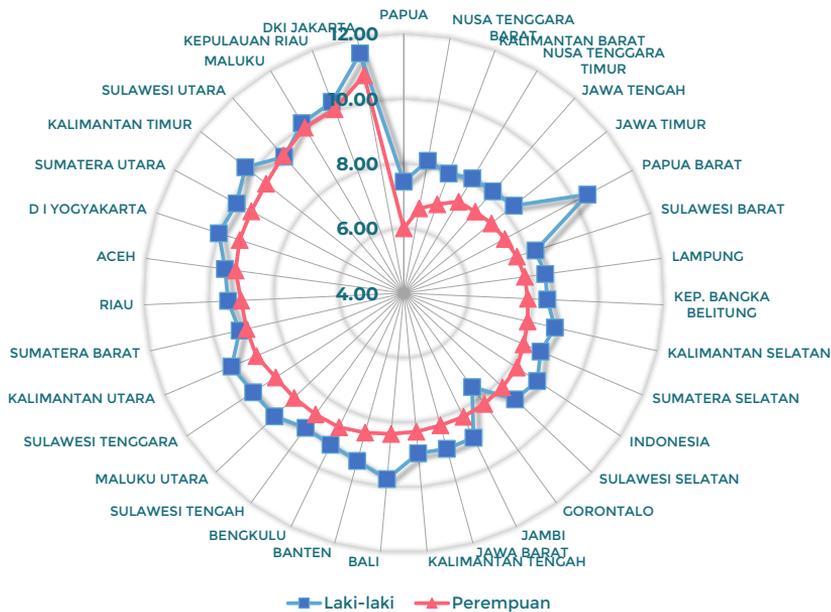
Sumber: Badan Pusat Statistik

Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 3.13). HLS perempuan sebesar 13,22 tahun sedangkan laki-laki sebesar 12,95 tahun dengan perbedaan 0,27 tahun. Analisa dari angka ini menggambarkan rata-rata anak yang berusia 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2021 akan berpeluang bersekolah 12-13 tahun atau minimal lulus sekolah menengah tingkat atas. Perkembangan HLS selalu meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 baik pada laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2010, HLS mengalami peningkatan 1,85 tahun untuk HLS perempuan dan 1,75 tahun untuk HLS laki-laki. Selain itu, tahun 2021 juga memiliki rentang HLS laki-laki dan perempuan yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rentang HLS laki-laki dan perempuan tahun 2010 sebesar 0,17 sedangkan tahun 2021 sebesar 0,27 tahun.

Menurut wilayah, sebagian besar HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki kecuali Yogyakarta, Maluku Utara, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat (Gambar 3.14). Provinsi Yogyakarta memiliki nilai HLS tertinggi dan provinsi Papua memiliki nilai terendah baik pada laki-laki maupun

perempuan. HLS laki-laki di provinsi Yogyakarta sebesar 15,67 tahun dan di provinsi Papua sebesar 11,31 tahun. Sedangkan untuk perempuan di provinsi Yogyakarta sebesar 15,64 tahun dan di provinsi Papua sebesar 10,99 tahun. Rentang atau perbedaan antara provinsi yang memiliki nilai HLS tertinggi dan terendah adalah 4,36 tahun untuk laki-laki dan 4,65 tahun untuk perempuan.

Gambar 3.14 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ada beberapa wilayah seperti provinsi Bengkulu, Maluku, Aceh, Sumatera Barat dan Yogyakarta yang memiliki nilai HLS perempuan melebihi 14 tahun sedangkan untuk laki-laki provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Yogyakarta. Provinsi Papua memiliki HLS kurang dari 12 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan baik pada perempuan maupun laki-laki, sebagian besar wilayah memiliki HLS antara 12-14 tahun.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beberapa program prioritas pada tahun 2021 yang berhubungan dengan filosofi merdeka belajar yaitu program yang memberikan suatu kemerdekaan bagi murid, kemerdekaan bagi guru, kemerdekaan bagi unit pendidikan dan juga kemerdekaan bagi ekosistem pendidikan untuk berpartisipasi

dalam dunia pendidikan. Beberapa program yang terkait antara lain: pembiayaan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, dan pemajuan budaya dan bahasa.

Tabel 3.5

Kabupaten/Kota yang memiliki Harapan Lama Sekolah (HLS) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	UHH	Kabupaten/Kota	Pro- vinsi	UHH
LAKI-LAKI						
1	Kota Banda Aceh	Aceh	17,84	Nduga	Papua	4,80
2	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	17,46	Puncak	Papua	5,73
3	Kota Kendari	Sultra	16,92	Pegunungan Bintang	Papua	6,57
4	Sleman	Yogyakarta	16,76	Puncak Jaya	Papua	7,64
5	Kota Kupang	NTT	16,40	Intan Jaya	Papua	8,32
6	Kota Padang	Sumatera Barat	16,33	Yahukimo	Papua	8,42
7	Kota Bengkulu	Bengkulu	16,01	Tolikara	Papua	9,13
8	Kota Palu	Sulteng	15,96	Asmat	Papua	9,31
9	Kota Malang	Jawa Tengah	15,93	Lanny Jaya	Papua	9,78
10	Kota Semarang	Jawa Tengah	15,73	Yalimo	Papua	9,99
PEREMPUAN						
1	Kota Banda Aceh	Aceh	17,72	Nduga	Papua	3,20
2	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	17,63	Puncak	Papua	4,90
3	Kota Padang	Sumbar	16,87	Pegunungan Bintang	Papua	6,08
4	Kota Kendari	Sultra	16,86	Intan Jaya	Papua	6,98
5	Kota Ambon	Maluku	16,66	Puncak Jaya	Papua	7,48
6	Sleman	Yogyakarta	16,55	Yahukimo	Papua	7,60
7	Kota Palu	Sulteng	16,51	Mamberamo Tengah	Papua	8,46
8	Kota Kupang	NTT	16,47	Tolikara	Papua	8,54
9	Kota Bengkulu	Bengkulu	16,44	Lanny Jaya	Papua	8,71
10	Kota Makasar	Sulel	16,08	Yalimo	Papua	8,80

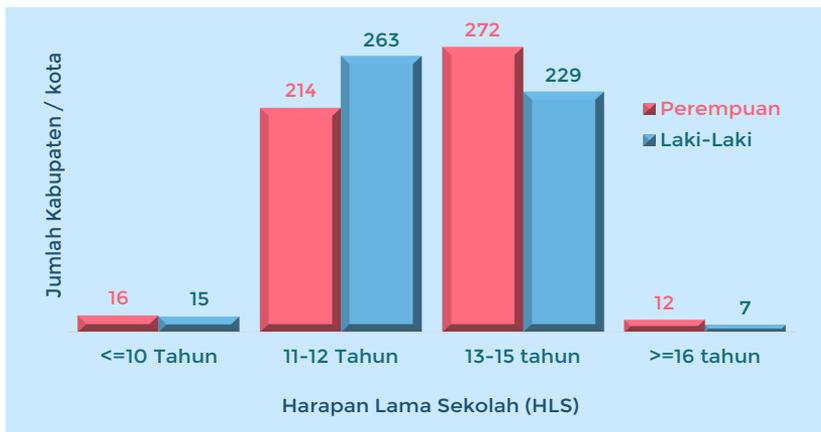
Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Tabel 3.5 menjelaskan bahwa HLS laki-laki tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh sebesar 17,84 tahun sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 4,80 tahun atau mempunyai rentang sebesar 13,04 tahun. Bila dibandingkan dengan 10 Kabupaten/ Kota yang memiliki HLS terendah yang semua berada di provinsi Papua, sedangkan untuk HLS tertinggi lebih menyebar dimana tidak hanya terdapat di pulau Jawa, juga terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Pada perempuan sama dengan laki-laki dimana tertinggi juga terdapat di Kabupaten Kota Banda Aceh sebesar 17,72 tahun sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 3,20 tahun atau mempunyai rentang sebesar 14,52 tahun. Pada perempuan Kota Ambon dan Kota Makassar menjadi 10 Kabupaten/Kota yang memiliki HLS tertinggi menggantikan Kota Malang dan Kota Semarang pada HLS laki-laki. Untuk Kabupaten Asmat tidak masuk kedalam 10 kabupaten/kota HLS terendah pada perempuan digantikan dengan Kabupaten Memberamo Tengah.

Jumlah kabupaten/kota menurut kelompok HLS dan jenis kelamin yang ditunjukkan pada Gambar 3.15 mempunyai pola yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Pada laki-laki, jumlah kabupaten/kota terbanyak terdapat pada kelompok HLS 11-12 tahun yaitu sebanyak 263 kabupaten/kota sedangkan pada perempuan terbanyak pada kelompok 13-15 tahun yaitu sebanyak 272 kabupaten/Kota. Berdasarkan Gambar 3.15 terlihat baik pada perempuan maupun laki-laki, jumlah kabupaten/kota dalam kelompok HLS kurang dari 10 tahun terendah kedua setelah kelompok HLS lebih dari 16 tahun.

Gambar 3.15 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2.4. Lama Sekolah Perempuan Masih Perlu Ditingkatkan

Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua adalah tujuan dari SDGs tujuan 4. Beberapa target dalam SDGs tujuan 4 adalah:

- 1 Memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif;
 - 2 Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif;
 - 3 Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar;
 - 4 Memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas;
 - 5 Secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha;
 - 6 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan;
 - 7 Memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung;
 - 8 Memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.
- Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua;

- Secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya;
- Secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat menggambarkan kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Lain halnya dengan HLS, indikator RLS digunakan pada penduduk usia 25 tahun keatas karena dianggap rata-rata usia tersebut sudah menyelesaikan pendidikan formal. RLS adalah indikator kedua di sektor pendidikan yang digunakan dalam perhitungan capaian pembangunan.

Gambar 3.16 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

RLS tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya baik laki-laki dan perempuan, hanya saja pencapaian RLS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tahun 2021, RLS laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun dari 8,90 tahun pada tahun

Pola penyebaran RLS untuk laki-laki menunjukkan 3 provinsi (Papua, Gorontalo dan Kalimantan Barat) memiliki RLS dibawah 8,00 tahun, sedangkan 5 provinsi (Maluku, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat dan DKI Jakarta) memiliki RLS diatas 10,00 tahun, sedangkan sisanya atau 26 provinsi memiliki RLS antara 8,00 sampai dengan 10,00 tahun. Sedangkan, untuk pola penyebaran RLS untuk perempuan menunjukkan 11 provinsi (Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Lampung, Kep Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan) dibawah 8,00 tahun sedangkan 2 provinsi (Kepulauan Riau dan DKI Jakarta) memiliki RLS diatas 10,00 tahun sedangkan sisanya atau 20 provinsi memiliki RLS antara 8,00 sampai dengan 10,00 tahun.

Menurut jenis kelamin, hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki RLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sisanya sebaliknya. Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan di provinsi Sulawesi utara sebesar 9,64 tahun sedangkan laki-laki sebesar 9,59 tahun, untuk Provinsi Gorontalo RLS perempuan sebesar 8,22 tahun sedangkan laki-laki sebesar 7,58 tahun.

Tahun 2021, dunia pendidikan mengalami perubahan metode dari tatap muka atau *offline* dengan pergi ke sekolah menjadi *online* dengan bantuan teknologi. Beberapa hambatan perubahan metode pengajaran dari tatap muka menjadi *online* adalah bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik dengan segala kekurangan metode *online* dan penyediaan sarana akses internet yang berbeda setiap wilayah. Beberapa dampak dalam dunia pendidikan pada masa pandemi adalah ancaman putus sekolah karena banyak anak-anak harus bekerja untuk membantu keluarganya, kendala tumbuh kembang anak dan tekanan psikososial dan peningkatan kekerasan terhadap anak.

Rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin tinggi mengindikasikan kualitas seseorang dalam pola pikir dan tindakan yang semakin baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah antara lain: perbedaan upah antara sektor modern dan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan (Todaro, 2004).

Tabel 3.6 menjelaskan bahwa RLS laki-laki tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh sebesar 13,11 tahun sedangkan RLS laki-laki terendah terdapat di Kabupaten Nduga Tengah sebesar 2,27 tahun atau mempunyai rentang tertinggi-terendah sebesar 10,84 tahun. 10 kabupaten/kota yang memiliki RLS tertinggi menyebar di seluruh pulau antara lain 2 provinsi di pulau Sumatera, 3 provinsi berada di pulau Jawa, 2 provinsi berada di pulau Sulawesi dan sisanya berada di pulau Nusa Tenggara dan Maluku. Sebaliknya, 10 kabupaten/kota yang memiliki RLS terendah semuanya berada di pulau Papua.

Pola RLS perempuan sama dengan laki-laki dimana tertinggi juga terdapat di kota Banda Aceh sebesar 12,52 tahun sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 1,16 tahun atau mempunyai rentang sebesar 11,36 tahun. 10 kabupaten/kota yang memiliki RLS tertinggi sebagian besar atau 6 kabupaten/kota berada di pulau Sumatera, sedangkan sisanya berada di pulau Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan, sebaliknya 10 kabupaten/kota yang memiliki RLS terendah semuanya berada di pulau Papua.

Tabel 3.6

Kabupaten/Kota yang memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin, 2021

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/ Kota	Provinsi	UHH	Kabupaten/ Kota	Pro- vinsi	UHH
LAKI-LAKI						
1	Kota Banda Aceh	Aceh	13,11	Nduga	Papua	2,27
2	Kota Kendari	Sultra	12,90	Puncak	Papua	2,74
3	Kota Ternate	Maluku Utara	12,26	Deiyai	Papua	4,21
4	Kota Ambon	Maluku	12,22	Lanny Jaya	Papua	4,68
5	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	12,21	Intan Jaya	Papua	4,74
6	Kota Bengkulu	Bengkulu	12,09	Pegunungan Bintang	Papua	4,78
7	Kota Tangsel	Banten	12,09	Tolikara	Papua	4,82
8	Kota Palu	Sulteng	12,08	Yalimo	Papua	4,93
9	Kota Jaksel	DKI Jakarta	12,05	Paniai	Papua	4,99
10	Kota Kupang	NTT	12,01	Mamberamo Tengah	Papua	5,06
PEREMPUAN						
1	Kota Banda Aceh	Aceh	12,59	Nduga	Papua	1,16
2	Kota Ambon	Maluku	12,14	Puncak	Papua	1,22
3	Kota Kendari	Sultra	12,09	Lanny Jaya	Papua	1,74
4	Kota Padang Panjang	Sumbar	11,69	Intan Jaya	Papua	1,76
5	Kota Pekanbaru	Riau	11,69	Deiyai	Papua	1,81

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/ Kota	Provinsi	UHH	Kabupaten/ Kota	Pro- vinsi	UHH
6	Kota Bengkulu	Bengkulu	11,56	Mamberamo Tengah	Papua	2,15
7	Kota Padang	Sumbar	11,53	Tolikara	Papua	2,31
8	Kota Solok	Sumbar	11,49	Pegunungan Bintang	Papua	2,69
9	Kota Kupang	NTT	11,47	Yahukimo	Papua	2,79
10	Kota Palangka Raya	Kalteng	11,41	Yalimo	Papua	2,99

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah kabupaten/kota menurut kelompok RLS dan jenis kelamin yang ditunjukkan pada Gambar 3.18 menunjukkan pola yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu puncak jumlah kabupaten/kota terbanyak pada rentang RLS antara 6 sampai 8 tahun kemudian diikuti rentang RLS 9 sampai 11 tahun.

Gambar 3.18 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Rata-rata Lama Sekolah dan Jenis Kelamin, 2021



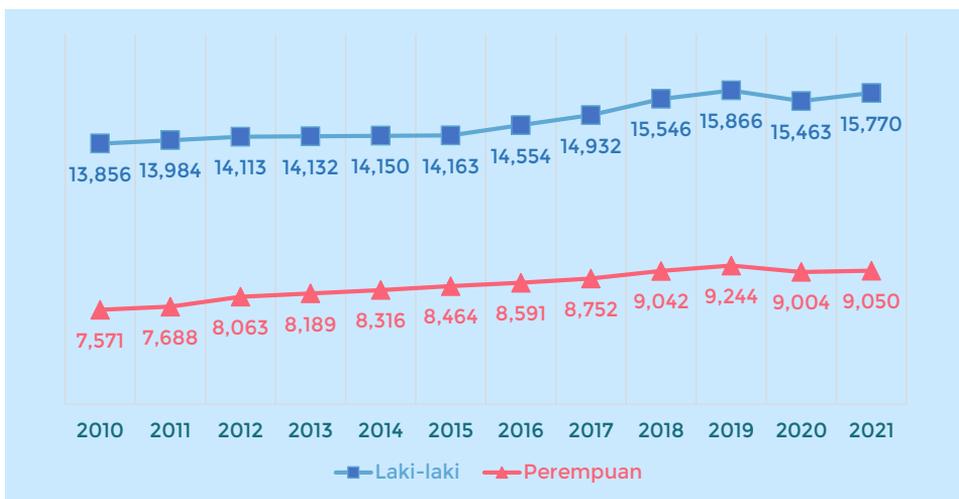
Sumber: Badan Pusat Statistik

Beberapa hal yang mungkin menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia antara lain: (1) perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan masyarakat miskin; (2) keadaan geografis suatu wilayah seperti wilayah kepulauan serta luasnya wilayah menjadi kendala dalam mengoptimalkan pemerataan pendidikan di Indonesia; serta (3) sebaran sekolah yang tidak merata yaitu sebagian besar masih berorientasi pada daerah perkotaan. Hal ini yang menyebabkan masih banyak daerah di Indonesia yang mempunyai RLS kurang dari 8 tahun.

3.2.5. Perekonomian Masih Didominasi oleh Laki-laki

Dalam menghitung capaian pembangunan, selain pembangunan sosial yaitu akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi terkait standar hidup layak juga menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan capaian pembangunan. Pemerataan dalam melakukan akses terhadap kegiatan ekonomi bagi seluruh masyarakat yang tidak melihat isu gender dan wilayah mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut. Indikator standar hidup layak menggunakan indeks pengeluaran per kapita sebagai proxy perhitungan indikator tersebut.

Gambar 3.19 Pengeluaran per kapita menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.19 menjelaskan perkembangan pengeluaran per kapita dari tahun 2010–2021 menurut jenis kelamin. Pengeluaran per kapita per tahun lebih tinggi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki terdapat peningkatan sebesar 0,31 juta rupiah sedangkan pada perempuan terdapat peningkatan sebesar 0,05 juta rupiah. Dibandingkan tahun 2010, pengeluaran per kapita per tahun laki-laki tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 1,9 juta rupiah, sedangkan perempuan meningkat sebesar 1,47 juta rupiah.

Menurut jenis kelamin, pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2021 dan di tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2021 adalah hampir Rp. 15,7 juta rupiah per tahun, sedangkan perempuan hanya 9 juta rupiah per tahun atau hanya 57,38 persen dibandingkan pengeluaran laki-laki. Ketimpangan pengeluaran per kapita per tahun antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 antara 50–60 persen.

Pekerja perempuan sering menghadapi diskriminasi dan stagnasi partisipasi dalam dunia kerja, salah satunya terkait dengan upah (Vibriyanti, 2013). Dalam ilmu ekonomi, disparitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh model modal manusia dan model segmentasi pasar kerja. Fokus dari model modal manusia adalah isu ketenagakerjaan, dimana perbedaan penghasilan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kepemilikan modal manusia yang berbeda, misalnya pendidikan. Sementara itu, menurut model segmentasi pasar kerja, pasar kerja laki-laki dan perempuan memang berbeda yaitu laki-laki cenderung bekerja di sektor utama (*primary*) dengan jabatan yang lebih tinggi, sementara perempuan bekerja di sektor kedua (*secondary*) dengan jabatan dan upah yang lebih rendah.

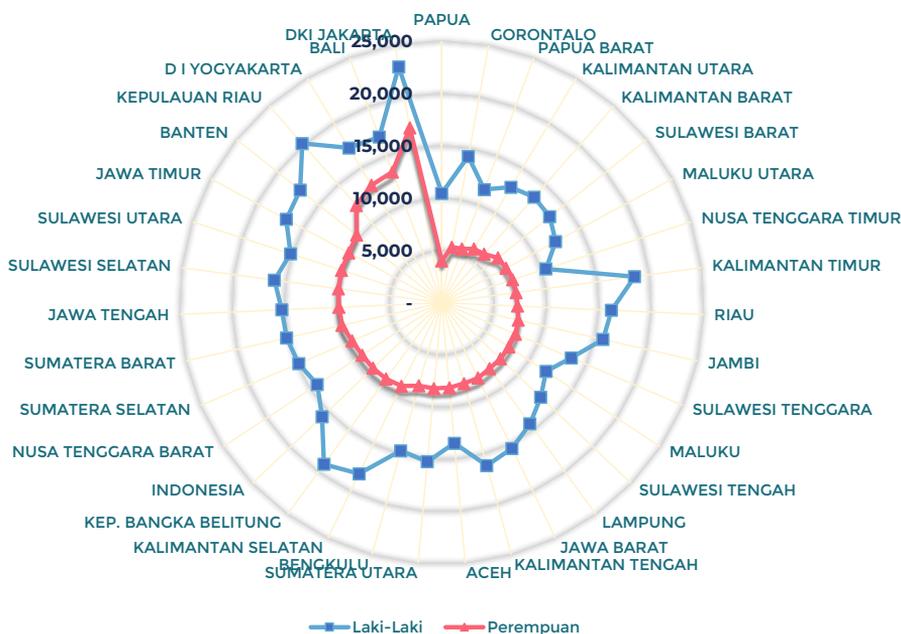
Statistical discrimination menyatakan bahwa ketika laki-laki atau perempuan yang memiliki kualitas yang sama dan menginginkan pekerjaan yang sama, meski pengusaha tidak memiliki dugaan terhadap jenis kelamin tertentu, tapi dia mengetahui bahwa perempuan cenderung memiliki waktu bekerja lebih sedikit karena tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, maka perempuan akan cenderung dikeluarkan dari pekerjaannya.

Gambar 3.20 menunjukkan pengeluaran per kapita per tahun laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua wilayah di Indonesia. Ketimpangan tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo yaitu sebesar 37,96 persen yaitu pengeluaran per kapita per tahun laki-laki sebesar 14,2 juta rupiah sedangkan perempuan hanya sebesar 5,4 juta rupiah. Selain itu, provinsi Papua dan Kalimantan Timur memiliki ketimpangan pengeluaran yang sama dengan Gorontalo yaitu di bawah 40 persen. Sebaliknya, ketimpangan terendah terdapat pada provinsi Bali sebesar 78,85 persen yaitu pengeluaran per kapita laki-laki sebesar 16,2 juta rupiah sedangkan perempuan sebesar 13,3 juta rupiah.

Selain itu, provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta memiliki ketimpangan pengeluaran yang hampir sama dengan Bali yaitu diatas 70 persen.

Pola penyebaran pengeluaran per kapita per tahun laki-laki menunjukkan jumlah provinsi terbanyak pada rentang pengeluaran 10-15 juta yaitu 22 provinsi, selanjutnya sebanyak 10 provinsi berada pada rentang pengeluaran 16-19 juta dan 2 provinsi mempunyai pengeluaran per kapita pertahun lebih dari 20 juta. Untuk pola pengeluaran per kapita perempuan menunjukkan jumlah provinsi terbanyak pada rentang pengeluaran antara 6-9 juta sebanyak 23 provinsi, selanjutnya 7 provinsi mempunyai pengeluaran diatas 11 juta dan 4 provinsi yang mempunyai pengeluaran per kapita dibawah 5 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengeluaran per kapita perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 3.20 Pengeluaran Per kapita menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.7 menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita per tahun laki-laki tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 27,67 juta rupiah, sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Yalimo sebesar 3,93 juta atau mempunyai perbedaan sebesar 23,74 juta rupiah. 10 kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran per kapita per tahun tertinggi sebanyak

7 kabupaten/kota berada di pulau Jawa, 1 kabupaten/kota berada di pulau Sumatera dan 2 kabupaten/kota berada di pulau Kalimantan. Untuk 10 kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran per kapita per tahun terendah, 1 kabupaten/kota berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan sisanya berada di provinsi Papua.

Pada perempuan menunjukkan pola yang berbeda dengan laki-laki yaitu tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 23,25 juta rupiah sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Asmat sebesar 1,54 juta rupiah atau memiliki perbedaan sebesar 21,71 juta. Sebaliknya, dari 10 kabupaten/kota yang pengeluaran per kapita per tahun tertinggi, 7 kabupaten/kota berada di pulau Jawa, 1 kabupaten/kota berada di provinsi Bali dan 2 kabupaten/kota berada di provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk 10 kabupaten/kota yang mempunyai pengeluaran per kapita terendah sebanyak 8 kabupaten berada di provinsi Papua dan 3 kabupaten di provinsi Papua Barat.

Tabel 3.7

Kabupaten/Kota yang memiliki Pengeluaran Per kapita Tertinggi dan Terendah Menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah/orang/tahun), 2021

No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Pengeluaran Per kapita	Kabupaten/Kota	Provinsi	Pengeluaran Per kapita
LAKI-LAKI						
1	Kota Jaksel	DKI Jakarta	27.667	Nduga	Papua	3.935
2	Kota Jakut	DKI Jakarta	26.465	Lanny Jaya	Papua	4.389
3	Kota Batam	Kepri	26.356	Mamberamo Tengah	Papua	4.487
4	Kota Bontang	Kaltim	25.917	Puncak	Papua	5.663
5	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	24.103	Deiyai	Papua	6.573
6	Kota Balikpapan	Kaltim	23.073	Sumba Barat Daya	NTT	6.629
7	Kota Bandung	Jawa Barat	22.618	Mamberamo Raya	Papua	6.843
8	Kota Madiun	Jawa Timur	22.514	Pegunungan Arfak	Papua Barat	6.876
9	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	22.321	Sabu Raijua	Papua	6.963
10	Kota Tangsel	Banten	22.134	Yalimo	Papua	7.158

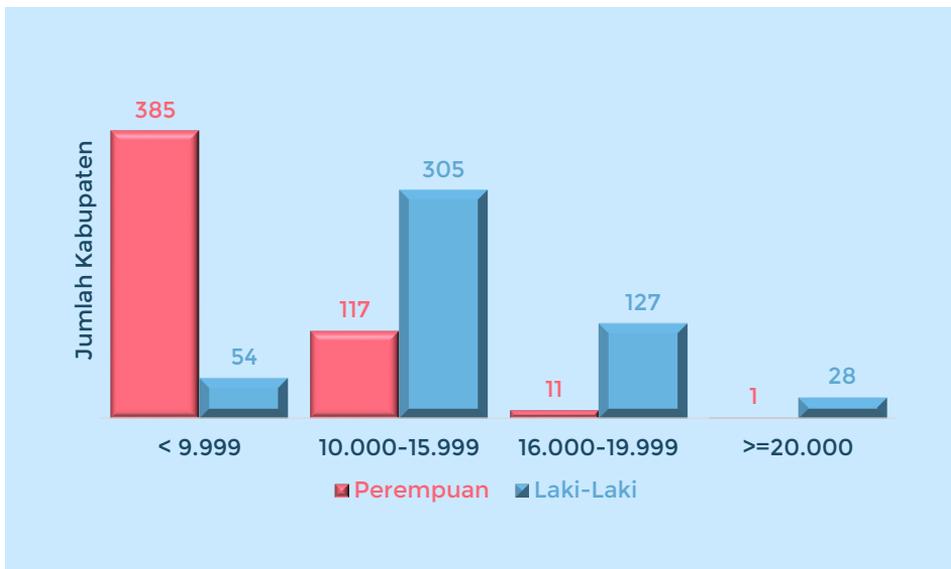
No.	Tertinggi			Terendah		
	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Penge- luaran Per kapita	Kabupaten/ Kota	Provin- si	Penge- luaran Per kapita
PEREMPUAN						
1	Kota Jaksel	DKI Jakarta	23.325	Asmat	Papua	1.543
2	Kota Jakbar	DKI Jakarta	19.693	Tolikara	Papua	1.886
3	Kota Denpasar	Bali	19.155	Manokwari Selatan	Papua Barat	2.105
4	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	18.642	Puncak Jaya	Papua	2.127
5	Kota Jakut	DKI Jakarta	18.387	Pulau Morotai	Papua Barat	2.363
6	Kota Jaktim	DKI Jakarta	17.322	Paniai	Papua	2.454
7	Kota Batam	Kepulauan Riau	17.304	Tambrau	Papua Barat	2.460
8	Badung	Bali	17.048	Deiyai	Papua	2.485
9	Kota Jakpus	DKI Jakarta	16.739	Waropen	Papua	2.509
10	Kota Malang	Jawa Timur	16.399	Buton Selatan	Papua	2.939

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah Kabupaten/kota menurut kelompok pengeluaran per kapita per tahun dan jenis kelamin yang dijelaskan pada Gambar 3.21 menunjukkan pola yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, jumlah kabupaten/kota yang tertinggi pada rentang pengeluaran 10-15 juta rupiah sebanyak 305 kabupaten/kota, diikuti oleh rentang pengeluaran 16-19 juta rupiah sebanyak 127 kabupaten/kota dan terdapat 28 kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran diatas 20 juta rupiah. Sedangkan pola pengeluaran perempuan menunjukkan jumlah kabupaten/kota terbanyak pada rentang pengeluaran di bawah 9 juta sebanyak 385 kabupaten/kota diikuti oleh rentang 10-15 juta rupiah sebanyak 117 kabupaten/kota dan di atas 16 juta sebanyak 12 kabupaten/kota.

Kontribusi angkatan kerja perempuan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah positif, sehingga semakin tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun, karena perbedaan seperti tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan lebih banyak terserap di sektor informal sehingga mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja dengan kurangnya keterjaminan pekerjaan, upah yang rendah, serta keterbatasan terhadap pelatihan profesional dan promosi karier yang terdapat pada sektor formal.

Gambar 3.21 Jumlah Kabupaten/Kota menurut kelompok pengeluaran per kapita per tahun dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik



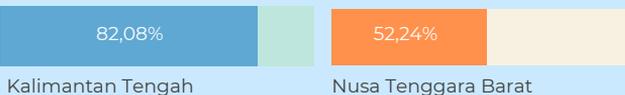
04

KONDISI PEMBERDAYAAN GENDER DI INDONESIA

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

KETIMPANGAN PEMBERAYAAN GENDER MASIH TERJADI DI INDONESIA

Wilayah dengan IDG tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

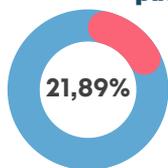


IDG 2021 76,26%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia atau nilai Nasional mencapai angka 76,26 (2021), **meningkat 0,69%** dibandingkan tahun 2020



Persentase Keterlibatan perempuan pada parlemen Nasional



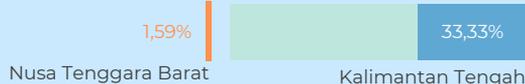
● Laki-Laki ● Perempuan

Persentase keterlibatan perempuan pada Parlemen Nasional Tahun 2021 **sebesar 21,89%** (meningkat 0,8%) sedangkan laki-laki sebesar 78,11%



KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PARLEMEN PERLU PERJUANGAN BESAR

Provinsi dengan keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat



PEREMPUAN SEMAKIN BENKONTRIBUSI DALAM PENCIPTAAN PENDAPATAN

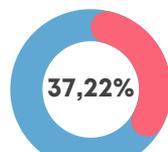
3 provinsi dengan Persentase sumbangan pendapatan perempuan **tertinggi**

- 1 NTT 43,78%
- 2 DI YOGYAKARTA 40,26%
- 3 BALI 39,18%

Sumber: BPS



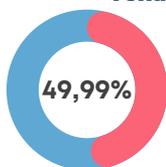
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional



● Laki-Laki ● Perempuan

Persentase sumbangan pendapatan perempuan nasional Tahun 2021 **sebesar 37,22%** (menurun 0,04%) sedangkan laki-laki sebesar 62,78%

Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Nasional



● Laki-Laki ● Perempuan

Persentase perempuan sebagai tenaga profesional nasional Tahun 2021 **sebesar 49,99%** (meningkat 1,23%) sedangkan laki-laki sebesar 50,01%



PROFESIONALISME PEKERJA PEREMPUAN TELAH BANYAK DIPERHITUNGKAN

provinsi dengan persentase perempuan sebagai tenaga profesional nasional **tertinggi** **3**

- 1 SUMATERA BARAT 59,09%
- 2 GORONTALO 58,78%
- 3 SULSEL 55,10%

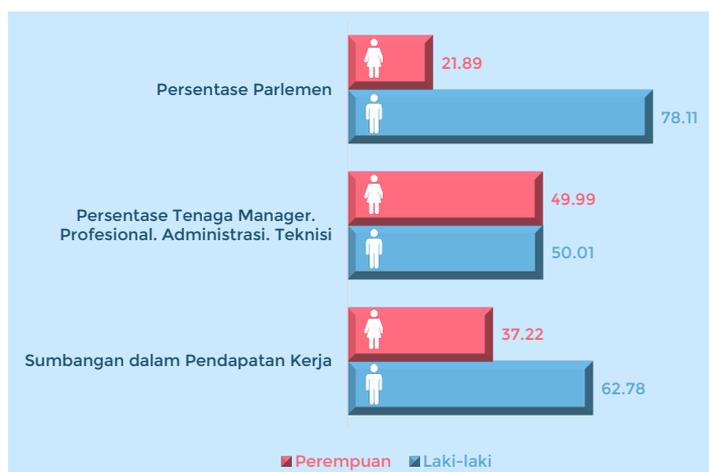
Sumber: BPS

4.1 Pemberdayaan Gender Semakin Terlihat

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Indonesia pada tahun 2021 adalah 76,26. Artinya peran aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi semakin terlihat. Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu (1) persentase parlemen, (2) persentase tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi serta (3) sumbangan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk pada parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,89 persen dibandingkan 78,11 persen. Komposisi tenaga kerja manager, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 62,78 persen sedangkan perempuan sebesar 37,22 persen.

Gambar 4.1

Capaian Indikator Komponen Penyusunan IDG Indonesia, 2021

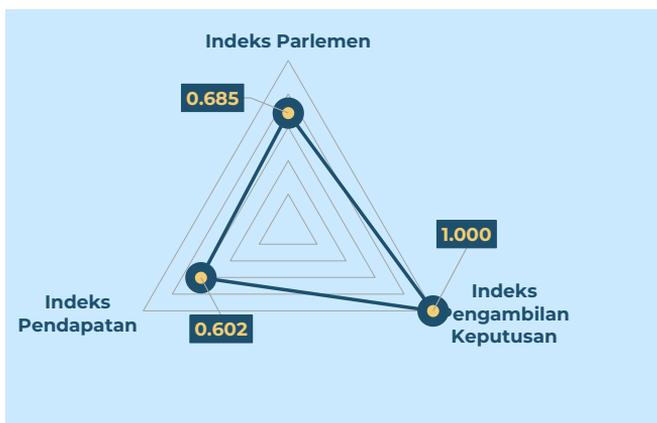


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari masing-masing indikator penyusun IDG kemudian dihitung indeks indikatornya sebelum mencapai nilai IDG. Indeks pengambilan keputusan sudah mencapai nilai 1, sementara indeks parlemen mencapai 0,685 dan 0,602 untuk indeks pendapatan.

Kondisi ini menunjukkan kondisi sumbangan utama pendapatan kerja perempuan masih lebih banyak berasal dari laki-laki dibandingkan perempuan. Faktor penyebabnya bisa dikaitkan dengan persentase perempuan yang bekerja serta rata-rata upah perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 4.2 Indeks Indikator Komponen Indeks Pemberdayaan Gender, 2021

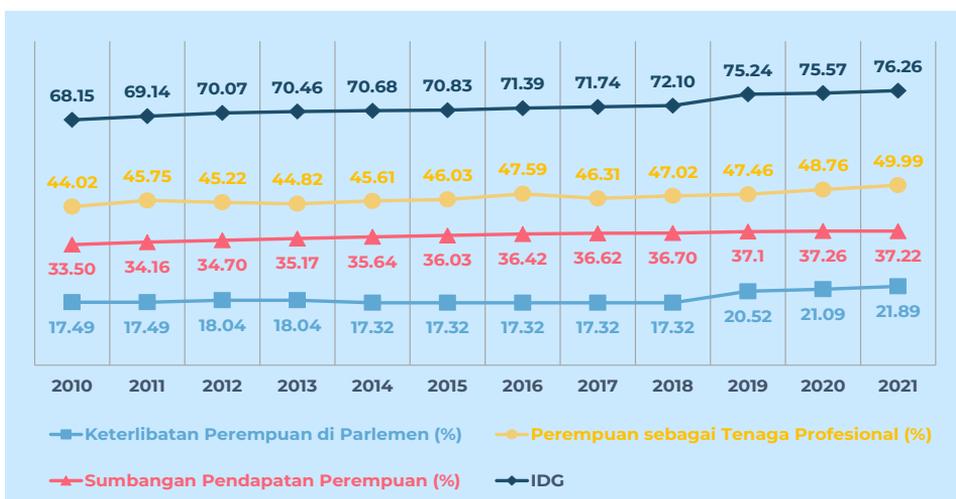


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kurunwaktu 2010 hingga 2021, capaian IDG terus menunjukkan peningkatan, rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 4,36 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 (0,21 persen). Sedangkan pada tahun 2021, IDG Indonesia tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan tahun 2020.

Gambar 4.3

Perkembangan IDG, Keterlibatan perempuan di parlemen, persentase sumbangan pendapatan perempuan dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu sebaran per provinsi masih tidak merata. Gap antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah mencapai 29,54 persen. Terdapat empat provinsi dengan capaian melebihi angka nasional yaitu DI Yogyakarta (76,26), Maluku Utara (78,59), Sulawesi Utara (79,07) dan Kalimantan Tengah (82,08).

Gambar 4.4 IDG Indonesia Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki rentang nilai IDG 60-80, yaitu sebanyak 30 provinsi dan tersebar di seluruh pulau. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki nilai IDG tertinggi menjadi satu-satunya provinsi dengan capaian melebihi 80. Sementara tiga provinsi yang memiliki nilai IDG antara 50-60 adalah Nusa Tenggara Barat (52,54), Kepulauan Bangka Belitung (57,49) dan Kepulauan Riau (58,97).

Meskipun Kepulauan Riau memiliki nilai IPM dan IPG yang baik, ternyata pemberdayaan gendernya masih perlu terus ditingkatkan. Sedangkan provinsi NTB dan Kep. Bangka Belitung masih memiliki tugas besar untuk dapat meningkatkan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di wilayahnya, karena memiliki capaian baik IPM dan IPG yang masih berada di bawah nilai nasional.

4.2 Pemberdayaan Gender Belum Merata antar Wilayah

Rata-rata disparitas capaian IDG menurut provinsi dari tahun 2010 hingga 2021 sebesar 28,84 atau berkisar pada 22 hingga 34 persen. Kesenjangan capaian IDG provinsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 hingga mencapai 34,49, di mana terdapat kenaikan nilai IDG provinsi tertinggi dan penurunan nilai IDG terendah.

Gambar 4.5 Disparitas capaian IDG provinsi tertinggi dan terendah, 2010-2021

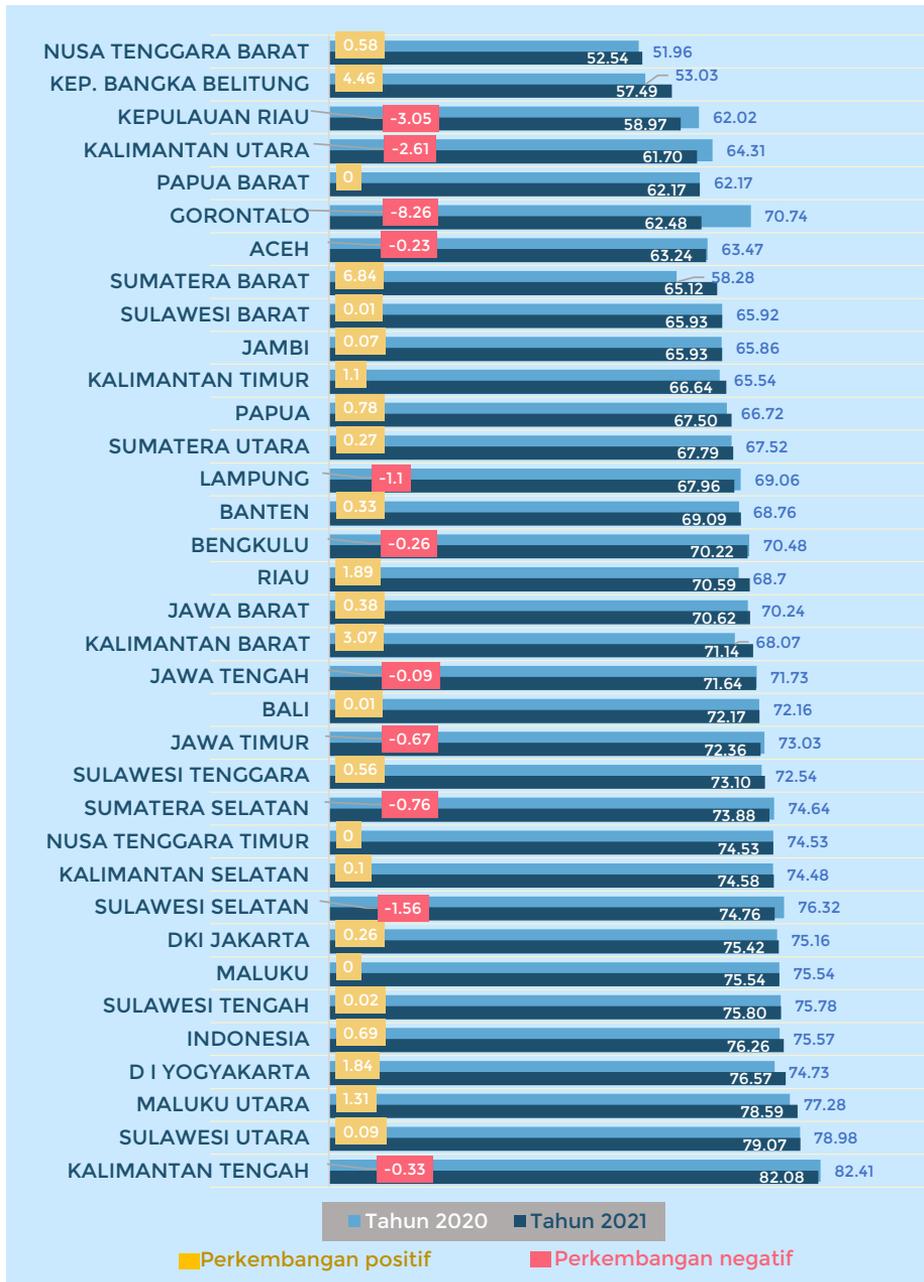


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tiga tahun terakhir, kesenjangan capaian IDG menunjukkan penurunan, namun ini terjadi karena nilai IDG tertinggi turun sementara terjadi peningkatan pada nilai IDG terendah. Capaian IDG terendah dari tahun 2019 hingga 2021 terus menunjukkan perbaikan, secara berturut-turut nilainya 51,91; 51,96 dan 52,54. Sementara itu, capaian IDG provinsi tertinggi menurun dari 83,20 ke 82,41 dan 82,04.

4.2.1 Pemberdayaan Gender Belum Merata di level Provinsi

Gambar 4.6 IDG Indonesia Menurut Provinsi, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia belum terlihat berdampak secara langsung pada indikator IDG, yaitu pada periode tahun 2020 hingga 2021 nilainya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa disebabkan karena salah satu indikator pembentuk IDG tidak langsung berpengaruh pada pandemi Covid-19 yaitu persentase perempuan di parlemen. Indikator perempuan yang menduduki parlemen didapatkan dari proses pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota parlemen.

Meskipun capaian IDG nasional mengalami peningkatan pada periode 2020 ke 2021, terdapat 11 provinsi yang menunjukkan penurunan, 3 provinsi dengan nilai yang tidak berubah dan 20 provinsi yang menunjukkan peningkatan nilai. Penurunan IDG terbesar terjadi pada provinsi Gorontalo hingga mencapai 8,26 persen, disusul Kepulauan Riau (3,05 persen) dan Kalimantan Utara (2,61 persen). Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2020 dan 2021 memiliki nilai IDG tertinggi juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0,33 persen.

4.2.2 Pemberdayaan Gender Belum Merata di Level Kabupaten/Kota

Selain di tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten/kota makin terlihat kesenjangan yang jauh berbeda di antara kabupaten/kota yang memiliki nilai IDG tertinggi dan terendah. Bahkan disparitas ini mencapai 54,17 poin yaitu hampir 2 kali lipat dari kesenjangan IDG provinsi.

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai IDG Tertinggi dan Terendah, 2021

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi			
1.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	88,71
2.	Sulawesi Utara	Minahasa	87,29
3.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	86,17
4.	Kalimantan Tengah	Barito Utara	85,62
5.	Jawa Tengah	Temanggung	84,56
6.	Sulawesi Utara	Kota Manado	84,29
7.	Jawa Timur	Kota Kediri	84,17
8.	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	83,7
9.	Jawa Timur	Kota Surabaya	82,82
10.	Kalimantan Tengah	Barito Timur	82,44

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)
Terendah			
1.	Papua Barat	Tambrauw	34,54
2.	Papua	Dogiyai	35,22
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	36,36
4.	Papua	Lanny Jaya	37,08
5.	Papua	Intan Jaya	37,14
6.	Papua	Yalimo	37,80
7.	Papua	Yahukimo	37,95
8.	Papua	Deiyai	40,17
9.	Papua	Puncak	40,83
10.	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	41,11

Kabupaten/kota yang memiliki capaian IDG tertinggi memiliki nilai melebihi 80 dan didominasi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk IDG terendah memiliki nilai di bawah 50 dan didominasi kabupaten/kota di provinsi Papua.

Tabel 4.2 Nilai IDG Tertinggi dan Terendah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021

No	Provinsi	2020			2021		
		Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang	Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang
1	Aceh	75,43	47,37	28,06	75,66	47,84	27,82
2	Sumatera Utara	78,2	47,27	30,93	81,53	46,14	35,39
3	Sumatera Barat	71,01	48,13	22,88	71,58	46,64	24,94
4	Riau	69,23	42,38	26,85	68,63	42,19	26,44
5	Jambi	75,32	51,71	23,61	73,2	51,66	21,54
6	Sumatera Selatan	69,65	48,68	20,97	71,65	46,79	24,86
7	Bengkulu	77,68	55,03	22,65	77,67	54,62	23,05
8	Lampung	76,98	51,25	25,73	74,23	52,1	22,13
9	Bangka Belitung	65,24	49,93	15,31	62,34	48,65	13,69
10	Kepulauan Riau	76,44	42,99	33,45	76,64	42,95	33,69
11	DKI Jakarta	77,17	63,41	13,76	77,57	64,15	13,42

No	Provinsi	2020			2021		
		Tertinggi	Terendah	Rentang	Tertinggi	Terendah	Rentang
12	Jawa Barat	78,09	50,56	27,53	77,64	54,32	23,32
13	Jawa Tengah	84,21	48,7	35,51	84,56	48,68	35,88
14	D I Yogyakarta	81,25	64,78	16,47	81,31	65,27	16,04
15	Jawa Timur	84,38	53,01	31,37	84,17	52,44	31,73
16	Banten	73,85	52,32	21,53	73,08	52,81	20,27
17	Bali	78,36	63,61	14,75	78,27	65,09	13,18
18	Nusa Tenggara Barat	76,23	47,22	29,01	76,42	47,40	29,02
19	Nusa Tenggara Timur	75,61	47,4	28,21	75,58	47,2	28,38
20	Kalimantan Barat	73,24	47,76	25,48	73,04	47,87	25,17
21	Kalimantan Tengah	88,22	63,2	25,02	88,71	63,19	25,52
22	Kalimantan Selatan	80,52	53,82	26,7	80,24	53,55	26,69
23	Kalimantan Timur	80,41	49,75	30,66	80,43	45,67	34,76
24	Kalimantan Utara	77,16	59,72	17,44	77,67	58,92	18,75
25	Sulawesi Utara	87,05	59,91	27,14	87,29	60,61	26,68
26	Sulawesi Tengah	74,09	50,98	23,11	73,06	50,69	22,37
27	Sulawesi Selatan	80,26	38,11	42,15	81,2	41,11	40,09
28	Sulawesi Tenggara	81,38	51,1	30,28	81,22	51,48	29,74
29	Gorontalo	75,23	51,73	23,5	71,19	52,13	19,06
30	Sulawesi Barat	75,56	54,13	21,43	75,46	56,97	18,49
31	Maluku	76,66	53,33	23,33	77,53	51,74	25,79
32	Maluku Utara	74,96	45,05	29,91	75,08	44,68	30,4
33	Papua Barat	74,23	33,34	40,89	74,3	34,54	39,76
34	Papua	81,05	39,88	41,17	80,25	35,22	45,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rentang capaian IDG kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi juga cukup bervariasi dari 13 hingga 45 poin. Provinsi Bali dan DKI Jakarta memiliki kesenjangan antar kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan pada 2021 dibandingkan pada 2020. Hal ini menunjukkan upaya pemberdayaan perempuan dilaksanakan merata pada setiap wilayahnya. Sementara itu, kabupaten/kota di Papua yang memiliki IDG tertinggi memiliki capaian hingga 80,25 namun yang terendah mencapai 35,22 sehingga gap tertinggi dan terendah mencapai 45,03 poin. Selain Papua, provinsi Sulawesi Selatan memiliki kesenjangan mencapai 40,09 poin. Kesenjangan antar wilayah untuk capaian IDG ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di provinsi tersebut belum merata.

Tabel 4.3

Jumlah Kabupaten/Kota menurut Provinsi dan Kelompok Nilai IDG, 2021

No.	Provinsi	Kelompok Nilai IDG				Jumlah
		<50	50-59	60-79	≥80	
1	Aceh	2	12	9	0	23
2	Sumatera Utara	1	4	27	1	33
3	Sumatera Barat	3	5	11	0	19
4	Riau	2	6	4	0	12
5	Jambi	0	4	7	0	11
6	Sumatera Selatan	3	8	6	0	17
7	Bengkulu	0	2	8	0	10
8	Lampung	0	4	11	0	15
9	Bangka Belitung	1	3	3	0	7
10	Kepulauan Riau	2	1	4	0	7
11	DKI Jakarta	0	0	6	0	6
12	Jawa Barat	0	5	22	0	27
13	Jawa Tengah	1	3	28	3	35
14	D I Yogyakarta	0	0	4	1	5
15	Jawa Timur	0	5	30	3	38
16	Banten	0	3	5	0	8
17	Bali	0	0	9	0	9
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	6	0	10
19	Nusa Tenggara Timur	1	10	11	0	22
20	Kalimantan Barat	1	2	11	0	14
21	Kalimantan Tengah	0	0	10	4	14
22	Kalimantan Selatan	0	1	11	1	13
23	Kalimantan Timur	2	2	5	1	10
24	Kalimantan Utara	0	1	4	0	5
25	Sulawesi Utara	0	0	11	4	15
26	Sulawesi Tengah	0	2	11	0	13
27	Sulawesi Selatan	1	7	15	1	24
28	Sulawesi Tenggara	0	3	11	3	17
29	Gorontalo	0	1	5	0	6

No.	Provinsi	Kelompok Nilai IDG				Jumlah
		<50	50-59	60-79	≥80	
30	Sulawesi Barat	0	2	4	0	6
31	Maluku	0	5	6	0	11
32	Maluku Utara	2	4	4	0	10
33	Papua Barat	3	4	6	0	13
34	Papua	10	10	8	1	29
35	Indonesia	37	121	333	23	514

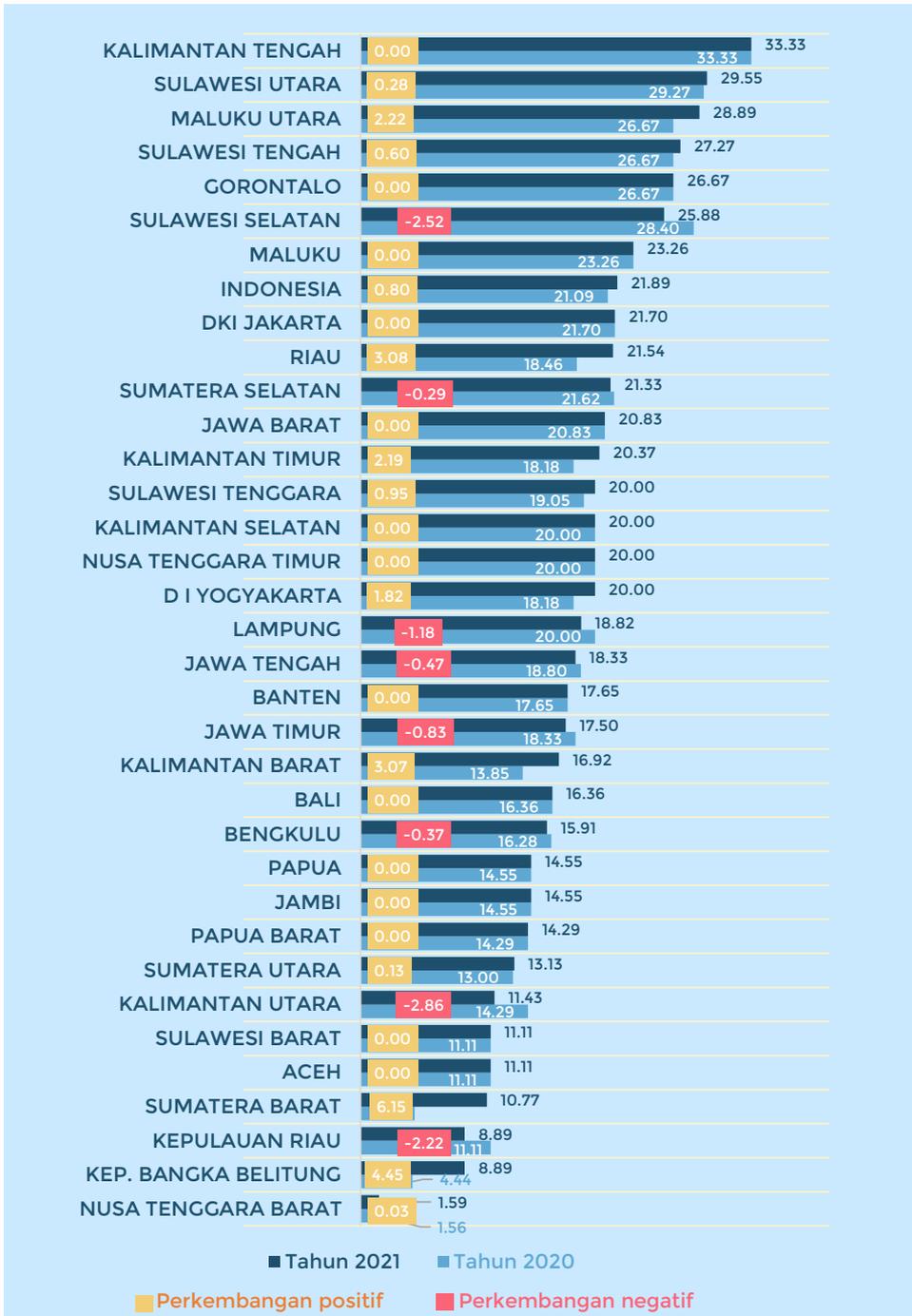
Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara total, masih terdapat 37 kabupaten/kota yang memiliki capaian IDG kurang dari 50, dimana 10 di antaranya berada di provinsi Papua. Sementara sama seperti pada tingkat provinsi, sebanyak 333 kabupaten/kota memiliki capaian IDG kabupaten/kota pada rentang 60-79. Sementara sudah ada 23 kabupaten/kota memiliki capaian lebih atau sama dengan 80, dan paling banyak tersebar di provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.

4.2.3 Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan

Meski sudah ada *affirmative action* bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik seperti yang tertuang dalam Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hasil akhir capaian perempuan yang duduk dalam Lembaga legislatif masih belum mencapai 30 persen. Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku Utara adalah provinsi dengan persentase perempuan dalam parlemen tertinggi. Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya provinsi dengan capaian perempuan dalam parlemen melebihi 30 persen.

Sebagian besar provinsi tidak mengalami perubahan persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen dari tahun 2020 ke 2021. Namun demikian, beberapa provinsi mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menyebabkan penambahan maupun pengurangan perempuan dalam parlemen. Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara mengalami penurunan sekitar 2 persen untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen pada tahun 2021, sedangkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebanyak 4,45 persen.

Gambar 4.7**Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurut Provinsi Tahun 2020-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 48,57 persen yaitu di Kabupaten Minahasa, artinya jumlah perempuan dan laki-laki dalam parlemen sudah hampir berimbang. Tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan 21 kabupaten/kota di Indonesia yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan di parlemen.

Tabel 4.4

Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tertinggi dan Terendah, 2021

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterlibatan perempuan di parlemen
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi			
1.	Sulawesi Utara	Minahasa	48,57
2.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	48,00
3.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	40,00
4.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	40,00
5.	Sulawesi Utara	Kota Manado	40,00
6.	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	40,00
7.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	40,00
8.	Aceh	Aceh Tamiang	36,67
9.	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	36,67
10.	Jawa Timur	Kota Kediri	36,67
Terendah			
1.	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	0,00
2.	Sumatera Barat	Padang Pariaman	0,00
3.	Sumatera Barat	Solok Selatan	0,00
4.	Jambi	Kota Sungai Penuh	0,00
5.	Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	0,00
6.	Bengkulu	Bengkulu Selatan	0,00
7.	Kepulauan Riau	Natuna	0,00
8.	Nusa Tenggara Timur	Lembata	0,00
9.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	0,00
10.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	0,00

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterlibatan perempuan di parlemen
(1)	(2)	(3)	(4)
Terendah			
11.	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	0,00
12.	Kalimantan Barat	Kayong Utara	0,00
13.	Maluku Utara	Kepulauan Sula	0,00
14.	Papua Barat	Tambrauw	0,00
15.	Papua Barat	Maybrat	0,00
16.	Papua Barat	Nduga	0,00
17.	Papua	Lanny Jaya	0,00
18.	Papua	Yalimo	0,00
19.	Papua	Dogiyai	0,00
20.	Papua	Intan Jaya	0,00
21	Papua	Deiyai	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

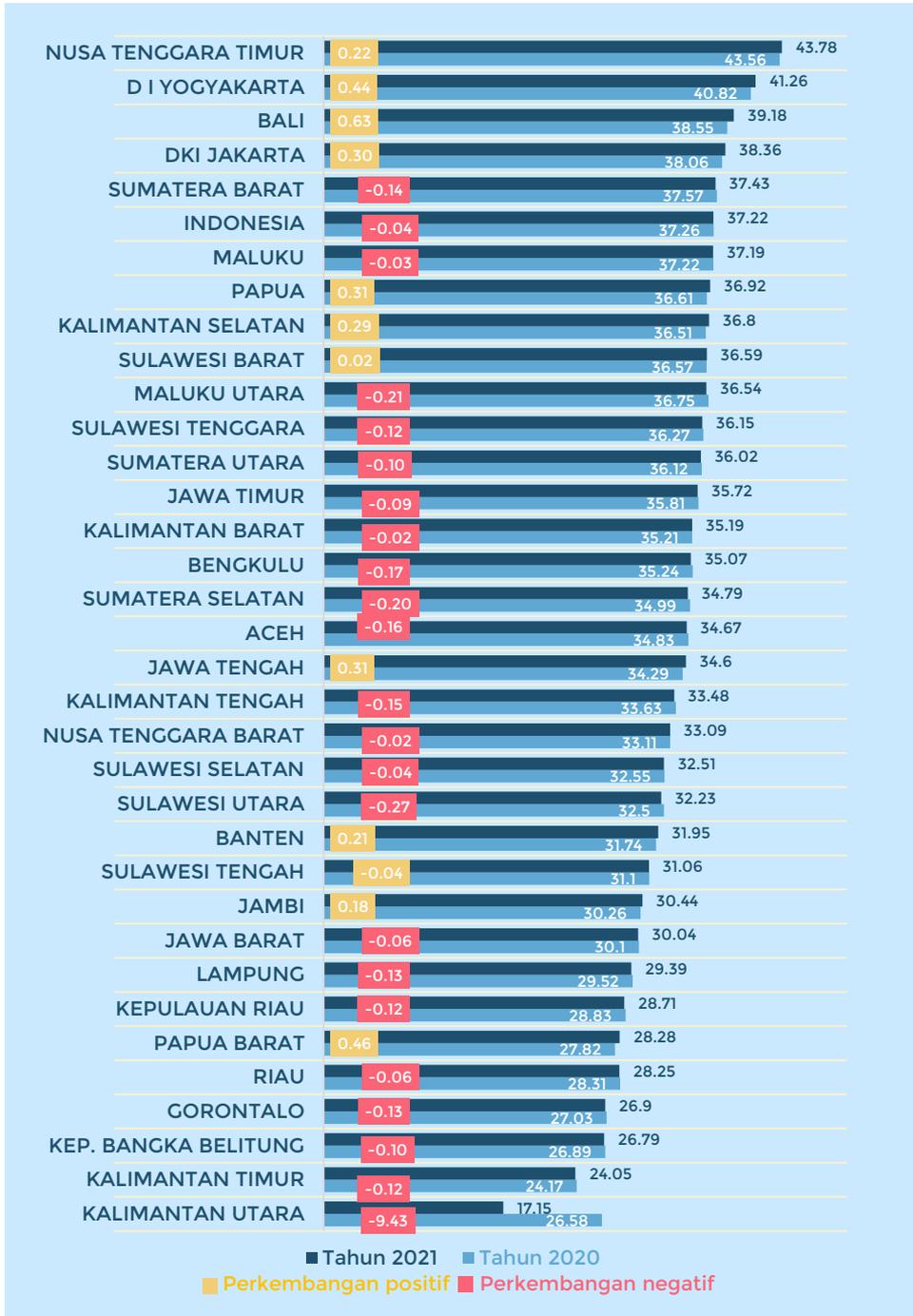
4.2.4 Perempuan Berkontribusi dalam Penciptaan Pendapatan

Indikator pembentuk IDG yang juga cukup jauh tertinggal capaiannya adalah sumbangan pendapatan perempuan dengan nilainya baru sebesar 37,22 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, sumbangan pendapatan perempuan di sebagian besar provinsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 mulai dari 0,02 persen hingga 9,43 persen. Kontribusi perempuan dalam pendapatan rata-rata baru mencapai 1/3 dibandingkan sumbangan dari laki-laki. Sumbangan pendapatan perempuan dipengaruhi oleh proporsi angkatan kerja serta rasio terhadap rata-rata upah. Proporsi angkatan kerja perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Di sisi lain rata-rata upah yang dimiliki perempuan juga masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan nilai indeks pendapatan masih rendah (0,602) atau jauh dari angka 1.

Gambar 4.8

Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan menurut Provinsi Tahun 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumbangan pendapatan perempuan di beberapa kabupaten/kota melebihi laki-laki, bahkan di Konawe Kepulauan 77,54 persen pendapatan disumbang oleh perempuan. Sementara di kabupaten Humbang Hasundutan, Gunung Mas, Samosir, Nias Barat dan Karo sumbangan pendapatan sudah berimbang dengan laki-laki yaitu sekitar 50 persen.

Tabel 4.5

Kabupaten/Kota yang memiliki nilai sumbangan pendapatan perempuan Tertinggi dan Terendah tahun 2021

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi			
1.	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	77,54
2.	Papua Barat	Manokwari Selatan	66,21
3.	Papua	Deiyai	57,93
4.	NTT	Ende	52,65
5.	Sumatera Utara	Nias	51,14
6.	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	50,34
7.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	50,32
8.	Sumatera Utara	Samosir	50,13
9.	Sumatera Utara	Nias Barat	50,09
10.	Sumatera Utara	Karo	50,02
Terendah			
1.	Maluku Utara	Pulau Taliabu	14,85
2.	Kalimantan Timur	Berau	17,57
3.	Kalimantan Timur	Kutai Timur	18,47
4.	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	18,96
5.	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	19,42
6.	Riau	Siak	20,09
7.	Kalimantan Tengah	Sukamara	20,23
8.	NTB	Sumbawa Barat	20,45
9.	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	20,63
10.	Lampung	Pringsewu	20,70

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rentang sumbangan pendapatan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi cukup bervariasi, dan tidak terlalu berubah pada 2021 dibandingkan 2020. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki rentang sumbangan pendapatan perempuan lebih dari 50 poin, di mana kabupaten/kota tertinggi mencapai 77,54 dan yang terendah hanya sebesar 18,96.

Tabel 4.6

Nilai Persentase sumbangan pendapatan perempuan Terendah, Tertinggi dan Rentang antara Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021

No	Provinsi	2020			2021		
		Tertinggi	Terendah	Rentang	Tertinggi	Terendah	Rentang
1	Aceh	39,31	23,49	15,82	39,67	23,46	16,21
2	Sumatera Utara	50,83	23,91	26,92	51,14	24,21	26,93
3	Sumatera Barat	46,90	27,27	19,63	47,10	27,24	19,86
4	Riau	36,79	20,11	16,68	36,62	20,09	16,53
5	Jambi	43,00	22,89	20,11	42,95	23,10	19,85
6	Sumatera Selatan	37,44	22,01	15,43	37,24	22,23	15,01
7	Bengkulu	42,81	24,66	18,15	42,65	24,92	17,73
8	Lampung	35,03	20,50	14,53	34,80	20,70	14,10
9	Bangka Belitung	29,89	22,18	7,71	29,83	21,79	8,04
10	Kepulauan Riau	29,55	23,16	6,39	29,62	22,91	6,71
11	DKI Jakarta	38,64	25,38	13,26	39,05	25,77	13,28
12	Jawa Barat	38,00	21,77	16,23	37,92	21,64	16,28
13	Jawa Tengah	45,72	23,66	22,06	46,19	24,08	22,11
14	D I Yogyakarta	44,63	34,09	10,54	44,72	34,27	10,45
15	Jawa Timur	40,33	23,66	16,67	39,90	23,98	15,92
16	Banten	32,21	21,11	11,10	32,06	20,93	11,13
17	Bali	46,95	36,43	10,52	46,81	36,84	9,97
18	Nusa Tenggara Barat	45,27	20,88	24,39	45,17	20,45	24,72
19	Nusa Tenggara Timur	52,39	29,70	22,69	52,65	29,44	23,21
20	Kalimantan Barat	41,17	25,71	15,46	41,41	25,42	15,99
21	Kalimantan Tengah	49,92	20,11	29,81	50,32	20,23	30,09
22	Kalimantan Selatan	48,72	26,94	21,78	49,05	27,22	21,83
23	Kalimantan Timur	30,95	17,41	13,54	31,16	17,57	13,59

No	Provinsi	2020			2021		
		Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang	Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang
24	Kalimantan Utara	28,21	21,95	6,26	28,60	22,96	5,64
25	Sulawesi Utara	39,15	24,81	14,34	39,34	24,92	14,42
26	Sulawesi Tengah	44,15	21,57	22,58	44,40	21,43	22,97
27	Sulawesi Selatan	43,00	20,86	22,14	43,48	20,63	22,85
28	Sulawesi Tenggara	77,61	19,36	58,25	77,54	18,96	58,58
29	Gorontalo	36,66	26,88	9,78	36,33	26,75	9,58
30	Sulawesi Barat	39,47	19,42	20,05	39,50	19,42	20,08
31	Maluku	44,22	26,55	17,67	44,15	26,77	17,38
32	Maluku Utara	36,89	15,25	21,64	36,93	14,85	22,08
33	Papua Barat	66,24	22,66	43,58	66,21	22,79	43,42
34	Papua	58,45	23,62	34,83	57,93	23,84	34,09

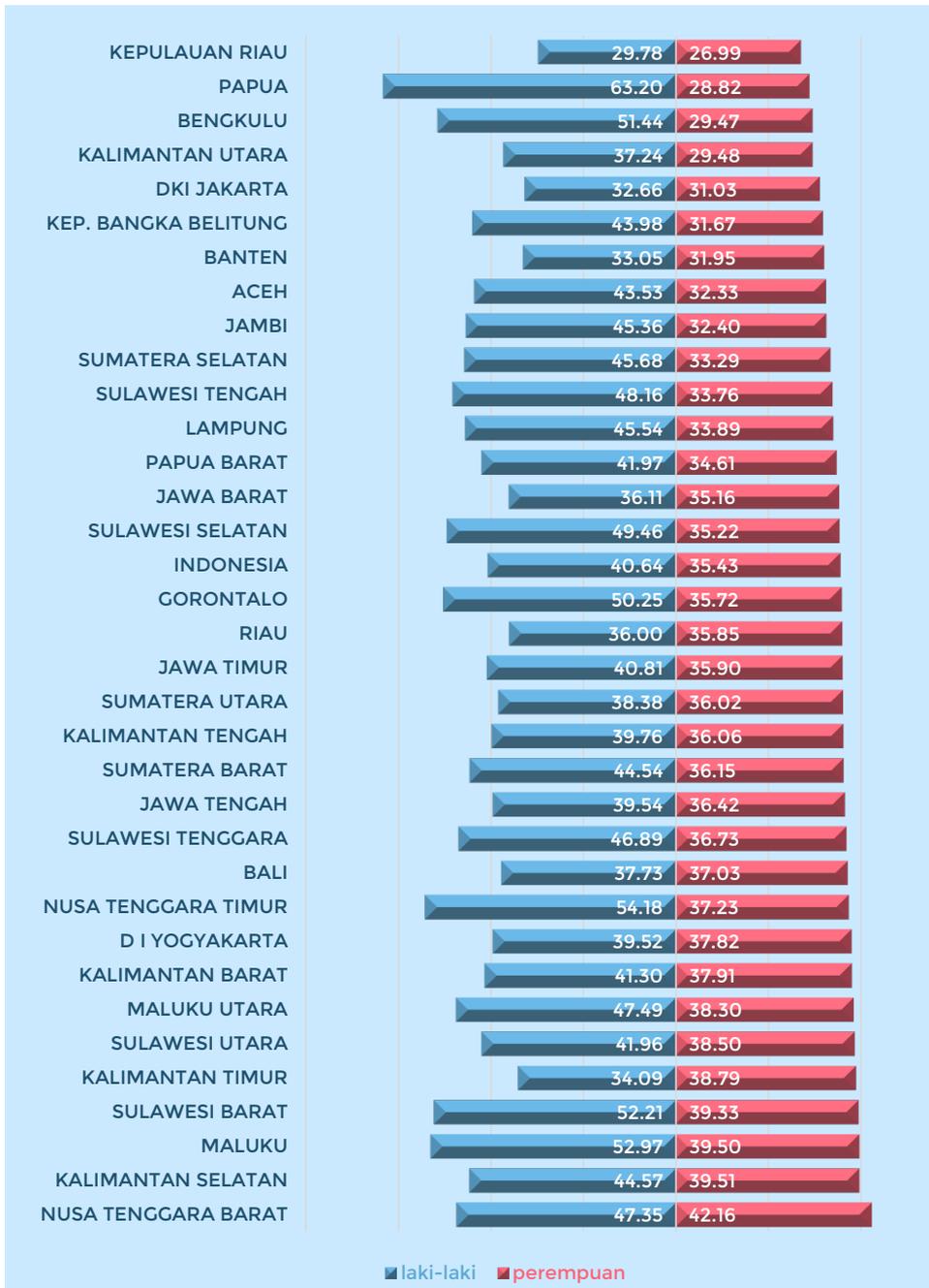
Sumber: Badan Pusat Statistik



Jika dilihat dari penduduk 15 tahun ke atas, sebanyak 40,64 persen penduduk laki-laki dan 35,43 persen penduduk perempuan berusaha. Kategori penduduk berusaha meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja dan berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar. Penduduk perempuan yang berusaha tertinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Barat (42,16 persen) dan yang terendah adalah provinsi Kepulauan Riau (26,99 persen).

Gambar 4.9

Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang berusaha, 2021

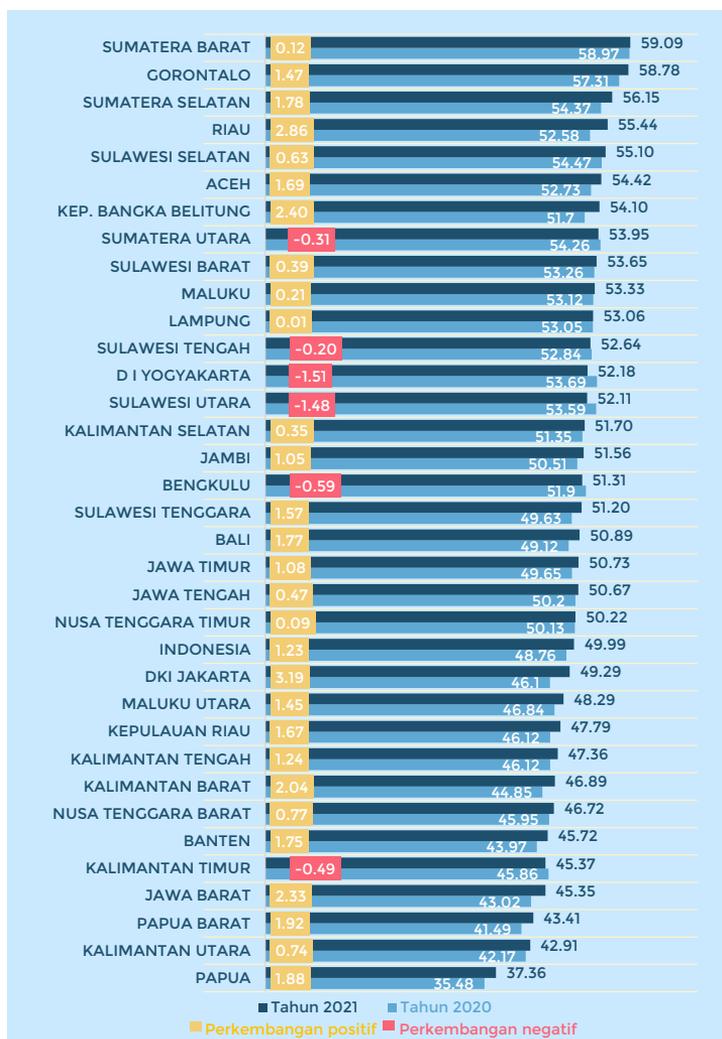


Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2.5 Profesionalisme Pekerja Perempuan Semakin diperhitungkan

Indikator pembentuk IDG yang sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional (Manager, Profesional, Administrasi, atau Teknisi). Indikator ini mengalami pertumbuhan positif artinya peran perempuan dalam pengambilan keputusan sudah semakin diperhitungkan.

Gambar 4.10 Persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurut Provinsi Tahun 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian tertinggi untuk persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2021 terdapat pada provinsi Sumatera Barat (59,09 persen), disusul Gorontalo (58,78 persen) dan Sumatera Selatan (56,15 persen). Sementara itu, DKI Jakarta mampu meningkatkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional hingga 3,19 poin dibandingkan pada tahun 2020.

Tabel 4.7 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi dan terendah tahun 2021

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi			
1.	Aceh	Aceh Timur	72,12
2.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	70,05
3.	Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	67,53
4.	Sumatera Barat	Solok Selatan	67,13
5.	Sulawesi Selatan	Enrekang	67,04
6.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	66,62
7.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	66,62
8.	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	66,17
9.	Sulawesi Selatan	Soppeng	65,78
10.	Nusa Tenggara Timur	Sikka	65,72
Terendah			
1.	Papua	Yahukimo	12,53
2.	Papua	Tolikara	14,13
3.	Papua	Intan Jaya	15,50
4.	Papua	Dogiyai	16,07
5.	Papua	Lanny Jaya	16,96
6.	Papua	Yalimo	17,27
7.	Papua	Mamberamo Tengah	19,44
8.	Papua	Puncak	19,78
9.	Papua	Deiyai	21,31
10.	Papua	Mamberamo Raya	23,80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Aceh Timur memiliki capaian perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 72,12 persen jauh melebihi angka capaian Indonesia dan provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Sumatera Barat. Namun demikian, di sebagian besar provinsi di Papua hanya mampu berkontribusi kurang dari 25 persen. Kesenjangan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, terlihat beberapa provinsi yang memiliki rentang kurang dari 10 poin hingga 30 poin. Provinsi dengan rentang nilai maksimum dan minimum persentase perempuan sebagai tenaga profesional di bawah 10 persen adalah Gorontalo (4,22 poin), DKI Jakarta (7,33 poin), Jambi (8,59 poin), dan Bengkulu (9,19 poin).

Tabel 4.8

Nilai Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Terendah, Tertinggi dan Rentang antara Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2020-2021

No	Provinsi	2020			2021		
		Tertinggi	Terendah	Rentang	Tertinggi	Terendah	Rentang
1	Aceh	63,11	40,75	22,36	72,12	41,40	30,72
2	Sumatera Utara	65,69	37,11	28,58	65,10	33,43	31,67
3	Sumatera Barat	66,00	50,78	15,22	70,05	49,36	20,69
4	Riau	58,42	47,77	10,65	61,41	48,94	12,47
5	Jambi	54,66	45,02	9,64	54,66	46,07	8,59
6	Sumatera Selatan	67,77	47,11	20,66	67,53	50,16	17,37
7	Bengkulu	58,32	48,47	9,85	56,92	47,73	9,19
8	Lampung	63,22	41,31	21,91	61,60	44,63	16,97
9	Bangka Belitung	58,06	48,68	9,38	62,84	47,75	15,09
10	Kepulauan Riau	55,53	43,00	12,53	54,55	44,23	10,32
11	DKI Jakarta	51,63	43,13	8,50	53,39	46,06	7,33
12	Jawa Barat	52,04	31,95	20,09	53,89	30,61	23,28
13	Jawa Tengah	60,72	43,97	16,75	59,89	44,94	14,95
14	DI Yogyakarta	55,37	46,13	9,24	56,03	44,59	11,44
15	Jawa Timur	57,93	33,93	24,00	60,80	35,00	25,80
16	Banten	45,81	40,36	5,45	49,68	39,38	10,30
17	Bali	52,45	38,51	13,94	54,94	42,93	12,01
18	Nusa Tenggara Barat	49,25	36,39	12,86	49,46	38,80	10,66
19	Nusa Tenggara Timur	64,10	34,63	29,47	65,72	37,64	28,08
20	Kalimantan Barat	58,08	34,30	23,78	60,64	37,52	23,12

No	Provinsi	2020			2021		
		Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang	Ter-tinggi	Te-ren-dah	Ren-tang
21	Kalimantan Tengah	56,26	38,55	17,71	54,86	43,56	11,30
22	Kalimantan Selatan	57,75	46,09	11,66	59,49	43,91	15,58
23	Kalimantan Timur	58,50	41,55	16,95	58,81	41,27	17,54
24	Kalimantan Utara	45,64	33,38	12,26	48,82	37,30	11,52
25	Sulawesi Utara	64,55	48,06	16,49	59,52	45,84	13,68
26	Sulawesi Tengah	59,58	43,05	16,53	58,53	43,14	15,39
27	Sulawesi Selatan	65,88	42,37	23,51	67,04	44,30	22,74
28	Sulawesi Tenggara	64,99	37,48	27,51	66,62	42,77	23,85
29	Gorontalo	61,64	55,29	6,35	60,53	56,31	4,22
30	Sulawesi Barat	57,01	46,54	10,47	60,35	47,63	12,72
31	Maluku	62,77	41,39	21,38	59,71	47,44	12,27
32	Maluku Utara	57,65	43,65	14,00	53,90	39,97	13,93
33	Papua Barat	48,81	20,59	28,22	50,43	25,21	25,22
34	Papua	46,52	13,15	33,37	45,14	12,53	32,61

Sumber: Badan Pusat Statistik

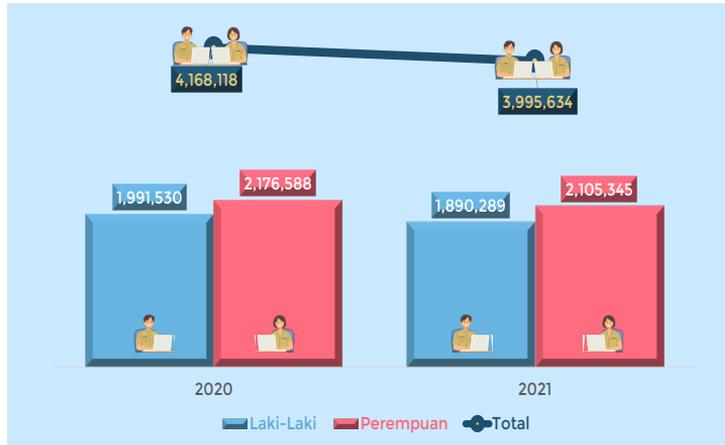
Kabupaten/kota di provinsi Gorontalo memiliki rentang persentase perempuan sebagai tenaga profesional terendah yaitu 4,22 poin, dan sudah memiliki capaian yang cukup baik yaitu berkisar 56,31 persen hingga 60,53 persen. Sementara itu, kabupaten/kota di provinsi Papua memiliki rentang terbesar mencapai 32,61 poin, capaian tertinggi adalah 45,14 persen dan terendah adalah 12,53 persen.

Tenaga profesional perempuan salah satunya dalam institusi pemerintahan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota pada tahun 2021 mencapai 3,9 juta orang, menurun dari jumlah tahun 2020 yang mencapai 4,1 juta orang.

Komposisi ASN perempuan sedikit lebih banyak dari pada laki-laki, namun pada level pengambil keputusan atau jabatan pimpinan tinggi terlihat lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Persentase laki-laki pada jabatan pimpinan tinggi utama mencapai 80 persen dan perempuan hanya 20 persen. Pada jabatan pimpinan tinggi madya, hanya terdapat 16,14 persen ASN perempuan yang dapat menduduki jabatan tersebut. Demikian juga pada jabatan tinggi pratama hingga administrator juga lebih banyak didominasi oleh ASN laki-laki.

Gambar 4.11

Jumlah ASN di Indonesia menurut Jenis Kelamin, 2020-2021

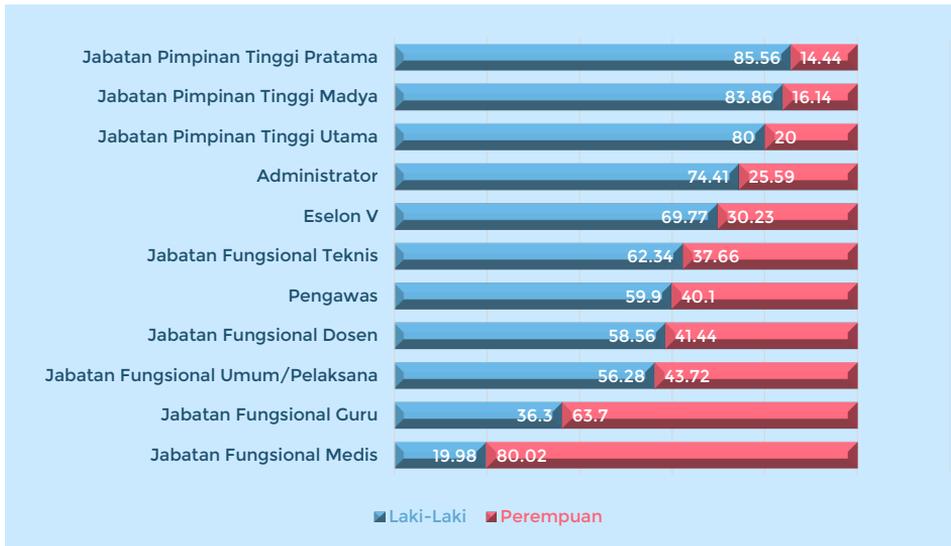


Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2022

Upaya untuk meningkatkan masing-masing indikator pembentuk IDG mulai tingkat kabupaten/kota akan berdampak pada capaian provinsi dan tentunya mendongkrak nilai nasional. Pemberdayaan gender dapat dilakukan dengan program-program yang mengajak partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi.

Gambar 4.12

Persentase ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, 2021



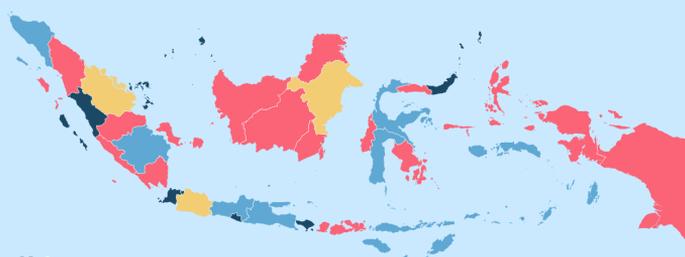
Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2022



05

KETERKAITAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KETERKAITAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN MANUSIA



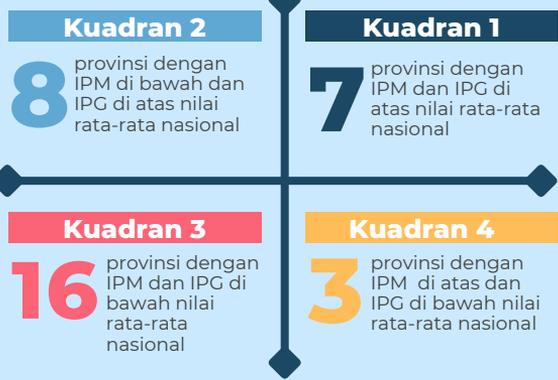
Keterangan:

- Kuadran 1: DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta
- Kuadran 2: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Aceh
- Kuadran 3: Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, Lampung, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua Barat, Papua, Bengkulu
- Kuadran 4: Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur

IPM

IPG

ANALISA KUADRAN IPM DAN IPG



Keterangan:

- Kuadran 1: Sulawesi Utara, DI Yogyakarta
- Kuadran 2: Kalimantan Tengah, Maluku Utara
- Kuadran 3: Kep. Bangka-Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara
- Kuadran 4: Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan

IPG

IDG

ANALISA KUADRAN IPG DAN IDG



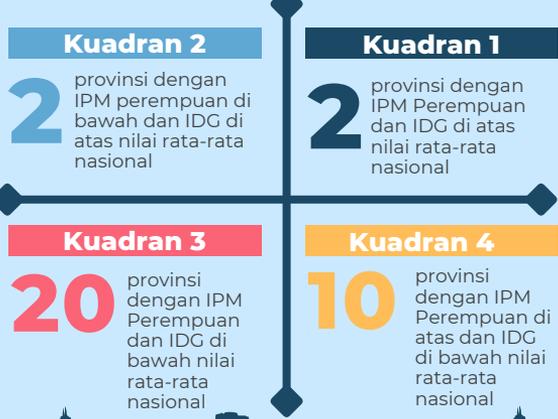
Keterangan:

- Kuadran 1: Sulawesi Utara, Yogyakarta
- Kuadran 2: Kalimantan Tengah, Maluku Utara
- Kuadran 3: Bangka-Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara
- Kuadran 4: Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

IPM Perempuan

IDG

ANALISA KUADRAN IPM PEREMPUAN DAN IDG



5.1. Analisa Kuadran IPM dan IPG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam kualitas hidup di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara umum, IPM Indonesia tahun 2021 (72,29) mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020 (71,94), yakni 0,35. Hal yang sama juga terjadi pada IPG Indonesia, yakni terjadi peningkatan sebesar 0,21 di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Keterkaitan antara IPM dan IPG dianalisa dalam bentuk kuadran. Data IPM dan IPG per provinsi dikelompokkan menjadi empat kuadran sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.

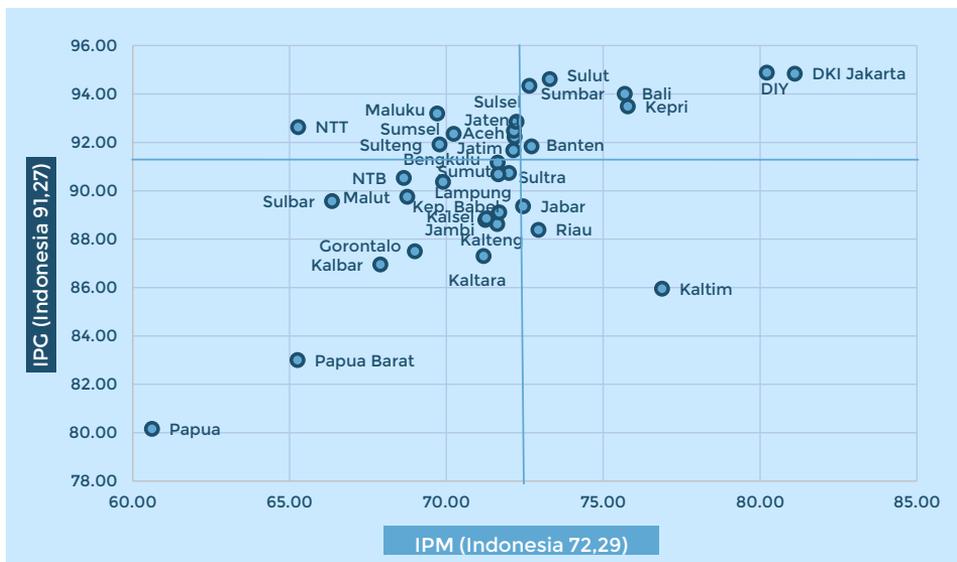
Gambar 5.1 Keterkaitan antara IPM dan IPG dalam bentuk kuadran



Gambar 5.2 menunjukkan posisi setiap provinsi di empat kuadran tersebut pada tahun 2021. Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta merupakan provinsi dengan nilai IPM dan IPG tertinggi di tahun 2021. Sementara, provinsi Papua dan Papua Barat memiliki nilai IPM dan IPG terendah. Posisi wilayah menurut kuadran di tahun 2020, antara lain:

- Kuadran I** DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Banten.
- Kuadran II** Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Maluku, Sumatera Selatan, NTT.
- Kuadran III** Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, Lampung, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua
- Kuadran IV** Jawa Barat, Riau, dan Kalimantan Timur

Gambar 5.2 Sebaran Provinsi menurut Kelompok Kuadran IPM dan IPG, 2021

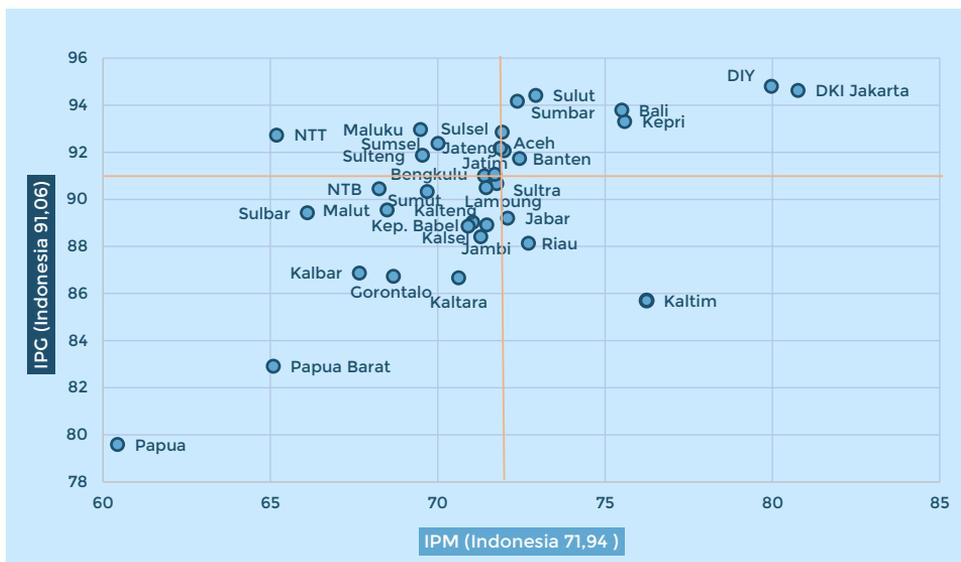


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5.3 menunjukkan posisi wilayah menurut kuadran di tahun 2020, antara lain:

- Kuadran I** DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Aceh, Banten.
- Kuadran II** Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, NTT.
- Kuadran III** Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Lampung, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua.
- Kuadran IV** Kuadran IV: Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur.

Gambar 5.3 Sebaran Provinsi menurut Kelompok Kuadran IPM dan IPG, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5.4 menjelaskan posisi provinsi di setiap kuadran yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Secara umum, perubahan jumlah dan posisi provinsi di tahun 2021 tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2020. Hal ini terlihat dari jumlah provinsi yang berada di kuadran I tidak bertambah bahkan berkurang dari 8 provinsi (tahun 2020) menjadi 7 Provinsi (tahun 2021). Hanya 20 persen daerah di Indonesia yang memiliki nilai IPM dan IPG di atas nilai rata-rata nasional.

Gambar 5.4 Hubungan antara IPM dan IPG Provinsi, 2020-2021

Kuadran II		IPG di atas nasional	Kuadran I	
2020	2021		2020	2021
Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Maluku Sumatera Selatan NTT Bengkulu	Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Maluku Sumatera Selatan NTT Aceh		DKI Jakarta Yogyakarta Bali Kepulauan Riau Sulawesi Utara Sumatera Barat Banten Aceh	DKI Jakarta Yogyakarta Bali Kepulauan Riau Sulawesi Utara Sumatera Barat Banten
IPM di bawah nasional		IPM di atas nasional		
Kuadran III		IPG di bawah nasional	Kuadran IV	
2020	2021		2020	2021
Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat NTB Lampung Jambi Maluku Utara Kep.Babel Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Barat Gorontalo Papua Barat Papua	Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat NTB Lampung Jambi Maluku Utara Kep.Babel Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Barat Gorontalo Papua Barat Papua Bengkulu		Jawa Barat Riau Kalimantan Timur	Jawa Barat Riau Kalimantan Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain itu, tidak terjadi pengurangan jumlah provinsi di kuadran III, yaitu 15 provinsi di tahun 2020 menjadi 16 provinsi di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan hampir 50 persen daerah di Indonesia memiliki nilai IPM dan IPG di bawah nilai nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang mempunyai kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih kurang dan belum

merata dengan daerah-daerah lainnya serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Provinsi Aceh mengalami perubahan tempat dari kuadran I di tahun 2020 menjadi kuadran II di tahun 2021, artinya nilai IPM Aceh berubah menjadi di bawah nilai rata-rata nasional sementara nilai IPG-nya tetap di atas rata-rata nasional. Selain itu, provinsi yang mengalami perubahan kuadran juga terjadi di Bengkulu. Tahun 2020, Provinsi Bengkulu ada di kuadran II kemudian bergeser ke kuadran III di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai IPG, sebelumnya nilai IPG Bengkulu berada di atas nilai nasional, kini menjadi di bawah nilai nasional.

Jika dilihat dari Angka Harapan Hidup (UHH) perempuan di Aceh mengalami peningkatan dari 71,91 tahun (2020) ke 71,94 tahun (2021). Capaian UHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu pada tahun 2021 sebesar 68,07 tahun. Hal yang sama juga terjadi pada harapan lama sekolah (HLS) perempuan di Aceh yaitu tahun 2021 (14,53 tahun) mengalami kenaikan sebanyak 0,05 poin dari tahun 2020 (14,48 tahun). Peningkatan HLS perempuan di tahun 2021 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Hal berbeda terjadi pada komponen rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan di Aceh masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, pada tahun 2020 (perempuan: 9,13 tahun dan laki-laki: 9,54 tahun) maupun 2021 (perempuan: 9,22 tahun dan laki-laki: 9,55 tahun). Namun, peningkatan RLS tahun 2021 dibandingkan 2020 lebih tinggi perempuan (0,09 poin) dibandingkan laki-laki (0,01 poin). Pengeluaran per kapita penduduk perempuan di Aceh tahun 2021 masih di angka 8 jutaan rupiah per tahun, masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yang berada di angka 13 jutaan rupiah per tahun. Pengeluaran per kapita penduduk perempuan di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 59 ribu per orang per tahun, sementara pada laki-laki mencapai 133 ribu per orang per tahun.

Angka Harapan Hidup (UHH) perempuan di Bengkulu mengalami kenaikan 0,13 poin dari tahun 2020 (71,40 tahun) ke 2021 (71,27 tahun). UHH perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan di Bengkulu hanya naik 0,06 poin dari 14 tahun di tahun 2020 menjadi 14,06 tahun di tahun 2021. Angka ini juga sedikit lebih tinggi dari angka laki-laki.

Sementara, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan di Bengkulu lebih rendah dari laki-laki selama 2 tahun terakhir (2020-2021). Kenaikan RLS perempuan di Bengkulu pun hanya 0,09 poin dari 8,50 tahun (2020) menjadi 8,59 tahun (2021). Kesenjangan pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki di Bengkulu masih tinggi,

pengeluaran per kapita perempuan ada di angka 8 jutaan per tahun dan laki-laki 14 jutaan per tahun. Kenaikan pengeluaran per kapita perempuan di Bengkulu dari tahun 2020 ke 2021 hanya sebesar 74 ribuan per tahun. Sementara, kenaikan pengeluaran per kapita laki-laki dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 179 ribuan per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi di Bengkulu.

5.2. Analisa Kuadran IPG dan IDG

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi. Secara umum, nilai IPG nasional mengalami kenaikan 0,21 poin dari tahun 2020 (91,06) ke 2021 (91,27). Hal yang sama juga terjadi pada nilai IDG nasional, terjadi peningkatan sebesar 0,69 poin, yaitu 75,57 di tahun 2020 menjadi 76,26 di tahun 2021.

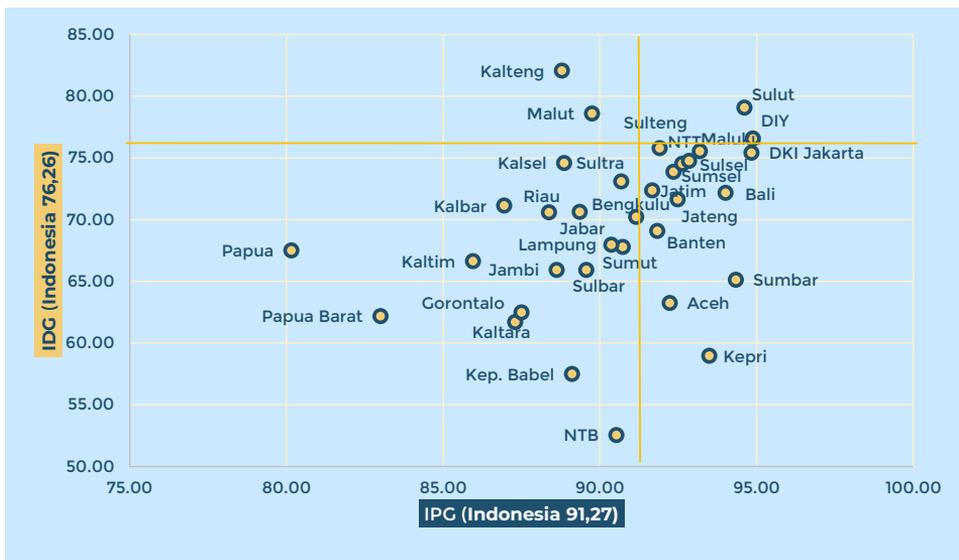
Keterkaitan antara IPG dan IDG dianalisa dalam bentuk kuadran. Data-data terkait IPG dan IDG per provinsi kemudian dikelompokkan menjadi empat kuadran, yaitu:

Gambar 5.5 Keterkaitan antara IPG dan IDG dalam bentuk kuadran



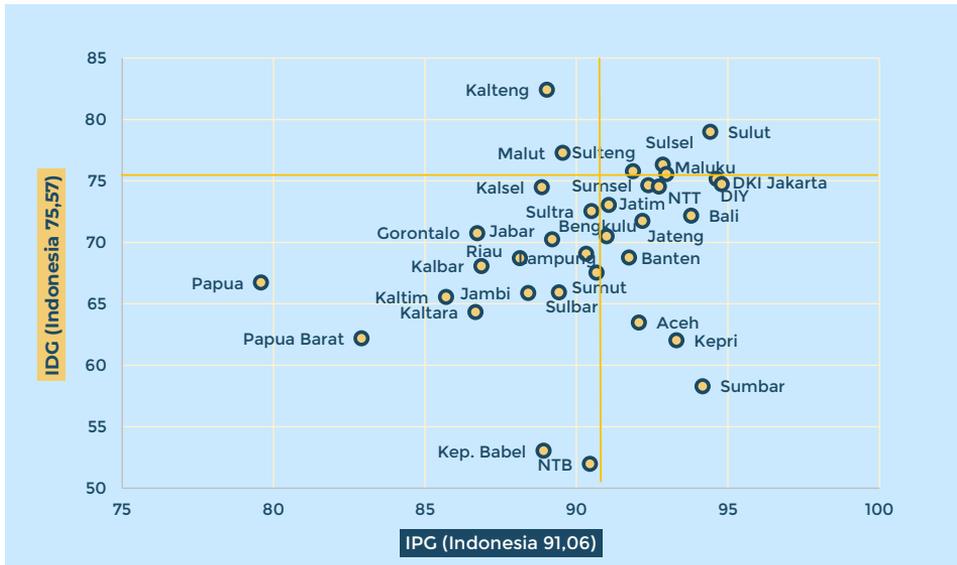
Gambar 5.6 menunjukkan posisi setiap provinsi di empat kuadran tersebut pada tahun 2021. Hanya ada 2 provinsi yang masuk ke kuadran I (nilai IPG dan IDG di atas nasional), yaitu Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta. Kuadran II juga hanya ada 2 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan NTB berada di kuadran III (nilai IPG dan IDG di bawah nilai nasional). Provinsi yang berada di kuadran IV antara lain Sulawesi Tengah, Maluku, DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sumatra Barat, Aceh, Kepulauan Riau.

Gambar 5.6 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPG dan IDG, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, provinsi dengan nilai IPG dan IDG yang di atas nilai nasional (kuadran I) antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku (Gambar 5.7). Di kuadran II, ada Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Provinsi dengan nilai IDG dan IPG di bawah nasional antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Barat, Gorontalo, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, NTB, Papua, dan Papua Barat. Provinsi lainnya masuk ke kuadran IV.

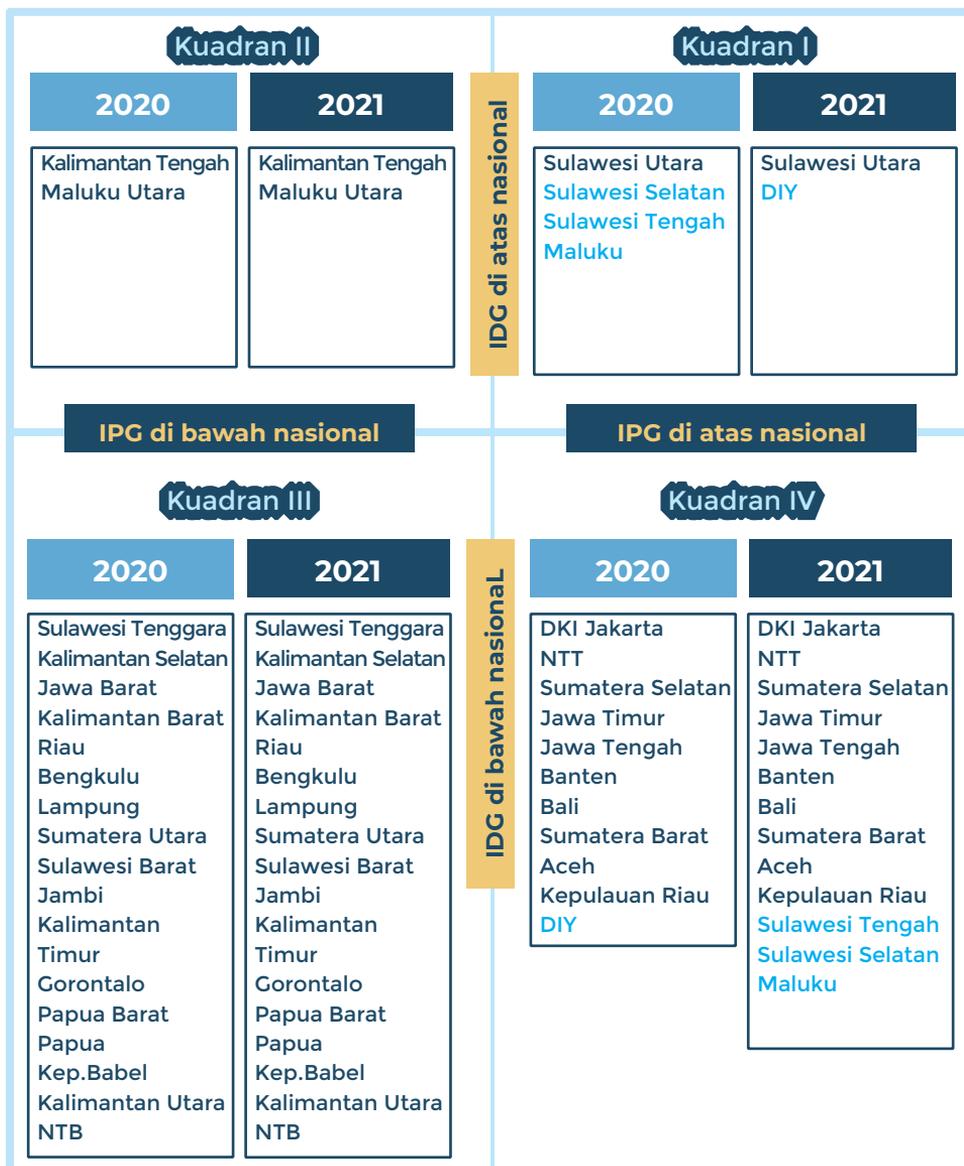
Gambar 5.7**Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPG dan IDG, 2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5.8 menjelaskan bahwa terdapat 4 provinsi yang mengalami perubahan posisi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku mengalami perubahan kuadran, yaitu tahun 2020 ada di kuadran I menjadi kuadran IV di tahun 2021. Penyebabnya adalah terjadi perubahan nilai IDG di provinsi tersebut, sebelumnya berada di atas nilai nasional pada tahun 2020 kemudian menjadi di bawah nilai nasional pada tahun 2021. Sementara DI Yogyakarta terjadi perubahan ke arah yang lebih baik yakni nilai IPG dan IDG-nya berada di atas nasional di tahun 2021, sebelumnya nilai IDG Provinsi DI Yogyakarta berada di bawah nasional di tahun 2020. Dengan demikian, pada tahun 2021 berada pada kuadran I sebelumnya berada pada kuadran IV pada tahun 2020.

Menurut jumlah provinsi, kuadran I mengalami penurunan tahun 2020 yaitu berjumlah 4 provinsi (11,76 persen) menjadi 2 provinsi di tahun 2021 (5,88 persen). Sementara, jumlah provinsi yang berada di kuadran III sebanyak 18 provinsi atau hampir 53 persen wilayah di Indonesia yang nilai IPG dan IDG-nya masih di bawah nilai nasional. Hal ini menunjukkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah nasional.

Gambar 5.8 Hubungan antara IDG dan IPG, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

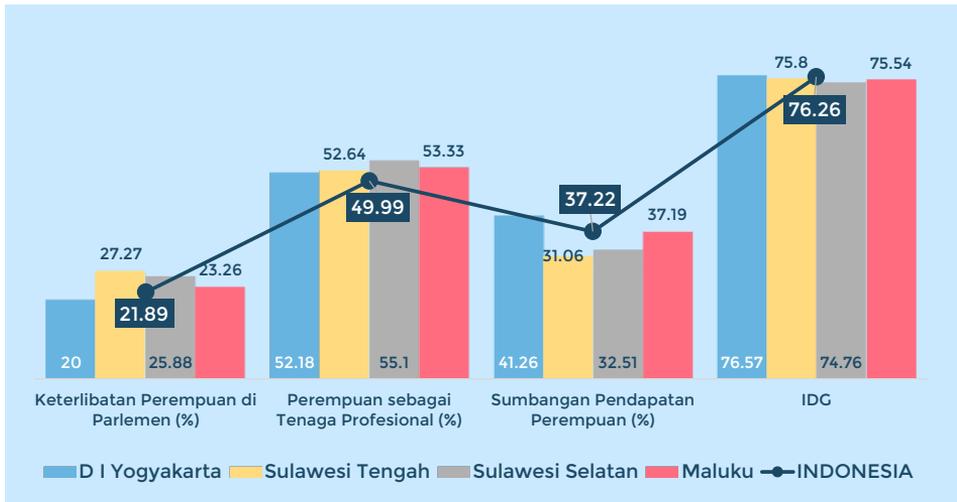
Gambar 5.9 menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku memiliki nilai IDG yang lebih rendah dari nilai IDG nasional. Penyebabnya adalah indikator persentase sumbangan pendapatan perempuan yang memiliki nilai capaian

dibawah angka nasional. Sementara untuk indikator lainnya yaitu persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional sudah berada di atas nilai nasional untuk ketiga provinsi tersebut.

Gambar 5.9 juga menunjukkan persentase keterlibatan perempuan di parlemen pada provinsi DI Yogyakarta (20 persen) masih lebih rendah dari nilai nasional (21,89 persen), walaupun nilai IDG-nya sudah di atas nilai nasional. Hal ini menunjukkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi masih belum merata di seluruh daerah di Indonesia.

Gambar 5.9

Komponen Pembentuk IDG di Provinsi yang Terjadi Perubahan Kuadran



Sumber: Badan Pusat Statistik

5.3. Analisa Kuadran IPM Perempuan dan IDG

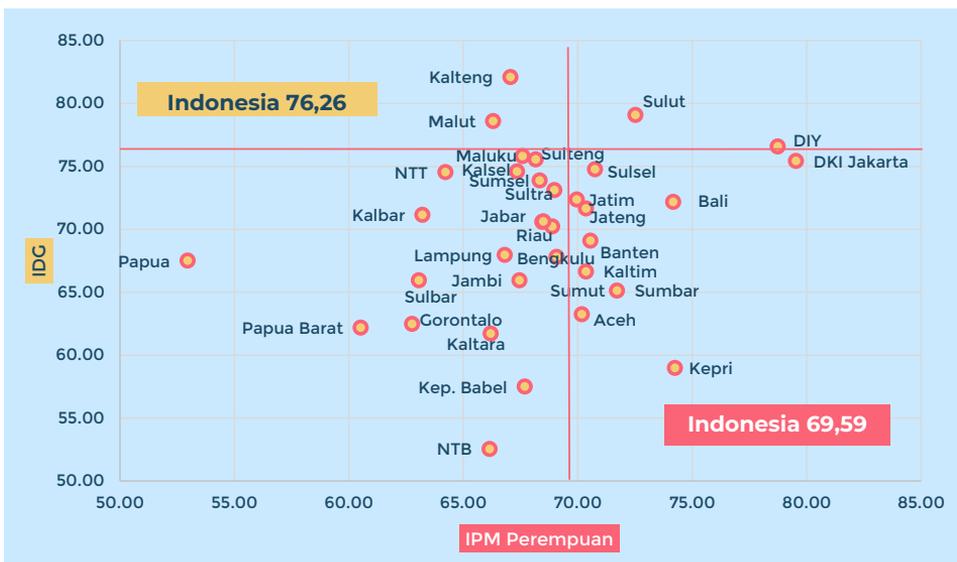
Keterkaitan antara IPM Perempuan dan IDG dianalisa dalam bentuk kuadran. Data-data terkait IPM Perempuan dan IDG per provinsi kemudian dikelompokkan menjadi empat kuadran, yaitu:

Gambar 5.10 Keterkaitan antara IPM Perempuan dan IDG dalam bentuk kuadran



Provinsi yang memiliki angka IPM Perempuan dan IDG di atas nilai rata-rata nasional di tahun 2021 adalah Provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara di kuadran I (Gambar 5.11).

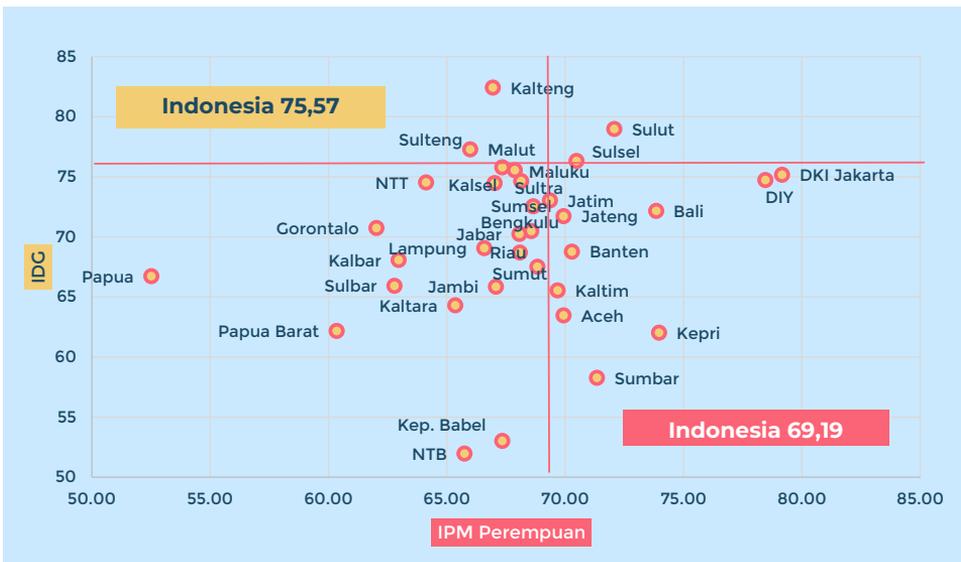
Gambar 5.11 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPM Perempuan dan IDG, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di kuadran II, ada Maluku Utara dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kuadran III berisi provinsi dengan nilai IPM Perempuan dan IDG masih di bawah nilai nasional antara lain Maluku, Sulawesi Tengah, NTT, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan NTB. Provinsi selain itu masuk ke kuadran IV.

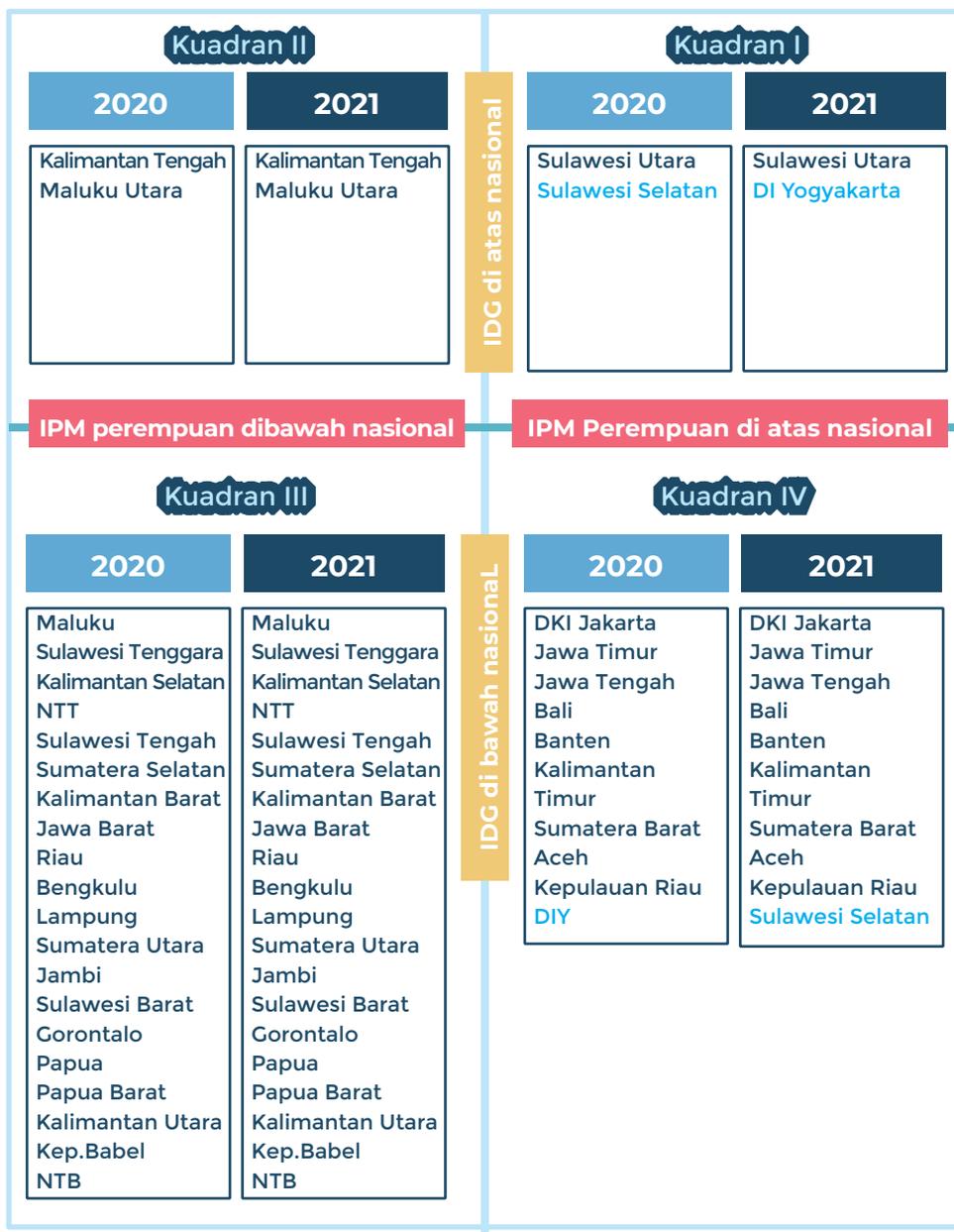
Gambar 5.12 Sebaran Provinsi menurut Kuadran Kelompok Nilai IPM Perempuan dan IDG, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi IPM Perempuan dan IDG di tahun 2020 ditunjukkan oleh Gambar 5.12. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan ada di kuadran I, sementara Kalimantan Tengah dan Maluku Utara ada di kuadran II. Provinsi dengan nilai IPM perempuan dan IDG yang masih di bawah nilai nasional antara lain Sulawesi Tengah, Maluku, NTT, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bengkulu, Jawa Barat, Riau, Lampung, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan NTB. Provinsi lainnya masuk ke kuadran IV.

Gambar 5.13 Hubungan antara IPM Perempuan dan IDG, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, tidak ada provinsi yang mengalami perubahan kuadran kecuali Provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan (Gambar 5.12). Provinsi DI Yogyakarta mengalami perbaikan nilai IDG menjadi di

atas nilai nasional sementara Sulawesi Selatan mengalami penurunan nilai IDG menjadi di bawah nilai nasional. Nilai IPM perempuan di kedua provinsi tersebut sudah berada di atas nilai nasional.

Jika dilihat dari komponen penyusun IDG, DI Yogyakarta mengalami kenaikan dari 2020 ke 2021, kecuali di komponen persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan 1,51 poin dari 53,69 persen ke 52,18 persen. Sementara persentase keterlibatan perempuan di parlemen kenaikannya cukup besar, yakni 1,82 poin dari 18,18 persen menjadi 20,00 persen, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan naik 0,44 poin dari 40,82 persen menjadi 41,26 persen.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, 2 dari 3 komponen penyusun IDG-nya mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen turun 2,52 poin dari 28,40 persen menjadi 25,88 persen. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional naik hanya 0,63 poin dari 54,47 persen menjadi 55,10 persen. Persentase sumbangan pendapatan perempuan turun 1,56 poin dari 76,32 persen ke 74,76 persen.

Secara keseluruhan, masih ada 20 provinsi yang berada di kuadran IV atau 58,82 persen wilayah Indonesia memiliki angka IPM Perempuan dan IDG di bawah nilai nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih rendah dan tidak merata di wilayah Indonesia. Selain itu, peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi juga masih kurang dan tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia.

5.4. Best Practice Wilayah dengan Capaian Tinggi

Daerah dengan capaian IPM, IPG, dan IDG tertinggi di tahun 2021 adalah DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Daerah lain yang memiliki nilai IPM dan IPG tertinggi, antara lain DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, dan Banten. Hasil literature review terkait usaha untuk peningkatan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan perempuan akan dibahas di subbab ini.

Tahun 2021, DKI Jakarta merupakan wilayah dengan nilai IPM tertinggi (81,11). IPM di sebuah wilayah berkaitan dengan tiga dimensi, yakni kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak. Kesehatan dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita.

Penelitian Bakhri (2012) menunjukkan bahwa Product Domestic Regional Bruto atau PDRB berpengaruh terhadap IPM. Pendapatan yang tinggi di suatu daerah menjadi modal dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas modal manusia (Ezkirianto dan Findi, 2013). DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tentunya memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Semakin besar pendapatan daerah berdampak dengan meningkatnya kapasitas pemerintah suatu daerah dalam penyediaan fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mampu meningkatkan pembangunan manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor input sekaligus tujuan utama dari proses pembangunan (Ezkirianto dan Findi, 2013). Pembangunan manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Penelitian Sangkereng, Engka dan Sumual (2019) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap IPM. Penduduk bisa menjadi pelaku atau sumber daya untuk faktor produksi, bisa juga menjadi konsumen dari produk yang dihasilkan. Tingginya IPM DKI Jakarta tentunya tidak lepas dari faktor sumber daya yang tersedia, produktivitas penduduk, tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan infrastruktur, maupun efisiensi dan efektifitas kebijakan pemerintah daerah. Belanja pemerintah DKI Jakarta di bidang pendidikan dan kesehatan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan dalam pembangunan manusia. Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap kapabilitas individu serta pemahaman teknologi modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi (Ezkirianto dan Findi, 2013).

IPM DIY tahun 2021 juga sangat tinggi, yakni 80,22. Hal ini didukung oleh sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa (BPS, 2019). Hal tersebut dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis budaya seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY. Dukungan komunitas intelektual di DIY juga membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif.

Keberadaan sektor industri kreatif dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibandingkan daerah lain untuk menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal finansial yang dialami DIY (BPS, 2019). Secara lebih luas, potensi ekonomi kreatif di DIY tidak hanya didukung oleh sektor industri pengolahan namun juga mencakup sektor lain seperti kuliner, musik, arsitektur, seni pertunjukan, seni rupa dan lainnya.

Sulawesi Utara merupakan provinsi pertama di Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Papua) yang berada pada level Indeks Pembangunan Manusia tinggi. Menurut Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai strategi dan treatment khusus untuk meningkatkan IPM hingga masuk kategori tinggi, antara lain menyediakan pendidikan inklusif, terjangkau, dan berkualitas serta mendorong pendidikan vokasi dan juga pelestarian budaya hingga kearifan lokal.

5.5. Strategi Pencapaian untuk Wilayah di Kuadran II, III dan IV

Perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan variabel setiap komponen IPM sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai lebih fokus dan tetap sasaran. Beberapa hal yang diutamakan menurut analisis BPS pada IPM DIY (2019) untuk dilaksanakan dalam rangka mendorong provinsi di kuadran II, III, dan IV, antara lain:

- a Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mendongkrak determinan variabel angka harapan hidup, dengan menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi; mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin; meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin; memperluas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok melalui sistem monitoring dan informasi kesehatan untuk menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat.
- b Realisasi anggaran pendidikan dari APBD difokuskan ke tiga permasalahan mendasar yaitu belum meratanya pelayanan pendidikan, masih banyaknya sekolah yang tidak layak, dan pengelolaan pendidikan yang belum optimal.

Daya beli masyarakat secara mendasar dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga. Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di perdesaan perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di perdesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mengembangkan usaha pertanian supaya lebih produktif, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Arawi, F. A., Atthahara, H. Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina*. 4(2), 74–85.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Gender (Metode 2020)*.
- Brahim Tengah. (2013). Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21: Isu dan Caaran di Brunei Darussalam. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 6(2), 197–208. Diakses dari: <http://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/viewFile/492/490>.
- Dewi, O. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 200–218. Diakses dari: <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4111.200-218>.
- Ernawati, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1), 18–24.
- Kemen PPPA. (2000). Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses dari: <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Khouangvichit, D. (2010). *Socio-Economic Transformation and Gender Relations in Lao PDR*. Department of Social and Economic Geography, Sweden.
- Lao People's Democratic Republic. (2020). *9TH Five-Year National Socioeconomic Development Plan (2021-2025)*. 20.
- National and International Partners in Lao People's Democratic Republic. (2019). *Lao People's Democratic Republic: Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Novrita, Sri Zulfia, Ramainas, dkk. (2012). Analisis Peran Gender Dalam Sistem Matrilineal, Manajemen Keuangan dan Kesejahteraan Keluarga (Kasus pada Keluarga Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman di Provinsi Sumatera Barat. Laporan Penelitian Dosen Pemula. Universitas Negeri Padang.
- Nurhalizah, M. E., & Yuwafik, M. H. (2020). Kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. 15(2).
- Odi, Pyburn, R., Audet-bélanger, G., Verhart, N., Wijngaart, A. Van Den, Anonuevo, C. A. Q., Office, F. P., JNC, Colverson, F., N, & Zealand, N. (2000). An Overview of the Gender Situation in the Philippines. September, 5-7. Diakses dari: <http://www.google.com/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEIQFjAG&url=http%3Apersen2Fpersen2Fwww.gfras.orgpersen2Fenpersen2Fknowledgopersen2Fdocumentspersen2Fgender-equality-inras3.htmlpersen3Fdownloadpersen3D193persen3Agender-integration-in-value-chains-good-practices-farnworth-colver>.
- Paqueo, V. B., & Orbeta, A. C. (2019). Gender equity in education: Helping the boys catch up. Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series No. 2019-01.
- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W, (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Putri, Ririn Noviyanti. (2019). Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 19 No 1. 2019.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, 4(2), 52-58.
- Setiyono, D.A., & Imelda, J.D. (2021). Makna Dan Perubahan Relasi Gender Bagi Perempuan Pekerja Dadakan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 446. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2144>.
- Todaro, M. & Smith, S. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [UNDP] United Nations Development Programme. (2022). Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Diakses dari: Report 2021/2022. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf.
- [UNICEF] United Nations Children's Fund. (2022). Mengatasi Hambatan Gender dalam Kewirausahaan dan Kepimpinan Bagi Anak Perempuan dan Perempuan di Asia Tenggara. Diakses dari: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan>.
- Vibriyanti, Deshinta. (2013). Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Ekonomi Analisa Data Sakernas 1908-2013. Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 8 No 1 Tahun 2013.
- Walby, S. (1990). Theorising Patriarchy (p. 229). USA: Basil Blackwell Inc.
- World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. In World Economic Forum (Issue March). Diakses dari: <http://reports.weforum.org/global->
- Yuliani, Putri Analisa. (2021, Januari 25). Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/megapolitan/379719/simak-ini-empat-layanan-kesehatan-gratis-di-dki>.
- Zakiah, (2010). Pemberdayaan perempuan oleh Lajnah Perempuan. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial keagamaan, Nomor XVII.



DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN

01

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Komponen
Pembentuknya menurut Provinsi
dan Kabupaten/Kota, 2020/2021

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	69,93	69,96	14,31	14,36	9,33	9,37	9.492	9.572	71,99	72,18
Simeulue	65,26	65,28	13,76	13,90	9,34	9,48	7.085	7.148	66,03	66,41
Aceh Singkil	67,39	67,43	14,31	14,32	8,53	8,68	8.707	8.776	68,94	69,22
Aceh Selatan	64,35	64,40	14,42	14,60	8,87	8,88	8.089	8.180	67,12	67,44
Aceh Tenggara	68,14	68,22	14,00	14,01	9,66	9,67	8.020	8.030	69,37	69,44
Aceh Timur	68,72	68,74	13,03	13,04	8,15	8,21	8.489	8.577	67,63	67,83
Aceh Tengah	68,85	68,86	14,27	14,28	9,85	9,86	10.673	10.780	73,24	73,37
Aceh Barat	67,98	67,99	14,60	14,61	9,37	9,55	9.516	9.593	71,38	71,67
Aceh Besar	69,78	69,79	14,72	14,73	10,32	10,33	9.641	9.644	73,56	73,58
Pidie	66,94	66,95	14,46	14,47	8,99	9,00	9.816	9.860	70,63	70,70
Bireuen	71,22	71,26	14,83	14,84	9,28	9,29	8.857	8.867	72,28	72,33
Aceh Utara	68,80	68,81	14,70	14,71	8,63	8,64	8.122	8.201	69,33	69,46
Aceh Barat Daya	65,00	65,06	13,58	13,65	8,66	8,67	8.316	8.428	66,75	66,99
Gayo Lues	65,47	65,53	13,77	13,78	8,20	8,40	8.791	8.856	67,22	67,56
Aceh Tamiang	69,58	69,63	13,59	13,76	8,90	8,91	8.327	8.367	69,24	69,48
Nagan Raya	69,22	69,24	14,13	14,14	8,68	8,69	8.216	8.292	69,18	69,31
Aceh Jaya	67,16	67,19	13,98	13,99	8,70	8,71	9.615	9.666	69,75	69,84
Bener Meriah	69,22	69,26	13,46	13,47	9,79	10,00	11.098	11.118	72,98	73,27
Pidie Jaya	70,14	70,18	14,82	14,97	9,33	9,34	10.071	10.290	73,2	73,60
Kota Banda Aceh	71,45	71,52	17,79	17,80	12,65	12,83	16.778	16.891	85,41	85,71
Kota Sabang	70,51	70,56	13,95	14,13	11,14	11,18	11.273	11.378	75,78	76,11
Kota Langsa	69,42	69,43	15,35	15,63	11,11	11,12	12.057	12.067	77,17	77,44
Kota Lhokseumawe	71,60	71,64	15,20	15,21	10,91	11,11	11.367	11.390	77,31	77,57
Kota Subulussalam	64,02	64,07	14,61	14,62	7,84	8,03	7.317	7.385	64,93	65,27

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SUMATERA UTARA	69,10	69,23	13,23	13,27	9,54	9,58	10.420	10.499	71,77	72,00
Nias	69,75	69,78	12,57	12,84	5,36	5,64	6.898	6.995	61,93	62,74
Mandailing Natal	62,60	62,65	13,32	13,61	8,62	8,63	9.684	9.771	66,79	67,19
Tapanuli Selatan	64,91	64,97	13,24	13,35	9,28	9,29	11.236	11.304	70,12	70,33
Tapanuli Tengah	67,15	67,24	13,06	13,07	8,62	8,84	10.071	10.138	69,23	69,61
Tapanuli Utara	68,63	68,76	13,69	13,70	9,85	9,99	11.648	11.710	73,47	73,76
Toba Samosir	70,08	70,29	13,45	13,46	10,52	10,57	12.154	12.224	75,16	75,39
Labuhan Batu	69,93	69,95	12,73	12,74	9,24	9,25	11.150	11.212	72,01	72,09
Asahan	68,26	68,37	12,60	12,61	8,79	8,80	10.890	11.030	70,29	70,49
Simalungun	71,22	71,37	12,78	12,79	9,60	9,61	11.308	11.376	73,25	73,40
Dairi	69,00	69,19	13,10	13,11	9,58	9,59	10.350	10.504	71,57	71,84
Karo	71,40	71,58	12,76	12,77	9,79	10,00	12.349	12.412	74,43	74,83
Deli Serdang	71,73	71,77	13,35	13,36	10,09	10,10	12.225	12.291	75,44	75,53
Langkat	68,80	68,97	13,05	13,24	8,65	8,66	11.071	11.142	71	71,35
Nias Selatan	68,74	68,86	12,23	12,27	5,85	6,06	6.974	7.041	61,89	62,35
Humbang Hasundutan	69,27	69,51	13,28	13,29	9,54	9,71	7.850	8.016	68,87	69,41
Pakpak Bharat	65,74	65,96	13,86	13,87	9,03	9,14	8.170	8.254	67,59	67,94
Samosir	71,27	71,41	13,47	13,48	9,43	9,44	8.422	8.504	70,63	70,83
Serdang Bedagai	68,68	68,82	12,60	12,61	8,54	8,69	10.950	11.017	70,24	70,56
Batu Bara	66,96	67,13	12,63	12,64	8,06	8,07	10.410	10.539	68,36	68,58
Padang Lawas Utara	67,17	67,22	12,87	13,04	9,37	9,38	9.987	10.055	69,85	70,11
Padang Lawas	67,09	67,13	13,03	13,27	9,01	9,02	8.807	8.921	68,25	68,64

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Labuhan Batu Selatan	68,71	68,81	13,00	13,01	8,75	8,90	11.495	11.562	71,4	71,69
Labuhan Batu Utara	69,46	69,56	13,04	13,19	8,40	8,41	11.779	11.840	71,61	71,87
Nias Utara	69,43	69,55	13,03	13,04	6,58	6,77	6.064	6.155	62,36	62,82
Nias Barat	68,96	69,08	12,94	12,95	6,49	6,69	5.830	5.924	61,51	61,99
Kota Sibolga	69,01	69,25	13,16	13,28	10,40	10,41	11.473	11.540	73,63	73,94
Kota Tanjung Balai	63,27	63,44	12,50	12,62	9,44	9,45	11.132	11.225	68,65	68,94
Kota Pematang Siantar	73,55	73,77	14,45	14,57	11,16	11,29	12.372	12.436	78,75	79,17
Kota Tebing Tinggi	70,87	70,95	12,72	12,73	10,31	10,44	12.876	12.939	75,17	75,42
Kota Medan	73,14	73,23	14,74	14,75	11,39	11,48	14.890	14.999	80,98	81,21
Kota Binjai	72,38	72,45	13,62	13,63	10,93	10,94	10.997	11.063	75,89	76,01
Kota Padangsidempuan	69,41	69,50	14,54	14,56	11,00	11,09	10.856	10.965	75,22	75,48
Kota Gunungsitoli	71,19	71,32	13,74	13,75	8,61	8,62	7.980	8.134	69,31	69,61
SUMATERA BARAT	69,47	69,59	14,02	14,09	8,99	9,07	10,733	10,790	72,38	72,65
Kepulauan Mentawai	64,73	64,73	12,82	12,89	7,09	7,20	6.281	6.321	61,09	61,35
Pesisir Selatan	70,86	70,96	13,32	13,33	8,26	8,27	9.212	9.270	69,9	70,03
Solok	68,58	68,79	13,04	13,05	7,86	7,87	10.171	10.215	69,08	69,24
Sijunjung	66,21	66,36	12,37	12,38	8,11	8,12	10.361	10.389	67,74	67,86
Tanah Datar	69,94	70,12	14,33	14,34	8,61	8,62	10.588	10.616	72,33	72,46
Padang Pariaman	68,79	68,97	13,67	13,68	7,87	7,88	10.998	11.050	70,61	70,76
Agam	72,37	72,53	13,87	13,88	8,96	8,97	9.651	9.662	72,46	72,57
Lima Puluh Kota	69,79	69,84	13,29	13,30	7,99	8,07	9.596	9.668	69,47	69,68

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pasaman	67,40	67,59	12,80	12,81	8,09	8,10	8.425	8.440	66,64	66,77
Solok Selatan	67,81	68,01	12,71	12,72	8,28	8,32	10.325	10.367	69,04	69,23
Dharmasraya	71,33	71,53	12,43	12,44	8,47	8,55	11.273	11.324	71,51	71,76
Pasaman Barat	67,82	67,94	13,61	13,68	8,19	8,27	9.047	9.089	68,49	68,76
Kota Padang	73,65	73,69	16,52	16,53	11,58	11,59	14.481	14.540	82,82	82,90
Kota Solok	73,61	73,73	14,32	14,33	11,03	11,04	12.117	12.168	78,29	78,41
Kota Sawah Lunto	70,00	70,10	13,17	13,18	10,17	10,32	10.182	10.195	72,64	72,88
Kota Padang Panjang	72,82	72,82	15,06	15,07	11,62	11,63	10.734	10.754	77,93	77,97
Kota Bukittinggi	74,38	74,50	14,97	14,98	11,33	11,34	13.282	13.331	80,58	80,70
Kota Payakumbuh	73,74	73,84	14,26	14,27	10,73	10,81	13.281	13.317	78,9	79,08
Kota Pariaman	70,28	70,38	14,54	14,55	10,59	10,67	12.796	12.818	76,9	77,07
RIAU	71,60	71,67	13,20	13,28	9,14	9,19	10.675	10.736	72,71	72,94
Kuantan Singingi	68,55	68,60	13,33	13,34	8,59	8,75	10.243	10.309	70,31	70,60
Indragiri Hulu	70,25	70,26	12,36	12,46	8,38	8,39	10.202	10.260	69,83	70,01
Indragiri Hilir	67,85	67,98	11,91	11,93	7,23	7,24	9.954	9.945	66,54	66,63
Pelalawan	71,16	71,24	12,24	12,41	8,50	8,70	11.606	11.672	71,56	72,08
Siak	71,11	71,13	12,76	12,81	9,66	9,86	11.799	11.807	73,68	73,98
Kampar	70,76	70,83	13,46	13,55	9,26	9,27	10.796	10.858	72,83	73,02
Rokan Hulu	70,06	70,18	12,84	12,85	8,39	8,54	9.374	9.406	69,38	69,67
Bengkalis	71,20	71,24	12,87	12,88	9,69	9,70	11.331	11.415	73,46	73,58
Rokan Hilir	70,30	70,39	12,68	12,76	8,25	8,26	9.362	9.417	69,15	69,34
Kepulauan Meranti	67,68	67,78	12,82	12,83	7,70	7,84	7.790	7.780	65,5	65,70
Kota Pekanbaru	72,34	72,41	15,54	15,55	11,68	11,92	14.433	14.360	81,32	81,58
Kota Dumai	70,93	70,98	13,12	13,31	10,07	10,14	11.751	11.818	74,4	74,75

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JAMBI	71,16	71,22	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588	71,29	71,63
Kerinci	69,93	70,00	13,87	13,88	8,55	8,56	9.995	10.184	71,21	71,45
Merangin	71,26	71,29	11,99	12,04	7,76	7,90	10.279	10.380	69,19	69,53
Sarolangun	69,17	69,21	12,27	12,28	7,87	8,04	11.616	11.792	69,86	70,25
Batang Hari	70,56	70,64	12,92	12,93	8,11	8,12	9.825	10.032	69,84	70,11
Muaro Jambi	71,27	71,32	12,83	12,84	8,57	8,58	8.556	8.825	69,18	69,55
Tanjung Jabung Timur	66,23	66,34	12,16	12,17	6,70	6,92	9.026	9.163	64,43	64,91
Tanjung Jabung Barat	68,12	68,17	12,62	12,63	7,71	8,00	9.480	9.699	67,54	68,16
Tebo	69,99	70,02	12,60	12,64	7,58	7,59	10.389	10.546	69,14	69,35
Bungo	67,74	67,83	12,62	12,63	8,27	8,28	11.471	11.670	69,92	70,15
Kota Jambi	72,65	72,71	15,10	15,37	10,92	11,20	12.056	12.240	78,37	79,12
Kota Sungai Penuh	72,11	72,21	14,79	14,80	10,32	10,33	10.248	10.454	75,42	75,70
SUMATERA SELATAN	69,88	69,98	12,45	12,54	8,24	8,30	10.652	10.662	70,01	70,24
Ogan Komering Ulu	68,20	68,24	12,60	12,83	8,70	8,71	10.020	10.040	69,32	69,60
Ogan Komering Ilir	68,61	68,67	11,42	11,68	7,04	7,05	10.725	10.755	66,82	67,17
Muara Enim	68,90	69,02	11,97	11,98	7,79	7,80	10.951	10.995	68,74	68,86
Lahat	66,04	66,16	12,34	12,35	8,46	8,52	9.730	9.735	67,44	67,58
Musi Rawas	68,14	68,26	12,08	12,19	7,52	7,53	9.520	9.550	66,79	67,01
Musi Banyuasin	68,75	68,84	12,00	12,29	7,62	7,63	10.088	10.140	67,69	68,10
Banyu Asin	68,97	69,06	11,75	11,77	7,20	7,44	9.850	9.860	66,74	67,13
Ogan Komering Ulu Selatan	67,04	67,07	11,75	11,76	7,84	7,85	8.580	8.585	65,3	65,34

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ogan Komering Ulu Timur	69,10	69,17	12,23	12,45	7,55	7,56	11.505	11.531	69,28	69,58
Ogan Ilir	65,48	65,60	12,30	12,31	7,86	7,87	10.424	10.454	67,06	67,17
Empat Lawang	65,08	65,13	12,06	12,07	7,60	7,64	9.350	9.400	65,25	65,39
Penukal Abab Lematang Ilir	68,27	68,33	12,05	12,17	7,04	7,05	8.196	8.210	64,7	64,88
Musi Rawas Utara	65,68	65,76	11,57	11,58	6,84	7,09	9.783	9.855	64,49	64,93
Kota Palembang	70,79	71,01	14,41	14,42	10,53	10,75	14.679	14.704	78,33	78,72
Kota Prabumulih	70,32	70,47	12,91	12,92	9,96	9,97	12.723	12.752	74,55	74,67
Kota Pagar Alam	66,71	66,85	12,85	13,05	9,39	9,40	8.795	8.877	68,31	68,68
Kota Lubuklinggau	69,25	69,39	13,37	13,38	9,89	9,90	13.243	13.267	74,78	74,89
BENGKULU	69,35	69,42	13,61	13,67	8,84	8,87	10.380	10.487	71,4	71,64
Bengkulu Selatan	67,90	67,93	13,61	13,62	9,26	9,27	9.837	9.916	70,63	70,75
Rejang Lebong	68,57	68,75	13,83	13,93	8,28	8,33	10.234	10.323	70,44	70,77
Bengkulu Utara	68,19	68,27	12,87	12,88	7,87	8,09	10.263	10.410	68,82	69,28
Kaur	66,63	66,73	12,99	13,06	8,37	8,38	8.593	8.638	66,99	67,17
Seluma	67,75	67,90	13,28	13,29	7,99	8,00	8.220	8.256	66,89	67,03
Mukomuko	66,64	66,73	12,73	12,74	8,29	8,30	10.266	10.405	68,45	68,64
Lebong	63,29	63,40	12,57	12,58	7,99	8,18	11.124	11.317	67,01	67,46
Kepahiang	67,95	68,08	12,90	13,12	8,24	8,29	9.273	9.377	68,17	68,62
Bengkulu Tengah	68,19	68,19	13,03	13,28	7,47	7,48	9.392	9.471	67,61	67,96
Kota Bengkulu	70,13	70,20	16,02	16,03	11,79	11,80	13.938	14.108	80,36	80,54

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
LAMPUNG	70,65	70,73	12,65	12,73	8,05	8,08	9.982	10.038	69,69	69,90
Lampung Barat	67,58	67,65	12,25	12,26	8,06	8,07	9.929	9.969	67,8	67,90
Tanggamus	68,56	68,67	12,18	12,19	7,22	7,34	9.250	9.266	66,42	66,65
Lampung Selatan	69,33	69,42	12,50	12,52	7,69	7,70	9.875	9.931	68,36	68,49
Lampung Timur	70,73	70,78	12,85	12,86	7,60	7,77	9.983	10.026	69,37	69,66
Lampung Tengah	69,84	69,87	12,92	12,93	7,58	7,59	11.219	11.259	70,16	70,23
Lampung Utara	69,21	69,30	12,48	12,49	8,21	8,34	8.733	8.737	67,67	67,89
Way Kanan	69,40	69,46	12,36	12,37	7,70	7,71	9.102	9.173	67,44	67,57
Tulangbawang	69,97	70,01	11,89	11,95	7,49	7,55	10.683	10.735	68,52	68,73
Pesawaran	69,04	69,15	12,36	12,59	7,70	7,71	7.892	7.934	65,79	66,14
Pringsewu	70,08	70,27	12,83	12,84	8,38	8,39	10.262	10.302	70,3	70,45
Mesuji	68,19	68,26	11,63	11,64	6,88	7,08	7.894	7.980	63,63	64,04
Tulang Bawang Barat	70,00	70,03	12,05	12,06	7,24	7,39	8.395	8.422	65,97	66,22
Pesisir Barat	63,50	63,66	11,99	12,00	8,01	8,19	8.457	8.533	63,91	64,30
Kota Bandar Lampung	71,37	71,42	14,64	14,70	10,93	10,95	12.197	12.247	77,44	77,58
Kota Metro	71,63	71,66	14,47	14,75	10,96	10,97	11.906	11.916	77,19	77,49
KEP. BANGKA BELITUNG	70,64	70,73	12,05	12,17	8,06	8,08	12.794	12.819	71,47	71,69
Bangka	71,06	71,14	12,77	12,78	8,24	8,25	12.416	12.424	72,4	72,46
Belitung	71,05	71,10	11,85	11,86	8,46	8,47	13.554	13.563	72,51	72,57
Bangka Barat	70,06	70,08	11,53	11,70	7,22	7,44	12.233	12.269	69,08	69,60
Bangka Tengah	71,36	71,52	11,81	12,10	7,19	7,20	12.909	12.945	70,45	70,89
Bangka Selatan	68,16	68,35	11,37	11,38	6,67	6,71	11.757	11.768	66,9	67,06
Belitung Timur	72,03	72,10	11,52	11,63	8,22	8,47	11.730	11.760	70,92	71,42
Kota Pangkal Pinang	73,30	73,41	13,15	13,16	9,92	10,13	15.663	15.716	78,22	78,57

LAMPIRAN 1

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KEPULAUAN RIAU	69,96	70,12	12,87	12,98	10,12	10,18	14.209	14.122	75,59	75,79
Karimun	70,91	71,11	12,42	12,57	8,17	8,18	11.885	11.879	71,44	71,70
Bintan	70,38	70,46	13,10	13,26	8,44	8,67	14.482	14.393	74,13	74,57
Natuna	65,06	65,31	13,90	13,91	8,73	8,92	14.705	14.711	72,72	73,09
Lingga	62,06	62,39	12,45	12,59	6,67	6,88	11.998	11.938	65,29	65,83
Kepulauan Anambas	67,21	67,36	12,81	12,88	7,17	7,34	11.875	11.950	68,8	69,23
Kota Batam	73,33	73,36	13,16	13,17	11,14	11,15	18.095	18.034	81,11	81,12
Kota Tanjung Pinang	72,10	72,18	14,12	14,13	10,25	10,26	15.498	15.439	78,91	78,93
DKI JAKARTA	72,91	73,01	12,98	13,07	11,13	11,17	18.227	18.520	80,77	81,11
Kep. Seribu	68,76	68,99	12,57	12,63	8,68	8,81	12.412	12.587	71,63	72,10
Kota Jakarta Selatan	74,12	74,20	13,33	13,34	11,63	11,64	23.575	23.888	84,72	84,90
Kota Jakarta Timur	74,47	74,54	13,86	13,96	11,66	11,67	17.438	17.733	82,66	82,97
Kota Jakarta Pusat	74,11	74,19	13,25	13,26	11,38	11,39	17.179	17.365	81,39	81,56
Kota Jakarta Barat	73,62	73,69	12,80	12,81	10,63	10,78	20.468	20.801	81,38	81,76
Kota Jakarta Utara	73,28	73,35	12,63	12,64	10,80	10,81	18.437	18.762	80,29	80,51
JAWA BARAT	73,04	73,23	12,50	12,61	8,55	8,61	10.845	10.934	72,09	72,45
Bogor	71,17	71,36	12,48	12,49	8,30	8,31	10.317	10.410	70,4	70,60
Sukabumi	70,97	71,21	12,23	12,24	7,07	7,10	8.823	8.850	66,88	67,07
Cianjur	70,13	70,32	11,99	12,00	7,18	7,19	7.980	8.052	65,36	65,56
Bandung	73,53	73,72	12,69	12,70	8,96	9,07	10.201	10.307	72,39	72,73
Garut	71,41	71,59	11,91	12,03	7,52	7,53	7.876	7.961	66,12	66,45

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tasikmalaya	69,47	69,67	12,53	12,54	7,35	7,48	7.852	7.829	65,67	65,90
Ciamis	71,83	72,02	14,06	14,20	7,70	7,90	9.288	9.259	70,49	70,93
Kuningan	73,59	73,78	12,22	12,23	7,57	7,80	9.459	9.409	69,38	69,71
Cirebon	71,99	72,18	12,25	12,27	6,92	7,10	10.342	10.368	68,75	69,12
Majalengka	70,27	70,46	12,22	12,23	7,27	7,31	9.521	9.591	67,59	67,81
Sumedang	72,43	72,62	12,97	12,98	8,51	8,52	10.217	10.262	71,64	71,80
Indramayu	71,63	71,84	12,25	12,26	6,30	6,52	9.859	9.810	67,29	67,64
Subang	72,35	72,58	11,70	11,71	7,10	7,11	10.790	10.854	68,95	69,13
Purwakarta	70,99	71,18	12,11	12,12	8,09	8,10	11.614	11.669	70,82	70,98
Karawang	72,15	72,33	12,09	12,10	7,77	7,78	11.315	11.522	70,66	70,94
Bekasi	73,68	73,81	13,09	13,10	9,12	9,30	11.241	11.341	74,07	74,45
Bandung Barat	72,34	72,52	11,87	11,88	8,19	8,20	8.455	8.546	68,08	68,29
Pangandaran	71,40	71,60	12,07	12,08	7,74	7,85	9.084	9.065	68,06	68,28
Kota Bogor	73,61	73,82	13,41	13,42	10,33	10,53	11.564	11.716	76,11	76,59
Kota Sukabumi	72,42	72,58	13,47	13,58	9,59	9,81	10.999	10.942	74,21	74,60
Kota Bandung	74,28	74,46	14,20	14,21	10,75	10,99	16.887	16.996	81,51	81,96
Kota Cirebon	72,26	72,44	13,12	13,13	9,91	10,12	11.800	11.810	74,89	75,25
Kota Bekasi	75,01	75,19	14,00	14,10	11,16	11,31	15.776	15.903	81,5	81,95
Kota Depok	74,44	74,62	13,92	13,93	11,28	11,46	15.281	15.420	80,97	81,37
Kota Cimahi	74,03	74,21	13,80	13,81	10,96	11,08	12.025	12.019	77,83	78,06
Kota Tasikmalaya	72,15	72,34	13,45	13,46	9,33	9,52	10.263	10.213	73,04	73,31
Kota Banjar	70,99	71,19	13,23	13,24	8,63	8,77	10.535	10.476	71,7	71,92

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JAWA TENGAH	74,37	74,47	12,70	12,77	7,69	7,75	10.930	11.034	71,87	72,16
Cilacap	73,73	73,90	12,50	12,63	6,97	7,09	10.440	10.534	69,95	70,42
Banyumas	73,72	73,80	12,85	13,03	7,52	7,63	11.448	11.546	71,98	72,44
Purbalingga	73,14	73,21	11,99	12,00	7,24	7,25	9.914	10.032	68,97	69,15
Banjarnegara	74,18	74,28	11,46	11,63	6,74	6,75	9.263	9.407	67,45	67,86
Kebumen	73,40	73,55	13,34	13,35	7,54	7,55	8.901	9.028	69,81	70,05
Purworejo	74,72	74,87	13,50	13,51	8,12	8,21	10.163	10.275	72,68	72,98
Wonosobo	71,82	71,94	11,75	11,76	6,81	6,82	10.621	10.760	68,22	68,43
Magelang	73,72	73,88	12,54	12,55	7,78	7,79	9.301	9.440	69,87	70,12
Boyolali	75,95	76,03	12,56	12,57	7,84	7,85	12.910	13.031	74,25	74,40
Klaten	76,78	76,86	13,25	13,39	8,58	8,81	11.921	12.017	75,56	76,12
Sukoharjo	77,65	77,73	13,83	13,84	9,34	9,35	11.325	11.428	76,98	77,13
Wonogiri	76,16	76,28	12,49	12,50	7,33	7,34	9.286	9.429	70,25	70,49
Karanganyar	77,47	77,55	13,68	13,69	8,56	8,57	11.428	11.509	75,86	75,99
Sragen	75,71	75,79	12,83	12,84	7,65	7,66	12.589	12.679	73,95	74,08
Grobogan	74,75	74,84	12,30	12,44	6,91	7,11	10.221	10.294	69,87	70,41
Blora	74,41	74,51	12,20	12,35	6,83	6,99	9.571	9.669	68,84	69,37
Rembang	74,55	74,61	12,11	12,12	7,16	7,30	10.328	10.519	70,02	70,43
Pati	76,22	76,27	12,65	12,94	7,44	7,48	10.390	10.506	71,77	72,28
Kudus	76,60	76,68	13,23	13,24	8,75	8,76	11.160	11.272	75	75,16
Jepara	75,84	75,91	12,75	12,76	7,68	7,79	10.343	10.536	71,99	72,36
Demak	75,40	75,46	13,31	13,32	7,71	7,86	10.128	10.248	72,22	72,57
Semarang	75,73	75,79	12,97	12,98	8,02	8,03	11.966	12.070	74,1	74,24
Temanggung	75,58	75,64	12,14	12,32	7,24	7,25	9.343	9.408	69,57	69,88

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kendal	74,43	74,48	12,95	12,96	7,45	7,46	11.425	11.608	72,29	72,50
Batang	74,69	74,74	12,01	12,13	6,87	6,88	9.431	9.524	68,65	68,92
Pekalongan	73,69	73,74	12,41	12,42	6,91	7,17	10.312	10.409	69,63	70,11
Pemalang	73,40	73,53	11,95	11,96	6,42	6,45	8.461	8.573	66,32	66,56
Tegal	71,60	71,72	12,67	12,89	6,98	6,99	9.612	9.700	68,39	68,79
Brebes	69,33	69,54	12,04	12,05	6,21	6,22	10.058	10.152	66,11	66,32
Kota Magelang	76,85	76,93	14,14	14,15	10,39	10,62	12.210	12.349	78,99	79,43
Kota Surakarta	77,22	77,32	14,87	14,88	10,69	10,90	14.761	14.911	82,21	82,62
Kota Salatiga	77,40	77,55	15,41	15,42	10,42	10,66	15.699	15.843	83,14	83,60
Kota Semarang	77,34	77,51	15,52	15,53	10,53	10,78	15.243	15.425	83,05	83,55
Kota Pekalongan	74,38	74,44	12,84	12,85	8,96	9,18	12.467	12.598	74,98	75,40
Kota Tegal	74,46	74,54	13,05	13,07	8,51	8,73	12.999	13.143	75,07	75,52
D I YOGYAKARTA	74,99	75,04	15,59	15,64	9,55	9,64	14.015	14.111	79,97	80,22
Kulon Progo	75,24	75,27	14,26	14,27	8,86	9,02	10.041	10.069	74,46	74,71
Bantul	73,86	73,89	15,17	15,38	9,55	9,57	15.517	15.545	80,01	80,28
Gunung Kidul	74,12	74,19	12,97	12,98	7,21	7,30	9.486	9.505	69,98	70,16
Sleman	74,81	74,92	16,73	16,74	10,91	10,92	15.926	16.060	83,84	84,00
Kota Yogyakarta	74,65	74,76	17,43	17,60	11,46	11,72	18.678	18.801	86,61	87,18
JAWA TIMUR	71,30	71,38	13,19	13,36	7,78	7,88	11.601	11.707	71,71	72,14
Pacitan	71,94	72,07	12,64	12,65	7,60	7,61	8.796	8.887	68,39	68,57
Ponorogo	72,77	72,85	13,73	13,74	7,54	7,55	9.670	9.851	70,81	71,06
Trenggalek	73,75	73,86	12,35	12,47	7,55	7,56	9.630	9.743	69,74	70,06
Tulungagung	74,08	74,16	13,31	13,32	8,33	8,34	10.705	10.807	73	73,15
Blitar	73,52	73,61	12,46	12,63	7,39	7,50	10.654	10.757	70,58	71,05
Kediri	72,61	72,65	13,15	13,44	8,02	8,08	11.000	11.127	72,05	72,56

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Malang	72,55	72,61	13,18	13,24	7,42	7,43	10.028	10.163	70,36	70,60
Lumajang	70,10	70,21	11,81	11,88	6,40	6,67	9.088	9.203	65,46	66,07
Jember	69,15	69,28	13,42	13,43	6,48	6,49	9.294	9.410	67,11	67,32
Banyuwangi	70,65	70,72	12,80	13,10	7,16	7,42	12.140	12.217	70,62	71,38
Bondowoso	66,74	66,89	13,28	13,29	5,93	5,94	10.610	10.690	66,43	66,59
Situbondo	69,13	69,24	13,15	13,16	6,46	6,62	9.857	9.996	67,38	67,78
Probolinggo	67,20	67,36	12,35	12,36	6,11	6,12	10.859	10.969	66,07	66,26
Pasuruan	70,23	70,25	12,41	12,58	7,40	7,41	10.164	10.297	68,6	68,93
Sidoarjo	74,04	74,06	14,93	14,94	10,50	10,72	14.458	14.578	80,29	80,65
Mojokerto	72,53	72,59	12,88	12,95	8,51	8,64	12.779	12.844	73,83	74,15
Jombang	72,40	72,49	13,27	13,57	8,54	8,55	11.261	11.394	72,97	73,45
Nganjuk	71,54	71,60	12,86	12,87	7,64	7,78	12.130	12.172	71,72	71,97
Madiun	71,38	71,50	13,16	13,17	7,81	7,82	11.574	11.658	71,73	71,88
Magetan	72,59	72,65	14,03	14,04	8,24	8,36	11.776	11.833	73,92	74,15
Ngawi	72,30	72,41	12,70	12,83	7,06	7,26	11.418	11.459	70,54	71,04
Bojonegoro	71,56	71,72	12,39	12,68	7,33	7,38	10.121	10.221	69,04	69,59
Tuban	71,43	71,56	12,21	12,22	6,95	7,18	10.238	10.380	68,4	68,91
Lamongan	72,40	72,49	13,48	13,77	7,92	8,04	11.456	11.510	72,58	73,12
Gresik	72,66	72,67	13,73	13,77	9,30	9,56	13.246	13.280	76,11	76,50
Bangkalan	70,18	70,22	11,60	11,73	5,95	5,96	8.610	8.673	64,11	64,36
Sampang	68,03	68,07	12,37	12,38	4,85	4,86	8.739	8.790	62,7	62,80
Pamekasan	67,58	67,67	13,64	13,65	6,69	6,70	8.739	8.804	66,26	66,40
Sumenep	71,41	71,56	13,20	13,33	5,71	5,92	8.888	9.000	66,43	67,04
Kota Kediri	74,02	74,04	15,26	15,27	9,93	10,15	12.239	12.359	78,23	78,60
Kota Blitar	73,75	73,86	14,32	14,33	10,11	10,35	13.733	13.816	78,57	78,98

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Malang	73,27	73,36	15,51	15,75	10,18	10,41	16.593	16.663	81,45	82,04
Kota Probolinggo	70,29	70,35	13,59	13,60	8,70	8,95	12.180	12.245	73,27	73,66
Kota Pasuruan	71,52	71,60	13,62	13,63	9,12	9,33	13.281	13.354	75,26	75,62
Kota Mojokerto	73,32	73,39	14,00	14,01	10,25	10,47	13.499	13.610	78,04	78,43
Kota Madiun	72,81	72,83	14,40	14,41	11,14	11,37	16.018	16.095	80,91	81,25
Kota Surabaya	74,18	74,18	14,80	14,81	10,49	10,50	17.755	17.862	82,23	82,31
Kota Batu	72,61	72,65	14,13	14,16	9,07	9,31	12.824	12.887	75,9	76,28
BANTEN	69,96	70,02	12,89	13,02	8,89	8,93	11.964	12.033	72,45	72,72
Pandeglang	64,66	64,79	13,47	13,49	7,10	7,11	8.572	8.635	65	65,17
Lebak	67,21	67,33	11,97	11,98	6,40	6,41	8.690	8.724	63,91	64,03
Tangerang	69,89	69,93	12,82	12,84	8,39	8,61	12.203	12.273	71,92	72,29
Serang	64,64	64,76	12,57	12,58	7,50	7,51	10.665	10.713	66,7	66,82
Kota Tangerang	71,60	71,60	13,85	13,87	10,69	10,83	14.484	14.575	78,25	78,50
Kota Cilegon	66,67	66,69	13,16	13,18	9,87	10,08	13.010	13.041	73,05	73,35
Kota Serang	68,00	68,12	12,78	12,79	8,76	8,89	13.212	13.281	72,16	72,44
Kota Tangerang Selatan	72,47	72,47	14,47	14,66	11,81	11,82	15.667	15.751	81,36	81,60
BALI	72,13	72,24	13,33	13,40	8,95	9,06	13.929	13.820	75,5	75,69
Jembrana	72,35	72,46	12,65	12,92	8,23	8,35	11.790	11.675	72,36	72,75
Tabanan	73,65	73,75	13,00	13,01	8,88	9,14	14.494	14.326	76,17	76,45
Badung	75,10	75,18	13,98	13,99	10,39	10,62	17.503	17.327	81,6	81,83
Gianyar	73,68	73,78	13,89	13,97	9,04	9,29	14.544	14.391	77,36	77,70
Klungkung	71,25	71,41	12,99	13,00	8,13	8,14	11.376	11.287	71,73	71,75
Bangli	70,52	70,62	12,34	12,35	7,17	7,18	11.268	11.201	69,36	69,37
Karangasem	70,47	70,56	12,41	12,42	6,32	6,33	10.237	10.175	67,35	67,36
Buleleng	71,83	71,95	13,07	13,08	7,24	7,25	13.463	13.362	72,55	72,56
Kota Denpasar	74,82	74,93	14,00	14,09	11,47	11,48	19.723	19.598	83,93	84,03

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NUSA TENGGARA BARAT	66,51	66,69	13,70	13,90	7,31	7,38	10.351	10.377	68,25	68,65
Lombok Barat	66,94	67,19	13,71	13,95	6,41	6,42	11.304	11.334	68,2	68,61
Lombok Tengah	66,21	66,38	13,67	13,85	6,28	6,29	9.952	9.962	66,43	66,72
Lombok Timur	65,97	66,16	13,69	13,90	6,70	6,71	9.409	9.450	66,3	66,66
Sumbawa	67,54	67,73	13,06	13,07	7,92	8,15	9.146	9.167	67,61	68,01
Dompu	66,82	66,99	13,32	13,53	8,44	8,72	8.889	8.899	67,84	68,45
Bima	66,33	66,50	13,29	13,39	7,78	7,91	8.468	8.495	66,3	66,66
Sumbawa Barat	68,07	68,31	13,62	13,64	8,66	8,72	11.536	11.548	71,63	71,85
Lombok Utara	67,17	67,36	12,72	12,76	5,91	6,04	9.006	9.057	64,42	64,77
Kota Mataram	71,76	71,88	15,59	15,64	9,46	9,54	14.968	14.999	78,91	79,14
Kota Bima	70,38	70,50	15,00	15,04	10,49	10,65	11.105	11.135	75,81	76,11
NUSA TENGGARA TIMUR	67,01	67,15	13,18	13,20	7,63	7,69	7.598	7.554	65,19	65,28
Sumba Barat	67,08	67,12	13,11	13,12	6,60	6,84	7.321	7.307	63,53	63,83
Sumba Timur	65,13	65,16	12,82	12,83	7,12	7,32	9.406	9.354	65,52	65,74
Kupang	64,63	64,91	13,85	13,86	7,38	7,39	7.526	7.476	64,32	64,41
Timor Tengah Selatan	66,42	66,46	12,57	12,58	6,73	6,74	6.861	6.839	62,15	62,16
Timor Tengah Utara	66,96	67,09	13,31	13,32	7,81	7,96	6.364	6.324	63,53	63,69
Belu	64,61	64,89	12,27	12,28	7,35	7,36	7.479	7.431	62,68	62,77
Alor	61,48	61,64	12,23	12,24	8,41	8,42	6.786	6.751	61,33	61,37
Lembata	67,07	67,20	12,42	12,43	8,22	8,23	7.305	7.257	64,74	64,75
Flores Timur	65,20	65,31	12,91	12,92	7,71	7,72	7.631	7.578	64,22	64,22
Sikka	67,24	67,45	13,16	13,43	6,94	6,95	8.081	8.021	65,11	65,41
Ende	65,29	65,43	13,78	13,79	7,81	8,03	9.094	9.027	67,04	67,30
Ngada	68,04	68,12	12,70	12,71	8,52	8,53	8.865	8.819	67,88	67,88

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Manggarai	67,03	67,11	13,41	13,69	7,37	7,61	7.203	7.133	64,54	65,01
Rote Ndao	64,60	64,88	13,18	13,19	7,59	7,71	6.539	6.503	62,39	62,60
Manggarai Barat	67,38	67,46	12,28	12,29	7,30	7,56	7.468	7.410	63,89	64,17
Sumba Tengah	68,38	68,42	12,96	13,04	6,25	6,47	6.108	6.061	61,53	61,80
Sumba Barat Daya	68,53	68,57	13,06	13,07	6,34	6,35	6.372	6.355	62,28	62,29
Nagekeo	67,13	67,25	12,48	12,49	7,89	7,90	8.309	8.254	65,81	65,82
Manggarai Timur	68,04	68,07	11,99	12,26	7,08	7,35	5.818	5.780	60,85	61,37
Sabu Raijua	60,64	60,66	13,14	13,15	6,65	6,66	5.265	5.256	57,02	57,03
Malaka	64,97	65,01	12,78	12,79	6,87	7,10	5.901	5.861	60,21	60,42
Kota Kupang	69,55	69,73	16,40	16,41	11,58	11,60	13.337	13.218	79,71	79,74
KALIMANTAN BARAT	70,69	70,76	12,60	12,65	7,37	7,45	8.930	8.974	67,66	67,90
Sambas	68,93	69,08	12,61	12,63	6,71	6,72	9.858	9.828	67,03	67,10
Bengkayang	73,83	73,84	12,09	12,10	6,76	6,80	9.102	9.193	67,87	68,04
Landak	72,84	73,04	12,40	12,43	7,11	7,12	7.357	7.431	65,98	66,21
Mempawah	71,04	71,18	12,39	12,65	7,03	7,04	7.801	7.758	65,74	66,03
Sanggau	71,42	71,42	11,57	11,59	7,15	7,39	8.245	8.328	65,77	66,20
Ketapang	71,10	71,11	11,80	11,81	7,31	7,46	9.163	9.209	67,17	67,43
Sintang	71,71	71,84	12,03	12,04	7,07	7,08	8.728	8.708	66,88	66,93
Kapuas Hulu	72,52	72,53	12,05	12,08	7,52	7,53	7.162	7.168	65,69	65,75
Sekadau	71,84	72,05	11,88	11,89	6,83	6,85	7.434	7.462	64,76	64,93
Melawi	72,97	72,98	11,16	11,17	6,76	6,91	8.332	8.415	65,55	65,87
Kayong Utara	68,28	68,48	11,82	11,84	6,01	6,02	7.842	7.920	62,68	62,90
Kubu Raya	70,59	70,69	13,82	13,87	6,83	7,00	8.709	8.630	67,95	68,16
Kota Pontianak	72,96	73,12	15,00	15,01	10,17	10,43	14.465	14.610	79,44	79,93
Kota Singkawang	72,06	72,18	12,90	12,91	7,89	7,90	11.650	11.767	71,94	72,11

LAMPIRAN 1

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KALIMANTAN TENGAH	69,74	69,79	12,66	12,74	8,59	8,64	11.154	11.182	71,05	71,25
Kotawaringin Barat	70,59	70,68	12,72	12,73	8,42	8,53	13.109	13.117	72,87	73,07
Kotawaringin Timur	69,85	69,90	12,84	12,85	8,13	8,15	11.854	11.866	71,31	71,38
Kapuas	68,74	68,78	12,92	12,93	7,59	7,60	11.015	11.148	69,48	69,63
Barito Selatan	67,09	67,19	12,55	12,66	8,82	8,95	11.486	11.492	70,22	70,54
Barito Utara	71,30	71,30	12,49	12,50	8,71	8,85	9.936	9.951	70,59	70,79
Sukamara	71,53	71,56	12,12	12,13	8,01	8,09	8.674	8.773	68,03	68,27
Lamandau	69,36	69,39	12,48	12,49	8,42	8,43	11.190	11.234	70,51	70,58
Seruyan	69,26	69,26	11,99	12,00	7,94	7,96	9.370	9.420	67,58	67,67
Katingan	65,78	65,87	12,67	12,81	8,67	8,68	10.548	10.568	68,68	68,89
Pulang Pisau	68,04	68,10	12,41	12,42	8,18	8,19	10.047	10.082	68,45	68,53
Gunung Mas	70,40	70,46	11,78	11,90	9,14	9,18	10.793	10.809	70,81	71,03
Barito Timur	68,22	68,31	12,83	12,84	9,21	9,23	11.319	11.322	71,39	71,47
Murung Raya	69,51	69,53	11,75	11,76	7,54	7,61	10.419	10.449	67,98	68,12
Kota Palangka Raya	73,21	73,24	14,95	14,96	11,52	11,53	14.055	14.070	80,77	80,82
KALIMANTAN SELATAN	68,66	68,83	12,68	12,81	8,29	8,34	12.032	12.143	70,91	71,28
Tanah Laut	69,45	69,59	12,01	12,31	7,88	7,89	11.207	11.310	69,38	69,87
Kota Baru	69,21	69,32	11,93	11,95	7,43	7,46	11.530	11.720	68,86	69,13
Banjar	67,21	67,41	12,44	12,73	7,35	7,52	12.603	12.707	69,18	69,89
Barito Kuala	66,09	66,27	12,39	12,40	7,34	7,55	9.805	9.868	66,22	66,64
Tapin	70,40	70,57	11,94	11,95	7,76	7,77	11.841	11.952	70,11	70,31
Hulu Sungai Selatan	65,97	66,12	12,17	12,38	7,75	7,76	12.672	12.736	68,85	69,21
Hulu Sungai Tengah	66,01	66,20	12,20	12,21	8,00	8,01	12.153	12.280	68,84	69,05

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Hulu Sungai Utara	63,83	64,10	12,91	12,92	7,53	7,75	9.527	9.644	65,59	66,12
Tabalong	70,44	70,57	12,72	12,89	9,10	9,11	11.283	11.470	72,19	72,60
Tanah Bumbu	70,34	70,45	12,37	12,48	7,96	7,97	11.718	11.844	70,71	71,00
Balangan	67,72	67,85	12,46	12,47	7,55	7,69	11.452	11.500	68,82	69,11
Kota Banjarmasin	71,13	71,29	13,93	13,94	9,95	10,20	14.306	14.432	77,1	77,57
Kota Banjar Baru	71,99	72,10	14,81	14,82	10,95	10,96	13.675	13.789	79,1	79,26
KALIMANTAN TIMUR	74,33	74,61	13,72	13,81	9,77	9,84	11.728	12.116	76,24	76,88
Paser	72,62	72,88	13,10	13,25	8,55	8,79	10.344	10.673	72,04	72,93
Kutai Barat	72,86	73,10	12,90	13,02	8,47	8,70	9.712	10.062	71,19	72,07
Kutai Kartanegara	72,34	72,64	13,59	13,60	9,22	9,23	10.720	11.048	73,59	74,06
Kutai Timur	73,16	73,46	12,89	12,90	9,19	9,43	10.485	10.868	73	73,81
Berau	72,06	72,32	13,32	13,33	9,52	9,53	12.018	12.435	74,71	75,20
Penajam Paser Utara	71,41	71,68	12,56	12,57	8,28	8,36	11.231	11.651	71,41	72,01
Mahakam Ulu	72,10	72,33	12,51	12,61	7,97	8,18	7.524	7.802	67,09	67,95
Kota Balikpapan	74,49	74,76	14,14	14,22	10,68	10,91	14.549	14.862	80,01	80,71
Kota Samarinda	74,27	74,54	14,89	15,09	10,48	10,49	14.135	14.582	80,11	80,76
Kota Bontang	74,28	74,55	13,03	13,17	10,79	10,80	16.278	16.765	80,02	80,59
KALIMANTAN UTARA	72,59	72,65	12,93	12,94	9,00	9,11	8.756	9.075	70,63	71,19
Malinau	71,45	71,49	13,30	13,31	9,39	9,40	9.611	9.928	71,94	72,32
Bulungan	72,66	72,74	13,00	13,01	8,94	9,19	9.121	9.423	71,1	71,80
Tana Tidung	71,42	71,49	12,21	12,22	8,54	8,80	7.381	7.676	66,97	67,76
Nunukan	71,34	71,40	12,64	12,65	8,00	8,17	6.804	7.064	65,79	66,46
Kota Tarakan	73,97	74,04	14,02	14,03	9,97	9,98	10.894	11.261	75,83	76,23

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SULAWESI UTARA	71,69	71,76	12,85	12,94	9,49	9,62	10.791	10.882	72,93	73,30
Bolaang Mongondow	69,36	69,45	11,52	11,53	7,93	8,03	10.128	10.220	67,89	68,16
Minahasa	71,08	71,16	13,98	14,15	9,59	9,73	12.395	12.481	75,29	75,73
Kepulauan Sangihe	70,10	70,18	12,32	12,47	8,29	8,34	11.427	11.524	70,73	71,07
Kepulauan Talaud	70,16	70,24	12,51	12,59	9,51	9,72	8.505	8.558	69,4	69,83
Minahasa Selatan	69,92	70,01	12,74	12,83	9,08	9,09	11.481	11.554	72,11	72,32
Minahasa Utara	71,38	71,40	12,80	12,92	9,99	10,00	11.405	11.481	73,9	74,11
Bolaang Mongondow Utara	67,66	67,73	11,91	12,17	8,40	8,41	9.062	9.143	66,99	67,39
Siau Tagulandang Biaro	70,73	70,87	11,67	11,86	8,97	9,03	8.080	8.145	67,64	68,05
Minahasa Tenggara	70,15	70,21	12,27	12,43	8,88	9,11	10.408	10.479	70,51	71,06
Bolaang Mongondow Selatan	64,49	64,49	12,29	12,30	7,90	8,15	8.837	8.939	65	65,42
Bolaang Mongondow Timur	67,89	67,94	11,59	11,86	7,83	7,93	8.998	9.115	65,99	66,55
Kota Manado	71,87	71,90	14,15	14,16	11,27	11,42	13.886	13.991	78,93	79,20
Kota Bitung	71,07	71,10	12,61	12,62	9,88	9,89	12.193	12.271	74,1	74,20
Kota Tomohon	71,93	72,06	14,20	14,21	10,73	10,74	11.745	11.851	76,69	76,86
Kota Kotamobagu	70,47	70,60	12,79	12,88	10,10	10,31	10.744	10.848	72,97	73,47
SULAWESI TENGAH	68,69	68,83	13,17	13,23	8,83	8,89	9.335	9.378	69,55	69,79
Banggai Kepulauan	66,31	66,59	13,06	13,07	8,43	8,44	7.429	7.453	65,42	65,61
Banggai	70,88	70,88	13,24	13,25	8,52	8,53	9.554	9.603	70,52	70,60
Morowali	69,18	69,23	13,34	13,35	9,33	9,34	10.993	11.028	72,21	72,29
Poso	71,18	71,19	13,70	13,71	9,41	9,50	8.808	8.850	71,28	71,45
Donggala	67,33	67,50	12,49	12,51	7,97	7,98	7.960	8.002	65,56	65,72

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Toli-Toli	65,90	66,18	12,73	12,89	8,51	8,76	7.917	7.947	65,69	66,30
Buol	68,76	69,05	13,09	13,10	8,86	9,08	7.942	7.974	67,82	68,25
Parigi Moutong	64,30	64,35	12,47	12,48	7,48	7,74	9.641	9.675	65,44	65,82
Tojo Una-Una	65,67	65,90	12,28	12,29	8,39	8,40	7.606	7.621	64,59	64,74
Sigi	69,99	70,09	12,87	12,88	8,60	8,82	8.126	8.171	68,12	68,49
Banggai Laut	65,38	65,67	12,95	12,96	8,62	8,63	7.663	7.707	65,43	65,65
Morowali Utara	69,61	69,71	12,24	12,25	8,71	8,72	8.853	8.890	68,36	68,48
Kota Palu	71,04	71,09	16,23	16,28	11,61	11,72	14.839	14.894	81,47	81,70
SULAWESI SELATAN	70,57	70,66	13,45	13,52	8,38	8,46	11.079	11.184	71,93	72,24
Kepulauan Selayar	68,46	68,52	12,65	12,66	7,88	8,08	8.970	9.060	67,38	67,76
Bulukumba	67,92	68,10	13,17	13,41	7,67	7,82	10.513	10.632	68,99	69,62
Bantaeng	70,54	70,60	12,04	12,05	6,72	6,77	11.632	11.829	68,73	68,99
Jeneponto	66,39	66,49	11,98	12,10	6,59	6,60	9.114	9.215	64,26	64,56
Takalar	67,18	67,30	12,41	12,42	7,29	7,49	10.454	10.543	67,31	67,72
Gowa	70,43	70,45	13,64	13,65	8,19	8,20	9.394	9.504	70,14	70,29
Sinjai	67,30	67,38	13,05	13,06	7,75	7,78	9.439	9.505	67,6	67,75
Maros	69,02	69,04	13,04	13,16	7,73	8,01	10.963	11.032	69,86	70,41
Pangkajene dan Kepulauan	66,66	66,78	12,76	12,77	7,66	7,92	11.405	11.519	68,72	69,21
Barru	69,02	69,07	13,58	13,59	8,23	8,24	10.923	11.017	71	71,13
Bone	67,07	67,21	12,88	12,98	7,15	7,23	8.963	9.030	66,06	66,40
Soppeng	69,65	69,81	12,90	13,05	7,81	7,82	9.483	9.558	68,67	68,99
Wajo	67,35	67,48	13,14	13,15	6,81	7,05	12.386	12.505	69,15	69,62
Sidenreng Rappang	69,83	70,01	12,94	12,95	7,84	7,94	12.073	12.201	71,21	71,54
Pinrang	69,61	69,77	13,23	13,24	7,86	7,87	11.844	11.956	71,26	71,45
Enrekang	70,91	70,93	13,70	13,71	8,90	8,91	10.844	10.973	72,76	72,91

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Luwu	70,34	70,44	13,33	13,39	8,24	8,35	10.014	10.116	70,51	70,85
Tana Toraja	73,30	73,40	13,80	13,86	8,26	8,51	7.217	7.434	68,75	69,49
Luwu Utara	68,51	68,67	12,43	12,57	7,79	7,86	11.562	11.736	69,57	70,02
Luwu Timur	70,53	70,63	12,83	12,84	8,80	8,81	12.814	12.886	73,22	73,34
Toraja Utara	73,39	73,41	13,38	13,39	7,96	8,25	8.097	8.134	69,33	69,75
Kota Makasar	72,09	72,13	15,57	15,58	11,21	11,43	16.873	17.097	82,25	82,66
Kota Parepare	71,27	71,31	14,50	14,51	10,45	10,65	13.663	13.786	77,86	78,21
Kota Palopo	70,88	70,92	15,08	15,09	10,76	10,94	12.995	13.117	78,06	78,38
SULAWESI TENGGARA	71,22	71,27	13,65	13,68	9,04	9,13	9.331	9.381	71,45	71,66
Buton	68,25	68,39	13,75	13,76	7,71	7,92	7.307	7.324	65,98	66,32
Muna	70,39	70,41	13,79	13,80	8,36	8,46	8.203	8.218	69,02	69,17
Konawe	70,27	70,32	13,00	13,01	9,15	9,21	10.126	10.151	71,35	71,48
Kolaka	71,06	71,21	12,81	12,83	8,98	8,99	12.515	12.525	73,45	73,56
Konawe Selatan	70,80	70,87	12,36	12,37	7,86	8,11	9.037	9.059	68,2	68,58
Bombana	68,91	69,09	11,84	11,85	8,03	8,04	8.234	8.310	66,05	66,25
Wakatobi	70,41	70,48	13,50	13,51	7,94	8,16	9.204	9.280	69,48	69,87
Kolaka Utara	70,36	70,36	12,11	12,15	8,12	8,22	10.218	10.244	69,31	69,50
Buton Utara	70,93	70,93	12,76	12,92	8,92	8,93	7.470	7.496	67,87	68,08
Konawe Utara	69,51	69,53	12,83	13,08	9,21	9,30	9.165	9.181	69,86	70,23
Kolaka Timur	72,67	72,82	12,41	12,69	7,56	7,84	7.727	7.753	67,02	67,76
Konawe Kepulauan	68,43	68,43	12,06	12,32	9,41	9,42	6.700	6.738	65,41	65,73
Muna Barat	70,34	70,35	12,50	12,51	7,01	7,30	7.485	7.502	65,08	65,48
Buton Tengah	67,66	67,69	13,00	13,12	7,30	7,31	7.221	7.244	64,37	64,55
Buton Selatan	67,66	67,69	13,23	13,24	7,53	7,54	7.263	7.279	64,93	64,99
Kota Kendari	73,77	73,83	16,62	16,89	12,20	12,51	14.335	14.356	83,53	84,15
Kota Baubau	71,19	71,25	15,16	15,17	10,64	10,91	10.483	10.503	75,9	76,26

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
GORONTALO	68,07	68,19	13,08	13,11	7,82	7,90	10.020	10.157	68,68	69,00
Corontalo	67,58	67,69	13,17	13,18	7,13	7,30	9.277	9.412	66,92	67,34
Pohuwato	64,07	64,30	12,37	12,38	7,12	7,26	10.255	10.409	65,37	65,80
Bone Bolango	68,46	68,52	13,57	13,65	8,31	8,32	10.052	10.198	69,98	70,25
Corontalo Utara	65,87	65,93	12,45	12,46	7,03	7,15	8.921	9.064	64,86	65,21
Kota Gorontalo	72,49	72,53	14,34	14,50	10,36	10,37	12.278	12.390	77,13	77,41
SULAWESI BARAT	65,06	65,25	12,77	12,86	7,89	7,96	9.168	9.153	66,11	66,36
Majene	61,56	61,77	13,61	13,62	8,65	8,91	10.056	10.028	66,91	67,29
Polewali Mandar	62,38	62,53	13,06	13,38	7,41	7,44	8.580	8.548	63,84	64,23
Mamasa	70,87	70,94	12,05	12,36	7,65	7,88	7.747	7.736	66,02	66,63
Mamuju	67,52	67,77	13,19	13,24	7,95	7,96	9.500	9.494	68,15	68,32
Mamuju Utara	66,20	66,45	11,93	11,95	7,98	8,09	11.111	11.072	67,79	68,03
Mamuju Tengah	68,33	68,55	12,23	12,53	7,46	7,51	8.414	8.408	65,71	66,18
MALUKU	65,98	66,09	13,96	13,97	9,93	10,03	8.732	8.770	69,49	69,71
Maluku Tenggara Barat	63,42	63,45	12,29	12,30	9,68	9,69	6.297	6.335	62,86	62,97
Maluku Tenggara	65,07	65,14	12,81	12,82	9,73	9,76	7.545	7.580	66,2	66,33
Maluku Tengah	66,42	66,45	14,16	14,17	9,67	9,68	10.210	10.243	71,25	71,32
Buru	66,41	66,44	13,03	13,04	8,52	8,79	10.316	10.347	68,95	69,33
Kepulauan Aru	62,87	62,96	12,30	12,31	8,82	8,83	7.586	7.623	63,71	63,83
Seram Bagian Barat	61,69	61,85	13,44	13,48	8,87	8,92	8.690	8.720	65,62	65,83
Seram Bagian Timur	59,41	59,62	12,76	12,77	8,43	8,46	9.453	9.480	64,12	64,30
Maluku Barat Daya	62,38	62,55	12,27	12,35	8,35	8,59	6.890	6.918	61,9	62,37
Buru Selatan	66,27	66,36	12,69	12,70	7,94	7,95	7.566	7.600	64,69	64,80
Kota Ambon	70,52	70,63	16,03	16,04	11,92	12,20	14.116	14.148	80,84	81,23
Kota Tual	65,47	65,68	13,97	13,98	10,52	10,53	7.351	7.405	67,96	68,16

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MALUKU UTARA	68,33	68,45	13,67	13,68	9,04	9,09	8.032	8.140	68,49	68,76
Halmahera Barat	66,25	66,34	13,19	13,20	8,35	8,37	7.352	7.467	65,31	65,56
Halmahera Tengah	63,91	64,15	12,99	13,11	9,00	9,01	7.841	7.966	65,42	65,82
Kepulauan Sula	63,30	63,39	12,74	12,77	8,95	9,00	6.950	7.040	63,53	63,80
Halmahera Selatan	65,86	65,93	12,78	12,79	7,93	8,10	7.068	7.142	63,84	64,19
Halmahera Utara	69,56	69,61	13,60	13,61	8,51	8,62	7.414	7.519	67,5	67,82
Halmahera Timur	68,88	69,08	12,75	12,76	8,26	8,27	7.876	7.973	66,75	67,00
Pulau Morotai	67,18	67,35	12,77	12,93	7,39	7,40	6.290	6.378	62,5	62,90
Pulau Taliabu	62,10	62,22	12,59	12,65	7,66	7,67	6.390	6.467	60,48	60,73
Kota Ternate	70,97	71,06	15,74	15,75	11,71	11,81	13.091	13.290	79,82	80,14
Kota Tidore Kepulauan	69,34	69,43	14,31	14,32	9,73	9,95	8.188	8.316	70,53	70,99
PAPUA BARAT	66,02	66,14	12,91	13,13	7,60	7,69	8.086	7.929	65,09	65,26
Fakfak	68,47	68,50	14,37	14,63	8,84	8,97	7.599	7.446	68,36	68,52
Kaimana	64,81	64,93	12,13	12,41	8,41	8,58	8.325	8.151	65	65,31
Teluk Wondama	60,10	60,24	11,48	11,63	6,98	7,08	8.219	8.034	60,21	60,33
Teluk Bintuni	60,83	60,99	12,31	12,42	8,08	8,22	9.974	9.708	64,55	64,65
Manokwari	68,68	68,82	13,65	13,66	8,25	8,34	12.207	11.977	72,01	72,02
Sorong Selatan	66,25	66,39	13,16	13,17	7,36	7,49	6.286	6.188	62,42	62,46
Sorong	66,10	66,22	13,71	13,72	8,17	8,33	7.495	7.350	65,74	65,77
Raja Ampat	64,74	64,83	12,03	12,06	7,91	8,02	8.014	7.882	63,89	63,92
Tambrau	60,13	60,20	11,91	12,18	5,24	5,39	4.998	4.903	53,45	53,71
Maybrat	65,19	65,25	13,21	13,47	6,85	6,96	5.336	5.245	59,52	59,70
Manokwari Selatan	67,58	67,60	12,35	12,35	6,63	6,63	5.505	5.505	59,84	59,85
Pegunungan Arfak	67,24	67,26	11,72	11,72	5,12	5,12	5.099	5.009	56,33	56,13
Kota Sorong	70,70	70,93	14,38	14,39	11,14	11,19	13.954	13.744	78,45	78,49

LAMPIRAN 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PAPUA	65,79	65,93	11,08	11,11	6,69	6,76	6.954	6.955	60,44	60,62
Merauke	67,00	67,07	13,88	14,14	8,72	8,73	10.097	10.201	70,09	70,49
Jayawijaya	59,64	59,90	12,27	12,53	5,51	5,60	7.441	7.545	58,03	58,67
Jayapura	67,05	67,16	14,20	14,39	10,04	10,05	9.898	9.989	71,69	72,03
Nabire	68,06	68,15	11,92	12,18	10,00	10,01	8.840	8.856	68,83	69,15
Kepulauan Yapen	69,12	69,17	12,73	12,74	9,46	9,47	7.484	7.491	67,66	67,72
Biak Numfor	68,25	68,29	13,96	14,20	10,33	10,34	9.705	9.607	72,19	72,33
Paniai	66,44	66,62	10,49	10,50	4,57	4,77	6.361	6.377	56,31	56,70
Puncak Jaya	65,15	65,33	7,24	7,49	3,62	3,74	5.282	5.289	48,37	48,99
Mimika	72,32	72,36	12,40	12,69	10,17	10,18	11.431	11.400	74,19	74,48
Boven Digoel	59,97	60,32	11,07	11,08	8,78	8,79	7.947	7.864	61,53	61,62
Mappi	65,11	65,31	10,55	10,79	6,31	6,51	6.353	6.327	58,15	58,70
Asmat	58,05	58,59	9,02	9,30	4,94	5,08	5.733	5.736	50,55	51,29
Yahukimo	65,93	66,05	7,61	7,62	4,26	4,27	4.875	4.895	49,37	49,48
Pegunungan Bintang	64,44	64,54	6,25	6,47	2,81	3,04	5.409	5.429	45,44	46,28
Tolikara	65,71	65,83	8,60	8,61	3,64	3,65	4.826	4.841	49,5	49,60
Sarmi	66,36	66,46	12,05	12,29	8,82	8,83	6.600	6.617	63,63	63,94
Keerom	66,69	66,78	12,42	12,43	8,01	8,02	8.910	8.926	66,4	66,49
Waropen	66,33	66,42	12,79	12,80	9,20	9,21	6.732	6.788	64,94	65,10
Supiori	65,94	66,06	12,74	13,00	8,81	8,87	5.677	5.708	62,3	62,72
Mamberamo Raya	57,77	58,00	11,79	11,80	5,66	5,87	4.581	4.603	51,78	52,18
Nduga	55,27	55,43	3,61	3,87	1,13	1,42	3.975	3.976	31,55	32,84

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020/2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lanny Jaya	66,06	66,11	8,62	8,89	3,20	3,43	4.350	4.393	47,86	48,68
Mamberamo Tengah	63,59	63,75	8,93	9,22	3,15	3,33	4.462	4.487	47,57	48,32
Yalimo	65,42	65,49	9,11	9,32	2,79	3,01	4.647	4.664	48,34	49,01
Puncak	65,74	65,86	5,39	5,40	2,15	2,16	5.378	5.412	43,04	43,17
Dogiyai	65,73	65,85	10,58	10,59	4,93	4,94	5.373	5.415	54,84	55,00
Intan Jaya	65,60	65,69	7,65	7,66	2,84	3,09	5.283	5.328	47,79	48,34
Deiyai	65,24	65,36	9,81	9,82	3,01	3,25	4.632	4.673	49,46	49,96
Kota Jayapura	70,45	70,52	15,01	15,02	11,56	11,57	14.763	14.937	79,94	80,11
INDONESIA	71,47	71,57	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	71,94	72,29

Sumber: www.bps.go.id. 2022



LAMPIRAN

02

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
dan Komponen Pembentuknya
menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2021

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ACEH	68,07	71,94	14,26	14,53	9,55	9,22	13.484	8.162	76,09	70,18	92,23
Simeulue	63,33	67,15	13,82	14,35	10,02	8,98	11.362	3.435	72,10	56,43	78,27
Aceh Singkil	65,40	69,31	14,36	14,09	9,01	8,17	14.983	5.924	75,19	63,72	84,75
Aceh Selatan	62,46	66,26	14,50	14,67	9,20	8,42	11.074	7.151	71,10	65,22	91,73
Aceh Tenggara	66,17	70,14	13,68	14,57	10,22	9,21	11.718	7.816	73,96	68,86	93,10
Aceh Timur	66,76	70,65	12,85	13,09	8,57	7,96	13.442	5.616	72,78	62,54	85,93
Aceh Tengah	66,80	70,78	13,93	14,82	10,03	9,69	11.554	9.567	74,16	72,13	97,26
Aceh Barat	65,96	69,93	14,56	14,86	9,82	9,39	14.313	5.723	76,20	65,51	85,97
Aceh Besar	67,80	71,69	14,71	15,36	10,53	10,13	12.487	8.982	76,75	72,86	94,93
Pidie	64,95	68,85	14,34	14,86	9,40	8,61	12.784	8.830	73,89	69,17	93,61
Bireuen	69,26	73,14	14,79	15,10	9,33	9,27	11.897	8.551	75,69	71,85	94,93
Aceh Utara	66,78	70,73	14,41	15,11	8,87	8,31	10.932	7.021	72,71	67,44	92,75
Aceh Barat Daya	63,10	66,93	13,64	14,81	8,93	8,53	14.448	6.939	72,83	65,45	89,87
Gayo Lues	63,55	67,40	13,78	13,99	9,21	7,70	13.498	7.663	72,91	65,14	89,34
Aceh Tamiang	67,59	71,54	13,42	13,98	9,15	8,83	15.652	4.670	75,93	62,26	82,00
Nagan Raya	67,24	71,19	13,91	14,46	9,08	8,44	12.751	6.942	74,23	67,08	90,37
Aceh Jaya	65,19	69,09	13,96	14,16	8,90	8,60	15.118	7.445	74,63	66,79	89,49
Bener Meriah	67,27	71,14	13,34	13,67	10,06	9,88	13.493	10.932	75,39	72,85	96,63
Pidie Jaya	68,21	72,08	14,84	15,25	9,64	9,12	13.607	9.978	76,93	72,99	94,88
Kota Banda Aceh	69,56	73,38	17,84	17,72	13,11	12,59	19.738	15.217	87,90	83,98	95,54
Kota Sabang	68,55	72,46	14,09	14,41	11,30	11,03	13.988	10.544	78,56	75,10	95,60
Kota Langsa	67,42	71,35	14,99	16,06	11,37	10,97	15.690	10.975	80,03	76,36	95,41
Kota Lhokseumawe	69,70	73,52	15,21	15,63	11,44	11,02	14.845	10.787	80,96	76,96	95,06
Kota Subulussalam	62,14	65,91	14,37	14,90	8,67	7,81	11.900	5.017	70,91	60,45	85,25

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SUMATERA UTARA	67,35	71,21	13,14	13,48	9,84	9,33	15.265	8.227	76,14	69,08	90,73
Nias	67,79	71,70	12,85	12,55	6,89	4,67	7.971	6.528	65,95	60,18	91,25
Mandailing Natal	60,74	64,47	13,21	13,89	8,81	8,39	15.002	9.608	71,31	66,65	93,47
Tapanuli Selatan	63,05	66,82	13,35	14,08	9,61	8,99	16.952	8.818	74,76	67,84	90,74
Tapanuli Tengah	65,19	69,17	12,85	13,64	9,16	8,55	13.481	9.674	72,76	69,07	94,93
Tapanuli Utara	66,72	70,70	13,64	14,18	10,32	9,69	12.618	11.625	75,06	73,51	97,93
Toba Samosir	68,22	72,20	13,38	13,62	10,76	10,40	12.925	11.952	76,31	74,83	98,06
Labuhan Batu	67,92	71,90	12,57	13,24	9,47	9,10	17.366	8.750	76,56	69,58	90,88
Asahan	66,34	70,33	12,57	13,17	8,95	8,62	16.666	8.977	74,72	68,49	91,66
Simalungun	69,38	73,27	12,75	13,34	9,76	9,47	16.483	9.828	77,37	71,99	93,05
Dairi	67,20	71,08	12,79	13,22	9,83	9,39	10.892	10.098	72,42	71,01	98,05
Karo	69,55	73,46	12,61	13,34	10,03	9,85	14.040	10.307	76,14	73,02	95,90
Deli Serdang	69,88	73,65	13,29	13,90	10,62	9,77	18.252	9.896	80,20	73,13	91,18
Langkat	66,98	70,89	12,94	13,43	8,93	8,19	16.548	7.857	75,35	67,08	89,02
Nias Selatan	66,87	70,76	12,52	12,22	6,93	5,19	10.466	6.476	68,00	60,03	88,28
Humbang Hasundutan	67,45	71,42	13,28	14,42	10,28	9,49	8.461	7.356	70,85	68,95	97,32
Pakpak Bharat	63,94	67,84	12,62	15,03	9,61	8,67	9.140	8.015	68,61	67,85	98,89
Samosir	69,39	73,30	13,35	14,47	10,06	8,74	9.656	8.385	73,02	70,53	96,59
Serdang Bedagai	66,86	70,75	12,19	12,82	8,89	8,39	17.284	7.804	74,82	66,59	89,00
Batu Bara	65,13	69,02	12,48	13,08	8,38	7,87	16.949	5.331	73,41	61,09	83,22
Padang Lawas Utara	65,20	69,18	12,87	13,33	9,48	9,20	16.183	6.922	74,85	65,91	88,06
Padang Lawas	65,18	69,04	12,93	13,61	9,21	8,81	13.721	5.429	73,06	62,79	85,94

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Labuhan Batu Selatan	66,72	70,71	12,84	13,42	9,41	8,79	19.119	7.708	77,00	67,46	87,61
Labuhan Batu Utara	67,59	71,48	12,98	13,48	8,80	8,17	17.962	8.814	76,27	68,61	89,96
Nias Utara	67,52	71,45	13,24	12,79	7,89	5,81	9.891	3.901	69,71	55,51	79,63
Nias Barat	67,07	70,99	13,11	12,82	8,18	5,70	8.732	5.418	68,43	59,39	86,79
Kota Sibolga	67,29	71,18	12,77	13,74	10,36	10,42	13.509	11.018	75,21	73,62	97,89
Kota Tanjung Balai	61,58	65,27	12,16	13,17	9,50	9,44	18.047	8.116	73,15	65,85	90,02
Kota Pematang Siantar	71,90	75,58	14,94	14,49	11,60	11,19	14.333	11.974	81,65	78,24	95,82
Kota Tebing Tinggi	69,02	72,85	12,38	12,75	10,88	10,29	18.306	11.597	79,17	73,88	93,32
Kota Medan	71,37	75,07	14,61	14,94	11,78	11,25	22.075	14.060	85,47	80,14	93,76
Kota Binjai	70,54	74,32	13,58	13,84	11,12	10,46	16.494	8.848	80,48	72,94	90,63
Kota Padangsidimpuan	67,34	71,43	13,82	15,20	11,23	10,99	13.180	10.684	77,02	75,38	97,87
Kota Gunungsitoli	69,34	73,20	13,70	13,79	9,93	7,70	12.001	7.545	75,46	67,46	89,40
SUMATERA BARAT	67,70	71,57	13,70	14,61	9,18	8,96	15.167	9.748	76,02	71,72	94,34
Kepulauan Mentawai	62,72	66,60	13,12	12,82	7,70	6,90	9.274	5.784	66,43	59,66	89,81
Pesisir Selatan	68,93	72,85	13,32	14,15	8,58	8,23	12.139	8.825	73,36	69,99	95,41
Solok	66,77	70,71	12,37	13,65	7,90	7,85	14.276	9.890	71,97	69,23	96,19
Sijunjung	64,38	68,24	12,19	13,36	8,40	7,95	15.786	9.409	72,12	67,36	93,40
Tanah Datar	68,12	72,04	13,59	14,65	8,48	8,66	12.843	9.981	73,67	71,89	97,58
Padang Pariaman	66,94	70,89	13,49	14,34	8,32	7,53	16.350	9.883	75,03	69,61	92,78
Agam	70,58	74,39	13,44	14,59	8,90	9,06	12.176	9.098	74,69	72,41	96,95
Lima Puluh Kota	67,84	71,76	12,93	13,87	8,40	8,06	13.368	9.166	73,13	69,41	94,91

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pasaman	65,53	69,55	12,53	13,50	8,36	8,02	12.052	7.111	70,55	65,24	92,47
Solok Selatan	65,94	69,99	12,48	13,35	8,38	8,30	13.744	9.264	71,95	68,45	95,14
Dharmasraya	69,55	73,41	12,36	12,63	8,93	8,50	17.301	7.631	76,40	67,48	88,32
Pasaman Barat	65,69	69,94	13,03	14,28	8,50	8,04	13.366	6.517	72,30	65,17	90,14
Kota Padang	71,83	75,46	16,33	16,87	11,68	11,53	21.575	13.088	87,05	81,66	93,81
Kota Solok	71,83	75,56	13,98	14,77	10,91	11,49	15.357	11.294	80,58	78,20	97,05
Kota Sawah Lunto	68,15	71,99	13,16	13,76	10,13	10,57	13.989	9.669	76,09	72,84	95,73
Kota Padang Panjang	70,87	74,63	14,72	16,02	11,53	11,69	11.260	9.054	78,32	76,58	97,78
Kota Bukittinggi	72,66	76,30	14,49	15,42	11,43	11,32	14.245	13.055	81,34	80,52	98,99
Kota Payakumbuh	71,96	75,65	14,19	14,66	10,59	10,93	14.945	13.105	80,20	79,08	98,60
Kota Pariaman	68,26	72,30	14,45	15,42	10,54	10,73	14.362	12.127	78,15	77,07	98,62
RIAU	69,82	73,62	13,20	13,55	9,41	9,01	16.201	7.243	77,46	68,46	88,38
Kuantan Singingi	66,43	70,54	13,11	13,68	9,00	8,36	15.352	7.775	74,66	67,24	90,06
Indragiri Hulu	68,24	72,17	12,32	12,87	8,61	7,95	16.043	6.485	74,62	64,69	86,69
Indragiri Hilir	65,94	69,95	11,92	12,32	7,52	6,96	16.294	5.035	71,71	59,07	82,37
Pelalawan	69,25	73,12	12,26	12,48	8,93	8,48	18.548	8.309	76,76	68,11	88,73
Siak	69,16	73,01	12,91	12,81	10,01	9,81	18.301	8.204	78,70	69,80	88,69
Kampar	68,81	72,75	13,34	13,88	9,56	9,00	16.456	8.027	77,44	69,53	89,79
Rokan Hulu	68,18	72,09	13,38	12,84	8,76	8,40	16.688	5.279	76,28	62,64	82,12
Bengkalis	69,28	73,11	12,82	13,77	9,98	9,40	17.053	8.194	77,99	70,27	90,10
Rokan Hilir	68,41	72,29	12,67	13,24	8,67	7,90	14.743	5.463	74,39	62,97	84,65
Kepulauan Meranti	65,77	69,69	12,83	12,98	8,11	7,48	11.834	5.369	70,50	60,95	86,45
Kota Pekanbaru	70,51	74,26	15,58	15,48	11,94	11,69	20.542	12.763	85,46	79,71	93,27
Kota Dumai	68,98	72,88	13,11	13,48	10,36	10,00	17.207	8.825	78,69	71,39	90,72

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JAMBI	69,33	73,19	12,95	13,24	8,95	8,23	15.770	7.494	76,12	67,46	88,62
Kerinci	68,04	71,96	14,04	13,84	9,25	8,04	15.558	7.144	76,87	66,73	86,81
Merangin	69,40	73,18	12,04	12,25	8,40	7,51	14.564	7.115	73,71	65,04	88,24
Sarolangun	67,13	71,34	12,37	12,26	8,61	7,60	17.049	9.907	74,66	67,80	90,81
Batang Hari	68,70	72,56	12,93	13,31	8,56	7,99	15.805	5.898	75,31	64,19	85,23
Muaro Jambi	69,42	73,26	12,74	13,35	8,88	8,30	13.827	4.220	74,62	60,49	81,06
Tanjung Jabung Timur	64,42	68,23	11,84	12,69	7,25	6,56	14.806	6.349	69,68	60,92	87,43
Tanjung Jabung Barat	66,13	70,16	12,51	12,89	8,26	7,51	14.309	5.799	72,29	62,02	85,79
Tebo	67,96	71,98	12,62	12,82	8,22	7,26	15.388	8.602	73,92	66,82	90,40
Bungo	65,87	69,81	12,63	12,75	8,85	7,80	17.972	8.621	75,08	66,44	88,49
Kota Jambi	70,82	74,58	15,16	15,40	11,50	10,91	16.224	11.494	82,45	77,85	94,42
Kota Sungai Penuh	70,31	74,10	15,14	14,80	11,12	10,18	12.847	10.159	79,37	74,93	94,41
SUMATERA SELATAN	68,11	71,95	12,51	12,63	8,58	8,01	14.821	9.296	74,00	68,34	92,35
Ogan Komering Ulu	65,99	70,19	12,41	12,92	8,93	8,50	14.822	9.720	73,29	68,85	93,94
Ogan Komering Ilir	66,44	70,62	11,40	12,01	7,47	6,56	16.042	9.295	71,15	65,24	91,69
Muara Enim	67,37	70,97	11,77	12,15	8,27	7,40	15.930	8.328	73,06	65,51	89,67
Lahat	64,17	68,07	12,23	12,99	8,90	8,22	13.160	9.498	71,06	67,32	94,74
Musi Rawas	66,21	70,21	12,04	12,37	7,84	7,14	14.862	5.983	71,61	61,48	85,85
Musi Banyuasin	66,61	70,79	12,29	12,09	7,90	7,35	15.901	5.234	72,76	60,12	82,63
Banyu Asin	66,83	71,00	11,66	12,03	7,89	7,09	14.587	7.221	71,39	63,51	88,96
Ogan Komering Ulu Selatan	65,08	68,98	11,62	12,14	7,99	7,77	12.189	7.361	69,00	63,75	92,39

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ogan Komering Ulu Timur	67,17	71,12	12,39	12,45	8,06	7,11	15.261	11.232	73,00	68,49	93,82
Ogan Ilir	63,63	67,49	12,27	12,55	8,18	7,65	10.454	10.793	67,77	67,15	99,09
Empat Lawang	63,20	66,99	11,82	12,52	8,15	7,49	13.347	8.794	69,32	64,69	93,32
Penukal Abab Lematang Ilir	66,10	70,28	11,22	12,17	7,57	6,55	11.546	7.680	67,99	63,32	93,13
Musi Rawas Utara	63,80	67,64	11,55	12,35	7,73	6,61	14.196	9.208	69,32	64,19	92,60
Kota Palembang	69,01	72,93	14,46	14,30	10,99	10,29	16.990	14.318	80,69	77,52	96,07
Kota Prabumulih	68,47	72,37	12,76	13,20	10,19	9,74	18.841	11.916	78,68	73,71	93,68
Kota Pagar Alam	64,86	68,78	12,86	13,51	9,54	9,25	11.825	8.311	71,81	67,96	94,64
Kota Lubuklinggau	67,26	71,31	13,31	14,13	10,27	9,65	17.314	12.846	77,96	74,72	95,84
BENGKULU	67,54	71,40	13,62	14,06	9,19	8,59	14.689	8.233	75,57	68,89	91,16
Bengkulu Selatan	65,86	70,01	13,62	14,17	9,70	8,86	13.457	9.599	74,50	70,26	94,31
Rejang Lebong	66,85	70,68	13,66	14,26	8,66	8,11	14.251	9.459	74,33	69,66	93,72
Bengkulu Utara	66,20	70,23	12,50	13,19	8,54	7,71	15.262	8.611	73,26	66,95	91,39
Kaur	64,83	68,63	13,26	12,95	8,96	8,16	12.457	6.123	72,00	62,76	87,17
Seluma	65,94	69,82	12,98	13,62	8,42	7,52	12.870	5.440	71,92	61,80	85,93
Mukomuko	64,80	68,64	12,76	12,72	8,81	7,87	16.317	5.989	73,76	61,98	84,03
Lebong	61,29	65,38	12,15	12,96	8,54	7,79	17.410	9.705	71,47	65,65	91,86
Kepahiang	66,13	70,02	13,01	13,75	8,59	8,10	11.705	8.978	71,35	68,30	95,73
Bengkulu Tengah	66,14	70,25	13,22	13,29	7,92	6,90	14.137	6.527	72,51	63,11	87,04
Kota Bengkulu	68,28	72,11	16,01	16,44	12,09	11,56	17.407	13.289	83,24	79,72	95,77

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
LAMPUNG	68,86	72,69	12,64	12,95	8,39	7,76	14.308	7.778	73,93	66,81	90,37
Lampung Barat	65,58	69,58	12,17	12,50	8,27	7,72	13.069	8.532	70,84	65,88	93,00
Tanggamus	66,67	70,56	11,75	12,70	7,71	6,95	13.679	7.486	70,59	64,22	90,98
Lampung Selatan	67,40	71,33	12,22	12,68	8,07	7,40	14.303	7.308	72,35	64,83	89,61
Lampung Timur	68,77	72,68	13,15	12,86	8,18	7,34	14.705	7.680	74,42	66,07	88,78
Lampung Tengah	67,84	71,81	12,83	12,94	8,06	7,34	16.003	8.432	74,23	66,76	89,94
Lampung Utara	67,26	71,24	12,49	13,01	8,50	8,18	12.798	6.436	72,10	64,59	89,58
Way Kanan	67,41	71,38	12,19	12,74	8,07	7,09	13.808	6.705	72,00	63,59	88,32
Tulangbawang	67,98	71,94	11,85	12,43	8,25	7,54	15.950	7.838	73,44	65,77	89,56
Pesawaran	67,12	71,05	12,48	12,66	8,18	7,39	12.473	5.899	71,37	62,25	87,22
Pringsewu	68,25	72,16	12,73	13,03	8,71	8,05	15.931	9.715	75,14	69,35	92,29
Mesuji	66,18	70,21	11,50	11,86	7,29	6,81	11.987	4.670	68,31	57,63	84,37
Tulang Bawang Barat	68,02	71,95	11,93	12,53	7,54	7,16	12.002	5.912	69,99	62,26	88,96
Pesisir Barat	61,71	65,52	12,05	11,98	8,57	8,05	10.631	7.782	67,23	62,87	93,51
Kota Bandar Lampung	69,42	73,25	14,46	14,89	11,39	10,61	16.991	11.545	81,37	76,43	93,93
Kota Metro	69,69	73,55	14,64	14,83	11,16	10,91	14.792	11.457	80,07	76,78	95,89
KEP, BANGKA BELITUNG	68,86	72,70	12,11	12,21	8,42	7,82	19.096	9.012	75,96	67,69	89,11
Bangka	69,15	73,00	12,77	13,10	8,71	8,00	18.375	8.195	76,90	67,95	88,36
Belitung	69,09	73,00	11,84	12,06	8,95	8,08	20.045	8.932	76,91	67,90	88,29
Bangka Barat	68,07	72,03	11,68	12,00	8,04	7,39	18.290	9.169	74,19	66,80	90,04
Bangka Tengah	69,57	73,39	12,08	12,53	7,63	6,91	18.797	10.322	75,04	68,54	91,34
Bangka Selatan	66,26	70,34	11,34	11,72	7,20	6,46	18.397	6.222	71,76	60,50	84,31
Belitung Timur	70,15	74,00	11,53	11,83	8,71	8,29	18.217	6.994	75,92	65,72	86,56
Kota Pangkal Pinang	71,48	75,23	13,23	13,15	10,46	9,82	21.916	14.162	82,41	76,85	93,25

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KEPULAUAN RIAU	68,24	72,07	12,85	13,15	10,30	10,06	20.212	12.362	79,42	74,25	93,49
Karimun	69,11	73,02	12,35	12,92	8,49	7,82	18.307	9.615	76,09	69,24	91,00
Bintan	68,41	72,41	13,13	14,02	8,95	8,56	21.341	12.319	78,54	73,46	93,53
Natuna	63,32	67,17	13,76	14,00	9,14	8,83	21.049	11.521	76,62	70,45	91,95
Lingga	60,47	64,23	12,87	12,35	7,38	6,67	17.693	9.808	70,43	63,20	89,73
Kepulauan Anambas	65,35	69,27	12,81	13,01	7,65	6,85	17.083	9.173	73,00	65,92	90,30
Kota Batam	71,41	75,21	13,06	13,19	11,34	11,04	26.356	17.304	84,94	80,28	94,51
Kota Tanjung Pinang	70,21	74,05	14,04	14,60	10,44	10,26	18.644	14.984	81,11	78,79	97,14
DKI JAKARTA	71,21	74,91	13,10	13,03	11,52	10,83	22.910	16.993	83,87	79,54	94,84
Kep. Seribu	66,84	71,03	13,13	12,58	9,17	8,47	17.227	12.201	76,14	71,11	93,39
Kota Jakarta Selatan	72,33	76,12	13,78	13,27	12,05	11,31	27.667	23.325	87,14	83,90	96,28
Kota Jakarta Timur	72,70	76,27	13,76	14,02	12,21	11,33	22.321	17.322	85,93	82,01	95,44
Kota Jakarta Pusat	72,30	76,00	13,48	13,18	11,79	11,13	19.617	16.739	83,73	80,47	96,11
Kota Jakarta Barat	71,82	75,49	13,23	12,81	11,16	10,39	24.103	19.693	84,32	80,42	95,37
Kota Jakarta Utara	71,44	75,22	12,94	12,59	11,29	10,35	26.465	18.387	84,80	79,37	93,60
JAWA BARAT	71,57	75,19	12,59	12,68	8,98	8,23	15.459	7.995	76,66	68,50	89,36
Bogor	69,52	73,25	12,76	12,43	8,94	7,79	14.758	8.395	75,38	67,39	89,40
Sukabumi	69,27	73,13	12,62	12,07	7,80	6,84	13.007	6.704	72,44	63,34	87,44
Cianjur	68,45	72,23	12,28	11,65	7,50	6,72	11.457	5.042	70,08	59,08	84,30
Bandung	71,94	75,52	12,16	13,08	9,30	8,82	13.856	9.026	75,75	71,09	93,85
Garut	69,74	73,48	12,34	11,78	7,90	7,10	11.308	4.404	71,13	58,42	82,13

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tasikmalaya	67,78	71,59	12,71	12,54	7,64	7,33	11.657	5.279	70,59	60,96	86,36
Ciamis	70,19	73,91	14,65	14,20	8,20	7,63	14.223	6.370	76,41	66,13	86,55
Kuningan	71,98	75,61	12,90	12,23	8,11	7,54	13.923	6.638	75,06	65,28	86,97
Cirebon	70,34	74,07	12,25	12,73	7,62	6,66	15.614	5.444	73,96	61,75	83,49
Majalengka	68,58	72,37	12,44	12,21	7,74	6,88	13.912	6.284	72,46	62,49	86,24
Sumedang	70,77	74,49	12,96	13,63	8,70	8,34	13.551	9.781	75,07	71,45	95,18
Indramayu	70,01	73,72	11,88	12,44	7,20	5,77	14.487	7.213	72,12	63,41	87,92
Subang	70,78	74,44	11,68	12,10	7,58	6,54	14.867	8.500	73,01	66,08	90,51
Purwakarta	69,31	73,08	12,12	12,25	8,77	7,66	17.674	7.585	75,99	65,88	86,70
Karawang	70,50	74,21	11,98	12,17	8,42	6,97	15.510	9.255	74,76	67,50	90,29
Bekasi	71,99	75,63	13,09	13,12	9,77	8,82	16.854	8.419	79,23	70,42	88,88
Bandung Barat	70,70	74,39	11,90	11,87	8,72	7,83	12.976	3.935	73,50	58,12	79,07
Pangandaran	69,75	73,48	12,07	12,24	8,27	7,55	12.819	7.133	72,54	65,23	89,92
Kota Bogor	72,02	75,65	13,28	13,51	10,96	10,12	17.389	9.637	81,23	73,81	90,87
Kota Sukabumi	70,75	74,44	14,39	13,51	10,36	9,44	15.208	10.130	79,70	72,99	91,58
Kota Bandung	72,71	76,16	14,20	14,46	11,30	10,65	22.618	16.110	85,39	80,88	94,72
Kota Cirebon	70,61	74,31	12,80	13,42	10,65	9,58	15.494	11.379	78,56	74,21	94,46
Kota Bekasi	73,48	76,89	14,31	14,10	11,98	11,11	21.880	14.580	86,42	80,45	93,09
Kota Depok	72,87	76,60	13,92	14,05	11,81	10,84	22.082	14.052	85,60	79,57	92,96
Kota Cimahi	72,45	75,96	14,23	13,72	11,21	10,71	16.486	10.316	82,19	75,57	91,95
Kota Tasikmalaya	70,52	74,21	13,39	13,77	9,64	9,29	13.430	7.854	76,49	70,17	91,74
Kota Banjar	69,31	73,08	13,56	12,96	9,21	8,34	15.578	7.295	76,97	66,97	87,01

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JAWA TENGAH	72,61	76,42	12,71	12,93	8,17	7,34	15.253	9.805	76,08	70,36	92,48
Cilacap	72,05	75,75	13,07	12,58	7,47	6,76	15.560	7.200	75,46	65,65	87,00
Banyumas	71,93	75,71	13,02	13,04	7,98	7,35	16.840	7.957	76,76	67,96	88,54
Purbalingga	71,30	75,09	12,21	11,85	7,49	6,95	13.491	9.538	72,84	67,80	93,08
Banjarnegara	72,40	76,11	11,62	11,78	6,93	6,58	10.692	8.415	69,63	66,37	95,32
Kebumen	71,65	75,41	13,34	13,54	7,99	7,11	11.811	8.304	73,63	68,52	93,06
Purworejo	73,00	76,69	13,65	13,34	8,86	7,89	11.414	9.972	75,31	71,79	95,33
Wonosobo	70,01	73,84	11,73	11,79	7,03	6,62	14.705	9.440	71,84	66,65	92,78
Magelang	71,99	75,73	12,54	12,96	8,32	7,30	13.554	8.575	74,69	68,63	91,89
Boyolali	74,24	77,96	12,19	13,13	8,65	7,26	17.489	12.568	78,15	73,63	94,22
Klaten	75,10	78,80	13,37	13,51	9,35	8,33	13.229	11.539	78,09	74,97	96,00
Sukoharjo	75,99	79,72	13,83	14,23	9,97	8,88	12.360	10.982	79,05	76,30	96,52
Wonogiri	74,44	78,13	12,51	12,26	7,93	6,81	13.000	8.493	74,82	68,14	91,07
Karanganyar	75,81	79,43	13,34	13,77	9,34	8,07	12.064	11.116	77,42	74,81	96,63
Sragen	74,00	77,64	12,86	12,83	8,42	6,97	17.084	11.360	78,28	71,77	91,68
Grobogan	73,00	76,66	13,77	12,44	7,64	6,51	15.450	7.504	76,85	66,01	85,89
Blora	72,66	76,35	12,94	12,35	7,41	6,58	14.228	5.910	74,67	63,16	84,59
Rembang	72,73	76,43	12,15	12,11	7,86	6,82	15.543	7.326	75,24	65,70	87,32
Pati	74,28	78,10	13,06	12,93	8,05	7,13	14.638	9.718	76,68	70,71	92,21
Kudus	74,87	78,66	13,20	13,28	9,39	8,27	15.257	10.578	79,27	73,69	92,96
Jepara	74,11	77,89	12,72	13,08	8,18	7,37	14.489	8.486	76,30	69,65	91,28
Demak	73,64	77,37	13,22	13,52	8,31	7,42	14.840	8.705	77,05	70,24	91,16
Semarang	74,00	77,69	13,13	12,98	8,46	7,75	12.976	11.843	76,00	73,42	96,61
Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,59	7,54	7,02	11.098	8.819	72,02	68,95	95,74

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kendal	72,64	76,34	12,82	13,18	8,11	6,89	15.078	10.740	76,02	70,93	93,30
Batang	72,89	76,65	11,95	12,35	7,44	6,54	13.076	8.234	72,88	66,95	91,86
Pekalongan	71,84	75,60	12,10	12,99	7,53	6,85	14.517	8.715	73,69	68,21	92,56
Pemalang	71,65	75,46	12,20	11,94	6,96	6,10	12.642	6.009	71,64	61,96	86,49
Tegal	69,83	73,61	13,24	12,59	7,61	6,48	14.548	7.550	74,18	64,93	87,53
Brebes	67,64	71,44	12,15	12,04	6,78	5,55	14.812	7.038	70,94	61,47	86,65
Kota Magelang	75,11	78,82	14,44	14,00	11,32	10,42	13.806	11.897	82,03	78,37	95,54
Kota Surakarta	75,57	79,23	14,78	14,94	11,42	10,54	15.139	13.626	83,65	81,05	96,89
Kota Salatiga	75,50	79,44	15,41	15,43	11,19	10,32	19.666	15.329	86,58	82,57	95,37
Kota Semarang	75,79	79,43	15,73	15,24	11,51	10,44	16.436	14.442	85,63	81,92	95,67
Kota Pekalongan	72,54	76,26	12,71	13,07	9,28	8,97	16.589	12.180	78,30	74,71	95,42
Kota Tegal	72,66	76,46	13,06	13,24	9,06	8,28	18.275	12.043	79,35	74,00	93,26
D I YOGYAKARTA	73,27	76,89	15,67	15,64	9,98	9,31	17.231	13.075	82,99	78,74	94,88
Kulon Progo	73,39	77,18	14,24	15,26	9,44	8,62	13.058	9.539	78,19	74,35	95,09
Bantul	71,97	75,71	15,67	15,13	10,09	9,28	18.010	14.868	82,90	78,91	95,19
Gunung Kidul	72,26	76,02	13,17	12,88	7,90	6,88	15.748	6.543	76,36	65,14	85,31
Sleman	73,08	76,73	16,76	16,55	11,34	10,54	17.312	15.029	85,58	82,37	96,25
Kota Yogyakarta	72,92	76,40	17,46	17,63	11,91	11,34	19.002	18.642	87,72	86,25	98,32
JAWA TIMUR	69,51	73,35	13,25	13,47	8,33	7,45	16.828	10.055	76,32	69,96	91,67
Pacitan	70,11	73,95	12,89	12,52	8,00	7,10	13.760	5.857	73,92	62,90	85,09
Ponorogo	70,90	74,69	13,61	13,74	7,88	7,12	12.999	9.318	74,37	69,65	93,65
Trenggalek	71,95	75,65	12,47	12,50	7,85	7,39	14.714	9.380	74,73	69,17	92,56
Tulungagung	72,27	75,96	13,31	13,60	8,54	8,17	13.488	10.368	75,89	72,49	95,52
Blitar	71,69	75,43	12,34	13,02	7,81	7,34	15.923	9.492	75,13	69,69	92,76

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Malang	70,64	74,46	13,11	13,24	7,77	7,10	15.181	7.237	75,03	66,28	88,34
Lumajang	68,19	72,15	12,00	11,85	7,23	6,16	14.152	7.463	71,25	62,98	88,39
Jember	67,24	71,21	13,63	13,23	7,18	5,98	14.475	6.157	72,75	61,71	84,82
Banyuwangi	68,67	72,67	12,89	13,21	7,92	6,79	19.312	8.043	76,17	66,24	86,96
Bondowoso	64,85	68,81	13,54	13,29	6,67	5,28	14.711	9.551	70,95	64,39	90,75
Situbondo	67,22	71,15	13,48	13,15	7,34	5,94	15.452	7.678	73,38	63,96	87,16
Probolinggo	65,34	69,31	12,69	12,15	6,79	5,46	17.264	7.549	71,78	61,29	85,39
Pasuruan	68,21	72,18	12,58	12,65	8,09	6,91	13.995	8.616	72,96	66,31	90,89
Sidoarjo	72,15	75,83	14,84	15,07	10,95	10,27	20.278	14.005	84,32	79,48	94,26
Mojokerto	70,64	74,43	13,02	12,95	9,19	8,12	18.409	11.027	78,56	71,68	91,24
Jombang	70,53	74,34	13,35	13,58	9,02	8,10	16.639	8.969	77,72	70,13	90,23
Nganjuk	69,61	73,49	12,84	13,44	8,25	7,41	17.451	11.638	76,14	71,39	93,76
Madiun	69,52	73,39	12,99	13,68	8,44	7,32	16.303	9.690	75,90	69,65	91,77
Magetan	70,67	74,52	14,16	14,03	8,87	7,91	15.817	11.530	77,98	73,03	93,65
Ngawi	70,46	74,25	12,68	13,38	7,84	6,85	15.973	9.814	75,02	69,26	92,32
Bojonegoro	69,75	73,60	12,51	12,72	8,01	6,81	15.001	8.617	74,15	66,89	90,21
Tuban	69,58	73,45	12,23	12,22	7,61	6,81	16.106	7.646	73,85	65,03	88,06
Lamongan	70,53	74,34	13,63	13,85	8,63	7,59	17.185	8.534	77,82	69,25	88,99
Gresik	70,71	74,53	13,97	13,77	9,94	9,16	20.201	10.600	81,41	73,43	90,20
Bangkalan	68,19	72,14	11,99	11,52	6,72	5,35	12.888	6.823	69,68	60,59	86,95
Sampang	66,02	70,03	12,39	12,21	5,55	4,39	13.480	6.448	67,90	58,61	86,32
Pamekasan	65,62	69,63	13,89	13,51	7,52	5,88	12.906	6.586	71,61	61,94	86,50
Sumenep	69,58	73,43	13,62	13,02	6,91	5,17	13.721	5.136	73,01	59,27	81,18
Kota Kediri	72,11	75,88	15,11	15,28	10,99	9,59	15.835	12.153	82,23	77,47	94,21
Kota Blitar	71,95	75,65	14,18	14,62	10,70	10,18	15.145	13.301	80,45	78,33	97,36

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Malang	71,40	75,22	15,93	15,74	11,18	10,26	20.636	16.399	85,44	81,37	95,24
Kota Probolinggo	68,30	72,27	13,91	13,59	9,69	8,38	12.636	11.876	75,39	72,38	96,01
Kota Pasuruan	69,61	73,47	13,54	13,84	10,16	8,71	13.976	12.781	77,22	74,34	96,27
Kota Mojokerto	71,43	75,23	14,30	14,01	11,13	9,96	18.035	13.120	82,52	77,13	93,47
Kota Madiun	70,89	74,69	14,35	14,86	11,83	10,92	22.514	15.455	85,19	80,44	94,42
Kota Surabaya	72,27	75,97	15,08	14,66	11,03	9,96	21.826	16.165	85,40	80,19	93,90
Kota Batu	70,66	74,54	14,26	14,16	9,63	9,06	18.890	9.490	80,69	72,53	89,89
BANTEN	68,15	71,99	12,90	13,16	9,37	8,46	17.253	10.371	76,84	70,56	91,83
Pandeglang	62,82	66,68	13,21	13,91	7,61	6,62	13.865	6.098	70,25	61,00	86,83
Lebak	65,33	69,24	12,14	11,81	6,78	5,99	13.138	4.207	68,77	54,93	79,87
Tangerang	67,93	71,84	12,84	12,81	9,04	7,95	17.818	10.581	76,53	69,70	91,08
Serang	62,82	66,61	12,48	12,88	8,04	6,98	15.216	9.650	70,84	65,16	91,98
Kota Tangerang	69,61	73,49	13,86	13,88	11,22	10,42	19.106	14.203	81,79	77,47	94,72
Kota Cilegon	64,68	68,61	13,17	14,67	10,55	9,47	20.833	7.764	78,41	68,41	87,25
Kota Serang	65,91	70,06	12,92	12,79	9,56	8,48	18.981	12.402	76,79	71,01	92,47
Kota Tangerang Selatan	70,55	74,31	14,48	14,80	12,09	11,11	22.134	14.835	85,29	80,00	93,80
BALI	70,39	74,17	13,49	13,37	9,76	8,36	16.925	13.346	78,90	74,17	94,01
Jembrana	70,50	74,30	12,78	12,92	9,26	7,53	13.753	11.178	75,61	70,97	93,86
Tabanan	71,84	75,53	13,29	12,94	9,95	8,53	14.778	13.596	78,34	74,75	95,42
Badung	73,35	76,77	14,27	13,99	11,08	9,97	19.601	17.048	84,19	80,43	95,53
Gianyar	71,87	75,56	14,00	13,97	9,98	8,61	16.551	13.615	80,22	75,97	94,70
Klungkung	69,44	73,27	13,91	12,93	9,23	7,14	14.238	10.976	76,57	69,82	91,18
Bangli	68,61	72,53	12,59	12,09	8,11	6,48	14.821	10.781	73,72	67,51	91,58
Karangasem	68,57	72,43	12,59	12,41	7,36	5,29	14.330	8.944	72,39	64,40	88,96
Buleleng	69,99	73,80	13,24	13,04	8,16	6,44	18.020	12.519	76,93	70,51	91,65
Kota Denpasar	73,08	76,68	14,17	14,06	11,88	11,14	21.192	19.155	85,66	82,99	96,88

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NUSA TENGGARA BARAT	64,81	68,66	14,08	13,84	8,15	6,66	14.209	9.087	73,07	66,15	90,53
Lombok Barat	65,26	69,08	14,01	13,35	7,26	5,69	16.843	10.145	73,63	65,69	89,22
Lombok Tengah	64,46	68,25	14,24	13,41	7,12	5,54	14.352	7.849	71,87	62,66	87,19
Lombok Timur	64,23	68,02	14,01	13,87	7,50	6,18	12.214	8.308	70,50	64,39	91,33
Sumbawa	65,77	69,62	13,28	13,06	8,66	7,57	11.235	8.711	71,13	66,49	93,48
Dompu	65,07	68,86	13,53	13,93	9,24	8,02	13.293	7.915	73,34	66,49	90,66
Bima	64,59	68,37	13,39	13,05	8,57	7,68	10.999	7.620	70,34	64,62	91,87
Sumbawa Barat	66,34	70,21	14,00	13,33	9,21	8,15	15.059	11.086	75,60	70,16	92,80
Lombok Utara	65,42	69,24	13,17	12,59	6,88	5,26	12.979	6.465	69,98	59,86	85,54
Kota Mataram	69,98	73,74	15,70	15,25	10,57	9,25	18.739	13.251	82,85	76,88	92,79
Kota Bima	68,57	72,40	14,87	15,65	11,16	10,20	12.445	10.418	77,96	75,16	96,41
NUSA TENGGARA TIMUR	65,28	69,11	13,09	13,52	8,12	7,29	10.451	7.113	69,33	64,22	92,63
Sumba Barat	65,14	69,05	13,07	13,13	7,18	6,34	8.977	7.112	66,58	62,69	94,16
Sumba Timur	63,22	67,05	12,81	12,89	7,34	7,28	11.593	9.207	68,06	65,29	95,93
Kupang	63,01	66,68	13,81	13,90	7,78	7,24	10.636	5.510	68,70	60,50	88,06
Timor Tengah Selatan	64,51	68,39	12,29	14,77	7,11	6,35	8.973	5.996	65,39	62,09	94,95
Timor Tengah Utara	65,09	68,96	12,95	13,98	8,30	7,61	7.521	5.860	65,90	62,73	95,19
Belu	63,00	66,71	11,97	12,62	7,48	7,08	8.397	7.294	64,14	62,26	97,07
Alor	59,78	63,42	12,24	12,31	8,89	8,01	8.997	6.400	65,18	60,05	92,13
Lembata	65,24	69,06	12,43	12,76	9,08	7,58	9.901	6.731	69,27	63,20	91,24
Flores Timur	63,42	67,16	12,96	12,88	8,29	7,06	10.243	7.147	68,30	62,49	91,49
Sikka	65,49	69,34	13,15	13,64	7,28	6,60	12.143	6.218	69,89	62,15	88,93
Ende	63,56	67,24	14,05	13,78	8,49	7,80	9.751	8.675	69,17	66,27	95,81
Ngada	66,04	70,05	12,40	12,99	8,80	8,45	11.175	8.576	70,49	67,50	95,76

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manggarai	65,10	69,00	13,46	13,71	8,24	7,03	10.314	5.461	69,63	61,03	87,65
Rote Ndao	62,98	66,69	13,20	12,88	8,24	7,44	9.880	4.419	67,90	57,09	84,08
Manggarai Barat	65,40	69,38	12,60	12,05	8,13	7,01	11.242	5.972	69,61	60,64	87,11
Sumba Tengah	66,43	70,33	12,93	13,23	6,75	6,44	8.251	4.988	65,62	59,38	90,49
Sumba Barat Daya	66,58	70,50	13,02	13,26	6,44	6,10	6.629	6.157	63,04	61,58	97,68
Nagekeo	65,26	69,10	12,79	12,49	8,13	7,89	8.254	8.390	66,63	65,67	98,56
Manggarai Timur	66,10	70,01	12,26	12,55	7,71	6,90	7.901	5.056	65,51	59,30	90,52
Sabu Raijua	58,82	62,45	13,15	13,36	6,62	6,85	6.963	4.689	60,37	55,73	92,31
Malaka	63,04	66,88	12,39	12,96	7,45	6,68	8.348	4.878	64,49	57,67	89,42
Kota Kupang	67,77	71,59	16,40	16,47	12,01	11,47	15.825	12.796	82,28	78,98	95,99
KALIMANTAN BARAT	68,87	72,74	12,62	12,94	7,94	6,93	13.391	6.165	72,71	63,22	86,95
Sambas	67,07	70,88	12,68	12,62	7,36	6,11	14.587	7.039	71,93	62,58	87,00
Bengkayang	72,06	75,58	11,85	12,36	7,25	6,18	13.111	4.770	72,16	59,74	82,79
Landak	71,05	74,88	12,36	12,82	8,00	6,66	10.177	5.657	70,82	62,63	88,44
Mempawah	69,08	73,11	12,47	12,74	7,44	6,72	11.819	5.780	70,80	62,16	87,80
Sanggau	69,46	73,30	11,61	11,57	7,89	6,89	12.705	4.400	71,30	57,89	81,19
Ketapang	69,05	73,05	11,83	11,77	7,97	6,92	12.868	6.914	71,59	63,43	88,60
Sintang	69,87	73,73	11,93	12,24	7,49	6,51	12.615	5.846	71,24	61,79	86,73
Kapuas Hulu	70,63	74,34	12,71	12,08	7,97	6,95	10.243	4.935	71,03	60,34	84,95
Sekadau	70,01	73,92	11,61	12,30	7,62	6,26	11.535	4.409	70,27	58,13	82,72
Melawi	71,04	74,81	10,98	11,45	7,48	6,45	13.872	4.239	71,52	57,32	80,15
Kayong Utara	66,12	70,50	12,00	11,81	6,69	5,39	11.231	5.541	67,43	58,02	86,04
Kubu Raya	68,60	72,64	13,83	13,88	7,72	6,81	13.522	5.298	73,69	62,12	84,30
Kota Pontianak	71,15	74,91	15,28	14,99	10,69	10,13	19.911	13.938	83,76	78,74	94,01
Kota Singkawang	70,27	74,08	12,87	13,30	8,31	7,54	16.642	9.880	76,14	70,05	92,00

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KALIMANTAN TENGAH	67,89	71,72	12,85	12,67	8,96	8,29	16.147	8.019	75,53	67,06	88,79
Kotawaringin Barat	68,66	72,59	12,86	12,73	8,93	8,00	19.114	11.634	77,39	70,96	91,69
Kotawaringin Timur	67,85	71,82	12,91	12,79	8,53	7,71	18.346	8.480	76,15	67,12	88,14
Kapuas	66,76	70,70	12,92	12,96	7,91	7,45	13.442	10.536	72,02	68,65	95,32
Barito Selatan	65,17	69,08	12,96	12,53	9,43	8,59	15.817	10.205	74,66	68,52	91,78
Barito Utara	69,31	73,19	13,00	12,20	9,09	8,45	14.429	7.077	75,51	66,06	87,49
Sukamara	69,55	73,46	12,42	12,13	8,57	7,57	11.583	7.779	72,23	66,08	91,49
Lamandau	67,33	71,30	12,18	12,51	8,73	8,10	15.850	9.337	74,06	68,07	91,91
Seruyan	67,46	71,18	11,81	12,18	8,33	7,53	14.146	7.267	72,17	64,35	89,16
Katingan	63,84	67,76	12,64	12,87	9,00	8,23	16.220	6.249	73,32	62,60	85,38
Pulang Pisau	66,07	70,03	12,38	12,83	8,37	8,03	13.939	8.145	72,03	66,30	92,04
Gunung Mas	68,38	72,37	11,80	12,42	9,25	9,08	15.301	8.409	74,53	68,56	91,99
Barito Timur	66,24	70,25	13,14	12,34	9,68	8,97	16.701	8.668	76,20	67,68	88,82
Murung Raya	67,48	71,46	11,94	11,75	8,46	7,29	16.373	6.034	73,81	61,67	83,55
Kota Palangka Raya	71,26	75,09	15,09	14,82	11,66	11,41	18.805	13.805	84,23	80,03	95,01
KALIMANTAN SELATAN	66,97	70,79	12,78	12,81	8,77	7,91	18.148	8.846	75,79	67,35	88,86
Tanah Laut	67,62	71,52	12,56	11,97	8,34	7,34	17.002	7.884	74,74	64,92	86,86
Kota Baru	67,37	71,23	11,93	12,23	7,99	7,14	17.911	6.445	73,88	62,63	84,77
Banjar	65,45	69,32	12,76	12,39	8,06	7,08	18.731	11.350	74,32	67,63	91,00
Barito Kuala	64,33	68,15	12,64	12,39	7,88	6,99	14.259	7.828	71,01	63,33	89,18
Tapin	68,62	72,47	11,94	12,01	8,53	7,39	18.032	6.525	75,31	63,37	84,15
Hulu Sungai Selatan	64,19	68,01	12,11	12,91	8,11	7,54	18.613	8.603	72,96	65,41	89,65
Hulu Sungai Tengah	64,30	68,07	11,97	12,21	8,49	7,71	13.559	11.956	70,61	68,11	96,46

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Hulu Sungai Utara	62,22	65,94	12,91	13,56	8,38	7,44	13.795	8.427	70,54	64,71	91,74
Tabalong	68,62	72,49	12,85	13,10	9,57	8,63	18.018	6.811	77,67	66,39	85,48
Tanah Bumbu	68,53	72,36	12,70	12,39	8,45	7,55	18.958	7.225	76,44	65,04	85,09
Balangan	65,87	69,77	12,58	12,42	8,40	7,19	16.147	11.168	73,50	67,86	92,33
Kota Banjarmasin	69,40	73,20	13,94	14,06	11,10	9,67	18.264	13.452	81,20	76,08	93,69
Kota Banjar Baru	70,19	73,96	15,70	14,81	11,40	10,59	19.654	13.230	84,37	78,09	92,56
KALIMANTAN TIMUR	72,79	76,51	13,80	13,88	10,23	9,42	18.560	7.161	81,86	70,36	85,95
Paser	70,86	74,84	13,18	13,47	9,15	8,36	17.502	2.965	78,33	55,76	71,19
Kutai Barat	71,13	74,95	13,09	13,02	9,34	8,14	15.225	5.930	77,31	65,16	84,28
Kutai Kartanegara	70,67	74,50	13,54	13,66	9,58	8,64	18.079	4.625	79,47	62,88	79,12
Kutai Timur	71,50	75,32	12,77	13,00	9,89	8,78	17.595	3.947	79,21	60,52	76,40
Berau	70,34	74,13	13,02	14,22	9,90	9,13	19.231	7.574	79,72	69,96	87,76
Penajam Paser Utara	70,05	74,05	12,43	12,63	8,80	7,83	17.445	7.218	76,63	66,34	86,57
Mahakam Ulu	70,34	74,14	13,02	12,59	8,92	8,11	12.385	4.449	74,33	60,69	81,65
Kota Balikpapan	72,86	76,55	14,22	14,31	11,36	10,69	23.073	10.953	85,75	77,03	89,83
Kota Samarinda	72,62	76,23	15,00	15,12	10,90	9,99	21.177	10.070	85,07	75,94	89,27
Kota Bontang	72,63	76,27	13,24	13,17	11,11	10,54	25.917	9.712	85,33	74,34	87,12
KALIMANTAN UTARA	70,69	74,48	12,94	13,26	9,76	8,93	12.859	5.989	75,83	66,20	87,30
Malinau	71,29	71,69	13,19	13,73	9,56	8,70	14.735	5.234	77,46	63,48	81,95
Bulungan	71,69	73,65	13,20	12,78	9,76	8,80	14.477	6.460	77,74	66,17	85,12
Tana Tidung	70,74	71,57	12,42	12,22	9,32	8,20	11.420	3.880	73,59	57,55	78,20
Nunukan	70,63	72,21	12,64	12,71	8,59	7,92	10.236	4.376	71,74	59,61	83,09
Kota Tarakan	73,46	74,54	13,54	14,45	10,54	9,91	15.655	9.887	80,67	74,22	92,00

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SULAWESI UTARA	69,89	73,72	12,77	13,22	9,59	9,64	15.153	10.053	76,65	72,52	94,61
Bolaang Mongondow	67,43	71,35	11,30	12,12	7,95	8,10	15.137	6.253	71,67	63,36	88,41
Minahasa	69,15	73,04	14,15	14,24	9,69	9,75	15.384	11.692	77,97	74,87	96,02
Kepulauan Sangihe	68,15	72,07	12,03	13,10	8,01	8,60	14.981	9.562	72,84	69,88	95,94
Kepulauan Talaud	68,22	72,12	12,38	13,18	9,87	9,64	9.167	8.106	70,76	69,41	98,09
Minahasa Selatan	67,95	71,92	12,53	13,26	9,28	9,09	16.879	7.237	76,03	67,50	88,78
Minahasa Utara	69,44	73,27	12,61	13,24	10,00	9,96	14.413	10.783	76,30	73,43	96,24
Bolaang Mongondow Utara	65,70	69,66	11,98	12,82	8,15	8,48	15.402	5.728	72,02	62,67	87,02
Siau Tagulandang Biaro	68,87	72,76	11,52	12,36	8,93	9,23	12.513	5.598	72,16	64,13	88,87
Minahasa Tenggara	68,18	72,09	12,41	12,59	8,88	9,26	15.146	8.266	74,52	68,62	92,08
Bolaang Mongondow Selatan	62,67	66,35	12,20	12,43	8,26	8,14	14.591	4.122	70,38	56,37	80,09
Bolaang Mongondow Timur	65,83	69,87	11,85	12,36	7,93	7,82	13.184	7.019	70,26	63,92	90,98
Kota Manado	69,92	73,76	14,08	14,53	11,62	11,35	16.532	12.935	81,27	78,35	96,41
Kota Bitung	69,10	72,98	12,08	13,08	9,95	9,76	16.553	10.493	76,80	72,62	94,56
Kota Tomohon	70,07	73,90	13,71	14,43	10,66	10,95	12.901	11.426	77,41	76,60	98,95
Kota Kotamobagu	68,59	72,48	12,58	13,58	10,33	10,20	14.625	10.004	76,39	72,86	95,38
SULAWESI TENGAH	66,91	70,85	13,08	13,62	9,14	8,62	13.070	7.755	73,54	67,59	91,91
Banggai Kepulauan	64,64	68,45	13,09	12,87	8,74	8,26	10.837	7.265	70,12	64,64	92,18
Banggai	68,90	72,76	12,86	13,59	8,86	8,13	14.142	7.738	74,68	67,85	90,85
Morowali	67,08	71,15	13,59	13,31	9,71	9,22	16.990	6.302	77,29	65,72	85,03
Poso	69,25	73,06	13,47	14,04	9,57	9,47	10.128	8.221	73,01	70,61	96,71
Donggala	65,53	69,38	12,27	12,81	8,50	7,69	11.263	5.760	69,81	61,73	88,43

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Toli-Toli	64,27	68,04	12,74	13,45	8,83	8,51	11.348	6.132	70,15	63,34	90,29
Buol	67,04	70,98	13,07	14,42	9,22	8,78	11.725	5.598	72,63	64,71	89,10
Parigi Moutong	62,25	66,18	12,04	12,99	7,97	7,66	12.692	7.457	68,39	63,27	92,51
Tojo Una-Una	63,96	67,75	12,29	12,73	8,40	8,39	11.404	6.418	69,06	62,95	91,15
Sigi	68,07	71,95	12,67	13,10	8,95	8,48	10.987	7.495	71,75	67,07	93,48
Banggai Laut	63,72	67,52	13,03	12,71	9,13	8,16	10.632	7.388	69,87	64,12	91,77
Morowali Utara	67,55	71,64	12,01	12,80	9,22	8,27	10.518	8.603	70,72	67,88	95,98
Kota Palu	69,01	72,99	15,96	16,51	12,08	11,32	15.642	14.669	82,52	81,00	98,16
SULAWESI SELATAN	68,77	72,65	13,37	13,81	8,74	8,20	16.092	9.924	76,21	70,76	92,85
Kepulauan Selayar	66,49	70,43	12,59	13,59	8,51	7,85	14.422	7.945	72,95	66,75	91,50
Bulukumba	66,05	70,06	13,00	13,57	8,07	7,68	13.743	10.399	72,16	69,13	95,80
Bantaeng	68,45	72,53	11,83	12,40	7,23	6,74	12.286	9.452	69,88	66,92	95,76
Jeneponto	64,47	68,42	12,13	12,09	6,76	6,50	14.113	8.326	68,95	63,16	91,60
Takalar	65,28	69,24	12,25	12,77	7,71	7,24	16.446	6.820	72,09	63,04	87,45
Gowa	68,43	72,33	13,46	13,93	8,56	7,85	14.700	6.450	75,07	65,59	87,37
Sinjai	65,38	69,28	13,06	13,64	7,96	7,68	10.255	9.083	68,97	67,46	97,81
Maros	66,98	71,04	13,10	13,40	8,55	7,64	16.856	8.306	75,20	67,08	89,20
Pangkajene dan Kepulauan	64,75	68,70	12,65	12,91	8,38	7,48	18.187	9.423	74,01	66,59	89,97
Barro	67,04	71,02	13,50	13,83	8,40	8,09	14.268	10.693	73,95	70,63	95,51
Bone	65,16	69,14	12,52	13,58	7,61	6,92	12.936	7.874	70,07	64,96	92,71
Soppeng	68,01	71,60	12,83	13,42	7,90	7,81	10.891	9.133	70,49	68,55	97,25
Wajo	65,41	69,41	12,87	13,66	7,30	6,72	20.490	9.714	74,15	67,06	90,44
Sidenreng Rappang	68,01	71,93	12,55	13,29	8,16	7,74	18.631	10.168	75,47	69,58	92,20
Pinrang	67,88	71,56	12,42	14,03	8,36	7,54	15.585	10.601	73,96	70,34	95,11
Enrekang	68,92	72,82	13,66	14,19	9,28	8,42	11.296	10.347	73,83	71,91	97,40

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Luwu	68,42	72,34	12,85	13,78	8,58	8,22	14.402	8.315	74,25	68,74	92,58
Tana Toraja	71,48	75,22	13,51	14,16	8,74	8,49	10.986	5.336	73,94	65,41	88,46
Luwu Utara	66,60	70,62	12,55	12,57	8,12	7,39	16.369	8.367	73,59	65,82	89,44
Luwu Timur	68,60	72,57	12,77	13,23	9,12	8,50	19.794	9.346	77,82	69,88	89,80
Toraja Utara	71,46	75,23	13,01	13,69	8,73	8,02	11.588	5.227	73,94	64,18	86,80
Kota Makasar	70,17	73,99	15,54	16,08	11,65	11,15	20.575	13.633	84,93	80,21	94,44
Kota Parepare	69,33	73,18	14,14	14,67	11,01	10,27	16.044	13.497	80,02	77,40	96,73
Kota Palopo	68,93	72,80	14,12	15,81	11,06	10,70	15.965	12.140	79,81	77,66	97,31
SULAWESI TENGGARA	69,35	73,37	13,64	13,91	9,55	8,72	13.432	7.650	76,07	68,98	90,68
Buton	66,23	70,53	14,11	13,75	9,35	7,19	12.130	4.523	73,75	59,51	80,69
Muna	68,22	72,52	13,71	14,11	9,41	7,99	12.265	6.137	74,52	65,40	87,76
Konawe	68,19	72,40	12,63	13,35	9,78	8,79	14.467	9.386	75,46	70,31	93,18
Kolaka	69,09	73,32	12,80	13,41	9,27	8,86	18.054	8.443	77,48	69,74	90,01
Konawe Selatan	68,74	72,97	12,26	12,94	8,57	7,62	13.303	6.246	73,02	64,28	88,03
Bombana	66,93	71,20	11,73	12,37	8,43	7,62	12.469	4.928	70,79	60,11	84,91
Wakatobi	68,34	72,60	13,67	13,46	8,69	7,71	13.314	7.140	74,47	66,27	88,99
Kolaka Utara	68,29	72,46	12,11	12,31	8,48	8,16	10.891	9.872	70,60	69,04	97,79
Buton Utara	68,81	73,04	12,92	12,89	9,61	8,25	9.852	6.964	72,02	66,25	91,99
Konawe Utara	67,30	71,66	12,87	13,12	9,79	8,99	13.483	5.863	74,61	64,66	86,66
Kolaka Timur	70,75	74,89	12,69	12,43	7,94	7,28	7.753	8.366	68,06	67,43	99,07
Konawe Kepulauan	66,30	70,56	12,08	12,32	9,80	8,92	10.530	4.598	70,91	60,31	85,05
Muna Barat	68,20	72,42	12,67	12,49	7,88	6,67	10.348	6.066	69,88	62,13	88,91
Buton Tengah	65,53	69,70	13,10	13,29	7,70	5,73	11.572	4.465	69,94	56,99	81,48
Buton Selatan	65,54	69,73	13,33	13,24	8,01	6,84	13.247	2.939	71,84	52,13	72,56
Kota Kendari	71,81	75,86	16,92	16,86	12,90	12,09	17.061	12.743	86,63	82,16	94,84
Kota Baubau	69,12	73,37	15,15	15,28	11,29	10,51	15.167	8.187	80,65	72,95	90,45

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
GORONTALO	66,27	70,21	12,81	13,79	7,58	8,22	14.211	5.394	71,74	62,77	87,50
Boalemo	67,34	71,21	11,89	13,00	6,44	7,06	13.583	3.759	69,25	56,45	81,52
Gorontalo	65,46	69,65	12,73	13,90	6,79	7,53	14.205	4.031	70,20	58,07	82,72
Pohuwato	62,38	66,14	12,04	12,77	7,19	7,46	13.239	6.902	67,82	61,99	91,40
Bone Bolango	66,38	70,46	13,23	14,55	7,87	8,79	14.281	5.389	72,67	64,12	88,23
Gorontalo Utara	64,02	67,79	12,02	13,09	6,94	7,43	13.767	3.803	68,63	55,71	81,17
Kota Gorontalo	70,66	74,38	14,13	14,99	10,32	10,43	17.966	6.457	80,94	70,22	86,76
SULAWESI BARAT	63,39	67,19	12,74	13,17	8,26	7,66	13.173	6.880	70,40	63,06	89,57
Majene	59,87	63,53	13,51	13,62	9,20	8,68	12.289	9.124	69,78	65,71	94,17
Polewali Mandar	60,60	64,34	13,20	13,62	7,72	7,16	11.885	7.281	67,83	62,15	91,63
Mamasa	68,92	72,83	11,83	12,98	8,33	7,79	8.405	7.504	67,75	66,55	98,23
Mamuju	65,73	69,68	12,60	13,73	8,36	7,73	12.404	6.596	71,00	64,34	90,62
Mamuju Utara	64,49	68,27	11,94	12,24	8,35	7,97	16.965	6.144	72,46	61,77	85,25
Mamuju Tengah	66,50	70,48	12,39	13,17	7,89	7,31	12.754	5.240	70,81	60,97	86,10
MALUKU	64,23	68,05	13,83	14,29	10,11	9,95	11.922	7.673	73,15	68,17	93,19
Maluku Tenggara Barat	61,51	65,28	12,09	12,80	9,72	9,67	8.418	4.006	66,18	57,31	86,60
Maluku Tenggara	63,17	66,99	12,43	13,31	10,14	9,73	8.624	7.146	68,04	65,76	96,65
Maluku Tengah	64,44	68,32	13,94	14,83	9,70	9,68	11.259	9.845	72,34	71,19	98,41
Buru	64,43	68,30	12,81	13,51	9,16	8,37	16.158	8.581	73,97	67,08	90,69
Kepulauan Aru	61,01	64,77	12,22	12,61	8,91	8,62	11.238	5.648	67,97	60,22	88,60
Seram Bagian Barat	59,94	63,64	13,15	13,76	9,08	8,79	8.775	8.328	66,07	65,10	98,53
Seram Bagian Timur	57,78	61,34	12,68	12,95	8,86	7,70	13.031	6.912	67,96	60,07	88,39
Maluku Barat Daya	60,65	64,37	12,34	12,47	8,56	8,64	9.811	5.564	66,19	59,76	90,29
Buru Selatan	64,37	68,26	12,63	12,83	8,47	7,48	12.956	5.910	70,90	61,32	86,49
Kota Ambon	68,64	72,52	15,62	16,66	12,22	12,14	16.393	13.421	82,63	80,84	97,83
Kota Tual	63,72	67,54	13,91	14,83	10,90	10,33	10.681	5.266	72,72	64,22	88,31

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MALUKU UTARA	66,55	70,44	13,73	13,68	9,50	8,67	12.339	6.964	73,88	66,31	89,75
Halmahera Barat	64,37	68,22	13,07	13,28	9,06	8,12	10.782	5.801	70,30	62,20	88,48
Halmahera Tengah	62,24	66,00	13,13	13,10	9,52	8,71	10.924	6.405	69,93	62,78	89,78
Kepulauan Sula	61,45	65,23	12,97	12,76	9,36	8,74	9.371	6.609	67,66	62,49	92,36
Halmahera Selatan	63,97	67,79	12,82	12,75	8,51	7,59	10.697	5.512	69,12	60,34	87,30
Halmahera Utara	67,60	71,54	13,70	13,38	9,20	8,03	11.291	6.685	73,13	65,34	89,35
Halmahera Timur	67,11	71,00	13,08	12,63	8,79	7,95	12.377	4.443	72,68	59,28	81,56
Pulau Morotai	65,33	69,25	12,42	12,93	8,00	6,92	10.753	2.363	68,80	47,99	69,75
Pulau Taliabu	60,31	64,04	12,49	12,65	8,04	7,31	11.240	4.443	66,83	55,66	83,29
Kota Ternate	69,08	72,95	15,63	15,88	12,26	11,35	17.701	10.428	83,67	76,87	91,87
Kota Tidore Kepulauan	67,46	71,33	14,17	14,74	10,46	9,78	9.842	7.996	73,52	70,46	95,84
PAPUA BARAT	64,33	68,05	13,48	12,93	10,42	7,53	11.554	5.495	72,92	60,52	83,00
Fakfak	66,58	70,42	14,63	15,33	10,79	8,22	11.213	4.693	75,24	62,37	82,89
Kaimana	63,06	66,81	12,48	12,29	10,15	7,54	11.859	5.417	71,25	59,22	83,12
Teluk Wondama	58,46	62,03	11,60	11,95	9,49	7,08	12.538	4.329	67,68	53,59	79,18
Teluk Bintuni	59,21	62,81	12,64	12,36	9,47	8,21	13.651	6.493	69,85	60,17	86,14
Manokwari	66,89	70,77	13,83	13,47	11,13	8,28	17.583	7.466	79,44	66,61	83,85
Sorong Selatan	64,47	68,30	13,84	12,68	9,75	7,48	7.983	4.067	68,70	56,54	82,30
Sorong	64,32	68,14	13,90	13,71	9,08	7,89	10.592	5.195	70,92	60,97	85,97
Raja Ampat	62,94	66,73	12,25	12,05	9,35	7,68	12.001	3.759	70,14	54,48	77,67
Tambrau	58,43	61,96	12,88	11,24	7,63	4,97	8.324	2.460	62,89	42,94	68,28
Maybrat	63,31	67,17	14,48	13,19	9,31	6,42	7.732	3.336	67,88	52,65	77,56
Manokwari Selatan	65,68	69,52	12,33	12,91	9,73	5,82	9.398	2.105	69,61	44,81	64,37
Pegunungan Arfak	65,35	69,17	11,73	8,88	9,03	4,44	6.876	4.195	64,70	49,80	76,97
Kota Sorong	69,01	72,87	14,32	14,63	11,47	11,07	19.902	10.688	82,60	75,69	91,63

LAMPIRAN 2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PAPUA	65,79	65,93	11,08	11,11	6,69	6,76	6.954	6.955	60,44	60,62	92,48
Merauke	67,00	67,07	13,88	14,14	8,72	8,73	10.097	10.201	70,09	70,49	87,00
Jayawijaya	59,64	59,90	12,27	12,53	5,51	5,60	7.441	7.545	58,03	58,67	88,54
Jayapura	67,05	67,16	14,20	14,39	10,04	10,05	9.898	9.989	71,69	72,03	93,08
Nabire	68,06	68,15	11,92	12,18	10,00	10,01	8.840	8.856	68,83	69,15	95,32
Kepulauan Yapen	69,12	69,17	12,73	12,74	9,46	9,47	7.484	7.491	67,66	67,72	93,06
Biak Numfor	68,25	68,29	13,96	14,20	10,33	10,34	9.705	9.607	72,19	72,33	95,33
Paniai	66,44	66,62	10,49	10,50	4,57	4,77	6.361	6.377	56,31	56,70	92,78
Puncak Jaya	65,15	65,33	7,24	7,49	3,62	3,74	5.282	5.289	48,37	48,99	91,89
Mimika	72,32	72,36	12,40	12,69	10,17	10,18	11.431	11.400	74,19	74,48	94,22
Boven Digoel	59,97	60,32	11,07	11,08	8,78	8,79	7.947	7.864	61,53	61,62	96,00
Mappi	65,11	65,31	10,55	10,79	6,31	6,51	6.353	6.327	58,15	58,70	96,52
Asmat	58,05	58,59	9,02	9,30	4,94	5,08	5.733	5.736	50,55	51,29	91,07
Yahukimo	65,93	66,05	7,61	7,62	4,26	4,27	4.875	4.895	49,37	49,48	96,63
Pegunungan	64,44	64,54	6,25	6,47	2,81	3,04	5.409	5.429	45,44	46,28	91,68
Tolikara	65,71	65,83	8,60	8,61	3,64	3,65	4.826	4.841	49,5	49,60	85,89
Sarmi	66,36	66,46	12,05	12,29	8,82	8,83	6.600	6.617	63,63	63,94	84,59
Keerom	66,69	66,78	12,42	12,43	8,01	8,02	8.910	8.926	66,4	66,49	87,32
Waropen	66,33	66,42	12,79	12,80	9,20	9,21	6.732	6.788	64,94	65,10	92,21
Supiori	65,94	66,06	12,74	13,00	8,81	8,87	5.677	5.708	62,3	62,72	92,96
Mamberamo Raya	57,77	58,00	11,79	11,80	5,66	5,87	4.581	4.603	51,78	52,18	91,28
Nduga	55,27	55,43	3,61	3,87	1,13	1,42	3.975	3.976	31,55	32,84	91,16

LAMPIRAN 2

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 *(lanjutan)*

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS) (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS) (tahun)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Lanny Jaya	66,06	66,11	8,62	8,89	3,20	3,43	4.350	4.393	47,86	48,68	88,34
Mamberamo Tengah	63,59	63,75	8,93	9,22	3,15	3,33	4.462	4.487	47,57	48,32	88,39
Yalimo	65,42	65,49	9,11	9,32	2,79	3,01	4.647	4.664	48,34	49,01	84,82
Puncak	65,74	65,86	5,39	5,40	2,15	2,16	5.378	5.412	43,04	43,17	86,96
Dogiyai	65,73	65,85	10,58	10,59	4,93	4,94	5.373	5.415	54,84	55,00	90,75
Intan Jaya	65,60	65,69	7,65	7,66	2,84	3,09	5.283	5.328	47,79	48,34	87,16
Deiyai	65,24	65,36	9,81	9,82	3,01	3,25	4.632	4.673	49,46	49,96	85,39
Kota Jayapura	70,45	70,52	15,01	15,02	11,56	11,57	14.763	14.937	79,94	80,11	90,89
INDONESIA	71,47	71,57	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	71,94	72,29	94,26

Sumber: www.bps.go.id. 2022



LAMPIRAN

03

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
menurut Provinsi, 2017-2021

LAMPIRAN 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi. 2017-2021

Provinsi	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	91,67	91,67	91,84	92,07	92,23
SUMATERA UTARA	90,65	90,66	90,71	90,67	90,73
SUMATERA BARAT	94,16	94,17	94,09	94,17	94,34
RIAU	88,17	88,37	88,43	88,14	88,38
JAMBI	88,13	88,44	88,44	88,41	88,62
SUMATERA SELATAN	92,43	92,62	92,40	92,38	92,35
BENGKULU	91,34	91,37	91,19	91,00	91,16
LAMPUNG	90,49	90,57	90,39	90,33	90,37
KEP, BANGKA BELITUNG	88,93	89,15	89,00	88,92	89,11
KEPULAUAN RIAU	92,96	92,97	93,10	93,31	93,49
DKI JAKARTA	94,70	94,7	94,71	94,63	94,84
JAWA BARAT	89,18	89,19	89,26	89,20	89,36
JAWA TENGAH	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48
D I YOGYAKARTA	94,39	94,73	94,77	94,80	94,88
JAWA TIMUR	90,76	90,77	90,91	91,07	91,67
BANTEN	91,14	91,3	91,67	91,74	91,83
BALI	93,70	93,71	93,72	93,79	94,01
NUSA TENGGARA BARAT	90,36	90,37	90,40	90,45	90,53
NUSA TENGGARA TIMUR	92,44	92,57	92,72	92,73	92,63
KALIMANTAN BARAT	86,28	86,74	86,81	86,87	86,95
KALIMANTAN TENGAH	88,91	89,13	89,09	89,03	88,79
KALIMANTAN SELATAN	88,60	88,61	88,61	88,86	88,86
KALIMANTAN TIMUR	85,62	85,63	85,98	85,70	85,95
KALIMANTAN UTARA	85,96	86,74	87,00	86,67	87,3

LAMPIRAN 3**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2021**
(lanjutan)

Provinsi	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI UTARA	94,78	94,79	94,53	94,42	94,61
SULAWESI TENGAH	91,66	92,08	92,01	91,87	91,91
SULAWESI SELATAN	92,84	93,15	93,09	92,86	92,85
SULAWESI TENGGARA	90,24	90,24	90,56	90,50	90,68
CORONTALO	86,64	86,63	86,83	86,73	87,5
SULAWESI BARAT	89,44	90,05	89,76	89,43	89,57
MALUKU	92,75	93,03	93,04	92,97	93,19
MALUKU UTARA	89,15	89,5	89,61	89,55	89,75
PAPUA BARAT	82,42	82,47	82,74	82,91	83
PAPUA	79,38	80,11	80,05	79,59	80,16
INDONESIA	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: www.bps.go.id, 2022



LAMPIRAN

04

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	91,67	91,67	91,84	92,07	92,23
Simeulue	76,72	77,52	77,94	77,97	78,27
Aceh Singkil	83,98	84,02	84,48	84,48	84,75
Aceh Selatan	91,46	91,54	91,49	91,56	91,73
Aceh Tenggara	92,77	93,01	93,02	93,00	93,10
Aceh Timur	86,03	85,64	85,72	85,73	85,93
Aceh Tengah	97,69	97,75	97,48	97,35	97,26
Aceh Barat	84,92	85,41	85,81	85,76	85,97
Aceh Besar	95,09	95,19	94,98	94,90	94,93
Pidie	94,03	93,50	93,49	93,58	93,61
Bireuen	95,15	94,64	94,92	94,91	94,93
Aceh Utara	92,77	92,21	92,38	92,55	92,75
Aceh Barat Daya	89,49	89,86	90,02	89,82	89,87
Gayo Lues	87,77	88,39	88,70	88,91	89,34
Aceh Tamiang	81,28	81,43	81,95	81,95	82,00
Nagan Raya	89,80	89,92	90,31	90,31	90,37
Aceh Jaya	88,46	89,26	89,28	89,47	89,49
Bener Meriah	96,35	96,53	96,69	96,60	96,63
Pidie Jaya	95,19	95,35	95,11	94,92	94,88
Kota Banda Aceh	95,40	95,46	95,17	95,26	95,54
Kota Sabang	95,83	95,97	95,47	95,81	95,60
Kota Langsa	95,70	95,89	95,79	95,61	95,41
Kota Lhokseumawe	94,60	94,98	95,06	94,90	95,06
Kota Subulussalam	83,96	84,53	85,05	85,06	85,25

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SUMATERA UTARA	90,65	90,66	90,71	90,67	90,73
Nias	90,33	90,86	91,23	90,81	91,25
Mandailing Natal	93,23	93,48	93,62	93,24	93,47
Tapanuli Selatan	91,07	91,21	91,33	90,86	90,74
Tapanuli Tengah	94,16	94,27	94,78	94,85	94,93
Tapanuli Utara	97,51	97,87	98,04	97,98	97,93
Toba Samosir	97,40	97,93	98,14	97,96	98,06
Labuhan Batu	90,79	91,02	91,05	90,86	90,88
Asahan	91,07	91,21	91,22	91,51	91,66
Simalungun	92,59	92,80	93,03	93,02	93,05
Dairi	97,68	97,44	97,77	98,02	98,05
Karo	96,08	96,27	96,31	96,19	95,90
Deli Serdang	90,78	91,18	91,31	91,29	91,18
Langkat	88,77	89,29	89,52	89,24	89,02
Nias Selatan	87,38	87,51	87,59	87,58	88,28
Humbang Hasundutan	97,15	96,93	97,10	97,38	97,32
Pakpak Bharat	98,98	99,00	99,05	99,02	98,89
Samosir	96,07	96,43	96,54	96,51	96,59
Serdang Bedagai	88,03	88,61	88,79	88,74	89,00
Batu Bara	82,65	82,90	82,93	83,08	83,22
Padang Lawas Utara	86,22	86,79	87,63	87,92	88,06
Padang Lawas	85,21	85,11	85,64	85,75	85,94
Labuhan Batu Selatan	87,29	86,97	87,43	87,43	87,61
Labuhan Batu Utara	89,34	89,82	90,03	89,80	89,96

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias Utara	78,86	78,61	79,02	79,37	79,63
Nias Barat	85,53	85,97	86,26	86,67	86,79
Kota Sibolga	97,17	97,33	97,53	97,63	97,89
Kota Tanjung Balai	88,94	89,37	89,51	89,69	90,02
Kota Pematang Siantar	95,18	95,32	95,46	95,65	95,82
Kota Tebing Tinggi	93,23	93,33	93,55	93,53	93,32
Kota Medan	93,34	93,98	94,02	94,00	93,76
Kota Binjai	90,76	90,57	90,60	90,57	90,63
Kota Padangsidempuan	97,16	97,17	97,59	97,67	97,87
Kota Gunungsitoli	89,46	89,21	89,25	89,31	89,40
SUMATERA BARAT	94,16	94,17	94,09	94,17	94,34
Kepulauan Mentawai	89,13	89,45	89,33	89,59	89,81
Pesisir Selatan	94,98	94,62	95,16	95,12	95,41
Solok	95,73	96,20	96,17	96,18	96,19
Sijunjung	93,40	93,21	93,01	93,03	93,40
Tanah Datar	98,51	97,58	97,55	97,57	97,58
Padang Pariaman	93,79	93,07	92,92	92,69	92,78
Agam	97,16	96,92	96,84	97,01	96,95
Lima Puluh Kota	94,62	94,93	94,77	95,03	94,91
Pasaman	93,00	92,61	92,59	92,45	92,47
Solok Selatan	94,54	94,92	95,03	95,08	95,14
Dharmasraya	88,43	88,26	88,30	88,31	88,32
Pasaman Barat	88,97	89,59	90,06	90,26	90,14
Kota Padang	93,77	93,77	93,48	93,64	93,81
Kota Solok	96,70	97,24	97,13	97,05	97,05

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Sawah Lunto	95,50	95,68	95,51	95,48	95,73
Kota Padang Panjang	97,76	97,77	97,50	97,70	97,78
Kota Bukittinggi	98,78	98,80	98,77	98,89	98,99
Kota Payakumbuh	98,53	98,54	98,51	98,46	98,60
Kota Pariaman	98,95	98,61	98,19	98,49	98,62
RIAU	88,17	88,37	88,43	88,14	88,38
Kuantan Singingi	89,71	90,06	90,57	90,16	90,06
Indragiri Hulu	86,58	86,61	87,33	86,94	86,69
Indragiri Hilir	81,80	82,37	82,57	82,34	82,37
Pelalawan	88,50	88,50	88,51	88,06	88,73
Siak	88,41	88,52	88,58	88,62	88,69
Kampar	89,22	89,29	89,83	89,52	89,79
Rokan Hulu	81,84	81,85	82,13	81,88	82,12
Bengkalis	89,81	89,96	90,08	90,07	90,10
Rokan Hilir	84,73	84,86	85,22	84,91	84,65
Kepulauan Meranti	85,30	85,90	86,20	86,30	86,45
Kota Pekanbaru	92,86	92,97	93,12	93,01	93,27
Kota Dumai	90,52	90,82	90,86	90,66	90,72
JAMBI	88,13	88,44	88,44	88,41	88,62
Kerinci	85,97	86,32	86,68	86,65	86,81
Merangin	87,64	88,01	88,01	88,14	88,24
Sarolangun	90,44	90,29	90,67	90,55	90,81
Batang Hari	84,18	84,49	85,17	85,01	85,23
Muaro Jambi	79,41	80,21	80,29	80,08	81,06
Tanjung Jabung Timur	86,56	87,30	87,76	87,50	87,43

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanjung Jabung Barat	85,44	85,87	85,68	85,66	85,79
Tebo	90,06	90,22	90,23	90,06	90,40
Bungo	88,15	88,20	88,63	88,54	88,49
Kota Jambi	94,45	94,46	94,14	94,03	94,42
Kota Sungai Penuh	93,98	94,43	94,44	94,31	94,41
SUMATERA SELATAN	92,43	92,62	92,40	92,38	92,35
Ogan Komering Ulu	93,46	94,01	93,92	94,00	93,94
Ogan Komering Ilir	91,08	91,35	91,22	91,30	91,69
Muara Enim	89,32	89,76	89,69	89,64	89,67
Lahat	94,80	95,08	94,82	94,60	94,74
Musi Rawas	85,12	85,17	85,59	85,45	85,85
Musi Banyuasin	81,97	82,68	82,85	82,90	82,63
Banyu Asin	88,97	89,25	89,16	88,93	88,96
Ogan Komering Ulu Selatan	92,12	92,80	92,78	92,62	92,39
Ogan Komering Ulu Timur	93,84	94,14	94,07	94,00	93,82
Ogan Ilir	98,15	98,45	98,95	99,13	99,09
Empat Lawang	92,95	93,24	93,16	93,38	93,32
Penukal Abab Lematang Ilir	92,19	92,79	93,20	93,17	93,13
Musi Rawas Utara	92,86	93,18	93,10	92,82	92,60
Kota Palembang	95,56	96,01	95,90	95,97	96,07
Kota Prabumulih	92,72	93,32	93,26	93,70	93,68
Kota Pagar Alam	93,82	94,44	94,33	94,46	94,64
Kota Lubuklinggau	95,74	95,83	95,94	95,83	95,84

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BENGKULU	91,34	91,37	91,19	91,00	91,16
Bengkulu Selatan	93,74	94,08	94,05	94,14	94,31
Rejang Lebong	94,15	94,59	94,15	93,78	93,72
Bengkulu Utara	91,00	91,19	91,25	91,23	91,39
Kaur	86,91	87,20	87,13	87,12	87,17
Seluma	85,20	85,28	85,32	85,65	85,93
Mukomuko	83,98	84,18	83,95	83,88	84,03
Lebong	90,64	90,99	91,49	91,60	91,86
Kepahiang	94,69	95,20	95,32	95,80	95,73
Bengkulu Tengah	85,77	86,36	86,55	86,83	87,04
Kota Bengkulu	96,36	96,55	95,97	95,67	95,77
LAMPUNG	90,49	90,57	90,39	90,33	90,37
Lampung Barat	92,47	92,74	92,55	92,95	93,00
Tanggamus	90,71	91,14	90,88	91,13	90,98
Lampung Selatan	89,52	89,87	89,54	89,60	89,61
Lampung Timur	87,85	88,67	88,78	88,83	88,78
Lampung Tengah	89,23	89,57	89,88	89,87	89,94
Lampung Utara	88,69	89,34	89,48	89,46	89,58
Way Kanan	87,85	88,25	88,22	88,19	88,32
Tulangbawang	88,51	88,69	89,17	89,31	89,56
Pesawaran	87,25	87,57	87,30	87,20	87,22
Pringsewu	92,26	92,59	92,37	92,33	92,29
Mesuji	83,82	84,49	84,22	84,17	84,37
Tulang Bawang Barat	88,08	88,53	88,45	88,56	88,96
Pesisir Barat	92,84	93,40	93,22	93,21	93,51
Kota Bandar Lampung	93,53	93,55	93,96	93,86	93,93
Kota Metro	94,97	94,98	95,02	95,55	95,89

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEP, BANGKA BELITUNG	88,93	89,15	89,00	88,92	89,11
Bangka	88,14	88,24	88,49	88,48	88,36
Belitung	87,99	88,62	88,61	88,28	88,29
Bangka Barat	89,41	89,92	90,07	90,03	90,04
Bangka Tengah	90,83	91,04	91,05	91,49	91,34
Bangka Selatan	83,48	83,54	83,86	83,81	84,31
Belitung Timur	86,04	86,08	86,17	86,37	86,56
Kota Pangkal Pinang	92,80	92,94	92,89	93,16	93,25
KEPULAUAN RIAU	92,96	92,97	93,10	93,31	93,49
Karimun	91,35	91,48	90,91	91,25	91,00
Bintan	92,58	92,79	93,10	93,12	93,53
Natuna	91,31	91,62	91,72	91,67	91,95
Lingga	89,73	89,29	89,26	89,25	89,73
Kepulauan Anambas	89,97	90,12	90,16	90,27	90,30
Kota Batam	94,21	94,22	94,42	94,43	94,51
Kota Tanjung Pinang	96,46	96,47	96,77	96,79	97,14
DKI JAKARTA	94,70	94,70	94,71	94,63	94,84
Kep, Seribu	93,24	93,57	93,58	93,39	93,39
Kota Jakarta Selatan	95,71	96,07	96,29	96,14	96,28
Kota Jakarta Timur	94,59	94,79	95,50	95,48	95,44
Kota Jakarta Pusat	95,52	95,62	95,68	96,00	96,11
Kota Jakarta Barat	95,38	95,22	95,23	95,16	95,37
Kota Jakarta Utara	93,38	93,51	93,64	93,53	93,60

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA BARAT	89,18	89,19	89,26	89,20	89,36
Bogor	88,69	89,05	89,39	89,23	89,40
Sukabumi	86,90	86,95	87,43	87,37	87,44
Cianjur	83,56	83,72	84,36	84,14	84,30
Bandung	93,43	93,59	93,96	93,95	93,85
Garut	81,96	82,42	82,54	82,29	82,13
Tasikmalaya	85,63	85,98	86,05	86,02	86,36
Ciamis	85,60	86,00	86,49	86,61	86,55
Kuningan	86,34	86,62	86,92	86,81	86,97
Cirebon	82,51	82,92	83,50	83,47	83,49
Majalengka	85,43	85,93	85,76	85,91	86,24
Sumedang	94,60	94,88	95,01	95,18	95,18
Indramayu	87,91	87,97	88,35	88,15	87,92
Subang	90,52	90,57	90,58	90,53	90,51
Purwakarta	87,18	87,19	86,78	86,56	86,70
Karawang	90,42	90,45	90,33	90,12	90,29
Bekasi	88,00	88,28	88,68	88,58	88,88
Bandung Barat	79,11	79,18	79,29	79,06	79,07
Pangandaran	89,30	89,68	90,02	89,78	89,92
Kota Bogor	90,90	90,92	91,11	91,02	90,87
Kota Sukabumi	90,95	91,07	91,44	91,36	91,58
Kota Bandung	95,03	95,11	94,82	94,68	94,72
Kota Cirebon	93,94	93,94	94,35	94,39	94,46

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Bekasi	93,09	93,26	93,02	92,95	93,09
Kota Depok	93,05	93,06	92,78	93,01	92,96
Kota Cimahi	92,33	92,36	92,20	92,01	91,95
Kota Tasikmalaya	91,06	91,07	91,48	91,64	91,74
Kota Banjar	86,93	87,11	87,12	87,17	87,01
JAWA TENGAH	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48
Cilacap	86,14	86,53	86,67	86,69	87,00
Banyumas	87,62	87,94	88,20	88,27	88,54
Purbalingga	92,31	92,32	92,68	92,78	93,08
Banjarnegara	95,02	95,18	95,38	95,28	95,32
Kebumen	92,68	93,09	93,34	93,05	93,06
Purworejo	95,26	95,11	94,92	94,96	95,33
Wonosobo	92,61	92,91	92,72	92,75	92,78
Magelang	91,95	92,23	91,78	91,81	91,89
Boyolali	92,96	93,24	93,50	94,19	94,22
Klaten	96,54	96,00	96,04	96,17	96,00
Sukoharjo	96,98	96,73	96,58	96,49	96,52
Wonogiri	90,70	91,13	91,41	91,08	91,07
Karanganyar	96,50	96,61	96,48	96,52	96,63
Sragen	91,89	92,27	91,40	91,62	91,68
Grobogan	85,69	85,81	85,98	86,14	85,89
Blora	83,55	83,79	83,96	83,88	84,59
Rembang	86,18	86,49	86,85	87,00	87,32
Pati	91,98	91,50	91,60	91,50	92,21

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kudus	92,68	92,89	92,90	92,75	92,96
Jejara	90,39	90,66	90,91	90,99	91,28
Demak	90,45	90,40	90,57	90,90	91,16
Semarang	96,48	96,35	96,40	96,38	96,61
Temanggung	96,00	95,62	95,10	95,31	95,74
Kendal	93,25	92,96	92,85	93,19	93,30
Batang	90,49	90,65	91,08	91,47	91,86
Pekalongan	92,68	92,87	92,58	92,48	92,56
Pemalang	85,47	85,49	85,81	85,83	86,49
Tegal	87,52	86,95	86,74	86,79	87,53
Brebes	85,86	86,24	86,35	86,36	86,65
Kota Magelang	96,26	96,07	95,51	95,27	95,54
Kota Surakarta	96,74	96,82	96,72	96,84	96,89
Kota Salatiga	95,34	95,12	95,00	95,18	95,37
Kota Semarang	95,69	95,82	95,55	95,49	95,67
Kota Pekalongan	94,43	94,59	94,92	95,17	95,42
Kota Tegal	92,92	93,45	93,37	93,18	93,26
D I YOGYAKARTA	94,39	94,73	94,77	94,80	94,88
Kulon Progo	94,93	95,03	95,05	95,07	95,09
Bantul	94,98	95,11	95,18	95,12	95,19
Gunung Kidul	84,03	84,59	84,62	84,73	85,31
Sleman	95,62	96,01	96,04	96,20	96,25
Kota Yogyakarta	98,26	98,48	98,09	98,16	98,32

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TIMUR	90,76	90,77	90,91	91,07	91,67
Pacitan	84,41	84,44	85,13	84,87	85,09
Ponorogo	93,30	93,00	93,34	93,56	93,65
Trenggalek	91,84	92,52	92,74	92,93	92,56
Tulungagung	95,30	95,75	95,63	95,48	95,52
Blitar	92,50	92,33	92,73	92,70	92,76
Kediri	92,81	92,81	92,70	93,07	92,90
Malang	88,33	88,38	88,66	88,68	88,34
Lumajang	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39
Jember	84,32	84,23	84,30	84,66	84,82
Banyuwangi	86,20	86,44	86,81	86,66	86,96
Bondowoso	89,48	89,89	90,42	90,68	90,75
Situbondo	86,78	86,69	87,11	87,06	87,16
Probolinggo	84,57	84,86	84,95	85,38	85,39
Pasuruan	90,65	90,41	90,68	90,48	90,89
Sidoarjo	93,33	93,33	93,79	94,13	94,26
Mojokerto	90,39	90,15	90,65	91,10	91,24
Jombang	89,91	89,94	90,37	90,15	90,23
Nganjuk	93,48	93,26	93,27	93,26	93,76
Madiun	91,61	91,13	91,81	91,79	91,77
Magetan	93,20	92,93	93,16	93,36	93,65
Ngawi	91,70	91,72	92,52	92,19	92,32
Bojonegoro	89,78	89,77	89,98	90,17	90,21
Tuban	87,32	87,34	87,63	87,78	88,06

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lamongan	87,98	88,00	88,40	88,59	88,99
Gresik	89,57	89,72	90,05	89,93	90,20
Bangkalan	86,92	86,38	86,93	86,88	86,95
Sampang	84,15	84,33	84,79	85,50	86,32
Pamekasan	85,68	85,50	86,05	86,17	86,50
Sumenep	79,65	80,11	80,72	80,81	81,18
Kota Kediri	94,64	94,48	94,53	94,39	94,21
Kota Blitar	97,91	97,60	97,80	97,46	97,36
Kota Malang	94,96	94,71	94,72	94,97	95,24
Kota Probolinggo	96,07	95,56	95,91	95,87	96,01
Kota Pasuruan	96,36	96,02	96,18	96,16	96,27
Kota Mojokerto	93,40	93,05	93,18	93,26	93,47
Kota Madiun	93,66	93,47	94,05	94,38	94,42
Kota Surabaya	93,66	93,57	93,60	93,58	93,90
Kota Batu	89,27	89,27	89,71	89,72	89,89
BANTEN	91,14	91,30	91,67	91,74	91,83
Pandeglang	86,13	86,47	86,68	86,71	86,83
Lebak	78,56	79,26	79,63	79,81	79,87
Tangerang	91,20	90,90	90,97	90,98	91,08
Serang	92,28	92,18	92,40	92,14	91,98
Kota Tangerang	94,07	94,51	94,89	95,06	94,72
Kota Cilegon	86,35	86,75	87,16	87,22	87,25
Kota Serang	91,15	91,16	91,96	92,28	92,47
Kota Tangerang Selatan	92,83	93,16	93,56	93,58	93,80

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BALI	93,70	93,71	93,72	93,79	94,01
Jembrana	92,65	93,21	93,52	93,38	93,86
Tabanan	95,13	95,34	95,35	95,36	95,42
Badung	94,52	94,90	95,50	95,51	95,53
Gianyar	93,61	94,16	94,26	94,63	94,70
Klungkung	91,03	91,06	91,10	91,12	91,18
Bangli	90,72	91,23	91,25	91,54	91,58
Karangasem	89,02	89,22	88,87	88,93	88,96
Buleleng	91,40	91,92	91,94	91,59	91,65
Kota Denpasar	96,88	96,89	96,92	96,77	96,88
NUSA TENGGARA BARAT	90,36	90,37	90,40	90,45	90,53
Lombok Barat	88,93	88,71	89,05	88,85	89,22
Lombok Tengah	86,40	86,81	87,26	87,17	87,19
Lombok Timur	91,12	91,14	91,16	91,27	91,33
Sumbawa	93,40	93,76	93,65	93,67	93,48
Dompu	90,54	90,72	91,12	91,02	90,66
Bima	91,08	91,11	91,49	91,50	91,87
Sumbawa Barat	92,38	92,18	92,57	92,77	92,80
Lombok Utara	85,34	85,14	85,42	85,44	85,54
Kota Mataram	92,66	92,54	92,77	92,79	92,79
Kota Bima	96,15	96,44	96,39	96,41	96,41

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NUSA TENGGARA TIMUR	92,44	92,57	92,72	92,73	92,63
Sumba Barat	94,12	94,13	94,47	94,61	94,16
Sumba Timur	96,11	96,03	96,43	96,16	95,93
Kupang	87,73	88,29	88,22	88,23	88,06
Timor Tengah Selatan	94,79	94,23	94,87	94,91	94,95
Timor Tengah Utara	95,87	95,44	95,52	95,55	95,19
Belu	97,07	96,81	96,88	97,10	97,07
Alor	92,67	92,34	92,37	92,14	92,13
Lembata	92,04	91,44	91,27	91,29	91,24
Flores Timur	90,49	91,28	91,29	91,32	91,49
Sikka	88,64	88,96	89,64	89,15	88,93
Ende	95,52	95,23	95,44	95,64	95,81
Ngada	96,06	95,76	95,91	96,09	95,76
Manggarai	87,38	87,70	88,16	88,00	87,65
Rote Ndao	83,86	84,59	84,64	84,62	84,08
Manggarai Barat	87,38	87,43	87,17	86,67	87,11
Sumba Tengah	90,25	90,78	91,28	90,90	90,49
Sumba Barat Daya	98,20	97,43	97,48	97,62	97,68
Nagekeo	98,93	99,15	99,04	98,97	98,56
Manggarai Timur	90,76	90,80	90,89	90,50	90,52
Sabu Raijua	92,18	92,54	92,76	92,79	92,31
Malaka	89,90	89,17	89,42	89,49	89,42
Kota Kupang	95,23	95,50	95,48	95,73	95,99

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	86,28	86,74	86,81	86,87	86,95
Sambas	87,06	86,96	86,97	87,07	87,00
Bengkayang	82,81	82,81	82,82	82,78	82,79
Landak	87,87	87,90	87,92	88,14	88,44
Mempawah	86,98	87,76	87,78	87,92	87,80
Sanggau	80,38	80,59	80,92	81,04	81,19
Ketapang	87,84	88,41	88,52	88,42	88,60
Sintang	85,97	86,29	86,50	86,73	86,73
Kapuas Hulu	84,45	84,38	84,74	84,91	84,95
Sekadau	81,82	82,07	82,40	82,65	82,72
Melawi	79,79	79,75	80,08	80,10	80,15
Kayong Utara	85,14	85,19	85,73	85,75	86,04
Kubu Raya	84,05	84,57	84,60	84,30	84,30
Kota Pontianak	93,60	93,32	93,81	93,73	94,01
Kota Singkawang	91,98	91,91	92,21	92,00	92,00
KALIMANTAN TENGAH	88,91	89,13	89,09	89,03	88,79
Kotawaringin Barat	91,76	91,76	91,69	91,67	91,69
Kotawaringin Timur	87,73	87,74	87,91	88,12	88,14
Kapuas	96,59	96,26	95,51	95,35	95,32
Barito Selatan	93,02	92,35	92,04	91,92	91,78
Barito Utara	85,16	85,89	87,15	87,26	87,49
Sukamara	91,24	91,45	90,84	91,01	91,49
Lamandau	91,97	91,88	91,90	91,94	91,91

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seruyan	88,64	89,46	89,44	89,36	89,16
Katingan	85,51	85,70	85,57	85,41	85,38
Pulang Pisau	91,70	91,72	92,12	92,06	92,04
Gunung Mas	91,74	91,89	92,10	92,09	91,99
Barito Timur	88,36	88,41	88,76	88,74	88,82
Murung Raya	82,92	83,23	83,41	83,56	83,55
Kota Palangka Raya	94,42	94,66	94,96	95,02	95,01
KALIMANTAN SELATAN	88,60	88,61	88,61	88,86	88,86
Tanah Laut	87,53	87,14	86,96	87,19	86,86
Kota Baru	83,50	83,80	84,10	84,15	84,77
Banjar	91,85	91,39	90,65	90,50	91,00
Barito Kuala	88,63	88,91	89,03	89,04	89,18
Tapin	83,87	84,56	84,44	84,08	84,15
Hulu Sungai Selatan	89,07	89,10	89,21	89,23	89,65
Hulu Sungai Tengah	96,89	96,52	96,60	96,50	96,46
Hulu Sungai Utara	92,36	92,09	91,59	91,52	91,74
Tabalong	85,15	84,99	85,43	85,34	85,48
Tanah Bumbu	84,42	84,33	84,34	84,60	85,09
Balangan	92,31	92,32	92,12	92,22	92,33
Kota Banjarmasin	93,28	93,28	93,30	93,37	93,69
Kota Banjar Baru	92,17	92,42	92,43	92,55	92,56

LAMPIRAN 4
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN TIMUR	85,62	85,63	85,98	85,70	85,95
Paser	69,78	70,64	71,41	71,15	71,19
Kutai Barat	83,30	83,52	83,84	83,87	84,28
Kutai Kartanegara	78,54	78,83	79,14	78,90	79,12
Kutai Timur	75,48	76,03	76,51	76,26	76,40
Berau	87,77	87,92	87,93	87,61	87,76
Penajam Paser Utara	86,31	86,34	86,22	86,39	86,57
Mahakam Ulu	79,82	80,18	80,89	80,98	81,65
Kota Balikpapan	89,74	89,76	89,71	89,65	89,83
Kota Samarinda	89,26	89,42	89,41	89,27	89,27
Kota Bontang	86,44	86,61	86,72	86,87	87,12
KALIMANTAN UTARA	85,96	86,74	87,00	86,67	87,30
Malinau	81,02	81,53	81,71	81,36	81,95
Bulungan	84,74	84,98	85,39	85,10	85,12
Tana Tidung	77,37	77,82	78,02	77,57	78,20
Nunukan	82,15	82,41	82,74	82,29	83,09
Kota Tarakan	91,23	92,28	92,16	91,90	92,00
SULAWESI UTARA	94,78	94,79	94,53	94,42	94,61
Bolaang Mongondow	87,72	88,03	88,36	88,29	88,41
Minahasa	96,22	96,48	96,76	96,53	96,02
Kepulauan Sangihe	96,10	96,10	95,35	95,23	95,94
Kepulauan Talaud	97,18	97,64	97,67	97,90	98,09
Minahasa Selatan	88,53	89,31	88,81	88,74	88,78
Minahasa Utara	96,26	96,80	96,42	96,40	96,24

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow Utara	85,46	86,19	86,92	86,77	87,02
Siau Tagulandang Biaro	87,64	88,28	88,43	88,40	88,87
Minahasa Tenggara	91,81	92,21	91,87	91,88	92,08
Bolaang Mongondow Selatan	78,34	79,39	79,87	79,70	80,09
Bolaang Mongondow Timur	90,50	90,51	90,75	90,84	90,98
Kota Manado	95,96	96,07	96,28	96,23	96,41
Kota Bitung	94,87	95,01	94,23	94,19	94,56
Kota Tomohon	98,98	99,20	98,98	98,94	98,95
Kota Kotamobagu	94,78	95,13	95,42	95,37	95,38
SULAWESI TENGAH	91,66	92,08	92,01	91,87	91,91
Banggai Kepulauan	91,83	92,01	92,18	92,36	92,18
Banggai	90,64	91,48	90,95	90,83	90,85
Morowali	84,83	84,88	84,71	84,89	85,03
Poso	97,11	96,81	96,58	96,54	96,71
Donggala	87,66	87,75	88,27	88,34	88,43
Toli-Toli	89,70	89,62	89,82	89,73	90,29
Buol	89,12	89,27	89,34	89,25	89,10
Parigi Moutong	92,46	92,48	92,35	92,29	92,51
Tojo Una-Una	91,47	91,72	91,28	91,22	91,15
Sigi	92,98	92,99	93,32	93,26	93,48
Banggai Laut	91,56	91,60	91,04	91,31	91,77
Morowali Utara	96,58	96,41	95,90	95,98	95,98
Kota Palu	97,69	97,94	98,00	97,96	98,16

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI SELATAN	92,84	93,15	93,09	92,86	92,85
Kepulauan Selayar	90,97	91,96	91,92	91,63	91,50
Bulukumba	96,56	96,45	96,59	96,29	95,80
Bantaeng	95,28	95,30	95,31	95,78	95,76
Jeneponto	90,94	91,30	91,64	91,46	91,60
Takalar	86,76	87,24	87,29	87,56	87,45
Gowa	87,69	87,24	87,19	87,17	87,37
Sinjai	98,01	98,13	98,20	98,02	97,81
Maros	88,91	88,93	89,10	89,23	89,20
Pangkajene dan Kepulauan	89,26	89,80	90,16	89,85	89,97
Barru	95,51	95,44	95,42	95,52	95,51
Bone	92,65	92,95	93,25	92,89	92,71
Soppeng	97,43	97,25	97,08	97,26	97,25
Wajo	89,90	90,04	90,13	90,25	90,44
Sidenreng Rappang	92,21	91,90	92,08	92,06	92,20
Pinrang	95,44	95,45	95,35	95,16	95,11
Enrekang	98,12	97,99	97,31	97,41	97,40
Luwu	92,52	92,28	92,00	92,16	92,58
Tana Toraja	87,18	87,86	88,18	87,97	88,46
Luwu Utara	88,87	88,94	89,21	89,20	89,44
Luwu Timur	89,49	89,38	89,61	89,71	89,80
Toraja Utara	86,03	86,38	86,78	86,83	86,80
Kota Makasar	94,70	94,53	94,48	94,47	94,44
Kota Parepare	97,47	96,87	96,78	96,88	96,73
Kota Palopo	97,57	97,75	97,35	97,32	97,31

LAMPIRAN 4
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI TENGGARA	90,24	90,24	90,56	90,50	90,68
Buton	78,39	79,01	79,82	80,18	80,69
Muna	87,34	87,08	87,51	87,59	87,76
Konawe	93,12	92,91	92,61	92,65	93,18
Kolaka	89,77	89,59	89,87	89,78	90,01
Konawe Selatan	87,26	87,30	87,45	87,73	88,03
Bombana	83,71	84,02	84,77	84,67	84,91
Wakatobi	88,23	88,39	88,60	88,39	88,99
Kolaka Utara	97,55	97,84	97,32	97,24	97,79
Buton Utara	91,94	91,83	91,85	92,02	91,99
Konawe Utara	85,44	85,58	85,69	86,17	86,66
Kolaka Timur	98,15	98,16	98,63	98,37	99,07
Konawe Kepulauan	83,71	83,76	84,43	85,00	85,05
Muna Barat	88,13	88,05	88,82	88,65	88,91
Buton Tengah	78,57	79,29	80,15	80,57	81,48
Buton Selatan	72,21	72,49	72,28	72,25	72,56
Kota Kendari	94,57	94,66	94,75	94,61	94,84
Kota Baubau	90,64	90,65	90,65	90,27	90,45
GORONTALO	86,64	86,63	86,83	86,73	87,50
Boalemo	80,36	80,82	81,14	81,15	81,52
Gorontalo	80,98	81,18	81,33	81,67	82,72
Pohuwato	91,31	91,11	91,46	91,36	91,40
Bone Bolango	86,71	86,96	87,71	87,54	88,23
Gorontalo Utara	80,44	81,16	81,25	81,16	81,17
Kota Gorontalo	86,09	86,06	86,25	86,23	86,76

LAMPIRAN 4
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI BARAT	89,44	90,05	89,76	89,43	89,57
Majene	94,67	94,40	94,42	94,09	94,17
Polewali Mandar	91,22	91,87	91,57	91,56	91,63
Mamasa	97,92	97,78	97,75	97,79	98,23
Mamuju	90,37	90,37	90,64	90,57	90,62
Mamuju Utara	83,88	84,35	84,42	84,92	85,25
Mamuju Tengah	87,26	87,12	86,70	86,34	86,10
MALUKU	92,75	93,03	93,04	92,97	93,19
Maluku Tenggara Barat	85,80	86,26	86,46	86,44	86,60
Maluku Tenggara	96,47	96,39	96,76	96,63	96,65
Maluku Tengah	98,30	98,31	98,41	98,38	98,41
Buru	89,63	89,68	90,27	90,22	90,69
Kepulauan Aru	88,70	88,41	88,25	88,19	88,60
Seram Bagian Barat	98,35	98,68	98,63	98,44	98,53
Seram Bagian Timur	86,58	86,81	87,69	87,67	88,39
Maluku Barat Daya	89,50	89,56	89,81	90,08	90,29
Buru Selatan	85,42	86,08	86,18	86,39	86,49
Kota Ambon	97,88	97,84	97,84	97,78	97,83
Kota Tual	87,16	87,63	87,83	88,11	88,31
MALUKU UTARA	89,15	89,50	89,61	89,55	89,75
Halmahera Barat	88,20	87,79	88,20	88,30	88,48
Halmahera Tengah	89,52	89,34	89,61	89,53	89,78
Kepulauan Sula	92,13	92,14	92,14	91,97	92,36
Halmahera Selatan	85,83	86,41	86,60	86,49	87,30
Halmahera Utara	89,14	88,81	89,35	89,44	89,35
Halmahera Timur	81,29	81,30	81,41	81,43	81,56

LAMPIRAN 4
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Morotai	68,57	69,40	69,86	69,75	69,75
Pulau Taliabu	81,87	82,82	83,58	83,29	83,29
Kota Ternate	91,89	91,92	92,10	91,83	91,87
Kota Tidore Kepulauan	95,33	95,12	95,13	95,47	95,84
PAPUA BARAT	82,42	82,47	82,74	82,91	83,00
Fakfak	83,23	83,34	83,45	82,95	82,89
Kaimana	81,85	81,98	82,55	83,02	83,12
Teluk Wondama	78,85	78,91	79,15	79,28	79,18
Teluk Bintuni	85,65	85,71	85,91	86,17	86,14
Manokwari	82,62	83,11	83,47	83,69	83,85
Sorong Selatan	81,54	81,43	81,77	81,99	82,30
Sorong	85,33	85,58	85,76	85,95	85,97
Raja Ampat	76,67	77,00	77,55	77,64	77,67
Tambrau	66,50	67,31	67,97	68,14	68,28
Maybrat	76,10	76,55	76,97	77,31	77,56
Manokwari Selatan	62,66	63,45	64,16	63,88	64,37
Pegunungan Arfak	76,07	76,15	76,79	76,94	76,97
Kota Sorong	90,98	91,38	91,97	91,62	91,63
PAPUA	79,38	80,11	80,05	79,59	80,16
Merauke	87,45	87,69	87,70	87,84	88,04
Jayawijaya	82,80	82,93	83,22	83,50	84,09
Jayapura	90,48	90,59	91,10	90,92	91,19
Nabire	89,97	90,27	90,07	90,37	90,51
Kepulauan Yapen	88,07	88,68	89,11	89,00	89,15
Biak Numfor	89,80	90,10	90,01	90,15	90,25

LAMPIRAN 4**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paniai	67,15	67,60	68,21	67,88	68,25
Puncak Jaya	64,43	65,20	65,25	65,20	65,69
Mimika	77,09	77,10	76,93	77,03	76,88
Boven Digoel	78,83	79,17	79,25	79,18	79,06
Mappi	83,77	83,65	83,63	83,48	83,78
Asmat	50,61	52,23	53,71	53,59	53,72
Yahukimo	70,53	71,83	72,07	72,28	73,02
Pegunungan Bintang	79,83	80,49	79,62	80,01	80,49
Tolikara	57,77	59,17	59,83	59,58	60,18
Sarmi	82,12	82,31	82,15	82,35	82,56
Keerom	85,30	85,78	86,21	86,23	86,32
Waropen	70,13	70,57	70,52	70,13	70,35
Supiori	76,16	76,31	76,40	76,38	76,78
Mamberamo Raya	80,64	81,47	81,85	81,56	82,11
Nduga	84,45	84,47	82,73	84,09	86,01
Lanny Jaya	91,58	91,59	92,14	92,40	92,89
Mamberamo Tengah	87,35	86,80	86,00	86,79	87,80
Yalimo	82,29	83,47	82,87	82,60	83,65
Puncak	82,40	82,61	82,57	82,17	83,27
Dogiyai	81,17	81,05	81,45	80,82	80,48
Intan Jaya	68,42	69,32	70,64	70,40	71,62
Dogiyai	81,17	81,05	81,45	80,82	80,48
Intan Jaya	68,42	69,32	70,64	70,40	71,62
INDONESIA	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: www.bps.go.id, 2022



LAMPIRAN

05

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
dan Komponen Pembentuknya
menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2021 (

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	11,11	54,42	34,67	63,24
Simeulue	20,00	51,03	24,68	64,95
Aceh Singkil	12,00	51,30	28,32	59,65
Aceh Selatan	10,00	56,51	27,92	55,87
Aceh Tenggara	10,00	43,62	31,27	58,10
Aceh Timur	7,50	72,12	29,67	47,84
Aceh Tengah	16,67	52,63	37,93	71,82
Aceh Barat	8,00	53,23	30,25	56,69
Aceh Besar	2,86	48,67	25,73	48,11
Pidie	17,50	57,16	31,76	66,02
Bireuen	7,50	62,36	39,67	58,17
Aceh Utara	2,22	60,39	34,64	51,27
Aceh Barat Daya	4,00	59,01	30,59	52,3
Gayo Lues	5,00	47,01	37,02	56,76
Aceh Tamiang	36,67	58,39	27,53	75,01
Nagan Raya	16,00	41,40	27,48	61,74
Aceh Jaya	5,00	53,76	38,63	58,42
Bener Meriah	4,00	52,36	29,74	52,53
Pidie Jaya	4,00	61,77	34,87	55,04
Kota Banda Aceh	13,33	43,81	28,14	62,42
Kota Sabang	25,00	52,15	33,16	75,66
Kota Langsa	20,00	50,85	27,26	65,47
Kota Lhokseumawe	16,00	59,76	23,46	58,26

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUMATERA UTARA	13,13	53,95	36,02	67,79
Nias	8,00	33,43	51,14	60,33
Mandailing Natal	15,00	60,70	47,02	71,90
Tapanuli Selatan	11,43	61,88	49,96	69,25
Tapanuli Tengah	17,14	52,48	44,60	74,39
Tapanuli Utara	8,82	57,13	49,66	66,36
Toba Samosir	3,33	61,51	47,17	59,51
Labuhan Batu	20,00	55,14	32,61	71,96
Asahan	22,22	50,93	26,49	68,54
Simalungun	8,00	51,27	36,68	62,40
Dairi	5,71	60,28	49,35	61,11
Karo	28,57	60,57	50,02	81,53
Deli Serdang	6,00	51,57	28,19	55,14
Langkat	16,00	60,19	31,10	66,04
Nias Selatan	17,14	38,32	35,39	67,04
Humbang Hasundutan	16,00	52,72	50,34	72,76
Pakpak Bharat	10,00	54,56	49,27	66,97
Samosir	24,00	59,34	50,13	78,75
Serdang Bedagai	15,56	58,66	30,35	65,49
Batu Bara	8,82	57,61	37,85	63,16
Padang Lawas Utara	10,00	45,56	45,15	68,14
Padang Lawas	3,33	59,04	40,57	57,61
Labuhan Batu Selatan	14,29	62,99	32,39	64,56
Labuhan Batu Utara	2,86	59,70	24,88	46,14

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias Utara	12,00	39,41	48,02	67,03
Nias Barat	10,00	45,11	50,09	65,88
Kota Sibolga	25,00	65,10	32,90	71,84
Kota Tanjung Balai	20,00	54,21	24,21	63,46
Kota Pematang Siantar	10,00	55,28	35,10	62,43
Kota Tebing Tinggi	4,00	52,36	30,24	53,78
Kota Medan	12,00	51,51	32,61	63,91
Kota Binjai	16,67	62,37	34,94	68,32
Kota Padangsidempuan	16,67	54,91	31,05	65,99
Kota Gunungsitoli	8,33	44,75	41,70	63,28
SUMATERA BARAT	10,77	59,09	37,43	65,12
Kepulauan Mentawai	0,00	55,68	30,71	47,36
Pesisir Selatan	6,67	70,05	33,85	53,39
Solok	8,57	62,30	39,30	61,57
Sijunjung	13,33	62,87	28,57	60,46
Tanah Datar	8,57	55,97	33,98	59,70
Padang Pariaman	0,00	63,32	31,34	46,64
Agam	8,89	59,50	39,57	63,07
Lima Puluh Kota	5,71	63,75	29,17	50,59
Pasaman	8,57	62,53	39,17	62,74
Solok Selatan	0,00	67,13	37,11	47,86
Dharmasraya	6,67	64,05	27,24	50,66
Pasaman Barat	7,50	60,13	36,67	60,38

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Padang	11,11	49,36	35,08	65,33
Kota Solok	10,00	60,02	36,49	63,09
Kota Sawah Lunto	20,00	61,20	28,33	65,48
Kota Padang Panjang	10,00	61,13	47,10	66,62
Kota Bukittinggi	8,00	66,17	37,86	60,19
Kota Payakumbuh	16,00	55,59	38,69	71,58
Kota Pariaman	5,00	61,23	31,63	53,42
RIAU	21,54	55,44	28,25	70,59
Kuantan Singingi	2,94	60,59	36,62	56,32
Indragiri Hulu	2,50	57,73	28,70	51,46
Indragiri Hilir	13,33	48,94	29,17	64,50
Pelalawan	2,86	59,55	28,23	49,48
Siak	2,50	54,30	20,09	42,19
Kampar	8,89	61,41	23,94	53,62
Rokan Hulu	4,44	55,46	26,41	51,71
Bengkalis	8,89	54,56	23,18	53,50
Rokan Hilir	17,78	53,22	23,16	61,94
Kepulauan Meranti	13,33	50,22	27,06	61,88
Kota Pekanbaru	20,00	53,80	27,42	68,63
Kota Dumai	6,90	54,63	23,48	52,54
JAMBI	14,55	51,56	30,44	65,93
Kerinci	3,33	46,07	42,95	60,00
Merangin	2,86	52,20	41,20	58,51
Sarolangun	8,57	49,36	30,79	60,25

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batang Hari	20,00	53,52	34,70	73,12
Muaro Jambi	8,57	53,96	35,60	63,05
Tanjung Jabung Timur	26,67	48,07	23,10	69,28
Tanjung Jabung Barat	25,71	46,57	27,63	73,20
Tebo	2,86	49,63	28,79	51,66
Bungo	14,29	52,52	23,34	59,19
Kota Jambi	17,78	54,66	29,31	67,88
Kota Sungai Penuh	0,00	47,45	35,07	52,78
SUMATERA SELATAN	21,33	56,15	34,79	73,88
Ogan Komering Ulu	5,71	56,93	24,30	49,69
Ogan Komering Ilir	15,56	58,68	25,21	59,99
Muara Enim	17,78	51,16	36,86	71,65
Lahat	15,00	62,45	37,15	66,89
Musi Rawas	17,50	56,77	26,26	62,90
Musi Banyuasin	6,67	50,16	35,31	59,97
Banyu Asin	11,11	50,80	29,22	60,38
Ogan Komering Ulu Selatan	12,50	59,77	23,09	55,83
Ogan Komering Ulu Timur	8,89	59,36	29,70	57,86
Ogan Ilir	15,00	66,62	28,13	58,41
Empat Lawang	8,57	61,86	34,44	58,30
Penukal Abab Lematang Ilir	0,00	67,53	37,24	47,06
Musi Rawas Utara	4,00	61,69	26,13	46,79
Kota Palembang	8,00	53,01	29,78	57,52
Kota Prabumulih	16,00	55,27	24,91	60,20
Kota Pagar Alam	16,00	57,50	22,23	57,77
Kota Lubuklinggau	14,29	53,89	27,20	60,81

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BENGKULU	15,91	51,31	35,07	70,22
Bengkulu Selatan	0,00	56,92	42,65	54,62
Rejang Lebong	20,00	49,30	24,92	65,70
Bengkulu Utara	6,67	47,73	38,76	62,52
Kaur	8,00	54,92	37,77	61,72
Seluma	10,00	54,64	34,80	61,92
Mukomuko	4,00	54,63	33,28	56,26
Lebong	16,00	56,53	37,92	70,41
Kepahiang	12,50	53,36	35,96	66,96
Bengkulu Tengah	24,00	49,09	42,25	77,10
Kota Bengkulu	25,71	49,14	33,01	77,67
LAMPUNG	18,82	53,06	29,39	67,96
Lampung Barat	17,14	53,39	32,79	69,14
Tanggamus	6,67	56,23	29,83	56,39
Lampung Selatan	10,00	49,64	29,42	59,27
Lampung Timur	12,00	49,19	32,29	63,14
Lampung Tengah	12,00	61,60	31,17	61,01
Lampung Utara	13,33	59,34	34,80	64,94
Way Kanan	10,00	47,60	33,34	61,82
Tulangbawang	20,00	61,40	26,43	64,76
Pesawaran	26,67	48,56	30,19	73,70
Pringsewu	27,50	44,63	20,70	65,86
Mesuji	22,86	45,23	27,09	68,45
Tulang Bawang Barat	3,33	46,32	31,21	52,10

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pesisir Barat	4,00	58,90	34,51	54,93
Kota Bandar Lampung	22,00	51,53	31,21	71,69
Kota Metro	24,00	51,89	33,47	74,23
KEP, BANGKA BELITUNG	8,89	54,10	26,79	57,49
Bangka	14,29	52,09	25,46	62,34
Belitung	8,00	55,64	23,49	53,02
Bangka Barat	16,00	62,84	26,63	61,77
Bangka Tengah	12,00	53,82	22,62	56,81
Bangka Selatan	8,00	54,78	21,79	48,65
Belitung Timur	8,00	60,03	26,92	55,10
Kota Pangkal Pinang	10,00	47,75	29,83	61,19
KEPULAUAN RIAU	8,89	47,79	28,71	58,97
Karimun	16,67	48,26	25,05	63,89
Bintan	28,00	49,44	24,15	73,04
Natuna	0,00	51,11	24,30	42,95
Lingga	5,00	54,55	22,91	48,50
Kepulauan Anambas	20,00	47,42	26,31	67,66
Kota Batam	8,00	47,64	29,62	58,38
Kota Tanjung Pinang	36,67	44,23	27,12	76,64
DKI JAKARTA	21,70	49,29	38,36	75,42
Kep, Seribu	21,70	49,91	25,77	64,15
Kota Jakarta Selatan	21,70	49,77	36,59	75,95
Kota Jakarta Timur	21,70	47,82	33,68	74,36
Kota Jakarta Pusat	21,70	52,37	39,05	77,57
Kota Jakarta Barat	21,70	46,06	34,92	74,87
Kota Jakarta Utara	21,70	53,39	36,57	75,34

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAWA BARAT	20,83	45,35	30,04	70,62
Bogor	9,09	44,20	26,03	55,86
Sukabumi	14,00	30,61	27,76	57,45
Cianjur	18,00	42,09	21,94	59,70
Bandung	14,81	41,48	33,48	68,68
Garut	12,00	50,17	32,22	64,87
Tasikmalaya	16,00	53,89	28,15	63,79
Ciamis	10,00	41,44	37,92	63,65
Kuningan	24,00	46,23	31,29	73,04
Cirebon	28,00	37,56	27,53	72,52
Majalengka	12,00	48,79	27,61	60,04
Sumedang	18,00	41,11	34,94	70,13
Indramayu	34,00	42,21	21,64	70,93
Subang	20,41	48,01	31,50	70,77
Purwakarta	31,11	45,58	29,45	76,88
Karawang	28,00	51,61	28,58	74,83
Bekasi	20,00	42,63	24,43	65,24
Bandung Barat	12,00	49,88	33,34	65,83
Pangandaran	25,00	44,09	36,11	75,98
Kota Bogor	22,00	43,84	30,05	72,33
Kota Sukabumi	17,14	48,25	28,65	66,81
Kota Bandung	16,00	49,37	35,28	70,81
Kota Cirebon	28,57	42,39	32,65	77,64
Kota Bekasi	16,00	46,22	29,53	66,57

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Depok	26,00	48,53	32,46	76,53
Kota Cimahi	24,44	48,69	30,77	74,07
Kota Tasikmalaya	6,67	50,93	34,33	59,59
Kota Banjar	6,67	53,61	28,01	54,32
JAWA TENGAH	18,33	50,67	34,60	71,64
Cilacap	26,00	45,69	26,83	70,67
Banyumas	20,00	49,32	30,67	70,10
Purbalingga	22,22	50,52	30,61	70,99
Banjarnegara	26,00	49,92	29,40	73,79
Kebumen	22,00	56,09	25,83	66,86
Purworejo	17,78	53,44	34,33	70,09
Wonosobo	4,44	47,67	24,31	48,68
Magelang	14,00	55,63	37,82	69,64
Boyolali	31,11	48,58	40,97	82,23
Klaten	18,00	58,46	37,78	71,88
Sukoharjo	22,22	58,12	41,42	77,69
Wonogiri	16,00	48,31	38,63	71,55
Karanganyar	18,18	51,13	38,41	73,38
Sragen	13,33	53,94	37,15	67,14
Grobogan	12,00	50,18	25,85	58,03
Blora	11,11	48,48	34,21	64,36
Rembang	13,33	51,39	31,92	65,88
Pati	16,00	44,94	31,64	66,65

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudus	8,89	49,67	41,45	65,54
Jepara	12,00	50,57	24,08	56,66
Demak	12,00	48,85	37,83	66,83
Semarang	22,00	46,64	46,19	78,35
Temanggung	33,33	48,14	41,19	84,56
Kendal	24,44	55,07	35,35	76,95
Batang	15,91	45,76	28,92	64,43
Pekalongan	26,67	49,29	25,79	70,54
Pemalang	32,00	49,40	35,59	81,27
Tegal	24,00	45,64	29,09	72,32
Brebes	16,00	49,33	25,35	61,89
Kota Magelang	24,00	59,89	42,15	78,65
Kota Surakarta	22,22	49,78	43,57	79,32
Kota Salatiga	24,00	48,61	41,08	79,08
Kota Semarang	18,75	51,30	37,46	73,64
Kota Pekalongan	8,57	50,90	28,21	57,87
Kota Tegal	13,33	58,61	30,19	63,34
D I YOGYAKARTA	20,00	52,18	41,26	76,57
Kulon Progo	20,00	52,57	34,27	71,41
Bantul	8,89	56,03	39,28	65,27
Gunung Kidul	24,44	44,59	39,52	76,70
Sleman	28,00	51,66	38,92	81,31
Kota Yogyakarta	15,00	52,51	44,72	73,18

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAWA TIMUR	17,50	50,73	35,72	72,36
Pacitan	15,56	46,45	39,43	70,45
Ponorogo	13,33	54,15	35,99	67,63
Trenggalek	6,67	56,74	38,05	61,43
Tulungagung	12,00	60,80	38,16	65,06
Blitar	24,00	56,51	39,90	79,68
Kediri	22,00	56,45	31,21	71,64
Malang	22,00	49,21	37,12	76,69
Lumajang	16,00	50,92	23,98	59,38
Jember	16,00	46,55	31,19	66,16
Banyuwangi	26,00	47,70	31,37	74,84
Bondowoso	13,33	38,75	37,17	65,35
Situbondo	31,11	49,66	27,36	73,60
Probolinggo	26,00	49,77	25,42	68,75
Pasuruan	12,00	57,47	35,21	65,75
Sidoarjo	16,00	51,30	29,77	67,10
Mojokerto	28,57	50,92	35,01	80,20
Jombang	28,00	54,40	28,17	73,76
Nganjuk	26,00	47,20	25,64	69,78
Madiun	22,22	59,18	30,23	68,97
Magetan	15,56	55,54	38,33	70,50
Ngawi	22,22	52,93	32,32	71,33
Bojonegoro	10,00	48,78	26,68	56,14
Tuban	14,00	58,80	31,00	63,51

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lamongan	24,00	47,66	33,46	74,05
Gresik	20,41	48,48	31,41	71,48
Bangkalan	8,00	41,50	36,03	60,03
Sampang	6,67	42,68	30,82	55,67
Pamekasan	4,44	35,00	34,22	52,44
Sumenep	8,33	42,47	36,94	61,79
Kota Kediri	36,67	47,48	35,46	84,17
Kota Blitar	12,00	50,71	39,11	68,60
Kota Malang	26,67	57,80	34,69	77,63
Kota Probolinggo	13,33	46,77	31,09	65,05
Kota Pasuruan	3,33	47,13	31,84	54,94
Kota Mojokerto	16,00	59,56	37,35	70,68
Kota Madiun	23,33	55,13	37,65	76,75
Kota Surabaya	32,00	49,99	35,83	82,82
Kota Batu	16,67	49,51	30,05	68,80
BANTEN	17,65	45,72	31,95	69,09
Pandeglang	14,00	40,15	30,40	63,16
Lebak	8,00	39,38	31,70	58,24
Tangerang	12,00	47,20	28,80	62,17
Serang	12,00	46,55	27,03	59,93
Kota Tangerang	12,00	48,09	32,06	64,86
Kota Cilegon	10,00	49,68	20,93	52,81
Kota Serang	13,33	41,30	27,88	61,66
Kota Tangerang Selatan	30,00	44,10	26,44	73,08

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BALI	16,36	50,89	39,18	72,17
Jembrana	20,00	51,76	39,16	74,55
Tabanan	25,00	49,15	38,94	78,27
Badung	22,50	51,57	36,84	76,99
Gianyar	10,00	54,94	38,60	65,64
Klungkung	16,67	49,04	46,81	75,50
Bangli	10,00	42,93	38,41	65,36
Karangasem	6,67	46,69	43,93	65,09
Buleleng	17,78	43,54	40,04	72,91
Kota Denpasar	8,89	52,43	43,12	67,02
NUSA TENGGARA BARAT	1,59	46,72	33,09	52,54
Lombok Barat	8,89	38,80	31,80	57,56
Lombok Tengah	8,00	48,43	36,32	60,13
Lombok Timur	10,00	47,29	45,17	65,99
Sumbawa	13,33	48,67	38,52	70,15
Dompu	10,00	47,09	34,12	64,45
Bima	6,67	49,31	26,76	53,26
Sumbawa Barat	8,00	49,46	20,45	49,22
Lombok Utara	3,33	42,65	26,82	47,40
Kota Mataram	25,00	47,45	33,66	76,42
Kota Bima	16,00	47,81	38,20	70,16

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NUSA TENGGARA TIMUR	20,00	50,22	43,78	74,53
Sumba Barat	16,00	44,97	35,10	68,44
Sumba Timur	10,00	45,01	42,05	64,28
Kupang	10,26	51,99	35,42	62,80
Timor Tengah Selatan	12,50	51,42	29,44	60,08
Timor Tengah Utara	3,33	49,71	39,89	55,94
Belu	23,33	46,44	38,48	74,54
Alor	6,90	57,98	43,94	60,21
Lembata	0,00	44,40	45,99	52,31
Flores Timur	3,33	55,19	43,75	57,56
Sikka	14,29	65,72	36,71	61,53
Ende	10,71	59,51	52,65	65,58
Ngada	4,00	53,60	47,24	59,68
Manggarai	11,43	37,64	46,45	64,58
Rote Ndao	0,00	38,51	34,99	47,20
Manggarai Barat	6,67	45,90	39,13	58,46
Sumba Tengah	0,00	46,31	41,73	53,34
Sumba Barat Daya	11,76	43,32	47,82	68,05
Nagekeo	0,00	61,45	49,52	51,82
Manggarai Timur	3,33	41,77	35,78	51,16
Sabu Raijua	10,00	52,74	37,00	56,12
Malaka	12,00	55,52	48,33	58,54
Kota Kupang	20,00	49,22	39,45	75,58

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN BARAT	16,92	46,89	35,19	71,14
Sambas	13,33	41,15	36,49	65,92
Bengkayang	20,00	60,64	37,29	71,38
Landak	14,29	37,52	37,27	67,44
Mempawah	8,57	49,64	35,81	62,29
Sanggau	17,50	47,70	32,78	69,77
Ketapang	8,89	49,46	25,42	55,80
Sintang	12,50	48,31	32,26	63,97
Kapuas Hulu	6,67	46,54	41,41	63,13
Sekadau	3,33	46,81	39,31	57,40
Melawi	16,67	43,64	35,11	69,50
Kayong Utara	0,00	48,59	30,99	47,87
Kubu Raya	20,00	47,11	34,83	73,04
Kota Pontianak	13,33	46,71	33,75	66,23
Kota Singkawang	23,33	54,95	29,09	71,47
KALIMANTAN TENGAH	33,33	47,36	33,48	82,08
Kotawaringin Barat	16,67	44,39	23,97	63,44
Kotawaringin Timur	20,51	43,56	25,96	69,51
Kapuas	27,50	54,86	27,65	73,02
Barito Selatan	40,00	45,65	38,41	86,17
Barito Utara	33,33	53,05	43,74	85,62
Sukamara	25,00	48,65	20,23	66,40
Lamandau	20,00	54,34	27,74	70,26

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seruyan	12,00	43,93	27,37	63,19
Katingan	16,00	47,81	29,98	67,66
Pulang Pisau	28,00	48,04	22,79	70,35
Gunung Mas	48,00	44,54	50,32	88,71
Barito Timur	28,00	51,85	44,03	82,44
Murung Raya	16,00	47,58	29,45	67,72
Kota Palangka Raya	31,03	45,64	32,28	78,72
KALIMANTAN SELATAN	20,00	51,70	36,80	74,58
Tanah Laut	25,71	48,49	28,53	72,86
Kota Baru	23,53	43,91	27,22	72,60
Banjar	31,11	57,79	33,92	80,24
Barito Kuala	22,86	54,78	41,14	78,17
Tapin	16,00	50,20	49,05	73,19
Hulu Sungai Selatan	6,67	59,49	27,34	53,55
Hulu Sungai Tengah	20,00	55,17	48,29	77,48
Hulu Sungai Utara	23,33	53,46	29,59	70,07
Tabalong	26,67	52,71	29,17	74,65
Tanah Bumbu	14,29	46,08	31,17	66,87
Balangan	16,67	52,32	37,90	70,57
Kota Banjarmasin	24,44	53,57	38,59	79,45
Kota Banjar Baru	16,67	47,10	32,32	69,70

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN TIMUR	20,37	45,37	24,05	66,64
Paser	20,00	44,39	23,71	65,67
Kutai Barat	16,00	49,94	26,62	65,34
Kutai Kartanegara	15,56	43,72	24,51	62,76
Kutai Timur	12,50	49,74	18,47	53,78
Berau	16,67	41,54	17,57	56,48
Penajam Paser Utara	4,00	58,81	21,63	49,85
Mahakam Ulu	40,00	45,80	25,82	80,43
Kota Balikpapan	20,00	48,91	28,38	68,62
Kota Samarinda	15,56	41,27	26,41	67,54
Kota Bontang	8,00	42,74	31,16	45,67
KALIMANTAN UTARA	11,43	42,91	17,15	61,70
Malinau	20,00	37,30	26,92	70,11
Bulungan	20,00	43,51	28,60	64,45
Tana Tidung	15,00	37,32	22,96	60,52
Nunukan	32,00	38,43	27,47	77,67
Kota Tarakan	10,00	48,82	25,90	58,92
SULAWESI UTARA	29,55	52,11	32,23	79,07
Bolaang Mongondow	33,33	54,91	28,58	77,36
Minahasa	48,57	53,46	39,34	87,29
Kepulauan Sangihe	12,00	59,52	29,13	61,32
Kepulauan Talaud	20,00	51,92	27,75	68,46
Minahasa Selatan	30,00	57,72	31,49	77,59

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Minahasa Utara	10,34	48,96	33,37	63,95
Bolaang Mongondow Utara	10,53	55,08	28,72	60,61
Siau Tagulandang Biaro	25,00	58,32	35,07	74,47
Minahasa Tenggara	28,00	51,08	35,89	80,11
Bolaang Mongondow Selatan	25,00	54,20	28,17	71,51
Bolaang Mongondow Timur	25,00	50,84	24,92	70,59
Kota Manado	40,00	50,01	35,01	84,29
Kota Bitung	20,00	45,84	27,00	68,84
Kota Tomohon	40,00	51,67	34,34	83,70
Kota Kotamobagu	20,00	49,21	25,68	66,79
SULAWESI TENGAH	27,27	52,64	31,06	75,80
Banggai Kepulauan	16,00	48,00	44,40	71,86
Banggai	28,57	58,53	28,47	73,06
Morowali	4,00	48,69	27,25	51,08
Poso	20,00	55,64	32,21	70,94
Donggala	13,33	49,04	29,65	64,04
Toli-Toli	20,00	56,32	25,98	65,32
Buol	16,00	48,43	25,39	61,32
Parigi Moutong	15,00	54,96	25,15	60,50
Tojo Una-Una	4,00	50,89	26,96	50,69
Sigi	20,00	53,32	32,65	69,37
Banggai Laut	20,00	54,52	38,23	72,68
Morowali Utara	28,00	43,14	21,43	66,13
Kota Palu	11,43	51,21	34,49	65,07

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI SELATAN	25,88	55,10	32,51	74,76
Kepulauan Selayar	20,00	61,62	32,38	68,07
Bulukumba	17,50	61,25	34,02	67,10
Bantaeng	32,00	52,32	37,19	81,20
Jeneponto	20,00	58,32	31,86	68,68
Takalar	26,67	57,11	28,34	70,67
Gowa	31,11	56,67	34,51	79,71
Sinjai	26,67	57,66	33,76	73,59
Maros	28,57	48,82	26,79	72,38
Pangkajene dan Kepulauan	11,43	61,05	31,88	59,94
Barro	20,00	58,62	26,52	63,98
Bone	8,89	61,98	32,16	57,55
Soppeng	23,33	65,78	34,59	70,54
Wajo	10,00	57,26	27,52	56,30
Sidenreng Rappang	8,57	59,13	30,09	56,39
Pinrang	15,00	50,88	35,19	68,43
Enrekang	6,67	67,04	37,36	56,51
Luwu	5,71	63,38	37,65	57,29
Tana Toraja	13,33	59,57	43,48	68,77
Luwu Utara	2,86	63,82	20,63	41,11
Luwu Timur	10,00	57,25	22,96	54,09
Toraja Utara	10,00	55,42	35,57	62,73
Kota Makasar	24,49	44,30	35,51	76,59
Kota Parepare	20,00	56,30	32,51	70,86
Kota Palopo	28,00	53,06	34,36	78,45

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI TENGGARA	20,00	51,20	36,15	73,10
Buton	16,00	48,17	32,96	68,21
Muna	13,33	48,77	36,10	65,32
Konawe	26,67	54,18	36,58	77,94
Kolaka	20,00	54,13	26,47	67,02
Konawe Selatan	22,86	53,32	31,04	72,04
Bombana	12,00	57,78	27,36	57,62
Wakatobi	32,00	47,08	40,66	79,86
Kolaka Utara	20,00	66,62	27,82	64,54
Buton Utara	25,00	42,77	38,17	75,55
Konawe Utara	15,00	54,48	36,44	69,04
Kolaka Timur	40,00	52,72	31,82	80,75
Konawe Kepulauan	10,00	45,25	77,54	51,48
Muna Barat	20,00	46,27	18,96	55,66
Buton Tengah	24,00	48,44	48,44	80,73
Buton Selatan	20,00	54,71	37,70	74,79
Kota Kendari	28,57	44,88	37,94	81,22
Kota Baubau	24,00	52,86	31,34	72,42
GORONTALO	26,67	58,78	26,90	62,48
Boalemo	24,00	56,31	29,15	70,38
Gorontalo	17,14	59,39	26,75	62,48
Pohuwato	16,67	60,53	36,33	69,41
Bone Bolango	4,00	58,19	29,73	52,13
Gorontalo Utara	25,00	56,85	28,07	70,51
Kota Gorontalo	24,00	59,89	31,25	71,19

LAMPIRAN 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI BARAT	11,11	53,65	36,59	65,93
Majene	20,00	52,42	39,50	75,46
Polewali Mandar	17,78	60,35	37,64	71,13
Mamasa	13,33	47,63	26,21	60,49
Mamuju	10,00	51,04	28,61	59,38
Mamuju Utara	16,67	55,42	19,42	56,97
Mamuju Tengah	24,00	49,45	22,68	67,11
MALUKU	23,26	53,33	37,19	75,54
Maluku Tenggara Barat	24,00	47,44	44,15	77,53
Maluku Tenggara	16,00	47,82	36,57	69,22
Maluku Tengah	10,00	55,50	35,41	62,94
Buru	8,00	50,22	29,49	56,56
Kepulauan Aru	8,00	52,61	42,28	62,64
Seram Bagian Barat	3,33	53,09	37,25	55,49
Seram Bagian Timur	4,00	59,71	32,39	51,74
Maluku Barat Daya	5,00	58,24	40,99	56,41
Buru Selatan	10,00	51,70	31,44	61,48
Kota Ambon	17,14	52,92	39,72	74,33
Kota Tual	10,00	55,53	26,77	58,05
MALUKU UTARA	28,89	48,29	36,54	78,59
Halmahera Barat	24,00	52,01	32,93	72,38
Halmahera Tengah	5,00	51,78	29,05	51,70
Kepulauan Sula	0,00	52,59	28,23	44,68

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Selatan	6,67	49,51	21,50	47,19
Halmahera Utara	20,00	46,97	27,73	66,10
Halmahera Timur	5,00	46,16	26,91	51,23
Pulau Morotai	10,00	39,97	27,84	54,41
Pulau Taliabu	25,00	53,90	14,85	58,33
Kota Ternate	20,00	46,23	36,93	75,08
Kota Tidore Kepulauan	16,00	50,59	33,44	67,32
PAPUA BARAT	14,29	43,41	28,28	62,17
Fakfak	10,00	44,56	31,27	60,07
Kaimana	20,00	50,43	37,50	74,30
Teluk Wondama	10,00	32,79	22,79	51,01
Teluk Bintuni	10,00	40,98	25,26	56,85
Manokwari	28,00	41,47	30,57	72,57
Sorong Selatan	15,00	42,96	31,11	64,52
Sorong	16,00	45,52	22,79	59,61
Raja Ampat	10,00	41,55	24,56	53,11
Tambrau	0,00	31,53	36,02	34,54
Maybrat	0,00	49,88	30,48	44,84
Manokwari Selatan	20,00	41,54	66,21	66,26
Pegunungan Arfak	5,00	25,21	24,65	36,36
Kota Sorong	23,33	45,84	26,09	70,14

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PAPUA	14,55	37,36	36,92	67,50
Merauke	6,67	40,42	37,32	58,12
Jayawijaya	10,00	33,52	46,94	61,50
Jayapura	16,00	44,19	33,99	70,20
Nabire	12,00	42,27	34,70	66,55
Kepulauan Yapen	16,00	33,70	36,95	67,73
Biak Numfor	24,00	41,29	30,20	68,87
Paniai	8,00	29,30	48,05	57,36
Puncak Jaya	3,33	24,96	39,51	51,94
Mimika	8,57	34,39	23,84	53,86
Boven Digoel	5,00	33,14	35,54	52,17
Mappi	8,00	35,07	42,36	58,91
Asmat	28,00	44,22	40,92	78,37
Yahukimo	2,86	12,53	45,97	37,95
Pegunungan Bintang	4,00	28,92	48,43	51,95
Tolikara	6,67	14,13	45,41	47,91
Sarmi	20,00	37,73	36,77	72,92
Keerom	5,56	44,06	35,15	59,83
Waropen	5,00	28,23	33,51	50,39
Supiori	15,00	38,11	33,14	62,65
Mamberamo Raya	15,00	23,80	39,84	59,29
Nduga	0,00	29,99	43,97	47,61
Lanny Jaya	0,00	16,96	43,57	37,08

LAMPIRAN 5**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Yalimo	0,00	17,27	46,87	37,80
Puncak	4,00	19,78	33,26	40,83
Dogiyai	0,00	16,07	39,27	35,22
Intan Jaya	0,00	15,50	49,12	37,14
Deiyai	0,00	21,31	57,93	40,17
Kota Jayapura	25,64	45,14	34,77	80,25
INDONESIA	21,89	49,99	37,22	76,26

Sumber: www.bps.go.id. 2022



LAMPIRAN

06

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
menurut Provinsi, 2017-2021

LAMPIRAN 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2021

Provinsi	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	66,28	66,60	63,31	63,47	63,24
SUMATERA UTARA	69,29	71,29	67,76	67,52	67,79
SUMATERA BARAT	65,01	65,70	59,09	58,28	65,12
RIAU	75,36	75,73	69,17	68,70	70,59
JAMBI	65,32	67,78	65,97	65,86	65,93
SUMATERA SELATAN	73,53	74,37	74,45	74,64	73,88
BENGKULU	71,40	69,60	69,78	70,48	70,22
LAMPUNG	63,60	63,82	69,23	69,06	67,96
KEP, BANGKA BELITUNG	54,91	52,57	52,96	53,03	57,49
KEPULAUAN RIAU	66,96	66,18	61,59	62,02	58,97
DKI JAKARTA	72,34	73,68	75,14	75,16	75,42
JAWA BARAT	70,04	70,20	69,48	70,24	70,62
JAWA TENGAH	75,10	74,03	72,18	71,73	71,64
D I YOGYAKARTA	69,37	69,64	73,59	74,73	76,57
JAWA TIMUR	69,37	69,71	73,04	73,03	72,36
BANTEN	70,00	72,75	68,83	68,76	69,09
BALI	63,76	64,18	72,27	72,16	72,17
NUSA TENGGARA BARAT	59,95	60,56	51,91	51,96	52,54
NUSA TENGGARA TIMUR	63,76	65,86	73,37	74,53	74,53
KALIMANTAN BARAT	64,46	64,47	68,07	68,07	71,14
KALIMANTAN TENGAH	79,36	77,03	83,20	82,41	82,08
KALIMANTAN SELATAN	67,56	71,31	74,60	74,48	74,58
KALIMANTAN TIMUR	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64
KALIMANTAN UTARA	61,09	69,53	61,48	64,31	61,70

LAMPIRAN 6**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2021**
(lanjutan)

Provinsi	IPG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI UTARA	82,37	80,91	79,10	78,98	79,07
SULAWESI TENGAH	70,38	73,95	74,49	75,78	75,80
SULAWESI SELATAN	70,57	69,14	76,01	76,32	74,76
SULAWESI TENGGARA	70,76	71,54	71,40	72,54	73,10
GORONTALO	71,09	71,23	70,67	70,74	62,48
SULAWESI BARAT	73,37	71,95	65,92	65,92	65,93
MALUKU	78,87	77,77	75,77	75,54	75,54
MALUKU UTARA	70,31	72,81	77,50	77,28	78,59
PAPUA BARAT	47,88	51,04	61,52	62,17	62,17
PAPUA	61,89	68,71	65,37	66,72	67,50
INDONESIA	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26

Sumber: www.bps.go.id, 2022



LAMPIRAN

07

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	66,28	66,60	63,31	63,47	63,24
Simeulue	58,44	54,09	64,51	64,65	64,95
Aceh Singkil	52,33	59,49	59,72	59,83	59,65
Aceh Selatan	48,07	48,35	55,96	56,41	55,87
Aceh Tenggara	60,98	64,75	58,10	58,83	58,10
Aceh Timur	54,14	59,03	53,21	52,27	47,84
Aceh Tengah	56,48	64,57	68,18	71,39	71,82
Aceh Barat	55,90	56,25	56,89	57,22	56,69
Aceh Besar	47,27	47,46	47,73	47,37	48,11
Pidie	59,61	60,90	64,70	65,69	66,02
Bireuen	53,02	53,07	57,90	57,98	58,17
Aceh Utara	51,51	54,04	50,65	52,00	51,27
Aceh Barat Daya	51,62	51,29	51,90	52,6	52,30
Gayo Lues	61,62	66,56	56,51	56,49	56,76
Aceh Tamiang	72,05	73,45	74,39	73,50	75,01
Nagan Raya	59,45	60,44	61,80	61,56	61,74
Aceh Jaya	57,57	51,79	58,29	58,27	58,42
Bener Meriah	50,06	61,02	52,36	52,58	52,53
Pidie Jaya	52,00	54,71	55,49	55,32	55,04
Kota Banda Aceh	51,48	55,82	63,30	63,59	62,42
Kota Sabang	78,53	78,51	76,01	75,43	75,66
Kota Langsa	52,72	51,57	65,12	65,34	65,47
Kota Lhokseumawe	50,79	51,06	58,25	57,93	58,26
Kota Subulussalam	68,38	68,48	69,01	69,04	68,91

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SUMATERA UTARA	69,29	71,29	67,76	67,52	67,79
Nias	51,89	52,87	63,15	62,03	60,33
Mandailing Natal	64,99	62,32	72,70	70,01	71,90
Tapanuli Selatan	72,33	72,66	71,03	69,61	69,25
Tapanuli Tengah	62,07	61,60	60,40	74,05	74,39
Tapanuli Utara	65,87	66,11	62,81	65,84	66,36
Toba Samosir	63,86	63,88	59,60	60,07	59,51
Labuhan Batu	75,49	77,74	71,47	71,52	71,96
Asahan	60,44	60,71	69,10	67,48	68,54
Simalungun	66,13	65,65	62,33	61,49	62,40
Dairi	62,16	68,70	62,12	61,14	61,11
Karo	76,42	76,71	75,32	77,75	81,53
Deli Serdang	60,54	60,89	54,81	54,42	55,14
Langkat	58,41	55,79	66,21	66,55	66,04
Nias Selatan	59,66	68,81	64,63	66,70	67,04
Humbang Hasundutan	58,44	59,08	72,08	72,27	72,76
Pakpak Bharat	54,36	55,03	64,93	66,49	66,97
Samosir	77,11	76,72	79,78	78,20	78,75
Serdang Bedagai	66,17	69,84	65,70	65,73	65,49
Batu Bara	68,52	68,74	61,49	63,18	63,16
Padang Lawas Utara	63,57	63,01	67,58	67,99	68,14
Padang Lawas	58,08	57,64	55,81	55,43	57,61
Labuhan Batu Selatan	60,47	60,93	60,81	63,24	64,56
Labuhan Batu Utara	47,18	44,83	47,29	47,27	46,14

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias Utara	62,47	67,65	67,57	66,93	67,03
Nias Barat	67,88	66,02	65,80	64,55	65,88
Kota Sibolga	71,10	70,98	74,57	73,03	71,84
Kota Tanjung Balai	59,62	59,35	59,78	63,28	63,46
Kota Pematang Siantar	73,51	73,80	61,56	61,58	62,43
Kota Tebing Tinggi	57,65	61,83	53,60	53,58	53,78
Kota Medan	61,23	63,36	63,93	63,89	63,91
Kota Binjai	69,77	69,86	70,26	69,85	68,32
Kota Padangsidempuan	61,10	62,55	65,89	65,72	65,99
Kota Gunungsitoli	66,39	67,05	66,97	66,94	63,28
SUMATERA BARAT	65,01	65,70	59,09	58,28	65,12
Kepulauan Mentawai	46,90	47,36	48,36	48,13	47,36
Pesisir Selatan	53,46	57,70	55,79	56,93	53,39
Solok	62,16	62,89	63,89	62,23	61,57
Sijunjung	56,84	55,47	59,96	59,93	60,46
Tanah Datar	58,41	62,47	58,35	58,46	59,70
Padang Pariaman	54,48	54,82	49,10	48,79	46,64
Agam	54,16	55,07	63,32	63,06	63,07
Lima Puluh Kota	46,81	46,89	50,18	51,09	50,59
Pasaman	63,78	63,74	64,22	61,57	62,74
Solok Selatan	51,17	51,40	50,23	49,19	47,86
Dharmasraya	48,91	50,00	51,42	50,87	50,66
Pasaman Barat	54,42	53,82	60,88	60,16	60,38
Kota Padang	69,01	69,30	67,49	67,53	65,33
Kota Solok	56,20	55,76	58,47	57,46	63,09

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Sawah Lunto	65,86	65,33	66,18	65,87	65,48
Kota Padang Panjang	76,10	74,45	66,57	65,24	66,62
Kota Bukittinggi	62,11	62,19	60,99	60,33	60,19
Kota Payakumbuh	61,99	62,30	67,81	71,01	71,58
Kota Pariaman	51,34	52,11	54,47	54,41	53,42
RIAU	75,36	75,73	69,17	68,70	70,59
Kuantan Singingi	59,55	61,63	57,64	57,12	56,32
Indragiri Hulu	62,79	59,00	52,65	51,71	51,46
Indragiri Hilir	59,43	59,59	64,83	64,45	64,50
Pelalawan	53,48	54,59	47,45	49,99	49,48
Siak	42,02	45,58	42,77	42,38	42,19
Kampar	60,80	61,18	54,41	54,95	53,62
Rokan Hulu	60,75	62,48	52,81	52,08	51,71
Bengkalis	52,64	53,53	54,27	54,10	53,50
Rokan Hilir	49,86	49,99	62,23	62,59	61,94
Kepulauan Meranti	62,82	64,86	62,57	62,06	61,88
Kota Pekanbaru	65,83	61,05	67,79	69,23	68,63
Kota Dumai	59,49	59,90	56,78	52,97	52,54
JAMBI	65,32	67,78	65,97	65,86	65,93
Kerinci	67,20	67,44	59,96	59,51	60,00
Merangin	54,21	53,34	54,25	54,60	58,51
Sarolangun	58,35	57,30	60,07	60,20	60,25
Batang Hari	70,60	70,76	75,56	75,32	73,12
Muaro Jambi	68,67	68,81	63,18	62,70	63,05
Tanjung Jabung Timur	64,87	59,92	68,81	68,93	69,28

LAMPIRAN 7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanjung Jabung Barat	61,93	63,10	68,31	68,89	73,20
Tebo	62,02	63,55	51,98	51,71	51,66
Bungo	61,15	61,27	59,18	59,23	59,19
Kota Jambi	69,14	69,83	68,48	68,11	67,88
Kota Sungai Penuh	51,32	52,41	52,87	52,77	52,78
SUMATERA SELATAN	73,53	74,37	74,45	74,64	73,88
Ogan Komering Ulu	56,84	57,32	50,01	50,05	49,69
Ogan Komering Ilir	56,08	57,47	61,22	59,89	59,99
Muara Enim	60,18	61,55	71,07	69,65	71,65
Lahat	60,87	62,77	67,07	67,40	66,89
Musi Rawas	55,54	49,76	56,94	58,46	62,90
Musi Banyuasin	72,18	73,01	60,06	59,84	59,97
Banyu Asin	59,89	60,00	60,70	60,49	60,38
Ogan Komering Ulu Selatan	54,54	54,04	55,33	54,56	55,83
Ogan Komering Ulu Timur	57,34	56,99	59,51	58,96	57,86
Ogan Ilir	51,24	49,62	60,19	60,21	58,41
Empat Lawang	61,15	59,70	56,93	55,87	58,30
Penukal Abab Lematang Ilir	55,62	55,31	51,04	49,90	47,06
Musi Rawas Utara	53,42	52,47	48,51	48,68	46,79
Kota Palembang	63,41	64,28	58,28	58,27	57,52
Kota Prabumulih	55,75	55,94	59,90	59,80	60,20
Kota Pagar Alam	58,11	58,51	57,68	55,06	57,77
Kota Lubuklinggau	62,43	65,13	56,63	59,79	60,81

LAMPIRAN 7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BENGKULU	71,40	69,60	69,78	70,48	70,22
Bengkulu Selatan	54,75	54,89	55,20	55,03	54,62
Rejang Lebong	61,73	61,99	64,71	64,82	65,70
Bengkulu Utara	65,76	65,92	65,77	62,32	62,52
Kaur	61,86	66,25	62,13	61,17	61,72
Seluma	65,15	61,95	65,68	65,60	61,92
Mukomuko	61,32	61,40	56,78	56,48	56,26
Lebong	79,39	79,68	67,14	70,74	70,41
Kepahiang	73,29	73,63	65,09	66,27	66,96
Bengkulu Tengah	70,15	73,80	76,71	76,78	77,10
Kota Bengkulu	76,46	76,61	77,58	77,68	77,67
LAMPUNG	63,60	63,82	69,23	69,06	67,96
Lampung Barat	60,47	63,84	68,21	68,24	69,14
Tanggamus	69,77	69,90	56,97	56,80	56,39
Lampung Selatan	57,66	58,14	59,40	59,59	59,27
Lampung Timur	60,01	60,73	63,42	63,13	63,14
Lampung Tengah	55,75	53,52	62,22	61,96	61,01
Lampung Utara	60,90	61,41	64,87	65,21	64,94
Way Kanan	68,46	65,30	61,46	60,72	61,82
Tulangbawang	62,78	62,52	65,94	64,10	64,76
Pesawaran	70,51	67,03	72,59	72,21	73,70
Pringsewu	62,95	63,81	67,05	67,32	65,86
Mesuji	61,40	61,71	69,27	68,89	68,45
Tulang Bawang Barat	62,74	59,74	51,46	51,25	52,10
Pesisir Barat	64,34	63,90	56,21	56,02	54,93
Kota Bandar Lampung	62,11	62,39	71,54	71,88	71,69
Kota Metro	78,92	78,75	77,02	76,98	74,23

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEP, BANGKA BELITUNG	54,91	52,57	52,96	53,03	57,49
Bangka	62,04	62,20	65,18	65,24	62,34
Belitung	42,62	48,48	53,82	53,11	53,02
Bangka Barat	54,45	49,88	64,82	64,48	61,77
Bangka Tengah	55,76	56,39	57,31	57,50	56,81
Bangka Selatan	48,66	48,46	49,29	49,93	48,65
Belitung Timur	67,36	68,21	56,74	56,81	55,10
Kota Pangkal Pinang	56,64	57,17	61,88	61,84	61,19
KEPULAUAN RIAU	66,96	66,18	61,59	62,02	58,97
Karimun	56,47	57,03	64,17	64,05	63,89
Bintan	61,24	63,41	69,71	69,64	73,04
Natuna	48,55	49,17	42,02	42,99	42,95
Lingga	47,82	46,08	48,96	48,52	48,50
Kepulauan Anambas	57,07	57,32	57,74	62,57	67,66
Kota Batam	55,28	53,29	58,40	59,10	58,38
Kota Tanjung Pinang	70,33	68,57	76,13	76,44	76,64
DKI JAKARTA	72,34	73,68	75,14	75,16	75,42
Kep, Seribu	61,08	59,98	63,03	63,41	64,15
Kota Jakarta Selatan	73,17	74,33	75,80	75,69	75,95
Kota Jakarta Timur	71,17	72,82	74,52	74,20	74,36
Kota Jakarta Pusat	74,71	75,72	77,42	77,17	77,57
Kota Jakarta Barat	71,66	73,32	75,20	74,93	74,87
Kota Jakarta Utara	72,12	73,36	74,79	75,15	75,34

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA BARAT	70,04	70,20	69,48	70,24	70,62
Bogor	57,10	56,64	55,73	55,76	55,86
Sukabumi	58,33	53,07	60,70	55,86	57,45
Cianjur	55,95	60,36	60,32	58,59	59,70
Bandung	76,50	72,40	65,86	67,07	68,68
Garut	65,63	64,67	68,23	71,91	64,87
Tasikmalaya	63,04	63,15	64,30	64,13	63,79
Ciamis	63,67	64,54	65,35	66,43	63,65
Kuningan	72,39	73,05	70,58	70,54	73,04
Cirebon	74,27	72,39	75,61	72,07	72,52
Majalengka	59,15	61,67	58,90	60,06	60,04
Sumedang	68,08	70,57	70,94	70,78	70,13
Indramayu	58,94	61,12	70,10	70,45	70,93
Subang	65,90	68,81	68,83	68,75	70,77
Purwakarta	72,25	72,04	74,39	73,94	76,88
Karawang	68,08	68,52	74,80	74,42	74,83
Bekasi	57,16	57,02	60,83	62,46	65,24
Bandung Barat	53,98	62,71	64,53	65,40	65,83
Pangandaran	65,45	69,20	74,56	74,57	75,98
Kota Bogor	67,37	62,04	68,91	69,03	72,33
Kota Sukabumi	60,20	59,55	66,82	66,93	66,81
Kota Bandung	58,84	63,63	70,38	70,49	70,81
Kota Cirebon	74,23	73,97	77,86	78,09	77,64

LAMPIRAN 7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Bekasi	65,68	65,96	66,10	65,75	66,57
Kota Depok	81,40	81,49	74,82	76,31	76,53
Kota Cimahi	76,97	77,21	74,14	75,13	74,07
Kota Tasikmalaya	63,50	62,92	59,32	59,51	59,59
Kota Banjar	47,96	53,80	49,53	50,56	54,32
JAWA TENGAH	75,10	74,03	72,18	71,73	71,64
Cilacap	62,52	62,11	69,13	70,22	70,67
Banyumas	67,32	68,11	71,92	71,74	70,10
Purbalingga	73,11	75,51	70,60	70,27	70,99
Banjarnegara	66,44	65,12	72,84	73,20	73,79
Kebumen	70,13	68,09	67,15	66,89	66,86
Purworejo	69,56	71,61	70,03	69,83	70,09
Wonosobo	50,55	51,41	46,29	48,70	48,68
Magelang	62,43	71,21	67,74	69,65	69,64
Boyolali	66,28	65,61	81,88	81,95	82,23
Klaten	59,60	60,25	72,35	69,42	71,88
Sukoharjo	76,11	76,17	78,52	77,98	77,69
Wonogiri	64,04	63,80	71,88	71,56	71,55
Karanganyar	74,27	80,51	74,76	74,29	73,38
Sragen	62,28	62,48	65,07	65,20	67,14
Grobogan	56,01	53,70	56,31	57,18	58,03
Blora	70,52	70,72	65,59	64,37	64,36
Rembang	72,45	73,12	65,79	65,78	65,88
Pati	67,96	66,55	66,99	66,69	66,65

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kudus	62,02	62,07	65,24	65,18	65,54
Jepara	48,76	50,62	58,20	55,76	56,66
Demak	68,48	70,79	67,20	66,85	66,83
Semarang	76,15	77,41	74,97	75,40	78,35
Temanggung	82,49	82,01	84,46	84,21	84,56
Kendal	75,35	76,78	77,24	76,96	76,95
Batang	66,58	66,29	63,78	63,81	64,43
Pekalongan	68,38	73,19	70,87	71,68	70,54
Pemalang	70,52	68,95	80,08	80,95	81,27
Tegal	68,90	69,25	72,58	72,12	72,32
Brebes	60,72	60,94	62,04	61,93	61,89
Kota Magelang	76,28	76,30	76,81	76,35	78,65
Kota Surakarta	77,25	77,10	77,88	79,42	79,32
Kota Salatiga	80,83	82,16	76,19	76,07	79,08
Kota Semarang	75,22	75,55	74,57	74,67	73,64
Kota Pekalongan	65,11	68,62	60,95	58,29	57,87
Kota Tegal	77,52	79,57	63,66	64,07	63,34
D I YOGYAKARTA	69,37	69,64	73,59	74,73	76,57
Kulon Progo	68,42	68,36	71,68	71,45	71,41
Bantul	61,99	61,01	65,29	64,78	65,27
Gunung Kidul	68,70	67,45	75,34	75,53	76,70
Sleman	79,51	78,47	80,40	81,25	81,31
Kota Yogyakarta	78,94	80,65	71,06	71,05	73,18

LAMPIRAN 7**Indeks Pembangunan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota. 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TIMUR	69,37	69,71	73,04	73,03	72,36
Pacitan	69,01	69,57	68,77	68,64	70,45
Ponorogo	64,87	68,18	67,71	67,48	67,63
Trenggalek	65,21	66,12	66,86	66,11	61,43
Tulungagung	63,95	64,11	66,36	65,84	65,06
Blitar	77,15	78,02	79,05	80,32	79,68
Kediri	73,93	74,61	72,24	72,17	71,64
Malang	74,37	75,49	69,68	69,54	76,69
Lumajang	60,11	59,23	59,16	58,91	59,38
Jember	68,65	70,45	67,65	65,61	66,16
Banyuwangi	69,43	69,71	74,52	74,41	74,84
Bondowoso	57,28	59,55	65,10	65,06	65,35
Situbondo	65,04	67,72	69,26	72,80	73,60
Probolinggo	64,86	67,06	68,22	68,69	68,75
Pasuruan	65,59	65,81	66,24	65,99	65,75
Sidoarjo	64,65	64,46	67,13	67,20	67,10
Mojokerto	75,72	78,33	79,74	79,87	80,20
Jombang	68,40	68,25	73,52	73,42	73,76
Nganjuk	66,56	65,00	68,45	69,90	69,78
Madiun	60,03	60,05	68,47	69,53	68,97
Magetan	61,34	61,68	66,63	66,68	70,50
Ngawi	68,93	70,95	72,89	72,88	71,33
Bojonegoro	59,30	57,62	55,44	55,77	56,14
Tuban	61,25	67,74	64,32	64,00	63,51

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Lamongan	68,10	67,95	74,37	73,93	74,05
Gresik	63,35	65,33	69,43	63,29	71,48
Bangkalan	49,74	50,03	57,71	58,54	60,03
Sampang	48,18	49,67	55,99	55,91	55,67
Pamekasan	55,81	57,29	53,13	53,01	52,44
Sumenep	54,90	53,81	60,99	58,22	61,79
Kota Kediri	82,36	82,36	84,46	84,38	84,17
Kota Blitar	67,51	67,91	67,70	68,35	68,60
Kota Malang	70,76	71,05	78,11	78,06	77,63
Kota Probolinggo	66,69	67,76	66,02	65,92	65,05
Kota Pasuruan	62,03	62,01	55,09	54,58	54,94
Kota Mojokerto	82,00	82,10	71,51	81,99	70,68
Kota Madiun	82,19	82,28	77,07	77,18	76,75
Kota Surabaya	82,89	83,29	83,88	82,86	82,82
Kota Batu	73,66	70,92	69,13	68,91	68,80
BANTEN	70,00	72,75	68,83	68,76	69,09
Pandeglang	60,45	61,27	61,58	63,52	63,16
Lebak	64,38	60,85	60,36	58,68	58,24
Tangerang	62,43	62,25	61,54	61,53	62,17
Serang	59,00	64,55	58,87	59,48	59,93
Kota Tangerang	71,67	71,76	65,19	65,03	64,86
Kota Cilegon	56,05	59,22	52,86	52,32	52,81
Kota Serang	63,81	62,65	62,10	61,26	61,66
Kota Tangerang Selatan	68,46	70,72	74,00	73,85	73,08

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BALI	63,76	64,18	72,27	72,16	72,17
Jembrana	66,23	66,23	74,60	74,39	74,55
Tabanan	61,06	61,62	78,14	77,95	78,27
Badung	61,48	62,03	75,23	75,49	76,99
Gianyar	62,35	62,59	66,22	66,14	65,64
Klungkung	72,60	71,77	78,35	78,36	75,50
Bangli	59,57	61,07	61,81	65,16	65,36
Karangasem	59,30	60,20	60,77	63,61	65,09
Buleleng	67,68	65,58	73,13	72,89	72,91
Kota Denpasar	58,80	59,09	62,16	67,26	67,02
NUSA TENGGARA BARAT	59,95	60,56	51,91	51,96	52,54
Lombok Barat	62,28	59,25	56,32	55,91	57,56
Lombok Tengah	55,43	57,24	57,45	57,53	60,13
Lombok Timur	60,23	60,79	65,67	65,52	65,99
Sumbawa	56,48	56,43	69,26	69,41	70,15
Dompu	64,00	64,03	64,30	64,17	64,45
Bima	60,66	61,05	52,61	52,62	53,26
Sumbawa Barat	38,03	38,69	49,06	49,07	49,22
Lombok Utara	46,33	46,66	47,19	47,22	47,40
Kota Mataram	64,57	65,34	76,46	76,23	76,42
Kota Bima	65,14	65,33	69,91	69,58	70,16

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NUSA TENGGARA TIMUR	63,76	65,86	73,37	74,53	74,53
Sumba Barat	67,53	68,55	69,24	69,00	68,44
Sumba Timur	60,59	60,86	64,91	64,29	64,28
Kupang	64,75	65,58	65,30	63,16	62,80
Timor Tengah Selatan	58,78	59,68	57,47	57,66	60,08
Timor Tengah Utara	59,04	59,86	51,59	51,76	55,94
Belu	81,57	81,28	75,18	74,45	74,54
Alor	60,14	60,49	60,64	60,55	60,21
Lembata	52,44	52,34	53,04	52,64	52,31
Flores Timur	53,27	53,37	57,61	57,92	57,56
Sikka	58,15	58,57	64,03	62,53	61,53
Ende	57,64	57,99	65,66	65,67	65,58
Ngada	71,64	72,21	59,22	58,82	59,68
Manggarai	65,52	65,85	65,61	66,32	64,58
Rote Ndao	51,60	50,47	48,49	47,40	47,20
Manggarai Barat	52,53	54,66	53,14	57,54	58,46
Sumba Tengah	53,21	52,83	53,09	53,41	53,34
Sumba Barat Daya	53,86	54,31	65,43	65,34	68,05
Nagekeo	53,14	53,11	52,75	52,29	51,82
Manggarai Timur	49,36	50,19	51,62	51,91	51,16
Sabu Raijua	49,33	49,53	56,04	55,93	56,12
Malaka	61,42	62,42	59,01	58,53	58,54
Kota Kupang	68,27	68,62	75,14	75,61	75,58

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	64,46	64,47	68,07	68,07	71,14
Sambas	68,57	68,67	61,36	63,26	65,92
Bengkayang	61,55	62,71	72,80	71,96	71,38
Landak	64,07	64,47	67,80	68,47	67,44
Mempawah	62,91	61,62	62,22	62,27	62,29
Sanggau	61,15	62,11	69,88	69,64	69,77
Ketapang	58,77	55,83	49,32	49,92	55,80
Sintang	61,78	60,36	63,55	63,67	63,97
Kapuas Hulu	69,75	70,50	62,52	63,08	63,13
Sekadau	55,34	56,45	56,27	57,60	57,40
Melawi	55,70	54,62	66,40	66,33	69,50
Kayong Utara	50,02	48,92	47,29	47,76	47,87
Kubu Raya	63,33	63,57	72,43	73,24	73,04
Kota Pontianak	61,04	60,99	66,48	66,18	66,23
Kota Singkawang	56,75	56,71	71,58	71,65	71,47
KALIMANTAN TENGAH	79,36	77,03	83,20	82,41	82,08
Kotawaringin Barat	63,31	59,72	64,11	64,53	63,44
Kotawaringin Timur	67,87	67,35	67,36	69,52	69,51
Kapuas	71,50	75,34	73,81	73,33	73,02
Barito Selatan	81,67	83,19	86,33	86,05	86,17
Barito Utara	86,20	84,52	85,35	85,02	85,62
Sukamara	59,78	65,77	66,33	66,02	66,40
Lamandau	54,13	54,98	71,06	71,26	70,26

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seruyan	70,13	70,07	62,83	63,20	63,19
Katingan	66,87	73,32	66,57	66,36	67,66
Pulang Pisau	70,14	74,13	70,36	70,63	70,35
Gunung Mas	78,74	82,73	88,91	88,22	88,71
Barito Timur	76,46	76,50	82,67	81,98	82,44
Murung Raya	66,93	67,38	68,10	68,21	67,72
Kota Palangka Raya	79,94	80,61	78,95	79,12	78,72
KALIMANTAN SELATAN	67,56	71,31	74,60	74,48	74,58
Tanah Laut	65,99	65,96	70,67	72,80	72,86
Kota Baru	70,08	70,68	71,21	72,21	72,60
Banjar	76,49	76,51	80,73	80,52	80,24
Barito Kuala	73,44	73,62	78,35	78,03	78,17
Tapin	72,99	73,11	65,16	64,97	73,19
Hulu Sungai Selatan	61,10	60,48	54,50	53,82	53,55
Hulu Sungai Tengah	80,07	80,19	77,69	77,53	77,48
Hulu Sungai Utara	64,50	64,59	70,36	70,65	70,07
Tabalong	70,77	71,97	72,30	73,39	74,65
Tanah Bumbu	57,45	57,61	67,05	67,23	66,87
Balangan	65,79	65,97	69,55	70,14	70,57
Kota Banjarmasin	73,74	74,24	79,56	79,60	79,45
Kota Banjar Baru	73,83	75,08	66,63	66,77	69,70

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN TIMUR	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64
Paser	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67
Kutai Barat	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34
Kutai Kartanegara	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76
Kutai Timur	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78
Berau	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48
Penajam Paser Utara	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85
Mahakam Ulu	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43
Kota Balikpapan	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62
Kota Samarinda	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54
Kota Bontang	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67
KALIMANTAN UTARA	61,09	69,53	61,48	64,31	61,70
Malinau	65,14	65,03	-	68,85	70,11
Bulungan	47,74	48,34	-	65,14	64,45
Tana Tidung	48,06	50,19	-	59,74	60,52
Nunukan	70,02	70,26	-	77,16	77,67
Kota Tarakan	51,33	52,00	-	59,72	58,92
SULAWESI UTARA	82,37	80,91	79,10	78,98	79,07
Bolaang Mongondow	69,91	70,64	78,05	77,77	77,36
Minahasa	82,42	82,96	87,63	87,05	87,29
Kepulauan Sangihe	73,01	66,00	61,38	59,91	61,32
Kepulauan Talaud	52,11	58,86	68,59	68,44	68,46
Minahasa Selatan	75,10	76,53	76,20	78,34	77,59
Minahasa Utara	77,48	76,74	67,40	64,60	63,95

LAMPIRAN 7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow Utara	64,93	64,90	61,99	63,79	60,61
Siau Tagulandang Biaro	73,05	73,90	74,53	74,89	74,47
Minahasa Tenggara	79,28	79,86	78,46	79,92	80,11
Bolaang Mongondow Selatan	67,86	67,98	72,22	68,16	71,51
Bolaang Mongondow Timur	64,41	66,08	73,06	72,48	70,59
Kota Manado	81,00	83,18	83,96	84,67	84,29
Kota Bitung	73,25	73,00	65,15	68,84	68,84
Kota Tomohon	82,32	83,23	81,86	82,91	83,70
Kota Kotamobagu	57,48	69,33	66,93	66,42	66,79
SULAWESI TENGAH	70,38	73,95	74,49	75,78	75,80
Banggai Kepulauan	67,79	72,04	72,09	71,79	71,86
Banggai	70,23	69,04	73,88	74,09	73,06
Morowali	63,49	64,04	51,09	51,56	51,08
Poso	68,01	65,29	70,77	70,92	70,94
Donggala	56,35	56,87	64,03	64,34	64,04
Toli-Toli	66,45	67,42	68,62	67,62	65,32
Buol	66,51	63,96	60,74	61,17	61,32
Parigi Moutong	54,93	55,28	60,85	60,49	60,50
Tojo Una-Una	53,76	54,64	50,73	50,98	50,69
Sigi	59,65	56,60	67,12	65,77	69,37
Banggai Laut	56,04	57,66	71,14	68,51	72,68
Morowali Utara	60,50	57,68	66,32	67,44	66,13
Kota Palu	67,81	67,83	66,15	65,76	65,07

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/
Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI SELATAN	70,57	69,14	76,01	76,32	74,76
Kepulauan Selayar	64,74	64,69	68,03	70,06	68,07
Bulukumba	67,16	66,78	69,89	68,22	67,10
Bantaeng	77,74	80,53	80,27	80,26	81,20
Jeneponto	67,93	72,37	68,04	68,24	68,68
Takalar	66,60	70,55	70,66	68,78	70,67
Gowa	69,01	61,06	78,31	77,97	79,71
Sinjai	72,56	70,24	72,48	73,46	73,59
Maros	65,16	65,48	69,93	72,43	72,38
Pangkajene dan Kepulauan	56,96	56,20	57,03	59,44	59,94
Barru	63,54	69,24	63,41	63,96	63,98
Bone	62,75	63,16	58,55	56,68	57,55
Soppeng	69,35	73,75	71,45	71,15	70,54
Wajo	60,62	61,07	55,09	56,24	56,30
Sidenreng Rappang	49,02	52,71	56,80	56,86	56,39
Pinrang	59,61	61,73	67,92	68,11	68,43
Enrekang	58,68	59,36	58,28	60,32	56,51
Luwu	61,61	63,58	55,89	57,15	57,29
Tana Toraja	73,99	74,14	69,32	68,50	68,77
Luwu Utara	44,98	46,24	38,92	38,11	41,11
Luwu Timur	45,96	46,06	50,76	50,76	54,09
Toraja Utara	56,04	56,15	62,58	60,98	62,73
Kota Makasar	68,73	67,89	78,32	77,61	76,59
Kota Parepare	61,56	66,62	73,86	74,06	70,86
Kota Palopo	70,85	74,87	77,53	77,47	78,45

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI TENGGARA	70,76	71,54	71,40	72,54	73,10
Buton	73,46	74,56	64,49	71,41	68,21
Muna	61,19	61,33	65,49	65,75	65,32
Konawe	76,76	75,90	78,41	78,29	77,94
Kolaka	59,45	61,12	63,98	67,48	67,02
Konawe Selatan	79,20	80,27	70,02	69,77	72,04
Bombana	53,23	54,04	58,11	57,19	57,62
Wakatobi	71,65	74,34	79,01	79,85	79,86
Kolaka Utara	51,62	46,43	67,30	65,01	64,54
Buton Utara	67,83	67,49	76,46	76,24	75,55
Konawe Utara	69,13	76,90	69,52	69,52	69,04
Kolaka Timur	61,70	62,27	80,33	81,38	80,75
Konawe Kepulauan	49,52	48,96	51,17	51,10	51,48
Muna Barat	45,07	45,09	50,64	52,76	55,66
Buton Tengah	70,08	71,43	80,20	81,29	80,73
Buton Selatan	69,09	63,03	74,66	74,75	74,79
Kota Kendari	85,30	83,48	79,76	81,00	81,22
Kota Baubau	67,98	68,94	72,28	72,12	72,42
GORONTALO	71,09	71,23	70,67	70,74	62,48
Boalemo	66,59	60,96	68,53	69,15	70,38
Gorontalo	65,76	66,42	62,91	62,84	62,48
Pohuwato	69,62	72,26	68,74	73,16	69,41
Bone Bolango	46,97	47,05	51,91	51,73	52,13
Gorontalo Utara	63,28	64,60	76,61	70,49	70,51
Kota Gorontalo	70,64	68,89	75,33	75,23	71,19

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SULAWESI BARAT	73,37	71,95	65,92	65,92	65,93
Majene	74,51	74,87	75,30	75,56	75,46
Polewali Mandar	71,81	75,19	72,21	71,94	71,13
Mamasa	52,52	52,59	60,28	60,40	60,49
Mamuju	65,34	62,75	58,96	58,58	59,38
Mamuju Utara	49,23	50,12	50,46	54,13	56,97
Mamuju Tengah	62,73	60,88	65,86	66,56	67,11
MALUKU	78,87	77,77	75,77	75,54	75,54
Maluku Tenggara Barat	71,36	66,08	73,32	76,66	77,53
Maluku Tenggara	59,84	60,64	69,08	69,24	69,22
Maluku Tengah	59,99	60,06	63,23	63,03	62,94
Buru	60,55	64,65	56,39	56,56	56,56
Kepulauan Aru	57,57	62,30	62,70	62,72	62,64
Seram Bagian Barat	57,91	62,12	54,26	53,33	55,49
Seram Bagian Timur	57,60	57,89	52,79	53,41	51,74
Maluku Barat Daya	50,10	50,42	55,85	55,99	56,41
Buru Selatan	54,98	55,66	55,87	61,23	61,48
Kota Ambon	67,66	71,54	74,38	74,01	74,33
Kota Tual	51,84	45,26	58,20	57,54	58,05
MALUKU UTARA	70,31	72,81	77,50	77,28	78,59
Halmahera Barat	69,15	66,01	66,22	72,36	72,38
Halmahera Tengah	51,79	51,42	52,20	51,69	51,70
Kepulauan Sula	48,59	49,51	49,87	45,05	44,68
Halmahera Selatan	38,52	38,54	47,30	47,29	47,19
Halmahera Utara	66,33	66,56	66,30	66,53	66,10
Halmahera Timur	49,53	50,23	50,74	50,84	51,23

LAMPIRAN 7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Morotai	55,45	55,40	55,77	55,71	54,41
Pulau Taliabu	50,73	53,90	56,73	57,69	58,33
Kota Ternate	70,03	71,57	74,90	74,96	75,08
Kota Tidore Kepulauan	66,48	67,02	67,52	67,01	67,32
PAPUA BARAT	47,88	51,04	61,52	62,17	62,17
Fakfak	68,38	67,41	59,64	59,82	60,07
Kaimana	66,98	69,82	80,13	74,23	74,30
Teluk Wondama	51,90	49,54	53,75	53,19	51,01
Teluk Bintuni	48,80	65,47	56,52	57,19	56,85
Manokwari	65,39	67,47	71,75	73,46	72,57
Sorong Selatan	63,02	63,77	63,74	58,40	64,52
Sorong	50,06	54,38	59,25	60,69	59,61
Raja Ampat	70,35	69,55	52,88	53,49	53,11
Tambrau	43,28	48,93	36,61	33,63	34,54
Maybrat	47,75	50,41	44,00	45,04	44,84
Manokwari Selatan	72,37	72,27	64,74	66,63	66,26
Pegunungan Arfak	42,46	47,25	31,57	33,34	36,36
Kota Sorong	60,14	60,46	69,55	69,65	70,14
PAPUA	61,89	68,71	65,37	66,72	67,50
Merauke	71,65	72,18	57,35	55,59	58,12
Jayawijaya	51,42	53,80	60,33	58,90	61,50
Jayapura	61,91	61,79	69,70	68,77	70,20
Nabire	71,80	72,71	65,90	65,17	66,55
Kepulauan Yapen	49,92	55,38	70,32	68,95	67,73
Biak Numfor	61,88	62,01	70,56	69,95	68,87

LAMPIRAN 7**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2017-2021 (lanjutan)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	IDG				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paniai	50,92	40,79	51,13	52,39	57,36
Puncak Jaya	42,76	51,17	47,90	48,90	51,94
Mimika	46,48	47,72	43,43	52,79	53,86
Boven Digoel	44,55	60,19	54,07	53,87	52,17
Mappi	57,51	61,61	55,56	55,98	58,91
Asmat	28,71	29,22	74,86	77,13	78,37
Yahukimo	46,01	50,71	44,86	41,30	37,95
Pegunungan Bintang	48,82	49,10	59,37	51,35	51,95
Tolikara	45,93	46,78	62,44	52,51	47,91
Sarmi	65,29	62,23	73,09	74,19	72,92
Keerom	62,34	57,71	58,06	59,31	59,83
Waropen	53,41	65,82	47,78	50,82	50,39
Supiori	63,00	63,85	66,33	64,07	62,65
Mamberamo Raya	36,95	53,16	58,23	53,80	59,29
Nduga	58,02	59,16	54,13	58,21	47,61
Lanny Jaya	38,86	57,80	42,51	44,03	37,08
Mamberamo Tengah	53,42	41,04	45,64	40,66	46,96
Yalimo	49,54	54,51	39,08	42,26	37,80
Puncak	42,95	43,57	48,26	45,43	40,83
Dogiyai	42,92	47,82	59,90	40,57	35,22
Intan Jaya	51,49	47,39	43,96	39,88	37,14
Dogiyai	38,42	41,12	39,35	40,07	40,17
Intan Jaya	78,89	83,41	82,75	81,05	80,25
INDONESIA	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26

Sumber: www.bps.go.id, 2022



CATATAN TEKNIS

1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah pendapatan/upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung umur harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks umur harapan hidup diperoleh dengan menghitung standardisasi nilai aktual terhadap nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) dan harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling*). Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan indeks rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 tahun.

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sementara BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengertian yang disesuaikan adalah yang telah disetarakan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*).

Penghitungan PPP menggunakan formula Rao sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j = paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} = harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

m = jumlah komoditas

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel L1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

TABEL LI. Komoditi yang digunakan dalam Penghitungan PPP

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/ singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/ bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/ cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedapmasakan/ vetsin	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/ pusat
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/ poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ ketupatsayur	Bensin

Bawang merah	Soto/gule/sop/ rawon/ cincang	Transportasi/ pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki- laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	lkan (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak- anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan gal on	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/ Makan

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

TABEL L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436 *)	26.572.352**)

Keterangan:

*) Garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

**) Proyeksi pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, antara lain:

Kelompok "sangat tinggi"	: $IPM \geq 80$
Kelompok "tinggi"	: $70 \leq IPM < 80$
Kelompok "sedang"	: $60 \leq IPM < 70$
Kelompok "rendah"	: $IPM < 60$

Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

02 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi

pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Penyusunan Indeks Komposit IPG

Penyusunan IPM laki-laki dan perempuan sama seperti IPM. Perbedaannya hanya pada batasan untuk indikator UHH. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator.

TABEL L3. Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Minimum		Maksimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur Harapan Hidup (tahun)	17,5	22,5	82,5	87,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	0	18	18
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)	1.007.436		26.572.352	

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan perempuan, digunakan rumus yang sama dengan IPM. Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Kategori Pembangunan Gender

Capaian pembangunan gender di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Kesetaraan Gender Tinggi ($|\text{IPG}-100| \leq 2,5$);
2. Kesetaraan Gender Menengah Tinggi ($2,5 < |\text{IPG}-100| \leq 5$);
3. Kesetaraan Gender Menengah ($5 < |\text{IPG}-100| \leq 7,5$);
4. Kesetaraan Gender Menengah Rendah ($7,5 < |\text{IPG}-100| \leq 10$);
5. Kesetaraan Gender Rendah ($|\text{IPG}-100| > 10$).

03 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender

a. Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par})

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

dan

$$EDEP_{(par)} = \frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

b. Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dan

$$EDEP_{(DM)} = \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

c. Indeks Distribusi Pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)	732.720

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata upah} \\ &= (\text{Rasio Upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &+ (\text{Rasio Upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio terhadap Rata - rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata - rata Upah}_m}$$

Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Sumbangan Pendapatan}_i \\ &= \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \\ &\times \text{Rasio terhadap Rata - rata Upah}_i \end{aligned}$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana,

i = Laki-laki (*m*) atau perempuan (*f*)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{EDEP}_{(inc-dis)} = \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m}$$

$$\begin{aligned} I_{(inc-dis)} \\ &= \frac{(\text{EDEP}_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300} \end{aligned}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

d. Indeks Pemberdayaan Gender

$$\text{IDG} = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$



**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
